



**PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

**PEMERINTAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, maka perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan Daerah periode tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Wali Kota.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Wali Kota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Wali Kota berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

IWAN GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,
PROVINSI LAMPUNG:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah serta agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang serta dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dari tingkat Provinsi Lampung sampai dengan tingkat Kota Bandar Lampung, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun (2025-2045).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung yang merupakan jabaran dari dibentuknya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan dari tahun 2025-2045. Pelaksanaan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kota Bandar Lampung digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kota Bandar Lampung pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota Bandar Lampung yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengendalian dan evaluasi” mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-10
1.4 Maksud dan Tujuan	I-13
1.5 Sistematika	I-15

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Geografi.....	II-1
2.1.2 Demografi.....	II-54
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-69
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-70
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II-90
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-105
2.4 Aspek Daya Saing.....	II-108
2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-108
2.4.2 Daya Saing SDM	II-130
2.4.3 Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah	II-137
2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-150
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-158
2.5.1 Capaian Kinerja Makro Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2005-Tahun Berjalan	II-158
2.6 Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-164
2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan Per Lima Tahun.....	II-164

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Per Lima Tahun.....	II-169
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II-175
2.7.1 Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II-175
2.7.2 Arah Pengembangan Wilayah	II-177
2.7.3 Rencana Pengembangan Wilayah	II-181

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
3.1.1 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Sosial	III-1
3.1.2. Permasalahan Pembangunan pada Aspek Ekonomi	III-6
3.1.3. Permasalahan Pembangunan pada Aspek Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur.....	III-8
3.1.4 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Lingkungan..	III-11
3.1.5 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Iptek.....	III-14
3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	III-15
3.2.1 Isu Strategis Global	III-16
3.2.2 Isu Strategis Nasional.....	III-19
3.2.3 Isu Strategis Provinsi Lampung	III-21
3.2.4 Isu Strategis Kota Bandar Lampung.....	III-22

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Tinjauan Visi Pembangunan Nasional.....	IV-1
4.2.1 Visi Pembangunan Nasional 2025-2045	IV-1
4.2.2 Misi Pembangunan Nasional 2025-2045.....	IV-10
4.2 Tinjauan Visi Pembangunan Provinsi Lampung	IV-13
4.3.1 Visi Provinsi Lampung 2025-2045.....	IV-13
4.3.2 Misi Provinsi Lampung 2025-2045	IV-17
4.3 Visi Pembangunan Kota Bandar Lampung.....	IV-21
4.3.1 Visi Kota Bandar Lampung 2025-2045.....	IV-21
4.3.2 Misi Kota Bandar Lampung 2025-2045	IV-27

4.4 Upaya Transformatif Super Prioritas Nasional	IV-32

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan	V-1
5.1.1 Arah Kebijakan Misi 1: Transformasi Sosial	V-3
5.1.2 Arah Kebijakan Misi 2: Transformasi Ekonomi	V-11
5.1.3 Arah Kebijakan Misi 3: Transformasi Tata Kelola.....	V-23
5.1.4 Arah Kebijakan Misi 4 : Pemerintahan yang Tangguh, Demokrasi secara Substantif, dan Stabilitas Ekonomi...	V-28
5.1.5 Arah Kebijakan Misi 5 : Sosial Budaya dan Ekologi yang berketahanan dan berkelanjutan.....	V-32
5.1.6 Arah Kebijakan Misi 6 : Pembangunan Berbasis Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan.....	V-38
5.1.7 Arah Kebijakan Misi 7 : Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.....	V-45
5.1.8 Arah Kebijakan Misi 8 : Kestinambungan Pembangunan.....	V-49

BAB VI. PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas dan Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung	II-2
Tabel 2.2	Gunung/Bukit/Lereng di Kota Bandar Lampung	II-6
Tabel 2.3	Jumlah Kelurahan menurut Kecamatan, Letak Geografi, dan Topografi Tahun 2024	II-7
Tabel 2.4	Gambaran Data Sungai di Kota Bandar Lampung	II-9
Tabel 2.5	Koefisien Limpasan	II-21
Tabel 2.6	Klasifikasi Kelas Daya Dukung Fungsi Lahan.....	II-22
Tabel 2.7	Tutupan Lahan Kota Bandar Lampung	II-23
Tabel 2.8	Kelas Kemampuan Lahan.....	II-25
Tabel 2.9	Daya Dukung Lahan.....	II-27
Tabel 2.10	Daya Tampung Lahan.....	II-28
Tabel 2.11	Indeks Resiko Bencana Tahun 2019-2023	II-30
Tabel 2.12	Titik Banjir/Genangan Kota Bandar Lampung Tahun 2023.....	II-35
Tabel 2.13	Jasa Penyedia Pangan	II-38
Tabel 2.14	Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih.....	II-40
Tabel 2.15	Jasa Pengaturan Tata Aliran dan Banjir	II-43
Tabel 2.16	Jasa Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam ..	II-46
Tabel 2.17	Jasa Pendukung Biodiversitas	II-48
Tabel 2.18	Jasa Pengaturan Iklim	II-50
Tabel 2.19	Potensi Keanekaragaman Hayati Kota Bandar Lampung	II-53
Tabel 2.20	Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2023	II-54
Tabel 2.21	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Budaya Tahun 2019-2023.....	II-55
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023.	II-55
Tabel 2.23	Kepadatan Penduduk Tahun 2021-2023.....	II-56
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023	II-58
Tabel 2.25	Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2019-2023	II-59

Tabel 2.26	Rasio Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2019-2023	II-60
Tabel 2.27	Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Tahun 2019-2023 (persen)	II-60
Tabel 2.28	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023.....	II-62
Tabel 2.29	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Tahun 2019-2023..	II-62
Tabel 2.30	Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita Tahun 2019-2023.....	II-63
Tabel 2.31	Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk Tahun 2019-2023	II-63
Tabel 2.32	Jumlah Kasus Demam Berdarah dan Malaria Tahun 2019-2023	II-66
Tabel 2.33	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2019-2023 (persen).....	II-67
Tabel 2.34	Jumlah Kasus Penyakit Tuberculosis Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023.....	II-67
Tabel 2.35	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR) Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023	II-68
Tabel 2.36	Jumlah Kasus Prevalensi Kasus HIV Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023.....	II-68
Tabel 2.37	Penderita Diare yang Ditangani di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023	II-69
Tabel 2.38	Angka Kejadian Malaria di Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2023	II-69
Tabel 2.39	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah).....	II-70
Tabel 2.40	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah).....	II-71
Tabel 2.41	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023	II-72
Tabel 2.42	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)	II-73
Tabel 2.43	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023 (Persen).....	II-74
Tabel 2.44	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2019-2023	II-76

Tabel 2.45	PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023.....	II-78
Tabel 2.46	PDRB Per Kapita Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah/Tahun)	II-79
Tabel 2.47	Rasio Gini Tahun 2019-2023	II-79
Tabel 2.48	Rasio Gini Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023	II-80
Tabel 2.49	Penduduk Miskin Tahun 2019-2023	II-80
Tabel 2.50	Persentase Penduduk Miskin Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023..	II-81
Tabel 2.51	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023.....	II-82
Tabel 2.52	Indeks Keparahane Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 (Persen)	II-82
Tabel 2.53	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahane Kemiskinan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023	II-82
Tabel 2.54	Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019-2023	II-86
Tabel 2.55	Luas Kawanan Kumuh Tahun 2019-2023.....	II-87
Tabel 2.56	Penanganan untuk Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2019-2023.....	II-89
Tabel 2.57	Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2019-2023.....	II-91
Tabel 2.58	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2019-2023.....	II-94
Tabel 2.59	Rasio Dokter dan Bidan per 100.000 Penduduk Tahun 2019-2023	II-94
Tabel 2.60	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2019-2023	II-95
Tabel 2.61	Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2019-2023	II-95
Tabel 2.62	Jumlah Rumah Sakit Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2.63	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 (Dua Puluhan) Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2.64	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2019-2023	II-98
Tabel 2.65	Angka Pemakaian Kontrasepsi usia 15-49 Tahun Menurut Jenis Kontrasepsi Tahun 2019-2023	II-99
Tabel 2.66	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Tahun 2019-2023	II-99

Tabel 2.67	Persentase Faskes dan Jejaring Kerjasama dengan BPJS Tahun 2019-2023	II-100
Tabel 2.68	Pemuda Pelopor Tahun 2019-2023	II-101
Tabel 2.69	Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023	II-102
Tabel 2.70	Sarana Prasarana Olahraga sampai dengan Tahun 2023.....	II-104
Tabel 2.71	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023	II-106
Tabel 2.72	Indeks Pelayanan Publik Tahun 2019- 2023	II-107
Tabel 2.73	Peningkatan Produktivitas Koperasi Tahun 2019-2023	II-108
Tabel 2.74	Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun 2019-2023	II-109
Tabel 2.75	Pertumbuhan Penanaman Modal Asing Tahun 2019-2023.....	II-109
Tabel 2.76	Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2019-2023	II-110
Tabel 2.77	Objek Wisata Seni Budaya di Kota Bandar Lampung.....	II-112
Tabel 2.78	Jumlah Perpustakaan di Kota Bandar Lampung..	II-113
Tabel 2.79	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019-2023	II-114
Tabel 2.80	Tingkat Kunjungan Perpustakaan Tahun 2019-2023	II-114
Tabel 2.81	Jumlah Data Arsip Terpilah Tahun 2019-2023.....	II-115
Tabel 2.82	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2019-2023 (Ton)	II-116
Tabel 2.83	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023	II-117
Tabel 2.84	Rata-rata Lama Tinggal Pengunjung Wisata Tahun 2019-2023	II-118
Tabel 2.85	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2019-2023	II-118
Tabel 2.86	Produktivitas Tanaman Sayuran Tahun 2019-2023	II-119
Tabel 2.87	Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas Tahun 2019-2023.....	II-120
Tabel 2.88	Persentase Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2019-2023.....	II-120

Tabel 2.89	Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Tahun 2019-2023	II-121
Tabel 2.90	Persentase Pertumbuhan Kategori Perdagangan Tahun 2019-2023	II-121
Tabel 2.91	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Tahun 2019-2023	II-122
Tabel 2.92	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Tahun 2019-2023	II-122
Tabel 2.93	Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2023 .	II-123
Tabel 2.94	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023	II-124
Tabel 2.95	Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2023.....	II-126
Tabel 2.96	Perkembangan Koperasi Tahun 2019-2023.	II-126
Tabel 2.97	Perkembangan Koperasi Sehat Tahun 2019-2023	II-127
Tabel 2.98	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Tahun 2019-2023	II-128
Tabel 2.99	Perkembangan UMKM Tahun 2019-2023.....	II-128
Tabel 2.100	Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2019-2023.....	II-130
Tabel 2.101	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023	II-130
Tabel 2.102	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2023	II-130
Tabel 2.103	Jumlah ASN Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023	II-131
Tabel 2.104	Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2019-2023	II-131
Tabel 2.105	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Tahun 2019-2023.....	II-131
Tabel 2.106	Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2019-2023	II-132
Tabel 2.107	Angka Partisipasi Kasar SD/MI Tahun 2019-2023	II-132
Tabel 2.108	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Tahun 2019-2023	II-133
Tabel 2.109	Persentase Satuan PAUD Berakreditasi Tahun 2019-2023	II-133
Tabel 2.110	Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A Tahun 2019-2023	II-133

Tabel 2.111	Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B Tahun 2019-2023	II-134
Tabel 2.112	Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakreditasi A Tahun 2019-2023.....	II-134
Tabel 2.113	Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakreditasi B Tahun 2019-2023.....	II-134
Tabel 2.114	Data Keadaan Guru PAUD, SD, dan SMP sampai dengan Tahun 2023.....	II-135
Tabel 2.115	Kualifikasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik	II-135
Tabel 2.116	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	II-135
Tabel 2.117	Jumlah Siswa PAUD, SD, dan SMP Tahun 2023...	II-136
Tabel 2.118	Rasio Guru terhadap Siswa	II-136
Tabel 2.119	Perbandingan Kondisi Ruang Kelas dengan Rombongan Belajar Tahun 2023	II-137
Tabel 2.120	Persentase Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Tahun	II-138
Tabel 2.121	Infrastruktur Jalan Tahun 2023	II-138
Tabel 2.122	Jumlah Fly Over dan Underpass	II-139
Tabel 2.123	Persentase Cakupan Layanan SPAM Perkotaan Tahun 2019-2023	II-143
Tabel 2.124	Bus Rapi Transit Bandar Lampung Tahun 2019-2023	II-143
Tabel 2.125	Pelayanan Bus Rapi Trans Bandar Lampung Tahun 2019-2023	II-143
Tabel 2.126	Angkutan Perkotaan Bandar Lampung Tahun 2019-2023.....	II-144
Tabel 2.127	Jurusan, Warna dan Jumlah Trayek Angkutan Tahun 2019-2023	II-144
Tabel 2.128	Marka Jalan yang dikerjakan Tahun 2019-2023..	II-146
Tabel 2.129	Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2019-2023.....	II-146
Tabel 2.130	Jumlah Persimpangan Tahun 2019-2023	II-146
Tabel 2.131	Kasus/Kejadian Kecelakaan Tahun 2019-2023....	II-147
Tabel 2.132	Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2019-2023.	II-147
Tabel 2.133	Pelanggaran Peraturan Daerah Penataan Ruang Tahun 2019-2023	II-148

Tabel 2.134	Indeks KualitasLingkungan Hidup Tahun 2019-2023	II-149
Tabel 2.135	Jumlah Tindak Kriminalitas Tahun 2019-2023....	II-150
Tabel 2.136	Data Realisasi Berdasarkan Jenis Perizinan DPM-PTSP T.A. 2023	II-151
Tabel 2.137	Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah	II-152
Tabel 2.138	Penanganan Sampah Tahun 2019-2023.....	II-153
Tabel 2.139	UPT Pengelolaan Sampah dan Lokasi TPS.....	II-153
Tabel 2.140	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2019-2023	II-156
Tabel 2.141	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2023.....	II-156
Tabel 2.142	Persentase PPKS yang Tertangani Tahun 2019-2023	II-156
Tabel 2.143	Jumlah Tempat Pemakaman Penduduk sampai dengan Tahun 2023.... ..	II-157
Tabel 2.144	Luasan Areal Pemakaman Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.....	II-158
Tabel 2.145	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2005 - 2022	II-159
Tabel 2.146	Proyeksi Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2024 - 2045.....	II-167
Tabel 2.147	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Bandar Lampung.....	II-170
Tabel 2.148	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik Kota Bandar Lampung.....	II-171
Tabel 2.149	Proyeksi Timbulan Kota Bandar Lampung	II-173
Tabel 2.150	Proyeksi Kebutuhan fasilitas Kesehatan Kota Bandar Lampung.....	II-174
Tabel 2.151	Proyeksi Kebutuhan fasilitas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	II-175
Tabel 2.152	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Bandar Lampung.....	II-175
Tabel 4.1	Penyelarasan Misi Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045	IV-27
Tabel 5.1	Indikator Sasaran Visi Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045	V-2
Tabel 5.2	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1	V-4

Tabel 5.3	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-1	V-9
Tabel 5.4	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2	V-13
Tabel 5.5	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-2	V-21
Tabel 5.6	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3	V-24
Tabel 5.7	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-3	V-27
Tabel 5.8	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-4	V-29
Tabel 5.9	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-4	V-31
Tabel 5.10	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-5	V-33
Tabel 5.11	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-5	V-37
Tabel 5.12	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6	V-43
Tabel 5.13	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7	V-48
Tabel 5.14	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-8	V-53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan.....	I-11
Gambar 1.2	Hubungan Dokumen Perencanaan RPJPD dengan Dokumen Lainnya.....	I-11
Gambar 2.1	Peta Administratif Kota Bandar Lampung	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kota Bandar Lampung	II-6
Gambar 2.3	Peta Hidrologi Kota Bandar Lampung.....	II-8
Gambar 2.4	Suhu dan Pengendapan Rata Rata di Bandar Lampung.....	II-11
Gambar 2.5	Peta Klimatogi Kota Bandar Lampung	II-12
Gambar 2.6	Peta Tutupan Lahan Kota Bandar Lampung.....	II-13
Gambar 2.7	Kawasan Lindung.....	II-14
Gambar 2.8	Kawasan Budidaya.....	II-15
Gambar 2.9	Peta Ekoregion	II-18
Gambar 2.10	Peta Vegetasi Alam Kota Bandar Lampung.....	II-20
Gambar 2.11	Daya Dukung Air Kota Bandar Lampung.....	II-22
Gambar 2.12	Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Bandar Lampung.....	II-24
Gambar 2.13	Peta Kemampuan Lahan Kota Bandar Lampung.....	II-25
Gambar 2.14	Peta Daya Dukung Lahan Kota Bandar Lampung...	II-27
Gambar 2.15	Peta Daya Tampung Penduduk Kota Bandar Lampung.....	II-29
Gambar 2.16	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi.....	II-32
Gambar 2.17	Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah.....	II-33
Gambar 2.18	Peta Risiko Bencana Longsor.....	II-34
Gambar 2.19	Peta Risiko Bencana Banjir	II-36
Gambar 2.20	Peta Jasa Penyedia Pangan	II-39
Gambar 2.21	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air	II-42
Gambar 2.22	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir	II-44
Gambar 2.23	Peta Jasa Pencemaran dan Perlindungan Bencana Alam.....	II-47
Gambar 2.24	Peta Jasa Pendukung Biodeversitas.....	II-49

Gambar 2.25	Peta Jasa Perubahan Iklim	II-52
Gambar 2.26	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	II-57
Gambar 2.27	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023	II-59
Gambar 2.28	Kasus Kematian Ibu Materai Tahun 2019-2023	II-64
Gambar 2.29	Kasus Kematian Bayi dan Balita Tahun 2019-2023..	II-65
Gambar 2.30	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2019-2023	II-65
Gambar 2.31	Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023 (Persen)	II-75
Gambar 2.32	Laju Inflasi Tahun 2019-2023 (Persen)	II-77
Gambar 2.33	PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023	II-78
Gambar 2.34	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023	II-81
Gambar 2.35	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Tahun 2019-2023 (ribu rupiah/orang/tahun)	II-84
Gambar 2.36	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2023...	II-85
Gambar 2.37	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023	II-85
Gambar 2.38	Angka Harapan Hidup Tahun 2020-2023	II-86
Gambar 2.39	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tahun 2019-2023	II-87
Gambar 2.40	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2019-2023.....	II-89
Gambar 2.41	Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019-2023	II-90
Gambar 2.42	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Tahun 2019-2023	II-97
Gambar 2.43	Indeks Pelayanan Publik Tahun 2019-2023 (Skor) ..	II-107
Gambar 2.44	Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2019-2023 (Dolar)	II-110
Gambar 2.45	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan Tahun 2019-2023	II-111
Gambar 2.46	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2023.....	II-137

Gambar 2.47	Rasio Jumlah Lampu Penerapan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota Tahun 2019-2023 (titik/KM)	II-140
Gambar 2.48	Peta Sungai dan Jaringan Drainase.....	II-141
Gambar 2.49	Persentase Rumah Tangga yang Dimiliki Akses terhadap Sumber Daya Minyak Layak Tahun 2019-2023	II-142
Gambar 2.50	Persentase Pemanfaatan Uang sesuai dengan Peruntukannya Tahun 2019-2023.....	II-148
Gambar 2.51	Proyeksi Penduduk Kota Bandar Lampung	II-165
Gambar 2.52	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia Kota Bandar Lampung	II-166
Gambar 2.53	Peta Struktur Ruang Kota Bandar Lampung	II-182
Gambar 2.54	Peta Rencana Rencana Pola Ruang	II-188
Gambar 2.55	Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategi Kota Bandar Lampung	II-189
Gambar 3.1	Jumlah Penduduk dari 2005-2045.....	III-2
Gambar 3.2	Komposisi Umur Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2045	III-4
Gambar 3.3	Tahapan Penentuan Isu Strategis Kota Bandar Lampung.....	III-16
Gambar 3.4	Megatren Dunia 2045.....	III-17
Gambar 3.5	Rencana	III-20
Gambar 4.1	Visi Indonesia Emas 2045	IV-2
Gambar 4.2	Visi Indonesia Emas 2045	IV-5
Gambar 4.3	Lima Sasaran dari tujuan pada Visi Indonesia Emas 2045.....	IV-10
Gambar 4.4	Transformasi dan Agena Pembangunan Indonesia Emas 2045.....	IV-11
Gambar 4.5	Tujuh Belas Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045.....	IV-13
Gambar 4.6	Kerangka Berfikir Visi dan Misi Lampung 2045	IV-14
Gambar 4.7	Visi Kota Bandar Lampung 2025-2045.....	IV-22
Gambar 5.1	Tahapan Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045	V-1
Gambar 5.2	Tahapan Transformasi Sosial.....	V-3
Gambar 5.3	Tahapan Transformasi Ekonomi.....	V-11

Gambar 5.4	Tahapan Transformasi Tata Kelola.....	V-23
Gambar 5.5	Tahapan Misi 4.....	V-28
Gambar 5.6	Tahapan Misi 5.....	V-32
Gambar 5.7	Tahapan Misi 6.....	V-39
Gambar 5.8	Tahapan Misi 7.....	V-46
Gambar 5.9	Kesinambungan Pembangunan Kota Bandar Lampung.....	V-49
Gambar 5.10	Tahapan Misi 8.....	V-52

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kota Bandar Lampung telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduk yang telah mencapai lebih dari 1 (satu) juta jiwa dan sebagian besarnya berada di usia produktif dengan kekayaan sumber daya alam dan maritim yang sangat baik dapat membawa Kota Bandar Lampung pada gerbang kemajuannya menuju kota metropolitan yang berdaya saing nasional. Hal tersebut tentu dapat terjadi apabila pembangunan Kota bandar Lampung dapat direncanakan dan diimplementasikan dengan benar. Dalam konteks ini memperlihatkan bahwa peran dari penyusunan rencana pembangunan yang sangat penting dan strategis dalam proses pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan di masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, mulai jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sesuai dengan amanah Undang- Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW yang susunan nya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RPJPD tersebut nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD disusun sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya dengan melibatkan multi *stakeholders* secara aktif dan bermakna, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang mengartikan partisipasi bermakna yaitu sebagai hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Dengan adanya hal tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat secara mandiri mengelola daerahnya dari berbagai persoalan baik secara global, nasional maupun di wilayahnya dengan lebih jelas, serta mendukung kesinambungan pembangunan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Dengan demikian, berbagai upaya yang diagendakan dalam rencana pembangunan daerah akan lebih terarah dan berdampak baik, sehingga menjadi krusial bagi pemerintah daerah menyiapkan rencana pembangunannya dengan sangat matang serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dan aktor pembangunan lintas sektor dan bidang agar lebih transformatif.

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki fungsi dan karakteristik yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, pusat kegiatan perekonomian, dan pusat perdagangan dan jasa khususnya di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Dengan peran tersebut, maka Kota Bandar Lampung cenderung tumbuh dan berkembang lebih cepat dan hal ini berdampak pada perubahan diberbagai aspek baik sosial, ekonomi, lingkungan, politik, budaya, dan keamanan. Terlebih perubahan paradigma pembangunan 20 tahun kedepan akan begitu massif dan dinamis, sehingga perlu mendorong kebijakan yang pro-lingkungan, adaptasi teknologi, pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau, serta penggunaan sistem keuangan digital. Oleh karena itu perlu dilakukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih komprehensif, tangguh, harmonis, inklusif, dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

Pada penyusunan Dokumen RPJPD Kota Bandar Lampung 2025 – 2045 mengacu kepada beberapa landasan hukum diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
16. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1874, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

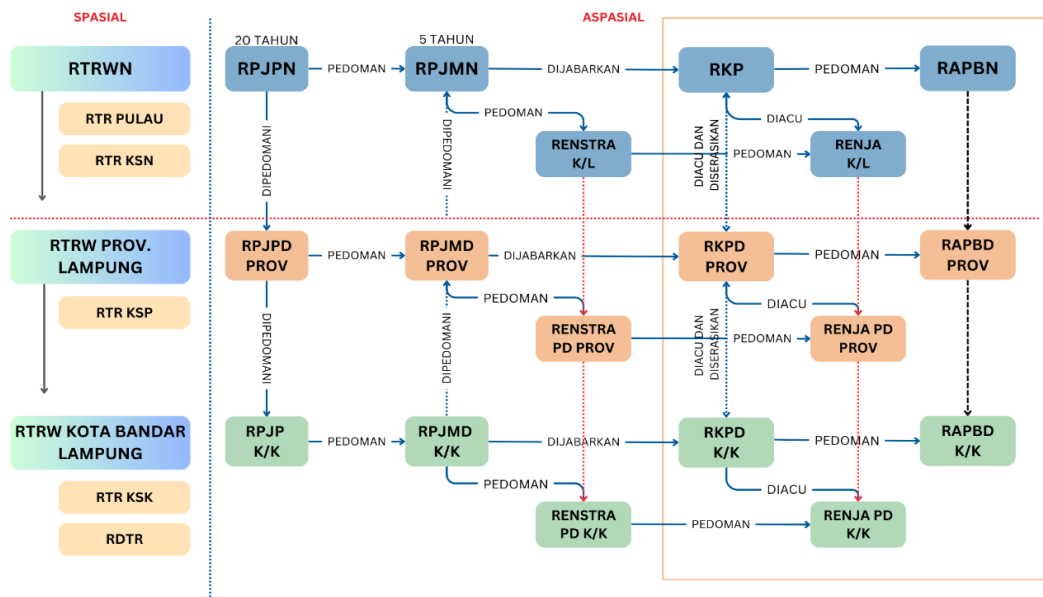
24. Peraturan Presiden No 39 tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);

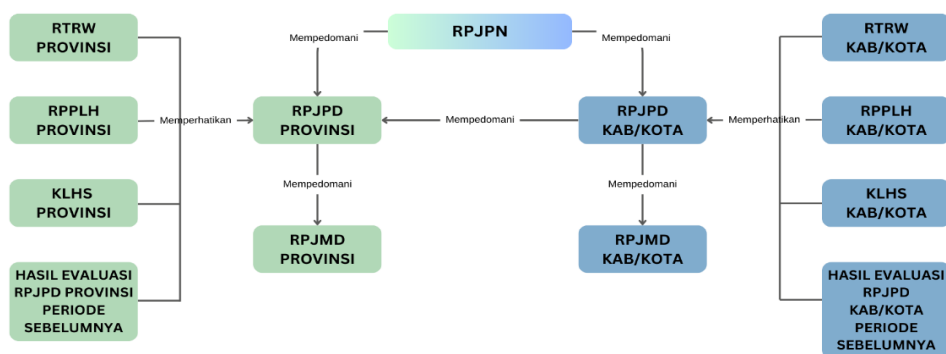
38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045;
39. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor. 26 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4).

1.3 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sinkronisasi berbagai dokumen perencanaan, baik dokumen spasial maupun nonspasial ditingkat pusat hingga daerah, termasuk dokumen strategis lainnya dan hasil evaluasi dokumen perencanaan periode sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.



Gambar 1. 1 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan



Gambar 1. 2 Hubungan Dokumen Perencanaan RPJPD dengan Dokumen Lainnya

Berikut penjelasan singkat mengenai sinkronisasi dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Penyusunan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 mempedomani RPJPN Tahun 2025-2045 terutama kebijakan nasional yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap Kota Bandar

Lampung. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang dan tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang, secara khusus arah pengembangan di wilayah Sumatera yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi (RPJPD Provinsi Lampung) Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 mempedomani RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 terutama kebijakan Provinsi Lampung yang berpengaruh langsung terhadap Kota Bandar Lampung, secara khusus pada pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari arah kebijakan sektoral pengembangan sumber daya manusia, kapasitas potensi pertumbuhan ekonomi daerah, pen jagaan kondusifitas daerah, dan pembangunan lingkungan berkelanjutan yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Penyusunan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 mempedomani RTRW Nasional sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan arah kebijakan RTRW Nasional, terutama pada arah pengembangan kebijakan Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung yang berkontribusi pada perumusan isu strategis dan potensi pengembangan wilayah secara spasial pada RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045.

4. RTRW Provinsi Lampung

Penyusunan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 mempedomani Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan arahan kebijakan RTRW Provinsi Lampung yang berkontribusi pada perumusan isu strategis

dan potensi pengembangan wilayah secara spasial pada RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045.

5. Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar

RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 juga disusun dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Kota lainnya, RTRW Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Kota lain yang berbatasan langsung seperti Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro, terutama pada isu pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ekonomi, isu sosial politik dan kependudukan, isu interkoneksi kewilayahan yang dapat berkontribusi pada perumusan isu strategis dan potensi pengembangan wilayah pada RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2025-2045.

6. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD.

Proses penyusunan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 juga mempertimbangkan KLHS RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 dengan mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis yang mempengaruhi di wilayah tersebut.

7. Dokumen Perencanaan Multi Sektor.

RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 juga disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor, seperti Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan hasil kajian terkait lainnya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 disusun dan ditetapkan dengan maksud:

1. Memberikan arah pembangunan jangka panjang Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung, sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan yang mendasari perencanaan pembangunan daerah.
3. Menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan Pembangunan dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Adapun tujuan dari disusun dan ditetapkan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 adalah :

1. Merinci visi dan misi yang akan membimbing perjalanan pembangunan kota selama dua dekade ke depan, agar rencana pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Memastikan keselarasan antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, sehingga tidak ada ketidaksesuaian yang mengganggu kelancaran proses pembangunan.
3. Mendukung upaya mencapai kesejahteraan bersama melalui kerjasama, koordinasi, dan harmonisasi antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, sehingga tercipta satu sikap dan tindakan yang seragam.
4. Menyusun pembangunan kota yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara lingkungan, aspek sosial, dan ekonomi.
5. Memastikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pembangunan daerah antara Kota Bandar Lampung, daerah sekitar, dan pemerintah pusat.
6. Memastikan adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara berbagai aspek seperti ruang, waktu, dan fungsi pemerintah.
7. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah secara proporsional dan profesional.

8. Menggunakan sumber daya dengan cara yang efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan.
9. Menjadi panduan untuk menyusun visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga sebagai pimpinan daerah dapat menjalankan tugas sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang kota.

1.5 Sistematika

Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 – 2045 ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, keterhubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan dokumen lainnya dan sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai aspek geografis dan demografis yang memuat karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan, wilayah rawan bencana dan demografi wilayah, aspek kesejahteraan masyarakat yang memuat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, aspek daya saing daerah memuat daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing iklim investasi, pelayanan umum dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya.

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai permasalahan pembangunan daerah Kota Bandar Lampung,

permasalahan penyelenggaraan pemerintah daerah dan isu strategis pembangunan daerah. Penyajian permasalahan Kota Bandar Lampung akan disajikan berdasarkan masing-masing aspek yang sebelumnya dijelaskan pada gambaran umum kondisi daerah.

Bab IV. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pada bab ini berisikan penjelasan visi dan misi Kota Bandar Lampung untuk pelaksanaan pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2025-2045.

Bab V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah

Pada bab ini berisikan penjelasan arah kebijakan dan sasaran pokok dari penurunan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2025-2045 untuk tahap 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun.

Bab VI. Penutup

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kota Bandar Lampung akan memberikan informasi data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025--2045. Gambaran umum ini mempertimbangkan Aspek Geografis dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

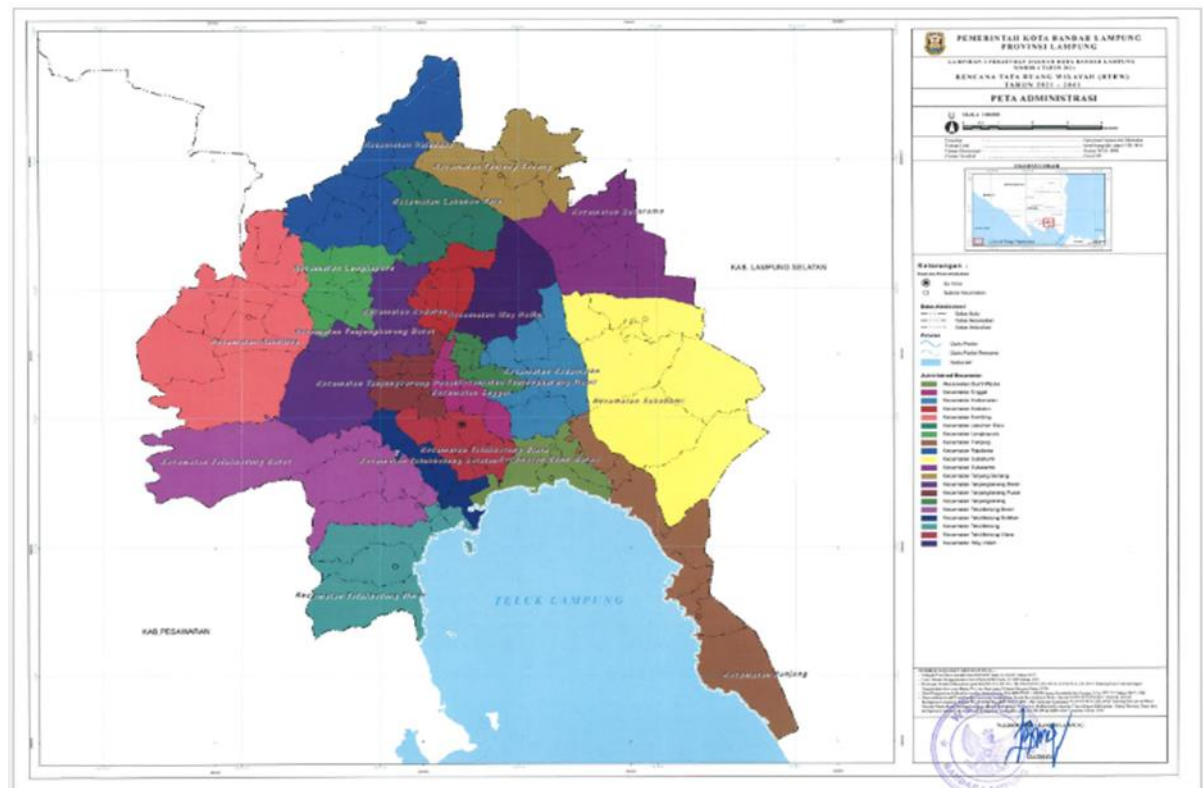
2.1.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Kota Bandar Lampung adalah Ibu Kota Provinsi Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Secara administrasi, Kota Bandar Lampung memiliki batasan dengan wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

- Di sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, serta Teluk Lampung.
- Di sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- Di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041, luas wilayah daratan Kota Bandar Lampung adalah

±18.377 Hektar (183,77 Kilometer Persegi) dengan panjang garis pantai sepanjang 35,6 Kilometer dan luas perairan sekitar 11,56 Hektar yang termasuk Pulau Kubur (0,96 Hektar) dan Pulau Pasaran (10,6 Hektar). Kota Bandar Lampung secara administratif terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Lebih detail dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung

Sumber: RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041

Data yang menunjukkan luas dan wilayah administrasi Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Luas dan Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
Telukbetung Barat	1.826,49
Telukbetung Timur	1.058,86
Telukbetung Selatan	348,75
Bumi Waras	451,69
Panjang	1.364,92

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
Tanjung Karang Timur	206,55
Kedamaian	834,44
Telukbetung Utara	437,76
Tanjung Karang Pusat	345,11
Enggal	278,49
Tanjung Karang Barat	1.153,82
Kemiling	2.133,11
Langkapura	529,57
Kedaton	377,11
Rajabasa	1.289,70
Tanjung Senang	927,83
Labuhan Ratu	609,85
Sukarame	1.068,22
Sukabumi	2.509,83
Way Halim	624,95
Jumlah	18.377,04

Sumber: RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041

a. Posisi Astronomis

Kota Bandar Lampung terletak pada koordinat geografis sebagai berikut:

- Lintang Selatan (Latitude): Antara 5°30'53.821" hingga 5°24'23.310" Selatan.
- Bujur Timur (Longitude): Antara 105°15'16.280" hingga 105°20'42.234" Timur.

Koordinat astronomis ini adalah garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menentukan posisi tepat Kota Bandar Lampung di Bumi. Lokasinya berada di ujung Selatan Pulau Sumatera, dengan garis pantai yang membentang sepanjang 35,6 Kilometer dan memiliki sejumlah pulau di sekitarnya. Posisi astronomis ini sangat penting untuk navigasi dan pemetaan wilayah Kota Bandar Lampung.

b. Posisi Geostrategis

Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional.

Kota Bandar Lampung berpotensi untuk menjadi Kota Metropolitan. Seiring dengan program pada Tahun 2015, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan kawasan yang dipetakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) berpotensi sebagai Area Metropolitan, terkhusus dalam cetak biru Wilayah Pengembangan Strategis Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api. Keunggulan Kota Metropolitan ini adalah menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata serta pendidikan. Dengan posisi penting tersebut, Kota Bandar Lampung harus lebih unggul dan maju dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Lampung.

Pembangunan jalur tol laut akan berperan dalam kemudahan akses jalur laut yang menghubungkan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Tol Laut akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai sebuah *multiplier effecter* masuk Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pusat jaringan pergerakan nasional melengkapinya dengan pembangunan Pelabuhan Panjang yang diarahkan sebagai pelabuhan ekspor-impor dan antarpulau. Kondisi fisik perairan pelabuhan memungkinkan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai gerbang internasional.

Pembangunan jalur tol trans Sumatera, jaringan jalan arteri primer, dan jalur Kereta Api Trans Sumatera yang terintegrasi dengan wilayah Kota Bandar Lampung akan sangat berperan dalam yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, dan pulau-pulau

lain melalui jalur darat. Jalan tol trans Sumatera dibangun di Timur Bandar Lampung ke arah Palembang sebagai kelanjutan jalur Jawa-Sumatera. Arteri primer sebagai bagian trans Sumatera dilengkapi jalur Lintas Barat dan Lintas Timur ke Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Gagasan pembangunan jalur Kereta Api trans Sumatera hingga Sumatera Utara akan berada pada sisi pantai Timur.

Kota Bandar Lampung memiliki berbagai fasilitas dan tempat yang lengkap yang terbagi atas pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat wisata dan pusat pendidikan. Aspek strategis lainnya adalah memiliki pantai yang indah yang berpotensi sebagai tempat wisata maupun Kota Pesisir yang dikenal dengan “Bandar Lampung Kota Marina”. Kota Bandar Lampung memiliki luas area pesisir sebesar 0,05% yang merupakan aset yang harus dioptimalkan.

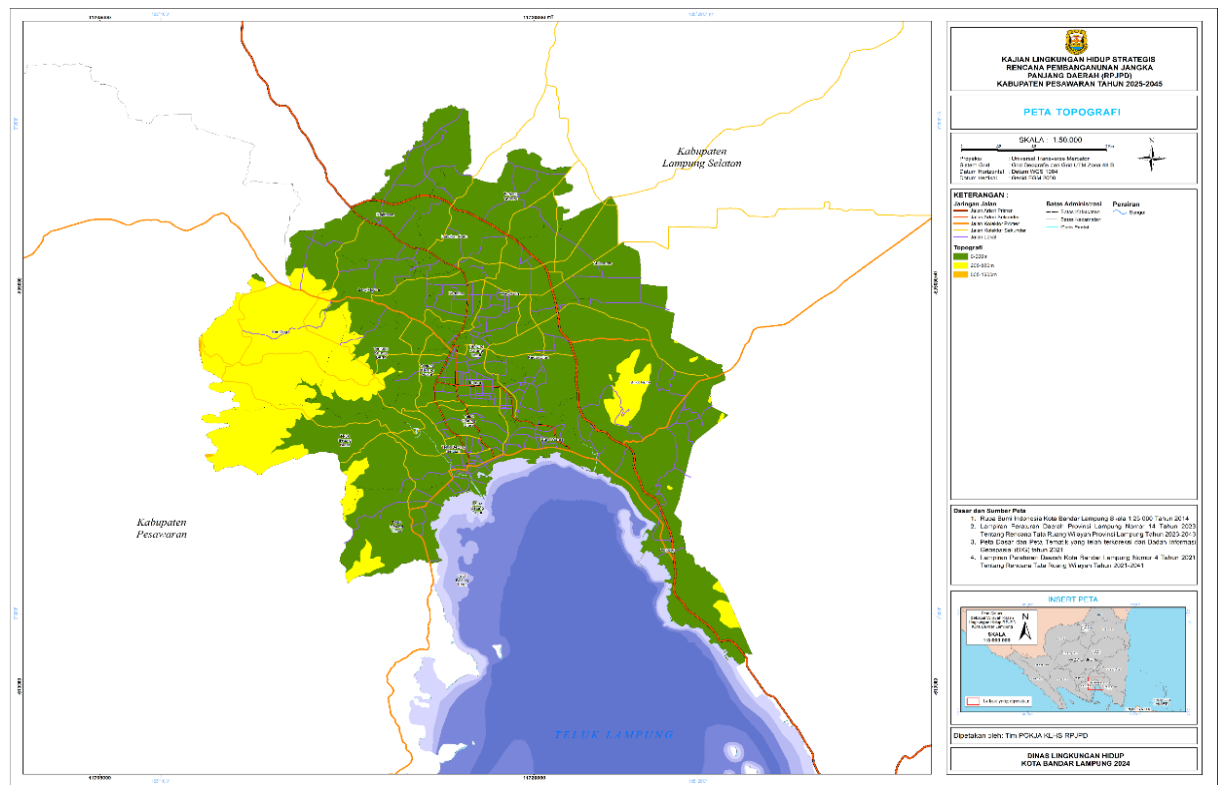
c. Kondisi Kawasan

Secara umum, Kawasan Kota Bandar Lampung merupakan wilayah perkotaan padat penduduk yang terdiri atas daratan dan perairan (lautan) dengan beberapa dataran tinggi dan pegunungan yang terbentang di wilayah Kota Bandar Lampung. Secara letak posisi Kota Bandar Lampung dikelilingi oleh beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

1. Topografi

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan kelerengan rata-rata 0-40%. yang memiliki kemiringan lereng 0 % diantaranya berada di wilayah Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton. Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40 % diantaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur. Berikut wilayah dengan karakteristik topografinya di Kota Bandar Lampung :

- 1) Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang
- 2) Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara
- 3) Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan.
- 4) Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.



Gambar 2. 2 Peta Topografi Kota Bandar Lampung

Sumber: RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan. Berikut ini adalah data yang menunjukkan Gunung/Bukit/Lereng di Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 2. 2 Gunung/Bukit/Lereng di Kota Bandar Lampung

Nomor	Nama Gunung/Bukit/Lereng	Lokasi
1	Gunung Kunyit	Bumi Waras
2	Gunung Mastur	Kel. Perwata (Teluk Betung Timur)
3	Gunung Bakung	Kel. Sukamaju (TelukBetung Timur)

Nomor	Nama Gunung/Bukit/Lereng	Lokasi
4	Gunung Sulah	Kel. Gunung Sulah (Way Halim)
5	Gunung Celegi	Sukarame II (Teluk Betung Barat)
6	Gunung Perahu	Kel. Sidodadi
7	Gunung Cerepung	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
8	Gunung Cerepoh	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
9	Gunung Sari	Kel. Gunung Sari (Enggal)
10	Gunung Palu	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
11	Gunung Depok	Kel. Keteguhan (Teluk Betung Barat)
12	Gunung Kucing	Kel. Segala Mider (Langkapura)
13	Gunung Banten	Kel. Sidodadi (Kedaton)
14	Gunung Sukajawa	Kel. Sukajawa (Tanjung Karang Barat)
15	Gunung Serampok	Kel. Srengsem (Panjang)
16	Bukit Asam	Ke. Way Lunik (Panjang)
17	Bukit Pidada	Kel. Way Gubak Campang Raya
18	Bukit Balau	Kel. Way Gubak Campang Raya
19	Gugusan Bukit Hatta	Kel. Sukamaju (Teluk Betung Timur)
20	Bukit Cepagoh	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
21	Bukit Kaliawi	Kel. Kaliawi (Tanjung Karang Pusat)
22	Bukit Palapa I	Kel. Durian Payung (Tanjung Karang Pusat)
23	Bukit Palapa II	Kel. Durian Payung (Tanjung Karang Pusat)
24	Bukit Pasir Gintung	Kec. Tanjung Karang Pusat
25	Bukit Kaki Gunung Betung	Kel. Beringin (Kemiling)
26	Bukit Sukadana Ham	Kec. Tanjung Karang Barat
27	Bukit Susunan Baru	Kec. Tanjung Karang Barat
28	Bukit Sukamenanti	Kec. Kedaton
29	Bukit Kelurum	Kec. Tanjung Karang Timur
30	Bukit Randu	Kec. Tanjung Karang Timur
31	Bukit Langgar	Kel. Campang Raya
32	Bukit Camang Timur	Kec. Kedamaian
33	Bukit Camang Barat	Kec. Kedamaian

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Berikut letak geografi dan topografi Kota Bandar Lampung yang dipilah menurut kecamatan.

Tabel 2. 3 Jumlah Kelurahan menurut Kecamatan, Letak Geografi, dan Topografi Tahun 2024

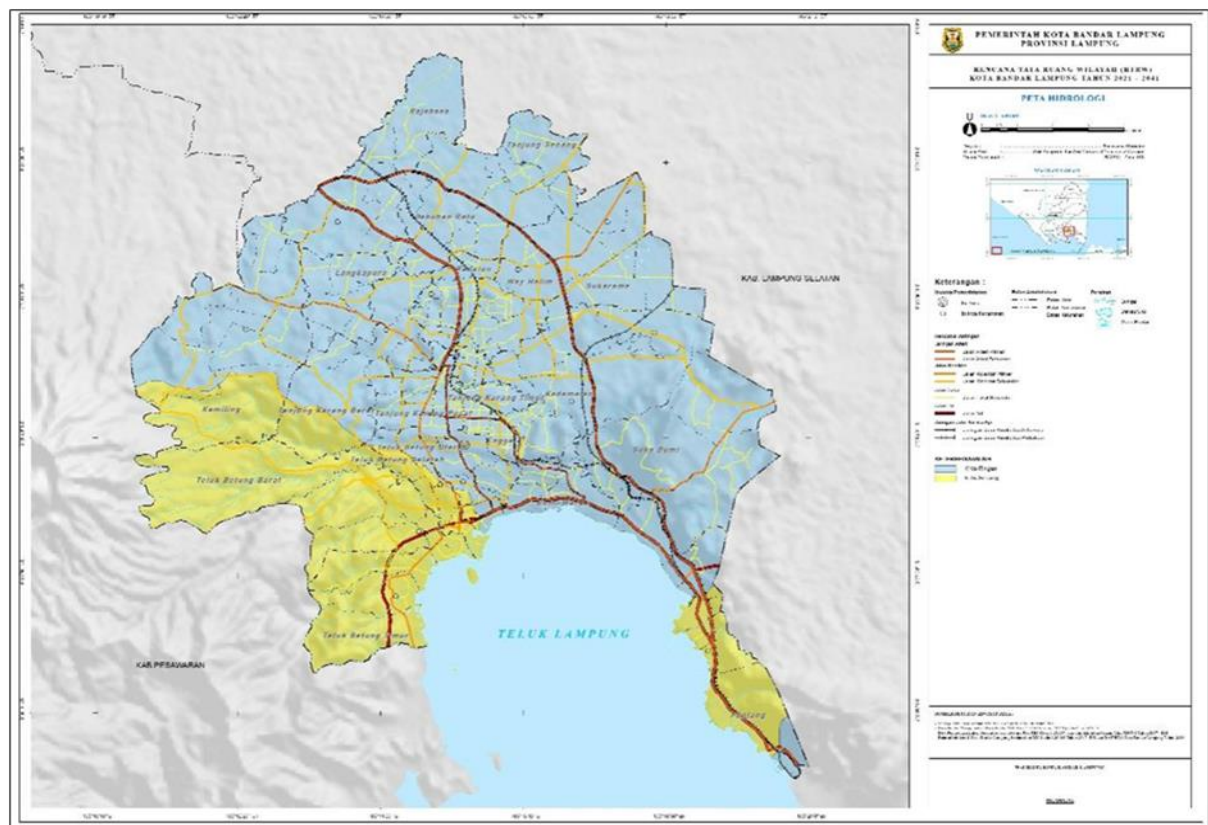
Kecamatan	Letak Geografi		Topografi	
	Pantai	Bukan Pantai	Datar	Berbukit
Telukbetung Barat	-	5	1	4
Telukbetung Timur	6	-	6	-
Telukbetung Selatan	-	6	2	4
Bumi Waras	5	-	5	-
Panjang	6	2	6	2
Tanjung Karang Timur	-	5	5	-
Kedamaian	-	7	6	1
Telukbetung Utara	-	6	6	-
Tanjung Karang Pusat	-	7	3	4
Enggal	-	6	6	-
Tanjung Karang Barat	-	7	2	5
Kemiling	-	9	4	5
Langkapura	-	5	1	4
Kedaton	-	7	6	1

Kecamatan	Letak Geografi		Topografi	
	Pantai	Bukan Pantai	Datar	Berbukit
Raja Basa	-	7	6	1
Tanjung Senang	-	5	5	-
Labuhan Ratu	-	6	6	-
Sukarame	-	6	6	-
Sukabumi	-	7	3	4
Way Halim	-	6	5	1
Jumlah	17	109	90	36

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

2. Hidrologi

Secara hidrologi Kota Bandar Lampung mempunyai 2 sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala, dan 23 sungai-sungai kecil. Semua sungai tersebut merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung. Berdasarkan inventarisasi dan penyusunan Database Sungai di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, berikut ini adalah data yang menunjukkan Gambaran Data sungai di Kota Bandar Lampung.



Gambar 2. 3 Peta Hidrologi Kota Bandar Lampung

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2024

Tabel 2. 4 Gambaran Data Sungai di Kota Bandar Lampung

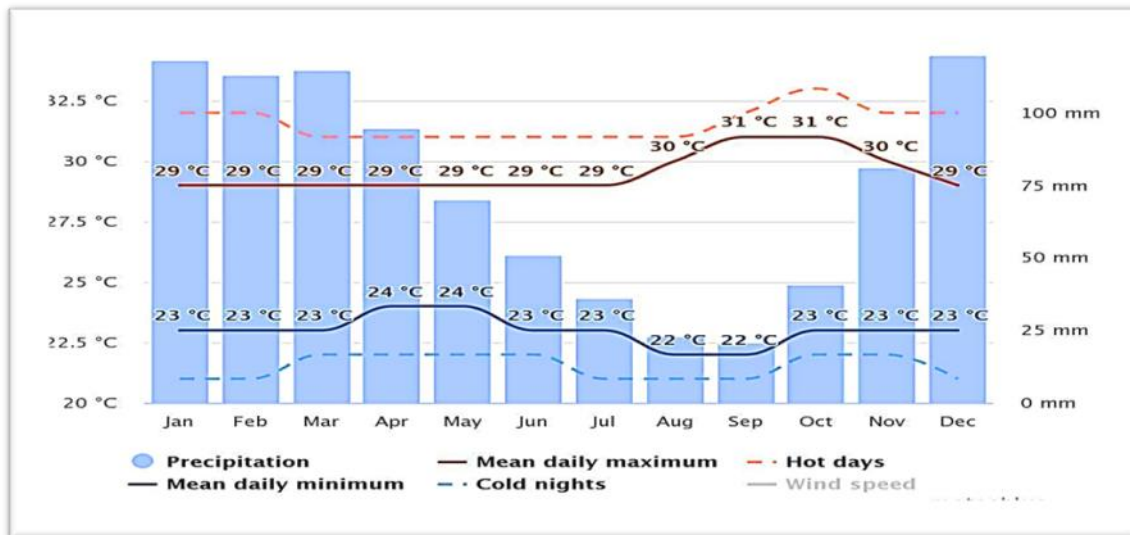
Nama Sungai	Lokasi Hulu		Lokasi Hilir		Dimensi				Debit					Muara ke	Potensi Banjir/ Bebas Banjir
	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	B1 (m) Bawah	B2 (m) Atas	H (m) Tinggi	Panjang (m)	Q (5)	Q (10)	Q (25)	Q (50)	Q (100)		
Way Kuala	Garuntang	Bumi Waras	Ketapang	Panjang	6	8	4	4.066	17,5737	20,5404	242517	26,9988	29,7252	Laut	Banjir
Anak Way Kuala	Garuntang	Bumi Waras	Ketapang	Panjang	4	6	2	1.029	0,8551	0,9995	1,18	1,3137	1,4464	Laut	Banjir
Way Balau	Jl. Imam Bonjol, Langkapura	Kemiling	Jl. Gatot Subroto, Garuntang, Kp. Balok	Teluk Betung Selatan	5	4	3	14.380						Way Kuala	Banjir
Way Galih	Sukarame	Sukarame	Sabah Balau	Tanjung Bintang	2	1,5	1	2.223	2,0471	2,3926	2,825	3,1449	3,4625	Sungai Way Galih Besar (Lampung Timur)	Banjir
Way Halim	Segala Mider	Tanjung Karang Barat	Surabaya	Kedaton	3	3	2	5.040	2,3684	2,7682	3,2684	3,6386	4,006	Ke Kuala	Banjir
Way Kupang	Jl. Wolter Monginsidi, Pengajaran	Teluk Betung Utara	Bumi Waras	Panjang	3	3	3	2.363	0,8681	1,0114	1,1979	1,3336	1,4683	Laut	Banjir
Way Awi	Jl. Singsing-maharaja	Tanjung Karang Pusat	Jl. Antasari, Kedamaian	Tanjung Karang Timur	4	5	3	4.683	2,9825	34860	4,1159	4,5821	5,0448	Way Kedamaian	Banjir
Way Kuripan	Jl. Wan Abdurrahman, Sukarame II	Telu Betung Barat	Jl. Ikan Kembung, Pesawahan	Panjang	18	18	3	6.024	22,5385	26,3433	31,1031	34,4626	38,1229	Laut	Bebas Banjir
Way Betung	Batu putukk	Teluk Betung Utara	Jl. Wan Abdurrahman, Sukarame II	Teluk Betung Barat	3	5	2	1.089	9,0434	10,5700	12,4799	13,8935	15,2965	Way Kuripan	Banjir
Way Penengahan	Jaga Baya	Way Halim	Jagabaya II	Sukabumi	1,2	1,3	1,2	1.679	0,3628	0,424	0,5006	0,5573	0,6136	Way Awi	Banjir
Anak Way Awi	Jl. Raden Intan Tanjung Karang	Tanjung Karang Pusat	Jl. Beo	Tanjung Karang Timur	2,5	3	3,5	1.075						Way Kedamaian	Banjir
Way Simpur	Durian Payung	Enggal	Enggal	Tanjung Karang Pusat	2,5	3	2,5	2.084	1,0909	1,2751	1,5055	1,6776	1,8452	Anak Way Awi	Banjir

Nama Sungai	Lokasi Hulu		Lokasi Hilir		Dimensi				Debit					Muara ke	Potensi Banjir/ Bebas Banjir
	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	B1 (m) Bawah	B2 (m) Atas	H (m) Tinggi	Panjang (m)	Q (5)	Q (10)	Q (25)	Q (50)	Q (100)		
Way Langkapura	Langkapura	Langkapura	Jl. Mangkubumi, Segala Mider	Tanjung Karang Barat	2	2,5	1,5	1.028	1,0184	1,1903	1,4053	1,5645	1,7225	Laut	Banjir
Way Sukamaju	Sukajaya Lempasing, Padang Cermin	Kabupaten Pesawaran	Jl. Laks. Martadinata	Teluk Betung Barat	10	12	2,5	4.062	4,4828	5,2396	6,1863	6,887	7,5825	Laut	Bebas Banjir
Way Keteguhan	Sawah Raya	Teluk Betung Selatan	Jl. RE. Martadinata	Panjang	1,2	2	1	2,013	0,7255	0,848	1,0013	1,1147	1,2272	Laut	Banjir
Way Lunik	Jl. Soekarno Hatta, Way Lunik	Teluk Betung Selatan	Jl. Yos Sudarso, Way Lunik	Panjang	3	6	4	1.700	2,2673	2,6501	3,1289	3,4833	3,8351	Laut	Banjir
Way Kedamaian	Antasari	Tanjung Karang Timur	Kampung Balok	Kedamaian	6	7	4	4.072	0,8732	1,0207	1,2051	1,3416	1,4771	Way Kuala	Banjir
Way Kunyit	Jl. Kh. Ahmad Dahlan	Teluk Betung Utara	Bumi Waras	Bumi Waras	3,4	3,4	2	1.087	1,1635	1,3599	1,6056	1,7874	1,9679	Laut	Banjir
Way Langka	Sumberejo	Kemiling	Sumber Rejo	Kemiling	4	3	2	2.155						Way Balau	Banjir
Way Simpang Kanan	Kp. Peninjauan	Teluk Betung Barat	Batu putuk	Teluk Betung Utara	4	7	2	1.695	43,921	5,1336	6,0611	6,7477	7,4291	Way Betung	Banjir
Way Simpang Kiri	Kp. Peninjauan	Teluk Betung Barat	Sukarame II	Teluk Betung Barat	7	10	3	9.500	38.609	45127	5,3281	5,9136	6,5306	Way Betung	Banjir

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2024

3. Klimatologi

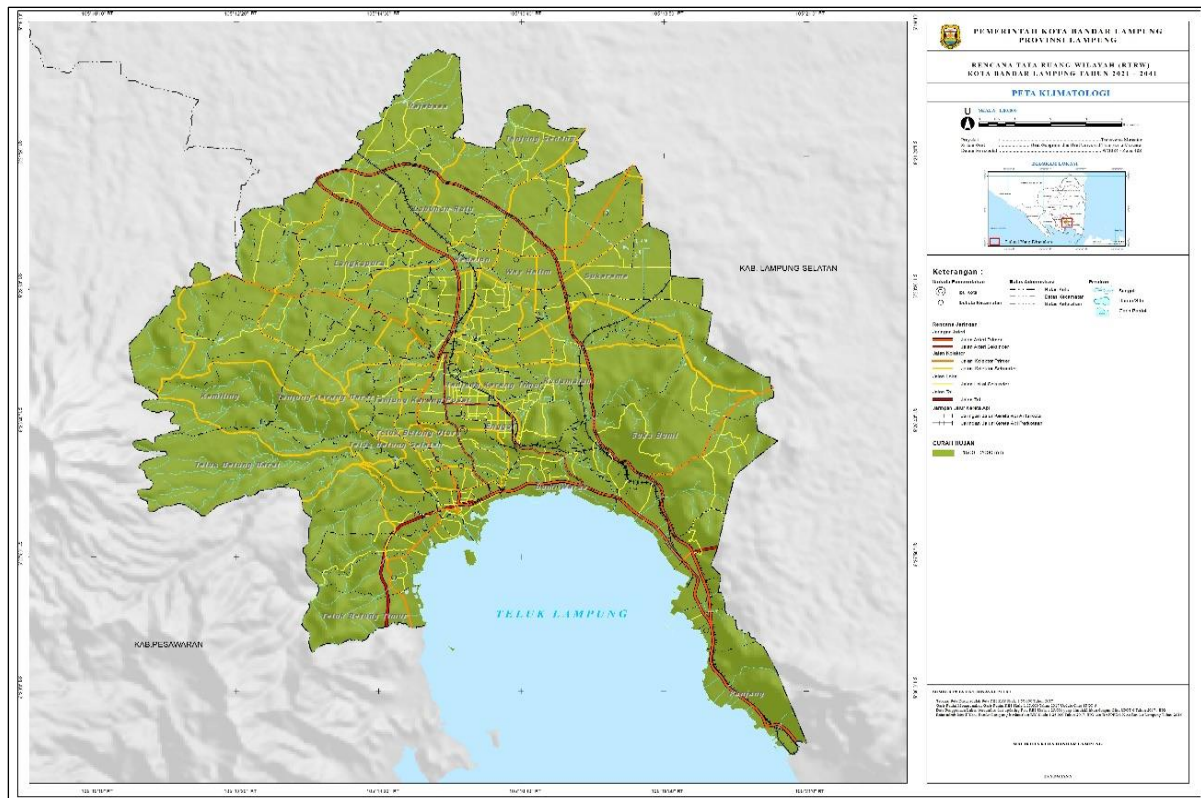
Berdasarkan kajian kerentanan iklim yang telah dilakukan bahwa kondisi iklim di Kota Bandar Lampung sama dengan iklim kota yang berada di garis khatulistiwa dengan kondisi panas dan lembab sepanjang tahun dan suhu di darat konstan. Gambar berikut ini mewakili suhu dan pengendapan rata-rata setiap bulan di Bandar Lampung.



Gambar 2. 4 Suhu dan Pengendapan Rata-Rata di Bandar Lampung

Sumber : www.meteoblue.com

Data tersebut menunjukkan bahwa curah hujan sedang terjadi di tiga bulan pertama setiap tahun dan di akhir tahun, karenanya rata-rata harian suhu maksimum akan terjadi sekitar bulan September-Oktober.

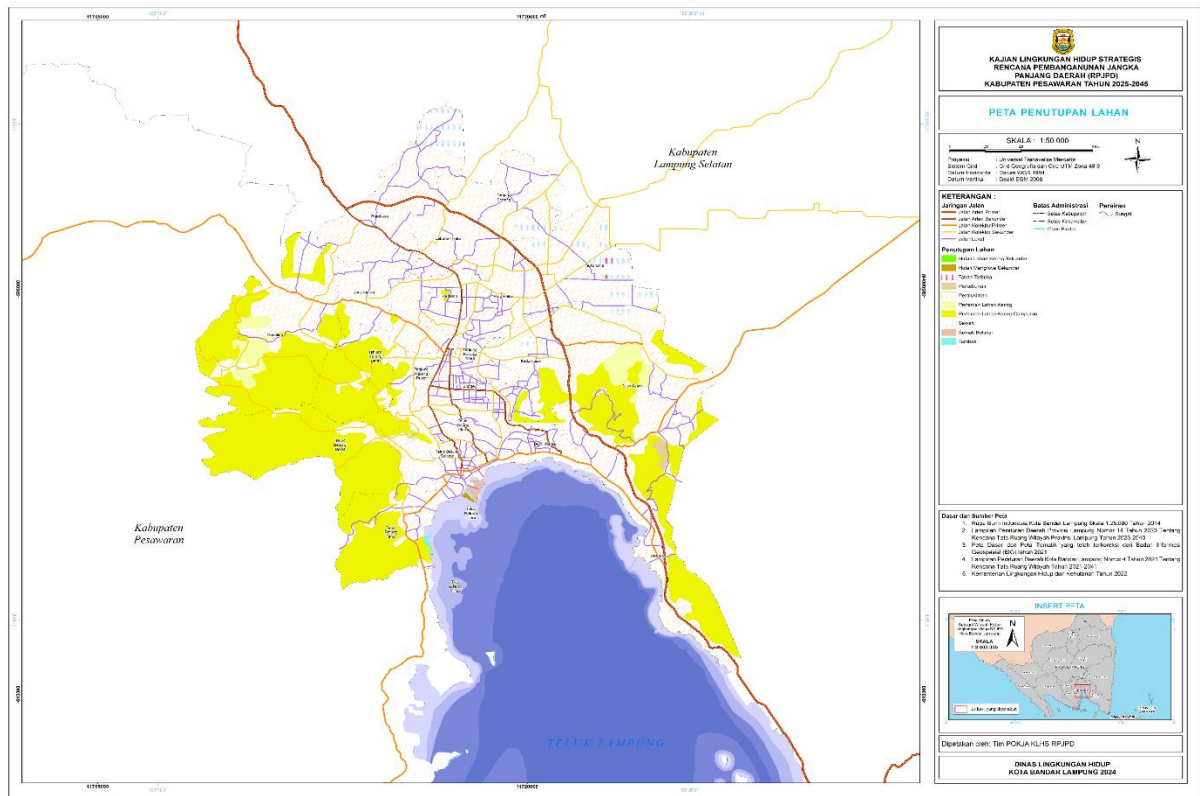


Gambar 2. 5 Peta Klimatologi Kota Bandar Lampung

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2024

4. Penggunaan Lahan

Tutupan lahan di Kota Bandar Lampung secara eksisting sampai saat ini secara garis besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan data RTRW Kota Bandar Lampung 2021-2041 dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, saat ini luas Kota Bandar Lampung sekitar 18.377,04 Ha. Secara umum lahan terbangun sampai saat ini dengan luas sekitar $\pm 9.983,34$ Ha atau sekitar 54,33 persen dari luas Kota Bandar Lampung, sedangkan lahan yang belum terbangun saat ini sekitar $\pm 8.390,66$ Ha atau sekitar 45,67 persen dari luas Kota Bandar Lampung.

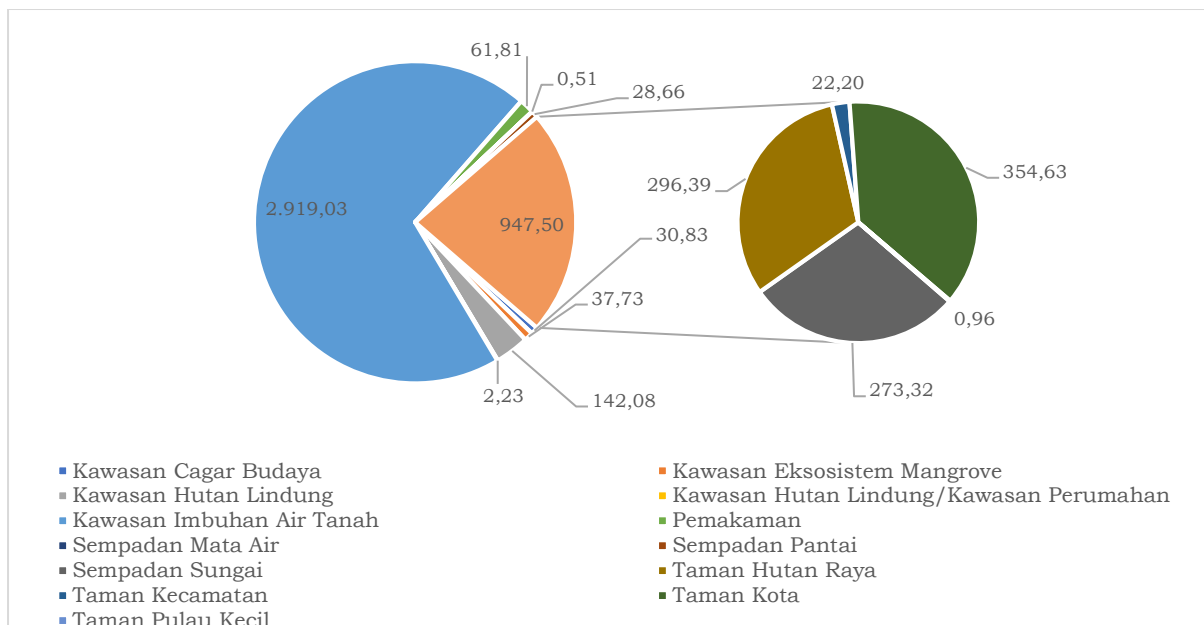


Gambar 2. 6 Peta Tutupan Lahan Kota Bandar Lampung

Sumber : KLHS RPJPD Kota Bandar Lampung,2025-2045

a. Kawasan Lindung

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018, kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya, kawasan ekosistem mangrove, taman pulau kecil, kawasan imbuhan air tanah dan ruang terbuka hijau (RTH) kota dengan total luas kawasan lindung yaitu 4.170,37 Ha. Adapun pembagian kawasan lindung adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 7 Kawasan Lindung

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2024

RTH dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanahkan ketersediaan RTH sebesar 30% yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% dan RTH private sebesar 10% dari luas wilayah terbangun kota.

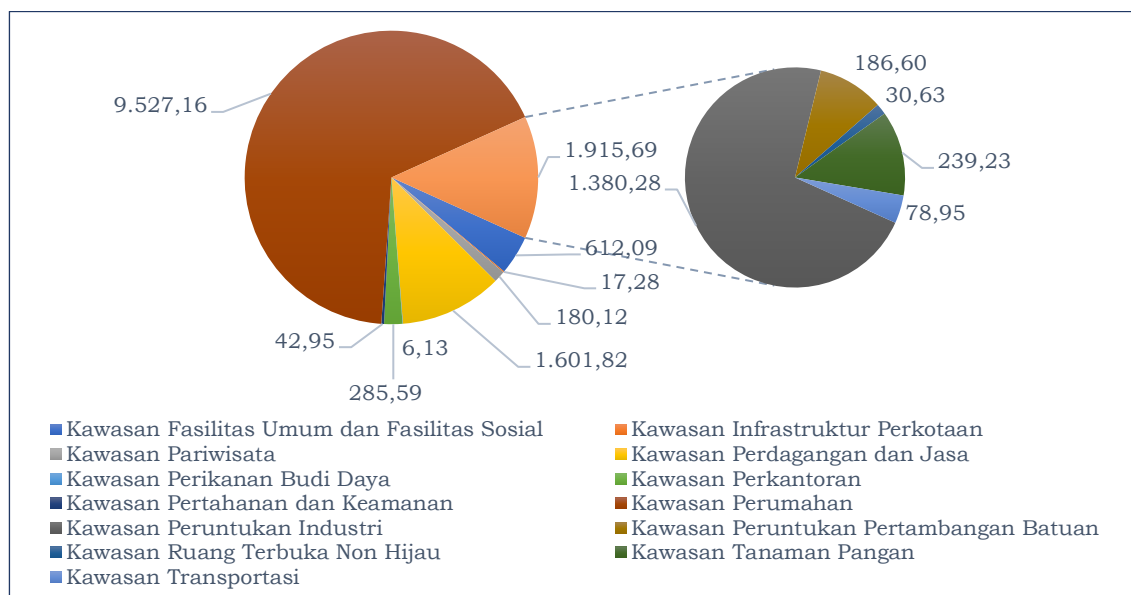
RTH publik terdiri dari taman kecamatan, taman kota, pemakaman, sempadan sungai dan sempadan pantai, sempadan mata air dan kawasan ekosistem mangrove yang tersebar diseluruh kecamatan wilayah Kota Bandar Lampung. Sedangkan RTH *private* tersebar pada lahan dengan fungsi permukiman di seluruh bagian wilayah kota. Selain itu RTH *private* juga tersebar pada kawasan industri yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Panjang, Sukabumi dan Kecamatan Bumi Waras.

Kondisi eksisting di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa ketersediaan RTH saat ini jika dilihat dari luasannya belum dapat memenuhi ketentuan tersebut dan RTH yang sudah ada perlu direvitalisasi fungsinya kembali. Luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bandar

Lampung saat ini berjumlah 658,57 Ha atau sekitar 6,59% dari total luas lahan terbangun Kota Bandar Lampung yang terdiri dari taman kota sebesar 355 Ha, taman kecamatan sebesar 22 Ha, pemakaman sebesar 62 Ha, sempadan sungai dan sempadan pantai sebesar 181,2 Ha, sempadan mata air 0,37 Ha dan kawasan ekosistem mangrove sebesar 38 Ha.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Adapun pembagian kawasan budidaya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.8 Kawasan Budidaya

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2024

Berdasarkan Permen ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota, kawasan budidaya dibagi menjadi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan hutan rakyat, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan peruntukan budidaya Kota Bandar Lampung ditetapkan seluas 14.188,81 hektar.

c. Proporsi Penggunaan Lahan

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, luasan pertanian tanaman pangan berdasarkan hasil *updating* terhadap luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 222 ha dan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) yaitu seluas 186 ha dengan dukungan saluran irigasi seluas 2,13 ha. Dan berdasarkan data pola ruang tersebut diatas, menunjukkan bahwa luas areal terluas adalah luas lahan non pertanian. Hal ini berarti Kota Bandar Lampung telah menjadi Kota Metropolitan yang ditunjukkan dengan luas lahan pertanian yang semakin berkurang dan luas lahan non pertanian yang cenderung meningkat. Terjadi peningkatan areal untuk pemukiman dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi sebagai dampak alami ketika jumlah penduduk meningkat. Hal yang perlu dibenahi adalah bagaimana mengatur perijinan tata ruang.

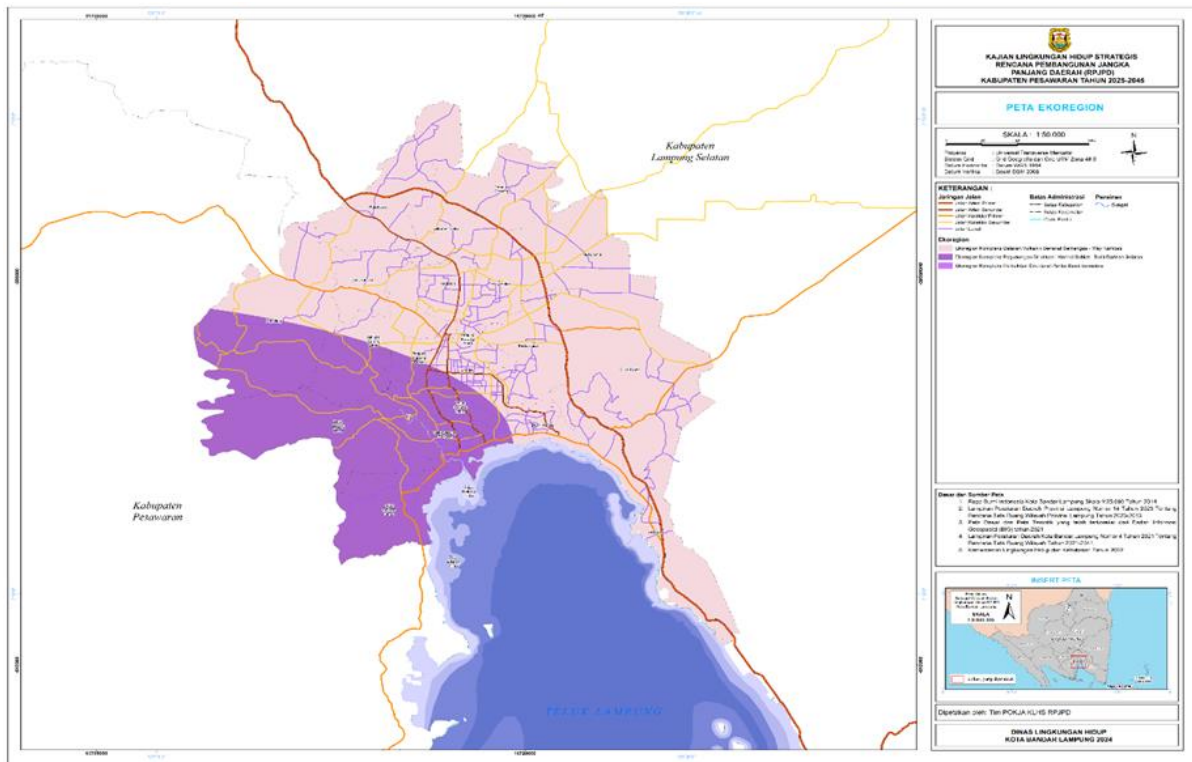
Untuk luas areal perusahaan menunjukkan terjadi peningkatan areal lahan untuk perusahaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi sebagai dampak positif dari munculnya badan usaha baru yang berinvestasi di Kota Bandar Lampung. Untuk areal industri terjadi peningkatan jumlah areal industri dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut sebagai dampak meningkatnya investasi sektor industri di Kota Bandar Lampung. Untuk luas areal jasa terjadi peningkatan luas areal yang digunakan untuk sektor jasa. Hal tersebut sebagai akibat tumbuhnya sektor industri jasa di Kota Bandar Lampung.

Penurunan areal yang digunakan untuk areal lainnya dikarenakan areal digunakan untuk penggunaan sektor lainnya yang lebih produktif seperti untuk industri pabrik dan perusahaan sektor jasa. Area tanah kosong juga mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena tanah kosong yang sebelumnya kurang produktif telah digunakan untuk sektor yang lebih produktif seperti sektor industri, jasa, dan pemukiman.

2.1.1.2 Wilayah Ekoregion

Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Secara sederhana ekoregion adalah geografis ekosistem, yaitu pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan wilayah geografis. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia telah menetapkan ekoregion sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Penentuan wilayah dan pemetaan ekoregion dimaksudkan untuk dapat digunakan dalam berbagai tujuan, yaitu:

- a) Sebagai unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- b) Sebagai dasar dalam memberikan arahan untuk penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan untuk perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan karakter wilayah.
- c) Memperkuat kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun persoalan lingkungan hidup.
- d) Sebagai acuan untuk pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem/lingkungan yang mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain dalam satu ekoregion, sehingga dapat dicapai produktivitas optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 2.9 Peta Ekoregion

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandar Lampung, 2025-2045

1. Karakteristik Bentang Alam

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki iklim, air, tanah, flora, dan fauna dengan ciri yang sama serta pola interaksi antara manusia dengan lingkungan yang menggambarkan integritas sistem lingkungan hidup. Ekoregion merupakan bentuk perencanaan wilayah untuk manajemen pembangunan yang berdasarkan batasan dan deliniasi ruang (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, 2016). Berdasarkan pengertian di atas maka ciri yang dapat dipakai sebagai acuan penentuan batas wilayah adalah bentang alam/ekoregion, iklim, Daerah Aliran Sungai (DAS), flora dan fauna, ekonomi, sosial budaya, kelembagaan, dan inventarisasi lingkungan hidup.

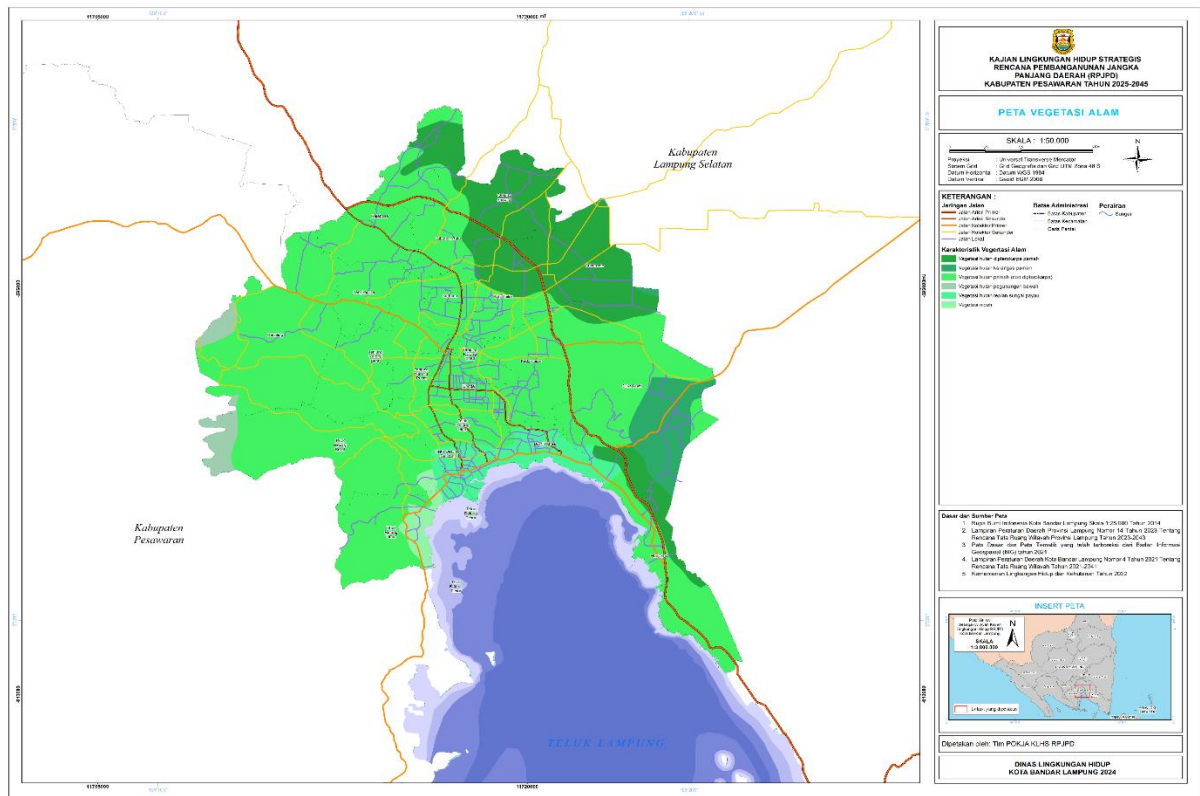
2. Karakteristik Vegetasi Alam

Wilayah Kota Bandar Lampung termasuk dalam ekoregion Pulau Sumatera. Ekoregion Kota Bandar Lampung terdiri dari Bentang alam dan vegetasi

alami. Berdasarkan hasil penetapan dan pemetaan ekoregion Provinsi Lampung pada skala 1 : 350.000 maka Kota Bandar Lampung memiliki 6 (enam) jenis satuan wilayah ekoregion yaitu:

1. Dataran fluvial sumatera
2. Dataran struktural jalur bukit barisan
3. Dataran vulkanik jalur bukit barisan
4. Pegunungan struktural jalur bukit barisan
5. Pegunungan vulkanik jalur bukit barisan
6. Perbukitan struktural jalur bukit barisan

Ekoregion di wilayah Kota Bandar Lampung didominasi oleh perbukitan struktural jalur bukit barisan seluas 69,58 km² (33,3%), disusul dengan Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan seluas 44,43 km² (24,45%) dataran Fluvial Sumatera seluas 40,14 km² (22,1%), Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan seluas 15,52 km² (8,54 %) Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan seluas 8,7 km² (4,8%) dan Pegunungan vulkanik Jalur Bukit Barisan seluas 3,31 km² (1,82%). Kondisi ekoregion ini tersebar diseluruh wilayah Kota Bandar Lampung, yang nantinya akan memberi pengaruh terhadap fungsi jasa layanan lingkungan yang ada di atasnya sesuai kondisi fisik dan jenis tutupan lahan yang ada.



Gambar 2.10 Peta Vegetasi Alam Kota Bandar Lampung

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandar Lampung, 2025-2045

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Tahun-tahun terakhir banyak bencana yang terjadi di negeri ini. Insiden polusi tidak bisa dihindari akibat kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial. Itu terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah indikator Daya dukung dan performa terlampaui kapasitas lingkungan. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kehidupan menyebutkan daya dukung lingkungan adalah keterampilan lingkungan yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antara keduanya.

Meskipun kapasitas lingkungan memiliki kemampuan untuk menyerap zat Energi dan/atau komponen masuk lainnya atau masukkan, daya dukung dan kapasitas lingkungan harus melalui pertimbangan dalam perencanaan tata ruang sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1. Daya Dukung Air

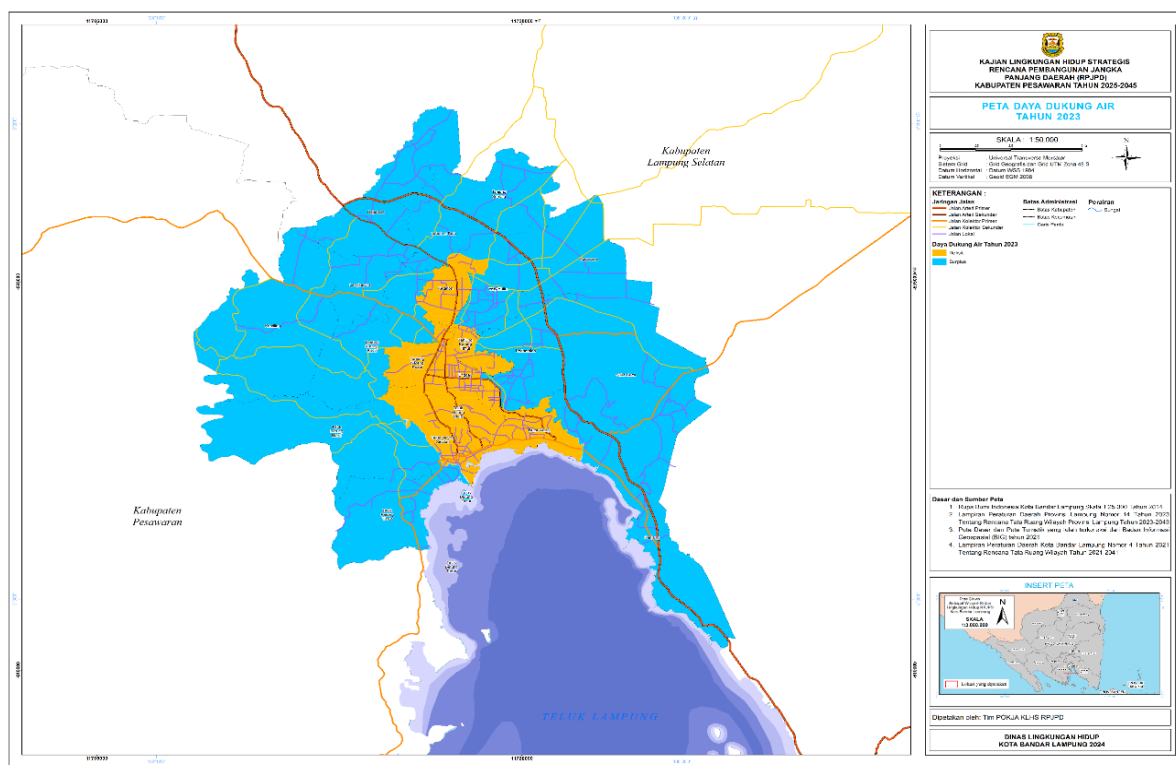
Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan.

Tabel 2.5 Koefisien Limpasan

No	Deskripsi Permukaan	Ci
1	Kota, jalan aspal, atap genteng	0,7-0,9
2	Kawasan Industri	0,5-0,9
3	Permukiman multi unit, pertokoan	0,6-0,7
4	Kompleks perumahan	0,4-0,6
5	Villa	0,3-0,5
6	Taman, pemakaman	0,1-0,3
7	Pekarangan tanah berat: a. >7% b. 2-7% c. <2%	0,25-0,35 0,18-0,22 0,13-0,17
8	Pekarangan tanah ringan: a. >7% b. 2-7% c. <2%	0,15-0,20 0,10-0,15 0,05-0,10
9	Lahan berat	0,40
10	Padang rumput	0,35
11	Lahan budidaya pertanian	0,30
12	Hutan Produksi	0,18

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009

Kebutuhan air dihitung dari hasil konservasi terhadap kebutuhan hidup layak untuk memenuhi kebutuhan air secara minimal yang harus dipenuhi untuk setiap masyarakat Kota Bandar Lampung. Asumsi kebutuhan air dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal pada Permen PU Nomor 01 Tahun 2014 bahwa kebutuhan air bersih domestik minimal yaitu 60 Liter/orang/hari, sedangkan asumsi 20% untuk kebutuhan air bersih domestik (sekolah, kantor, tempat ibadah, dan lain-lain). Kebutuhan perkapita untuk air bersih domestik dan non domestik tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk pada setiap Kecamatan di Kota Bandar Lampung



Gambar 2.11 Daya Dukung Air Kota Bandar Lampung

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung 2025-2045

2. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung adalah konsep yang berkaitan dengan kemampuan suatu ekosistem atau lingkungan untuk mendukung fungsi-fungsi perlindungan alam, seperti penyerapan air, pengendalian erosi, penyediaan habitat bagi flora dan fauna, serta penyaring polutan.

Tabel 2.6 Klasifikasi Kelas Daya Dukung Fungsi Lahan

Kelas	Jangkauan Nilai
Tinggi	>0,667
Sedang	0,333 - 0,667
Rendah	<0,333

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Lampung, 2025-2045

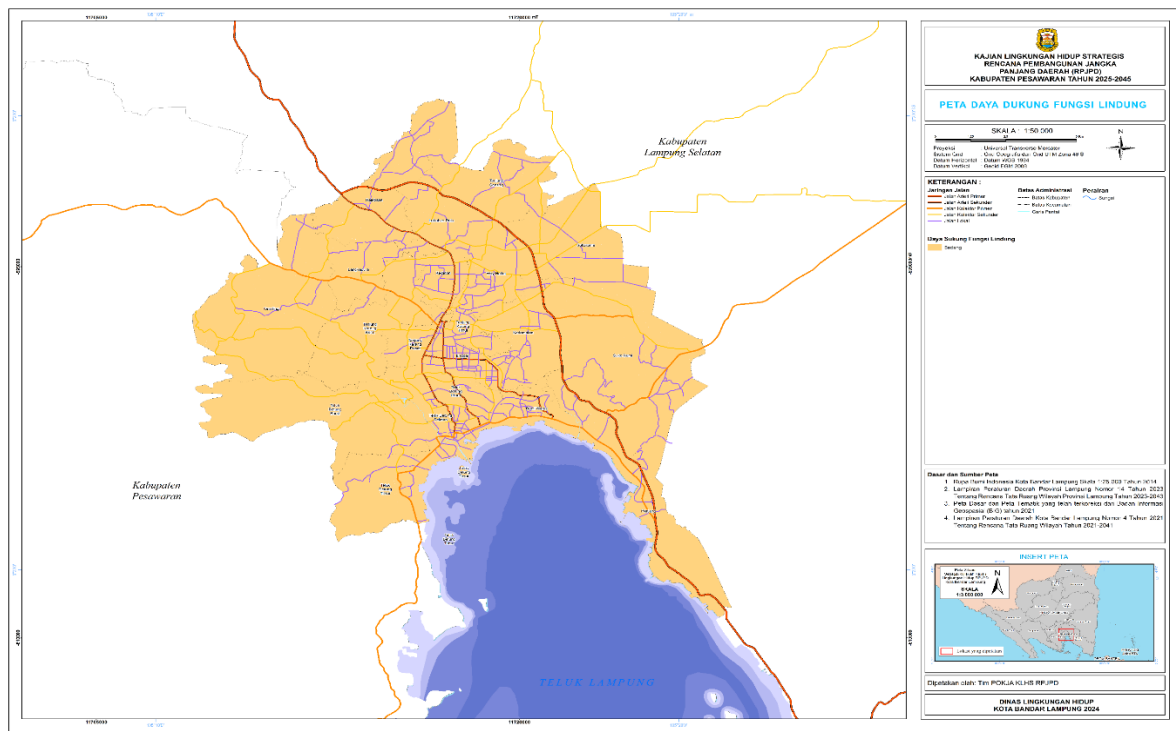
Tutupan lahan di Kota Bandar Lampung sampai saat ini secara garis besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kegiatan reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung telah menambah luas daratan Kota Bandar Lampung hingga lebih dari 18.348 ha. Tutupan lahan Kota Bandar Lampung diklasifikasikan berdasarkan SNI 7465-2010 tentang Klasifikasi

penutup lahan dan klasifikasi tutupan lahan pada skala 1:50.000 atau 1:25.000. Secara umum tutupan lahan didominasi untuk bangunan pemukiman kota dengan luas lahan terbangun sejumlah 86,77 km². Adapun luasan dan gambaran tutupan lahan Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.7 Tutupan Lahan Kota Bandar Lampung

Tutupan Lahan	Luas (Ha)
Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	863.74
Bangunan Permukiman Desa	230.04
Bangunan Permukiman Kota	8676.88
Hutan Lahan Rendah Primer Kerapatan Sedang	4961.53
Hutan, Jalur Hijau dan Taman Kota	80.97
Jalan	88.26
Kolam Air Tawar Lain	9.21
Ladang/Tegalan dengan Palawija	223.61
Lahan Terbuka Lain	68.67
Lapangan diperkeras	9.55
Padang Golf	42.84
Pelabuhan	41.93
Pemukaman Umum	15.70
Penambangan Terbuka Lain	156.70
Perkebunan Lain	14.77
Sawah dengan padi terus menerus	946.35
Semak dan Belukar	1878.26
Stadion dan Sarana Olahraga	6.72
Stasiun	5.05
Sungai	11.83
Tambak Ikan	6.21
Terminal Bus	9.16
Total	18348.00

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025--2045



Gambar 2.12 Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Bandar Lampung

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045

3. Kemampuan Lahan

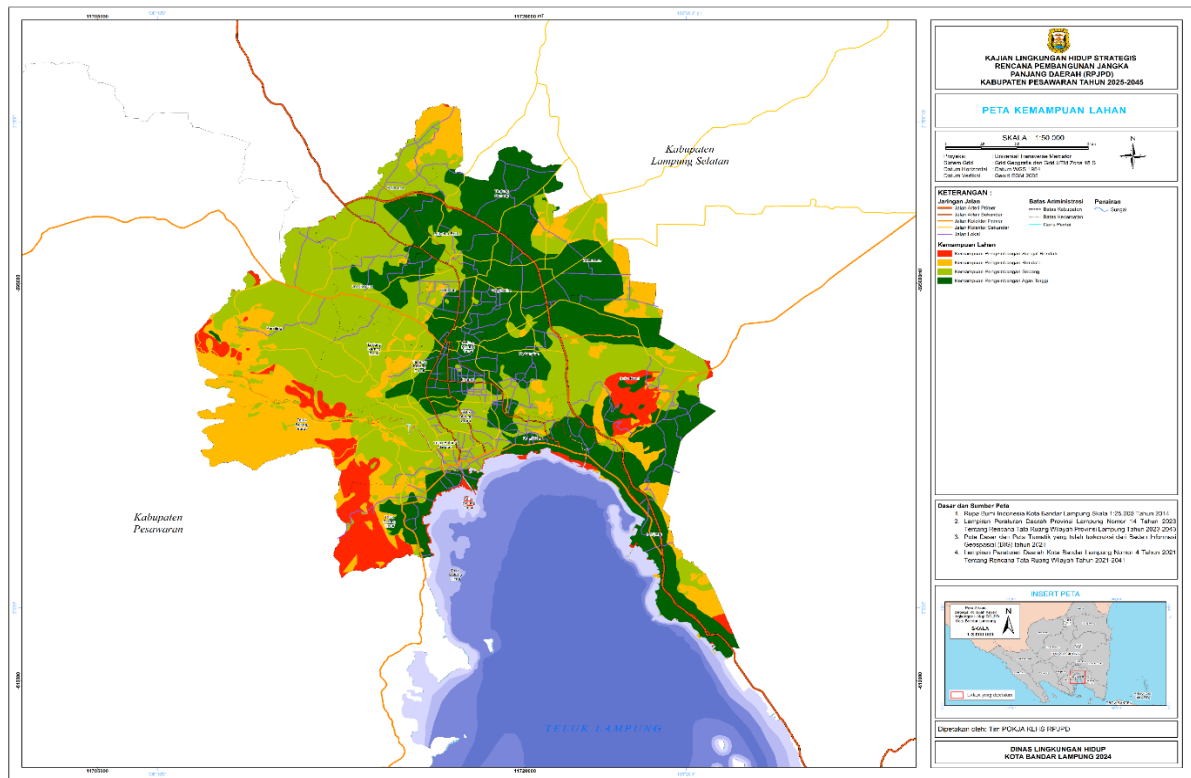
Tujuan analisis kemampuan lahan yaitu untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan dalam rangka pembangunan Kota Bandar Lampung dan sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya. Keluaran dari analisis ini yaitu berupa peta kemampuan lahan dengan klasifikasi kemampuan pengembangan lahan dari yang paling rendah karena terlalu banyak kendala sampai yang paling baik karena memiliki potensi tinggi dilihat dari hasil skoring analisis multikriteria/ superimpose. Dalam mencapai luaran tersebut maka dalam analisis ini menggunakan hasil semua analisis satuan kemampuan lahan yang sebelumnya telah dilakukan dan data-data serta studi terkait.

Dalam analisis ini, peta-peta keluaran analisis satuan kemampuan lahan ditumpang tindihkan satu sama lainnya sehingga setiap ruang memiliki nilai potensi dan kendala pengembangan. Berdasarkan gambaran peta kemampuan lahan Kota Bandar Lampung, sebagian besar berada pada kelas kemampuan lahan sedang (39%) dan tinggi (37%)

Tabel 2.8 Kelas Kemampuan Lahan

Skor	Kelas	Kelas Kemampuan Lahan	Luas (Ha)	%
32-58	Kelas A	Kemampuan Sangat Rendah	1434,02	8
59-83	Kelas B	Kemampuan Rendah	3053,54	17
84-109	Kelas C	Kemampuan Sedang	7139,49	39
110-134	Kelas D	Kemampuan Tinggi	6735,18	37
135-160	Kelas E	Kemampuan Sangat Tinggi	0	0
TOTAL			18362,2	100

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045



Gambar 2.13 Peta Kemampuan Lahan Kota Bandar Lampung

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045

4. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan adalah kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan kota, kegiatan ekonomi dan keseimbangan diantaranya. Daya dukung lahan mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung kegiatan perkotaan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan yang potensial, lahan yang memiliki kendala untuk pembangunan dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan perkotaan. Metode yang digunakan adalah overlay dengan teknik Boolean yang didukung oleh Pusat

Air Tanah & Geologi Tata Lingkungan. Data yang digunakan untuk membuat peta daya dukung lahan adalah sebagai berikut:

- a. Peta Kemiringan Lereng
- b. Peta Geologi
- c. Peta Jenis Tanah
- d. Peta Gerakan Tanah
- e. Peta Topografi
- f. Peta Penggunaan Lahan

Lahan limit adalah lahan yang dibatasi untuk dilakukan kegiatan pembangunan. Klasifikasi Lahan Limit adalah lahan dengan ketinggian >2.000 mdpl serta memiliki kelerengan $>40\%$. Lahan kendala adalah lahan yang dapat dikembangkan namun lebih baik dipertahan fungsi utamanya. Klasifikasi Lahan Kendala adalah kelerengan $15-40\%$. Lahan potensial adalah lahan yang dapat dilakukan pembangunan. Klasifikasi Lahan Potensial adalah lahan yang tidak termasuk lahan limit dan kendala. Integrasi hasil analisis daya dukung lahan dengan Rencana Pola Ruang RTRW adalah sebagai berikut:

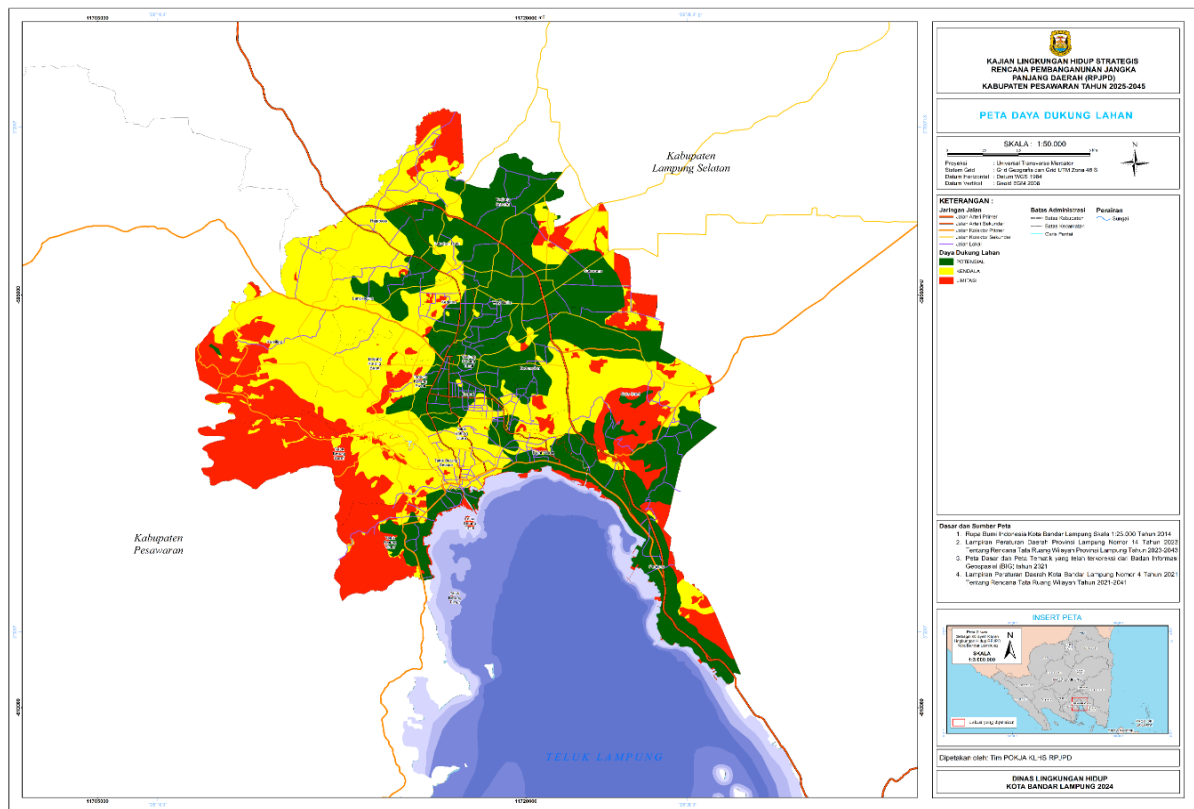
- a. Lahan limit dijadikan sebagai kawasan lindung Lahan kendala hutan produksi dijadikan sebagai kawasan budidaya.
- b. Lahan kendala kelerengan $15-40\%$ dijadikan sebagai kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya.
- c. Lahan potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya

Sebagaimana tergambar pada table dan gambar berikut, dapat dilihat bahwa kemampuan lahan Kota Bandar Lampung yang dapat dikembangkan dengan kemampuan sedang sebesar $7139,449$ Ha karena memiliki kelerengan $14-40\%$ dan dengan kemampuan tinggi sebesar $6735,18$ Ha (berpotensi untuk dikembangkan sebagai Kawasan budidaya), sementara sisanya berada dalam kondisi memiliki keterbatasan untuk dikembangkan karena memiliki kelerengan antara $15-40$ persen dan lebih dari 40 persen.

Tabel 2.9 Daya Dukung Lahan

Skor	Kelas	Kelas Kemampuan Lahan	Luas (Ha)	Daya Dukung Lahan
32-58	Kelas A	Kemampuan Sangat Rendah	1434,02	LIMITASI
59-83	Kelas B	Kemampuan Rendah	3053,54	
84-109	Kelas C	Kemampuan Sedang	7139,49	KENDALA
110-134	Kelas D	Kemampuan Tinggi	6735,18	POTENSI
135-160	Kelas E	Kemampuan Sangat Tinggi	0	

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Lampung. 2025-2045



Gambar 2.14 Peta Daya Dukung Lahan Kota Bandar Lampung

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045

5. Daya Tampung Lahan

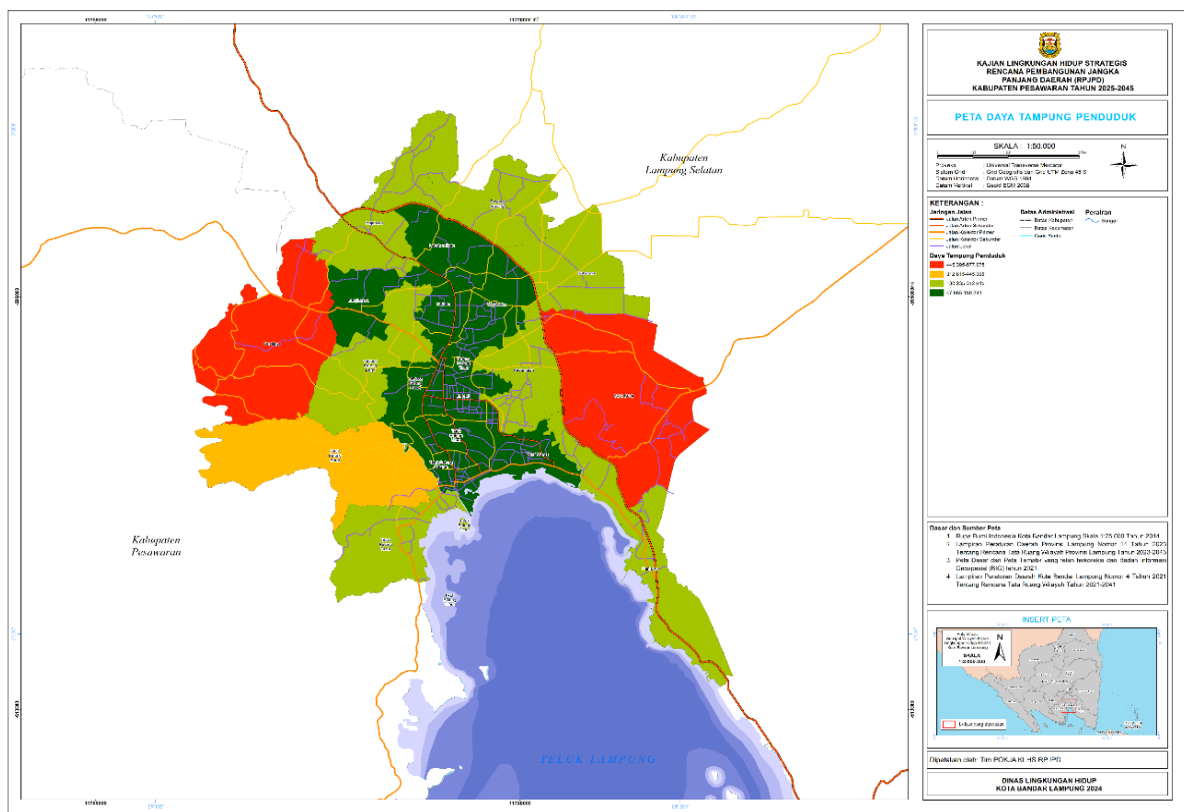
Analisis daya tampung merupakan proses evaluasi untuk menentukan jumlah maksimum individu, objek, atau unit lainnya yang dapat ditampung oleh suatu sistem atau tempat pada suatu waktu tertentu. Ini melibatkan penilaian terhadap kapasitas fisik, kebutuhan, dan ketersediaan sumber daya untuk menentukan batas optimal atau aman dari suatu sistem.

Tabel 2.10 Daya Tampung Lahan

No	Kecamatan	DDPm	Jumlah Penduduk Tahun 2022	DT (Data Tampung (Jiwa))	Daya Tampung Pemukiman	Keterangan
1	Teluk Betung Barat	9,17	45.963	421.445	316.569	Surplus
2	Teluk Betung Timur	4,07	59.302	241.082	127.534	Surplus
3	Teluk Betung Selatan	1,77	45.427	80.596	23.371	Surplus
4	Bumi Waras	1,54	67.230	103.488	14.554	Surplus
5	Panjang	3,64	85.602	311.174	203.723	Surplus
6	Tanjung Karang Timur	1,03	46.257	47.665	19.804	Defisit
7	Kedamaian	3,13	61.492	192.563	113.221	Surplus
8	Teluk Betung Utara	1,79	56.420	101.022	34.303	Surplus
9	Tanjung Karang Pusat	1,34	59.310	79.643	4.229	Surplus
10	Enggal	2,14	29.968	64.267	31.512	Surplus
11	Tanjung Karang Barat	3,76	70.887	266.333	154.704	Surplus
12	Kemiling	5,00	98.518	492.256	280.726	Surplus
13	Langkapura	2,55	47.869	122.208	32.402	Surplus
14	Kedaton	1,41	61.661	87.138	- 4.273	Defisit
15	Rajabasa	4,79	62.285	298.334	200.075	Surplus
16	Tanjung Senang	3,08	69.259	213.330	61.971	Surplus

No	Kecamatan	DDPm	Jumlah Penduduk Tahun 2022	DT (Data Tampung (Jiwa))	Daya Tampung Pemukiman	Keterangan
17	Labuhan Ratu	2,50	56.341	140.622	57.166	Surplus
18	Sukarama	3,45	73.120	252.092	138.921	Surplus
19	Sukabumi	6,88	83.973	577.975	407.168	Surplus
20	Way Halim	1,78	80.850	144.219	14.409	Surplus
21	Kota Bandar Lampung	3,37	1.259.004	4.237.454	2.283.804	Surplus

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045



Gambar 2. 15 Peta Daya Tampung Penduduk Kota Bandar Lampung

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045

2.1.1.4 Dampak dan Resiko Bencana

Berdasarkan RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 dan studi mitigasi bencana Kota Bandar Lampung, wilayah Kota Bandar Lampung saat ini memiliki beberapa kawasan yang diidentifikasi sebagai Kawasan rawan bencana, seperti gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan banjir.

Pengamatan lapangan dan penelitian menjelaskan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki potensi bahaya alam guncangan gempa bumi, pergeseran tanah (*ground-faulting*) bahaya pelulukan/likuifaksi akibat dari bahaya ikutan “*colateral hazard*” gempa bumi, tumbuh-tumbuhan yang semakin gundul, kondisi batuan yang sebagian sudah lapuk, pola drainase, kandungan cairan dalam batuan dan tanah lapukan dan tanah di beberapa tempat menunjukkan kondisi yang rentan terhadap gempa bumi. Kawasan yang terpetakan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat menengah sampai tinggi adalah Kecamatan Panjang, Sukabumi, dan Teluk Betung Timur.

a. Indeks Resiko Bencana

Seperti halnya Kota besar lainnya di Indonesia, Kota Bandar Lampung juga menghadapi berbagai macam permasalahan bencana. Berikut ini adalah indeks Resiko Bencana Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 11 Indeks Resiko Bencana Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks	Kategori
2019	154,05	Tinggi
2020	146,00	Tinggi
2021	140,36	Sedang
2022	139,02	Sedang
2023	119,79	Sedang

Sumber : www.inarisk.bnppb.go.id

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi trend penurunan terhadap Indeks Resiko Bencana Kota Bandar Lampung setiap tahunnya. Kelurahan Siaga Bencana merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas. Setiap kelurahan siaga bencana diharapkan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, terutama mengenai keselamatan mereka jika terjadi bencana alam, jadi BPBD Kota Bandar Lampung tinggal mengingatkan saja. Setiap kelurahan siaga bencana diberikan pengetahuan mengenai mitigasi bencana, terutama untuk jenis bencana yang rawan terjadi di daerah tersebut. Sampai dengan Tahun

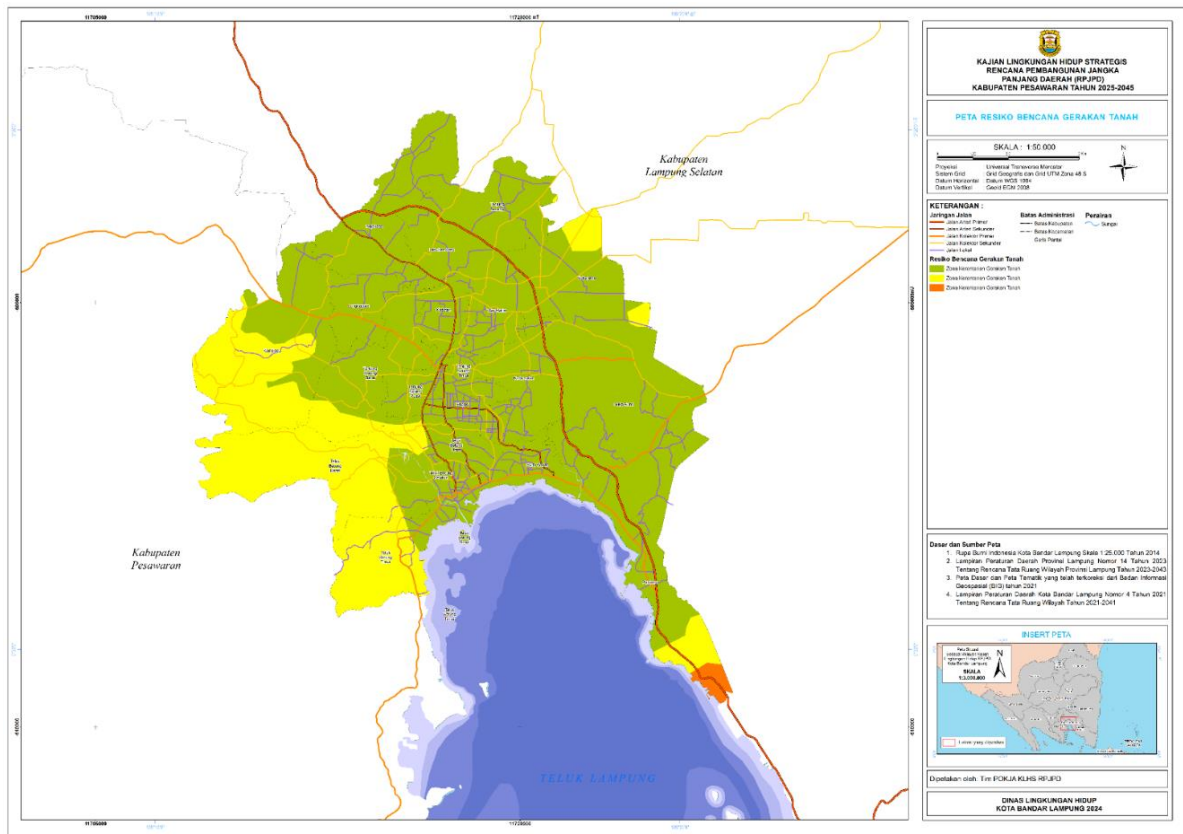
2023, telah ditetapkan 2 (dua) Kelurahan Siaga Bencana di Kota Bandar Lampung yaitu Kelurahan Kota Karang dan Kelurahan Kota Karang Raya.

Kawasan rawan bencana alam yang ada di Kota Bandar Lampung terdiri dari kawasan rawan banjir, kawasan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan tsunami. Penjelasan dari kondisi bencana yang ditemui di Kota Bandar Lampung yaitu :

1. Kawasan rawan bencana banjir sangat tinggi berada di Kecamatan Panjang, Sukabumi, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Utara, Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Langkapura, Rajabasa, Tanjung Senang, Kemiling, Sukarame dan Way Halim.
2. Kawasan rawan bencana gempa bumi sangat tinggi berada di Kecamatan Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Kedamaian, Enggal dan Tanjung Karang Timur serta Sukabumi.
3. Kawasan rawan bencana gerakan tanah menengah yang ada di Kota Bandar Lampung berada di Kecamatan Panjang, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat dan Kemiling.
4. Kawasan rawan bencana tanah longsor sangat tinggi berada bagian wilayah yang ada di Kecamatan Panjang, Sukabumi, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Tanjung Karang Barat dan Kemiling.
5. Kawasan rawan bencana tsunami berada di tepian pantai yang berada di Kecamatan Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan dan Teluk Betung Timur.

Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa Bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng Bumi). Frekuensi suatu wilayah, mengacu pada jenis dan ukuran gempa Bumi yang dialami selama periode waktu. Kawasan rawan bencana gempa bumi sangat tinggi yang ada di Kota Bandar Lampung berada di Kecamatan Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, Teluk



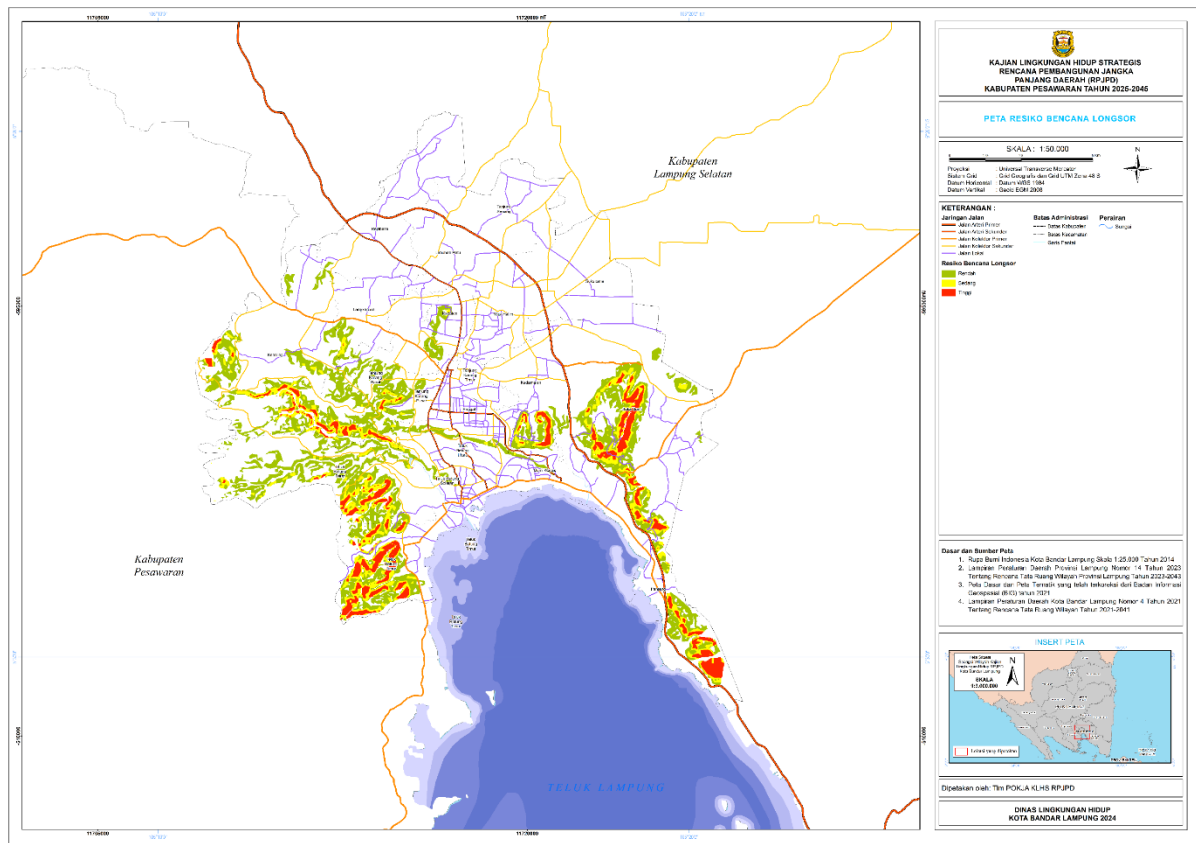


Gambar 2. 17 Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah

Sumber : : KLHS RPJPD Kota Bandar Lampung,2025-2045

Gerakan tanah adalah suatu konsekuensi fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan lereng yang terjadi, baik secara alamiah maupun akibat ulah manusia. Gerakan tanah akan terjadi pada suatu lereng, jika ada keadaan ketidakseimbangan yang menyebabkan terjadinya suatu proses mekanis, mengakibatkan sebagian dari lereng tersebut bergerak mengikuti gaya gravitasi dan selanjutnya setelah terjadi longsor, lereng akan seimbang atau stabil kembali. Jadi, longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan menuruni lereng mengikuti gaya gravitasi akibat terganggunya kestabilan lereng. Apabila massa yang bergerak pada lereng ini didominasi oleh tanah dan gerakannya melalui suatu bidang pada lereng, baik berupa bidang miring maupun lengkung, maka proses pergerakan tersebut disebut sebagai longsoran tanah.

Kawasan rawan bencana tanah longsor sangat tinggi yang ada di Kota Bandar Lampung berada bagian wilayah yang ada di Kecamatan Panjang, Sukabumi, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Tanjung Karang Barat dan Kemiling.



Gambar 2. 18 Peta Risiko Bencana Longsor

Sumber: : KLHS RPJPD Kota Bandar Lampung, 2025-2045

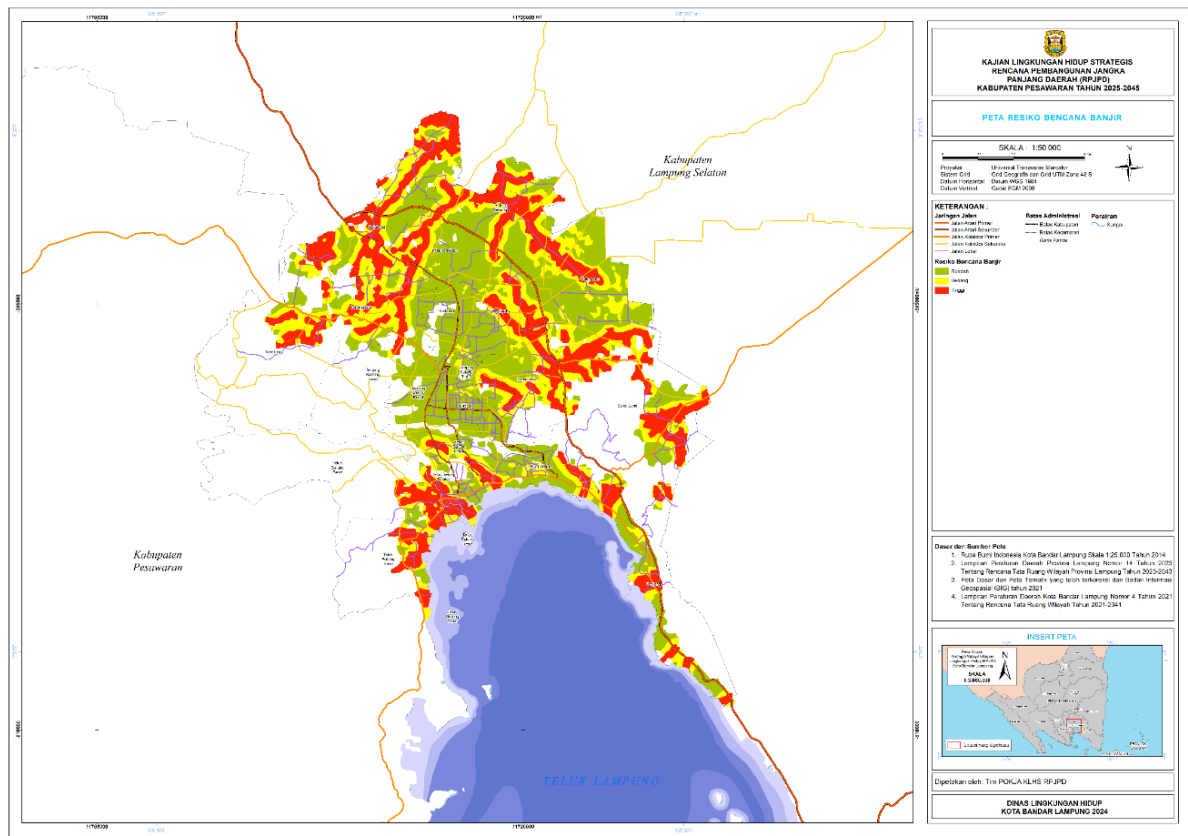
Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Kawasan rawan banjir terjadi disebabkan oleh tersumbatnya sungai maupun karena penggundulan hutan disepanjang sungai, bencana banjir terjadi hampir disetiap musim penghujan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor lainnya adalah ulah manusia juga seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman bantaran sungai, daerah resapan, penggundulan hutan dan sebagainya), pembuangan sampah ke dalam sungai, dan permukiman di daerah dataran banjir dan sebagainya. Berdasarkan data BPBD Kota

Bandar Lampung, pada Tahun 2018 bencana banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung sebanyak 19 kali, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 30 kali. Pada Tahun 2019 terjadi banjir di 24 titik di 19 kelurahan pada 12 kecamatan dan pada Tahun 2020 banjir terjadi di 35 titik di 25 kelurahan pada 14 kecamatan. Sedangkan pada Tahun 2021 terjadi banjir/genangan di 22 titik di 17 Kelurahan pada 13 Kecamatan. Berikut adalah data yang menunjukkan titik banjir/genangan Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

Tabel 2.12 Titik Banjir/Genangan Kota Bandar Lampung Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Ketinggian (cm)
1	Sukarame	Sukarame	Jl. Wiratama Samping Depo Bangunan	40
		Sukarame baru	Jl. Pendidikan RT. 17 LK.I	20
2	Sukabumi	Way Laga	Jl. Wala Abadi RT. 08 – 013 LK. I	30
		Jagabaya 2	Jl. Pulau Buton No. 2 RT. 08 LK. I	40
3	Way Halim	Jagabaya 3	Jl. Arif Rahman Hakim Gang Hi. Syahril No. 23	40
		Teluk Betung Barat	Jl. Morotai (Belakang Perumahan Citra Garden	30
5	Panjang	Way Lunik	Jl. H. Muhammad Salim RT.02 LK. I	40
6	Rajabasa	Rajabasa Nunyai	Perumahan Rajabasa Indah	30
		Sukaraja	Jl. Yos Sudarso	20
7	Bumi Waras	Bumi Raya	Jl.Slamet Riyadi RT. 045 dan 046 LK. III.	40
		Way Laga	Jl. Soekarno Hattta RT. 15 LK. II	30
8	Suka Bumi	Campang Raya	Jl. Tirtayasa Gangg Darussalam RT. 06, LK I.	40

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, 2024



Gambar 2.19 Peta Risiko Bencana Banjir

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandar Lampung, 2025-2045

2.1.1.5 Jasa Lingkungan Hidup

Jasa lingkungan dapat merepresentasikan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Hal ini berarti bahwa DDDTLH merupakan kapasitas jasa ekosistem dalam mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu wilayah ekoregion. Semakin tinggi atau baik DDDTLH suatu ekoregion, maka ekosistem semakin baik kualitas dan fungsi ekoregion tersebut menyediakan jasa ekosistemnya.

1. Jasa Penyediaan Pangan

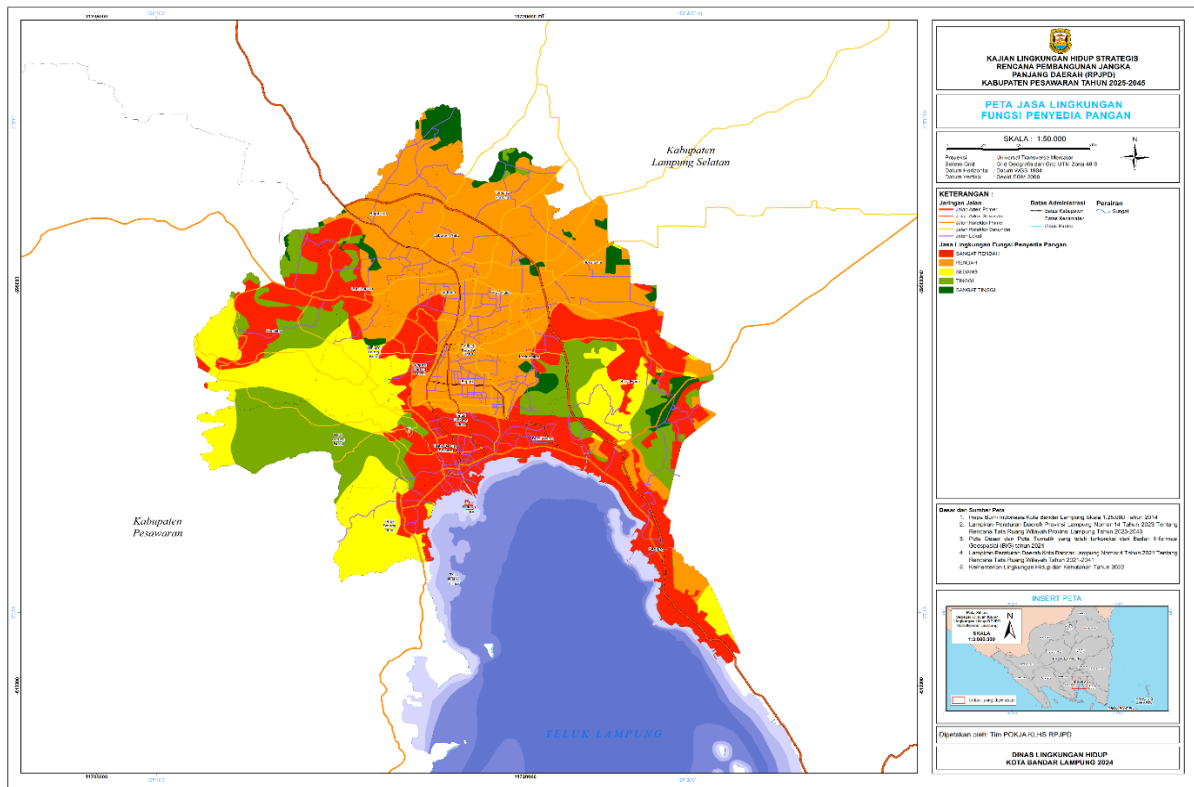
Jasa lingkungan hidup penyedia pangan menurut ekoregion Kota Bandar Lampung terlihat bahwa penyediaan pangan memiliki nilai jasa layanan ekosistem yang cukup tinggi, namun masih didominasi dengan jasa penyediaan skala rendah dan sangat rendah Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan didominasi skala rendah di Kota Bandar Lampung seluas 60.587.554 Ha (8,96%) dan disusul

dengan skala sangat tinggi seluas 34.194.376 Ha (2,58%). Profil distribusi daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 terlihat pada tabel 2.13 dan gambar 2.20.

Tabel 2.13 Jasa Penyedia Pangan

Kecamatan	Luas	KC2					Total
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	
Bumi Waras	448.45	0	15.4	0	1.88	431.17	448.45
Enggal	278.49	0	0	0	278.41	0.07	278.48
Kedamaian	834.44	70.37	161.92	0	464.79	137.37	834.45
Kedaton	377.6	0	0	0	312.3	65.29	377.59
Kemiling	2133.11	9.73	639.02	747.9	0	736.46	2133.11
Labuhan Ratu	609.36	0	0	0	609.36	0	609.36
Langkapura	529.57	13.2	58.57	13.8	241.93	202.07	529.57
Panjang	1348.42	0	124.63	116.7	196.73	910.36	1348.42
Rajabasa	1292.78	212.87	35.07	0	890.41	154.44	1292.79
Suka Bumi	2504.56	131.98	540.75	472.64	369.35	989.84	2504.56
Sukarame	1092.4	95.82	1.73	2.83	981.21	10.81	1092.4
Tanjung Karang Barat	1154.11	18.7	0	642.36	280.1	212.96	1154.12
Tanjung Karang Pusat	345.12	0	0	62.56	140.72	141.84	345.12
Tanjung Karang Timur	206.55	0	0	0	206.55	0	206.55
Tanjung Senang	924.43	80.87	26.16	0	817.4	0	924.43
Teluk Betung Barat	1826.26	0	1114.49	511.76	0	200.01	1826.26
Teluk Betung Selatan	349.25	0	36.51	40.27	0	272.48	349.26
Teluk Betung Timur	1044.69	0	1.54	733.5	0	309.65	1044.69
Teluk Betung Utara	437.76	0	0	0	128.71	309.05	437.76
Way Halim	624.95	21.26	0	0	603.69	0	624.95

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045



Gambar 2.20 Peta Jasa Penyedia Pangan

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025—2045

6. Jasa Penyediaan Air Bersih

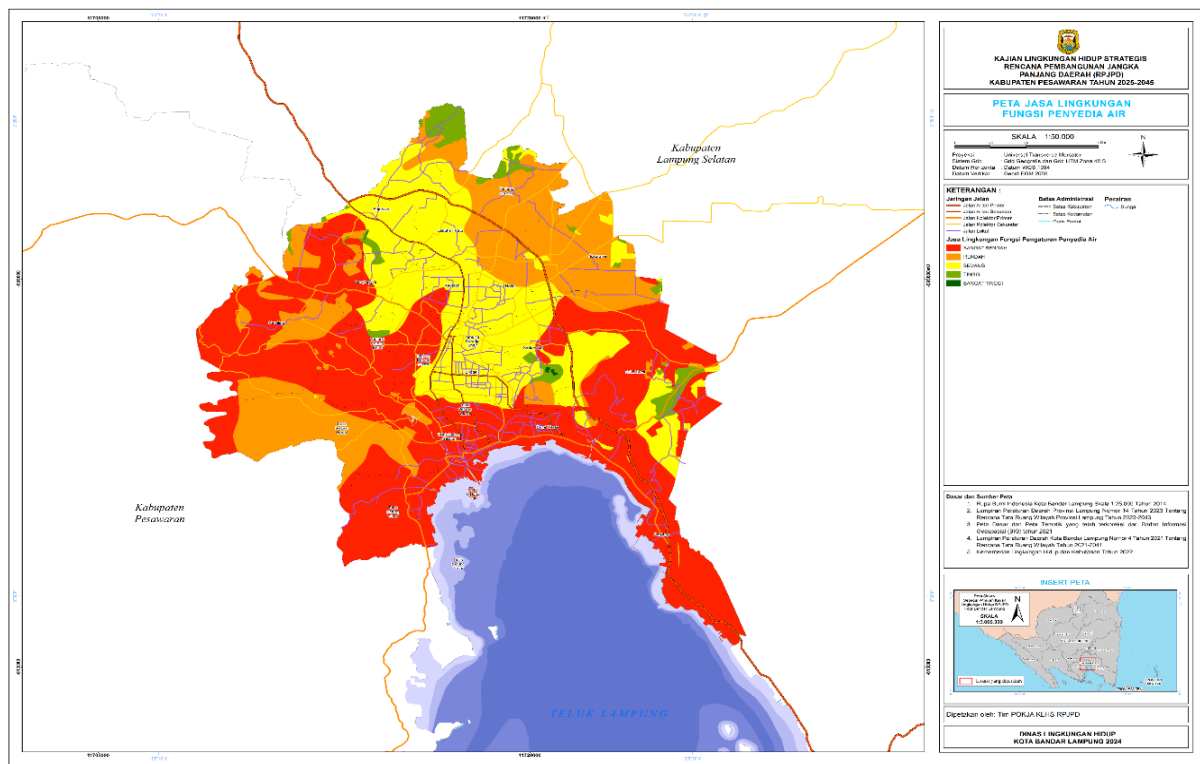
Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang lain seperti bentang lahan, vegetasi dan tutupan lahan. Sama halnya dengan jasa ekosistem penyedia pangan, jasa ekosistem penyedia air bersih dikategorikan ke dalam lima kelas. Jasa Lingkungan hidup pengatur air Kota Bandar Lampung Tahun 2023 didominasi skala sangat rendah seluas 101.566.409 Ha (100,9%) dan disusul dengan skala sedang seluas 46.643.508 Ha (67,6%). Profil distribusi daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 terlihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Kecamatan	Luas	KC2					Total
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	
Bumi Waras	448.45	0	0	7.165581	10.102934	430.835841	448.104356
Enggal	278.49	0	0	278.196975	0	0.072967	278.269942
Kedamaian	834.44	6.260647	64.049989	551.149068	75.069552	137.262399	833.791655
Kedaton	377.6	0	0	284.01195	28.048859	65.242614	377.303423
Kemiling	2133.11	0.000009	9.725752	0	642.478257	1479.229715	2131.433733
Labuhan Ratu	609.36	0	0	458.435916	150.449096	0	608.885012
Langkapura	529.57	0	13.188811	241.739671	58.528586	215.701528	529.158596
Panjang	1348.42	0	0	113.429891	11.101696	1222.847773	1347.37936
Rajabasa	1292.78	1.311725	212.816732	710.26363	213.062352	154.316605	1291.771044
Suka Bumi	2504.56	0	131.878469	587.417139	214.891737	1568.440361	2502.627706
Sukarame	1092.4	0	24.579523	84.138025	972.031199	10.805534	1091.554281
Tanjung Karang Barat	1154.11	0	18.685654	279.879609	11.476102	843.169688	1153.211053
Tanjung Karang Pusat	345.12	0	0	140.607914	0	204.23816	344.846074
Tanjung Karang Timur	206.55	0	0	206.388133	0	0	206.388133
Tanjung Senang	924.43	0	76.135452	169.551976	678.022134	0	923.709562
Teluk Betung Barat	1826.26	0	0	1.510688	1116.450973	706.865922	1824.827583
Teluk Betung Selatan	349.25	0	0	0	40.981572	307.994219	348.975791
Teluk Betung	1044.69	0	0	0	1.540572	1042.336935	1043.877507

Kecamatan	Luas	KC2					Total
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	
Timur							
Teluk Betung Utara	437.76	0	0	128.611812	0	308.810792	437.422604
Way Halim	624.95	0	0	381.253575	243.206663	0	624.460238

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045



Gambar 2.21 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045

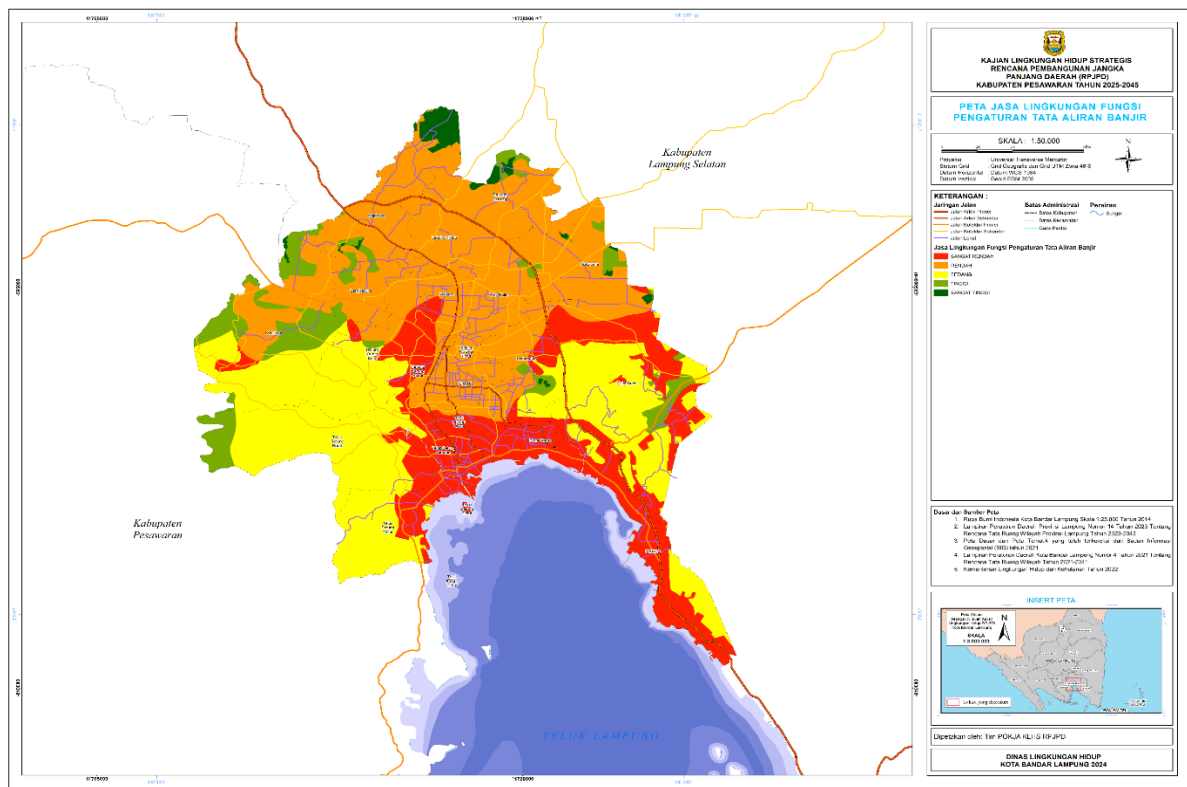
3. Jasa Pengaturan Tata Aliran dan Banjir

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kota Bandar Lampung Tahun 2023 di dominasi skala Rendah seluas 738.174,46 Ha (101,8%) dan disusun dengan skala sedang seluas 560.700,11 Ha (38,8%). Profil distribusi daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 terlihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15 Jasa Pengaturan Tata Aliran dan Banjir

Kecamatan	Luas	KR1					Total
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	
Bumi Waras	448.45	0	0	15.39	1.88	430.84	448.11
Enggal	278.49	0	0	0	278.2	0.07	278.27
Kedamaian	834.44	6.26	64.05	161.79	464.42	137.26	833.78
Kedaton	377.6	0	0	0	312.06	65.24	377.3
Kemiling	2133.11	9.68	620.17	780.71	663.45	57.42	2131.43
Labuhan Ratu	609.36	0	0	0	608.89	0	608.89
Langkapura	529.57	0	71.72	13.79	432.37	11.29	529.17
Panjang	1348.42	0	0	437.72	0	909.66	1347.38
Rajabasa	1292.78	187.54	60.2	0	1044.03	0	1291.77
Suka Bumi	2504.56	0	147.5	1346.56	181.55	827.01	2502.62
Sukarame	1092.4	21.99	76.58	1.73	980.46	10.81	1091.57
Tanjung Karang Barat	1154.11	0	18.69	641.85	279.88	212.79	1153.21
Tanjung Karang Pusat	345.12	0	0	62.51	140.61	141.73	344.85
Tanjung Karang Timur	206.55	0	0	0	206.39	0	206.39
Tanjung Senang	924.43	50	56.95	0	816.77	0	923.72
Teluk Betung Barat	1826.26	0	199.46	1425.51	0	199.85	1824.82
Teluk Betung Selatan	349.25	0	0	76.71	0	272.26	348.97
Teluk Betung Timur	1044.69	0	0	736.3	0	307.58	1043.88
Teluk Betung Utara	437.76	0	0	0	128.61	308.81	437.42
Way Halim	624.95	0	21.24	0	603.22	0	624.46

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045



Gambar 2.22 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045

4. Jasa Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam

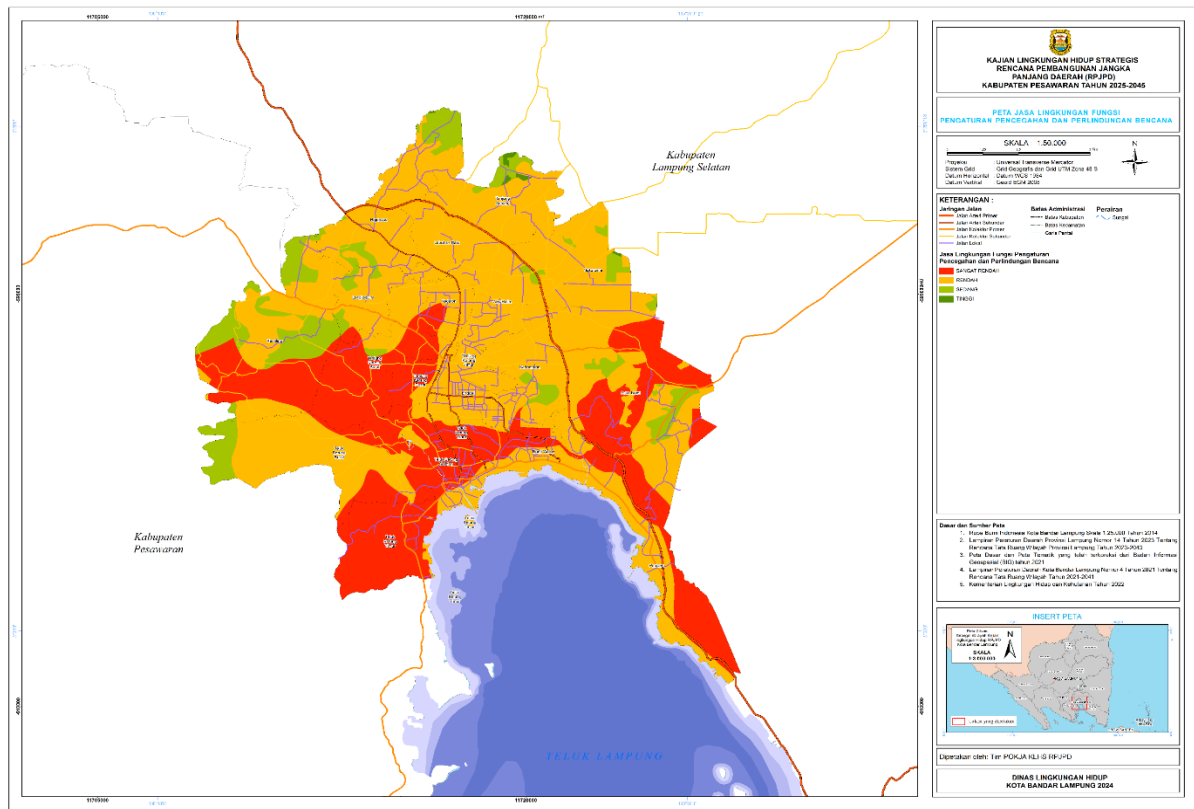
Fungsi pencegahan bencana alam dari tsunami, erosi, banjir, longsor, badai dan gempa bumi berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuklahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan dan melindungi sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami.

Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa Peta Jasa Pencegah dan Perlindungan bencana alam Kota Bandar Lampung didominasi oleh skala rendah. Untuk dominasi skala tinggi adalah seluas 110.349,132 Ha atau sebesar 3,15 persen dan disusul dengan skala sedang seluas 162.015,51 Ha (11,1%). Profil distribusi daya dukung lingkungan jasa pencegah dan perlindungan bencana alam di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 terlihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16 Jasa Pencegahan dna Perlindungan Bencana Alam

Kecamatan	Luas	KR3					Total
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	
Bumi Waras	448.45	0	0	0	317.21	131.24	448.45
Enggal	278.49	0	0	0	278.41	0.07	278.48
Kedamaian	834.44	0	0	70.37	741.72	22.35	834.44
Kedaton	377.6	0	0	0	312.3	65.29	377.59
Kemiling	2133.11	0	0	631.56	816.59	684.96	2133.11
Labuhan Ratu	609.36	0	0	0	609.36	0	609.36
Langkapura	529.57	0	0	71.77	432.7	25.1	529.57
Panjang	1348.42	0	0	0	739.44	608.98	1348.42
Rajabasa	1292.78	0	1.51	246.43	1044.85	0	1292.79
Suka Bumi	2504.56	0	0	183.77	1267.98	1052.8	2504.55
Sukarame	1092.4	0	2.83	95.82	993.75	0.01	1092.41
Tanjung Karang Barat	1154.11	0	0	18.7	280.1	855.32	1154.12
Tanjung Karang Pusat	345.12	0	0	0	140.72	204.4	345.12
Tanjung Karang Timur	206.55	0	0	0	206.55	0	206.55
Tanjung Senang	924.43	0	26.16	80.87	817.4	0	924.43
Teluk Betung Barat	1826.26	0	0	199.62	1114.49	512.16	1826.27
Teluk Betung Selatan	349.25	0	0	0	85.41	263.84	349.25
Teluk Betung Timur	1044.69	0	0	0	99.27	945.42	1044.69
Teluk Betung Utara	437.76	0	0	0	132.97	304.8	437.77
Way Halim	624.95	0	0	21.26	603.69	0	624.95

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Lampung Tahun 2025-2045



Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045

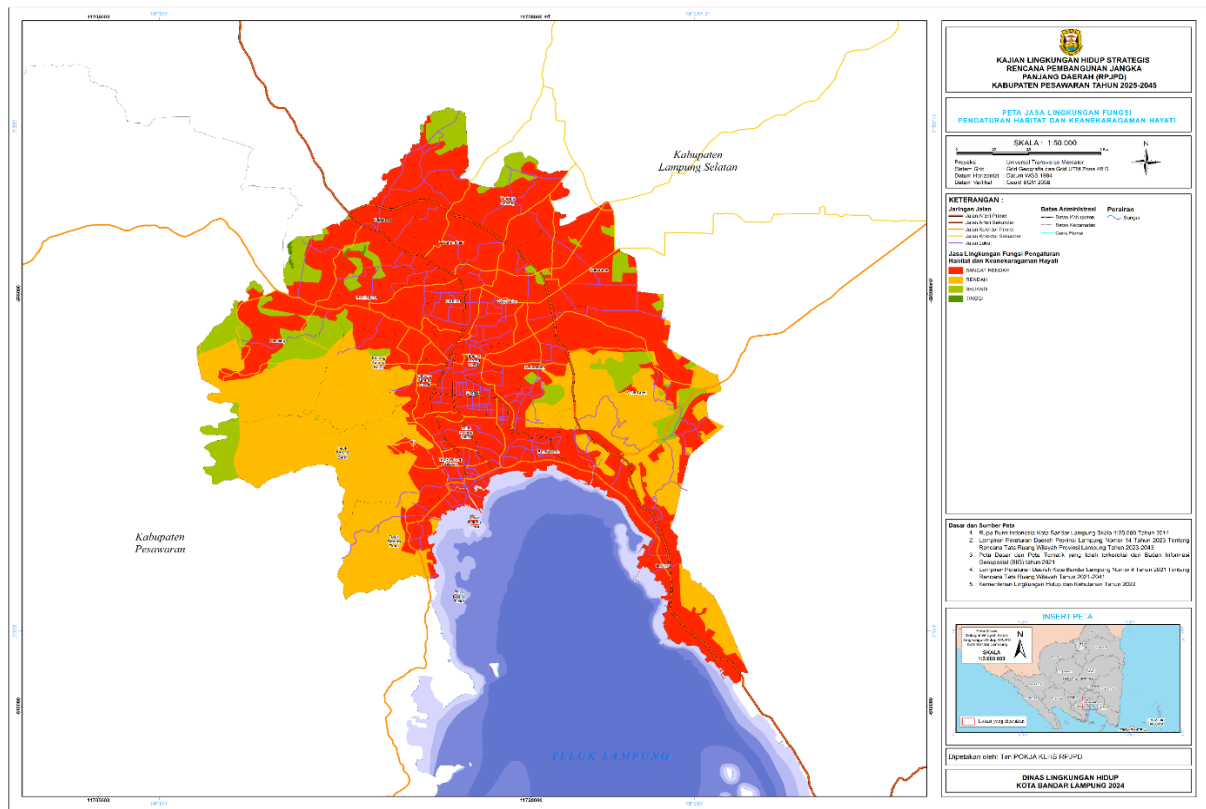
5. Jasa Lingkungan Fungsi Pengaturan Habitat dan Keanekaragaman Hayati

Biodiversitas atau dikenal dengan keanekaragaman hayati adalah keberagaman tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lain yang tumbuh hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Dalam kaitannya dengan jasa ekosistem pendukung biodiversitas, nilai keanekaragaman hayati mencakup tingkat keragaman dan kelimpahan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang ada di dalam wilayah kelola suatu unit pengelolaan atau unit usaha. Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Bandar Lampung didominasi skala sangat rendah 110.439,768 Ha (14,94%) dan disusul dengan skala rendah seluas 556.735,47 Ha (38,7%). Profil distribusi daya dukung lingkungan jasa pendukung Biodiversitas di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 terlihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Jasa Pendukung Biodiversitas

Kecamatan	Luas	KS4					Total
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	
Bumi Waras	448.45	0	0	0	15.4	433.05	448.45
Enggal	278.49	0	0	0	0	278.49	278.49
Kedamaian	834.44	0	0	70.37	161.92	602.15	834.44
Kedaton	377.6	0	0	0	0	377.6	377.6
Kemiling	2133.11	0	9.69	620.66	781.32	721.44	2133.11
Labuhan Ratu	609.36	0	0	0	0	609.36	609.36
Langkapura	529.57	0	0	71.77	13.8	444	529.57
Panjang	1348.42	0	0	0	438.06	910.36	1348.42
Rajabasa	1292.78	0	6.93	241.01	0	1044.85	1292.79
Suka Bumi	2504.56	0	0	283.78	1211.44	1009.34	2504.56
Sukarame	1092.4	0	0	98.64	1.73	992.03	1092.4
Tanjung Karang Barat	1154.11	0	0	18.7	642.36	493.06	1154.12
Tanjung Karang Pusat	345.12	0	0	0	62.56	282.55	345.11
Tanjung Karang Timur	206.55	0	0	0	0	206.55	206.55
Tanjung Senang	924.43	0	0	107.03	0	817.4	924.43
Teluk Betung Barat	1826.26	0	0	201.13	1425.12	200.01	1826.26
Teluk Betung Selatan	349.25	0	0	0	76.77	272.48	349.25
Teluk Betung Timur	1044.69	0	0	0	736.87	307.82	1044.69
Teluk Betung Utara	437.76	0	0	0	0	437.76	437.76
Way Halim	624.95	0	0	21.26	0	603.69	624.95

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045



Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045

2.1.1.6 Kerentanan dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

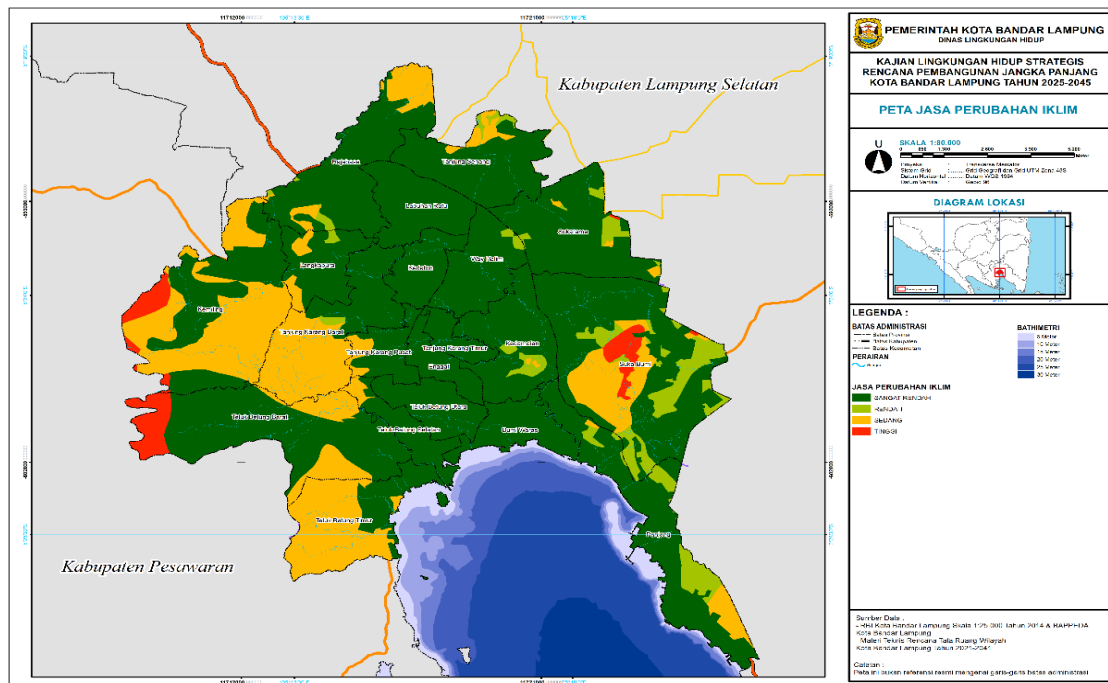
Jasa ekosistem Pengaturan (*regulating*) adalah jasa yang dimiliki oleh ekosistem untuk mengatur kondisi lingkungan. Terdapat 8 (delapan) jenis jasa ekosistem pengatur, yang pertama dan akan dipaparkan dalam pembahasan ini adalah jasa ekosistem pengatur iklim. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Bandar Lampung didominasi skala sangat rendah seluas didominasi skala tinggi seluas 131.691,37 Ha (15,25 %) dan disusul dengan skala sedang seluas 388.424,29 Ha (29,4%). Profil distribusi daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 terlihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Jasa Pengaturan Iklim

Kecamatan	KR1 (Jasa Pengaturan Iklim)										Total
	Sangat Rendah	%	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%	Sangat Tinggi	%	
Bumi Waras	4484519,43	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4484519,43
Enggal	2784867,72	100,00	0	-	0	-	0	-	0	-	2784867,72
Kedamaian	7640734,93	91,57	640996,64	7,68	62654,99	0,75	0	-	0	-	8344386,56
Kedaton	3775977,06	100,00	0	-	0,00	-	0	-	0	-	3775977,06
Kemiling	8590316,5	40,27	12558,69	0,06	11374014,41	53,32	1354240,03	6,35	0	-	21331129,63
Labuhan Ratu	6093601	100,00	0	-	0,00	-	0	-	0	-	6093601,00
Langkapura	4439996,82	83,84	131991,44	2,49	723746,90	13,67	0	-	0	-	5295735,16
Panjang	10349834,26	76,76	1967347,98	14,59	1166969,48	8,65	0	-	0	-	13484151,72
Rajabasa	10448475,15	80,82	251841,15	1,95	2227504,44	17,23	0	-	0	-	12927820,74
Suka Bumi	15407527,24	61,52	3887270,6	15,52	4407207,96	17,60	1343545,26	5,36	0	-	25045551,06
Sukarame	9937539,42	90,97	766401,18	7,02	191751,95	1,76	28287,41	0,26	0	-	10923979,96
Tanjung Karang Barat	4930574,91	42,72	187003,05	1,62	6423569,78	55,66	0	-	0	-	11541147,74
Tanjung Karang Pusat	2825541,49	81,87	0	-	625614,47	18,13	0	-	0	-	3451155,96
Tanjung Karang Timur	2065488,26	100,00	0	-	0,00	-	0	-	0	-	2065488,26
Tanjung Senang	8174013,05	88,42	308317,20	3,34	761946,40	8,24	0	-	0	-	9244276,65
Teluk Betung	13144980,82	71,98	0	-	3121467,62	17,09	1996165,34	10,93	0	-	18262613,78

Kecamatan	KR1 (Jasa Pengaturan Iklim)										Total
	Sangat Rendah	%	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%	Sangat Tinggi	%	
Barat											
Teluk Betung Selatan	3089812,18	88,47	0	-	402670,10	11,53	0	-	0	-	3492482,28
Teluk Betung Timur	3093637	29,61	0	-	7353310,97	70,39	0	-	0	-	10446947,97
Teluk Betung Utara	4377635,8	100,00	0	-	0,00	-	0	-	0	-	4377635,80
Way Halim	6036863,71	96,60	212593,50	3,40	0,00	-	0	-	0	-	6249457,21
Total	131691937	1525	8366321	58	38842429	294	4722238	23	0	0	183622926

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045



Gambar 2.25 Peta jasa Perubahan Iklim

Sumber : KLHS RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045

2.1.1.7 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup (Primak et al 1998 dalam Kuswanda 2009), sedangkan tingkat ketahanan keanekaragaman hayati adalah kemampuan mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Kota Bandar Lampung secara umum memiliki beberapa potensi keanekaragaman hayati, diantaranya kawasan ekosistem mangrove, kawasan lindung, kawasan hutan raya dan kawasan hutan monyet dan Batu Putu yang dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Potensi Keanekaragaman Hayati Kota Bandar Lampung

Potensi Keanekaragaman Hayati	Luas (km²)	Lokasi
Kawasan Batu Putuk, dan Hutan Monyet	0,41	Kecamatan Teluk Betung Barat dan Teluk Betung Utara
Kawasan Ekosistem Mangrove	0,38	Kecamatan Teluk Betung Timur dan Teluk Betung Selatan
Taman Hutan Lindung	1,09	Kecamatan Panjang
Taman Hutan Raya	2,97	Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kemiling

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lokasi dari kawasan Kawasan Batu Putuk, dan Hutan Monyet berada di Kecamatan Teluk Betung Barat dan Teluk Betung Utara dengan luas 0,41 Km², Kawasan Eksosistem Mangrove berada di Kecamatan Teluk Betung Timur dan Teluk Betung Selatan dengan luas 0,38 Km², Kawasan Hutan Lindung berada di Kecamatan Panjang dengan luas 1,09 Km² dan Taman Hutan Raya berada di Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kemiling dengan luas 2,97 Km².

Jenis-jenis flora yang terdapat di kawasan Tahura WAR terutama pada hutan primer antara lain jenis Merawan (*Hopea mangarawan*), Medang (*Litsea firmahoa*), Rasamala (*Altingia excelsa*), Bayur (*Pterospermum sp.*), Jabon (*Antocephalus cadamba*), Cempaka (*Beilschildia sp.*), Pulai (*Alstonia scholaris*), Kenanga (*Cananga odorata*) dan lain-lain, serta jenis Anggrek Hutan dan PakuPakuan. Sedangkan pada hutan sekunder dapat dijumpai jenis Durian (*Durio sp*), Makaranga (*Macaranga gigantea*), Kenanga (*Cananga odorata*), Jabon (*Antocephalus cadamba*), Vitex (*Vitex sp*), Bambu Betung dan lain-lain.

Satwa yang terdapat di kawasan ini dan diperkirakan menghuni di hutan primer seperti Siamang (*Hylobates syndactilus*), Kera (*Macaca fascicularis*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Babi Hutan (*Suscrofa sp*), Ayam

Hutan (*Galus galus*), serta berbagai jenis burung seperti Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus limnaetus*), Rangkong (*Buceros sp*), Punai (*Treron vernans*), Kepondang (*Oriolus chinensis*), Kutilang (*Picnonotus aurigaster*), Murai (*Copsychus malabaricus*) dan Tekukur (*Streptopelia chinensis*). (UPT TAHURA Wan Abdurahrhman, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Kependudukan

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada Tahun 2023, penduduk Bandar Lampung berjumlah 1.100.109 jiwa dengan sex ratio 102,4 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni 186,599 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 3.267 jiwa/km². Data jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin per kecamatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Telukbetung Barat	19.806	18.721	38.527	105,8
Telukbetung Timur	25.730	24.196	49.926	106,3
Telukbetung Selatan	19.903	19.456	39.359	102,3
Bumi Waras	29.896	28.273	58.196	105,7
Panjang	38.173	36.685	74.858	104,1
Tanjung Karang Timur	19.443	19.099	38.542	101,8
Kedamaian	26.962	26.495	53.457	103,3
Telukbetung Utara	25.503	25.084	50.587	103,5
Tanjung Karang Pusat	25.574	24.752	50.326	98,1
Enggal	12.752	13.000	25.752	101,9
Tanjung Karang Barat	31.888	31.306	63.194	101,9
Kemiling	43.551	42.749	86.300	100,7
Langkapura	21.902	21.740	43.372	100,9
Kedaton	26.313	26.075	52.388	102,9
Raja Basa	28.379	27.579	55.958	100,7
Tanjung Senang	31.314	31.088	62.402	100,8
Labuhan Ratu	24.197	24.011	48.208	102,2

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Sukarame	33.928	33.210	67.138	103,3
Sukabumi	37.183	35.995	73.178	100,9
Way Halim	34.384	34.084	68.468	102,5
2023	556.781	543.328	1.100.109	100,82
2022	603.532	581.417	1.209.937	103,80
2021	603.532	581.417	1.184.949	103,80
2020	594.292	571.774	1.166.066	103,90
2019	528.804	522.696	1.051.500	101,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2024

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Budaya

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan agama dan budaya Tahun 2019—2023 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Budaya Tahun 2019--2023

Tahun	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Budaya				
	Islam	Kristen	Budha	Hindu	Konghucu
2019	1.106.026	60.360	15.949	3.387	13
2020	1.111.769	60.590	15.793	3.444	18
2021	1.020.140	54.504	13.971	3.038	24
2022	1.022.449	53.749	13.670	3.038	33
2023	1.029.775	36.200	13.549	3.039	33

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2024 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2024

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019—2023 dapat dilihat pada Tabel 2.22

Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 -- 2023

Tahun	PAUD	SD	SMP	SMA	PT
2019	59.115	161.604	166.154	357.766	141.252
2020	76.941	155.645	164.473	362.151	145.237
2021	76.162	135.788	146.854	323.259	132.121
2022	80.006	132.290	144.614	322.059	135.467
2023	68.022	131.694	144.919	324.628	137.069

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2024

4. Kepadatan Penduduk Kota Bandar Lampung

Data kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung per Kecamatan Tahun 2021—2023 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2. 23 Kepadatan Penduduk Tahun 2021-2023

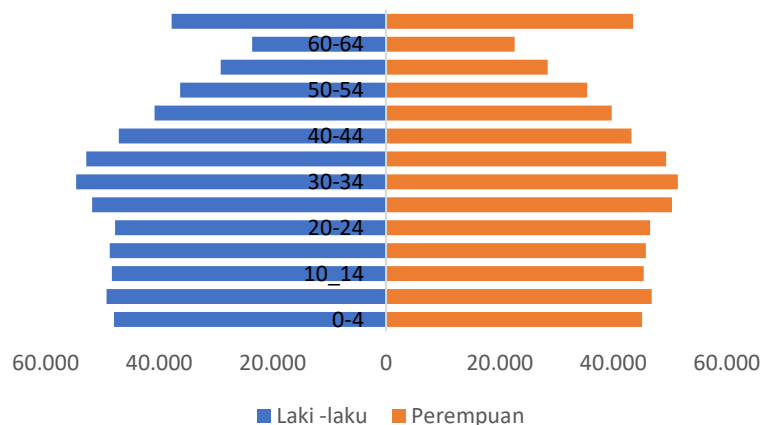
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Telukbetung Barat	41,761	42642	38527	3.279	3.790	2.110
Telukbetung Timur	54,746	55901	49926	3.633	3.692	4.805
Telukbetung Selatan	43,564	44483	39359	11.311	11.494	11.278
Bumi Waras	64,189	65542	58196	16.844	17.117	12.869
Panjang	82,120	83851	74858	5.131	5.214	5.488
Tanjung Karang Timur	43,774	44697	38542	21.220	21.564	18.619
Kedamaian	58,843	60084	53457	7.053	7.167	6.410
Telukbetung Utara	54,419	55567	50587	12.368	12.568	11.550
Tanjung Karang Pusat	56,831	58029	50326	13.809	14.032	14.379
Enggal	29,113	29727	25752	8.209	8.342	9.263
Tanjung Karang Barat	66,616	68020	63194	4.373	4.444	5.476
Kemiling	90,007	91907	86300	3.654	3.713	4.046
Langkapura	44,275	45208	43372	7.119	7.234	8.183
Kedaton	58,264	59493	52388	11.970	12.164	13.896
Rajabasa	58,522	59756	55958	4.256	4.325	4.328
Tanjung Senang	63,175	64507	62402	5.848	5.943	6.753
Labuhan Ratu	53,241	54364	48208	6.574	6.680	7.903
Sukarame	68,822	70273	67138	4.592	4.666	6.148
Sukabumi	77099	78724	73178	3.215	3.267	2.922
Way Halim	75568	77167	68468	13.900	14.125	10.955
	1.184.949	1.209.937	1.100.109	5.913	6.008	5.986

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Data tersebut menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan peningkatan angka kepadatan penduduk yang mendiami wilayah administratif Kota Bandar Lampung. Hal tersebut terjadi sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung serta perpindahan penduduk baik antarwilayah di dalam Kota Bandar Lampung maupun dari luar Kota Bandar Lampung yang masuk ke Kota Bandar Lampung.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung menurun pada tahun terakhir di tahun 2023 yaitu dengan nilai 5.986 jiwa/km². Hal tersebut dapat menjadi peluang, dan pekerjaan dalam mendesain perencanaan Pembangunan dan tata ruang yang lebih baik untuk bisa menjadi daerah yang mandiri dan berdaya saing. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan ketersediaan layanan. Sehingga perlu ada perhitungan yang mendetail untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat mengingat penduduk terus tumbuh. Namun hal seperti migrasi out juga perlu ditangani dikawatirkan Kota Bandar Lampung tidak menyediakan ruang yagn baik untuk mereka dapat hidup didalamnya dengan aman dan nyaman.

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur



Gambar 2.26 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak yaitu pada skala umur 30 sampai 34 tahun dengan jumlah laki-laki sebanyak 54.645 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 51.447

jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk yang paling rendah yaitu pada skala umur 60-64 tahun dengan jumlah laki-laki sebanyak 23.607 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 22.699 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya jumlah penduduk didominasi oleh kelompok umur belum produktif diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi yang ada di Kota Bandar Lampung

2.1.2.2 Modal Manusia

Pengembangan modal manusia mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan atribut lain yang berkontribusi terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dalam pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan sosial, daerah dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakatnya. Investasi dalam modal manusia tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan, menjadikan modal manusia sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah jangka panjang.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. 24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019--2023

Tahun	Paud	SD	SMP	SMA	PT
2019	59.115	161.604	166.154	357.766	141.252
2020	76.941	155.645	164.473	362.151	145.237
2021	76.162	135.788	146.854	323.259	132.121
2022	80.006	132.290	144.614	322.059	135.467
2023	68.022	131.694	144.919	324.628	137.069

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2024

2. Angkatan Kerja

Data ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung Tahun 2019--2023 dapat dilihat pada Tabel 2.25.

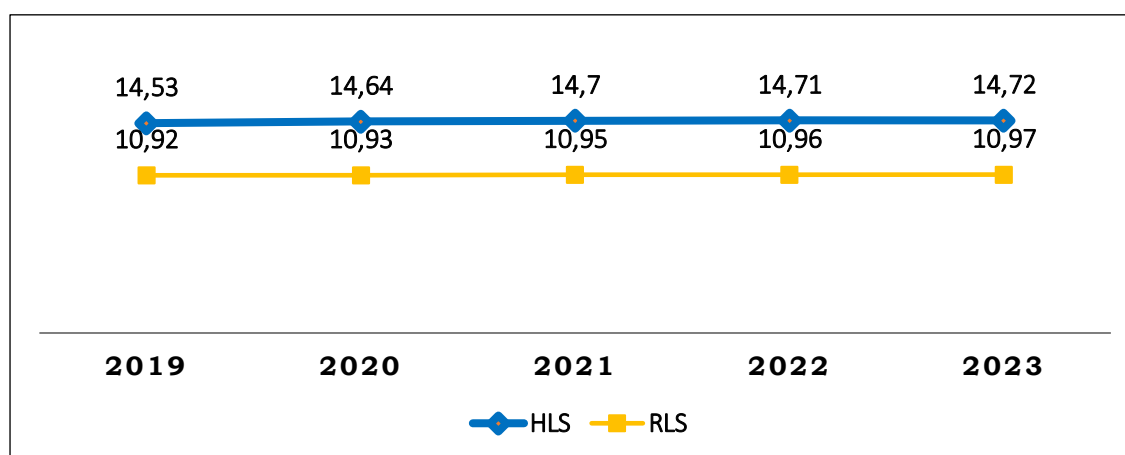
Tabel 2. 25 Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2019-2023

Tahun	Angkatan Kerja	Penduduk yang Bekerja	Pengangguran Terbuka	Rasio Kesempatan Kerja
2019	511.686	475.244	36.442	92,9
2020	554.224	505.483	48.741	91,2
2021	560.107	510.511	49.596	91,1
2022	567.038	522.166	44.872	92,1
2023	608.299	563.037	45.192	92,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2024

3. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 (tujuh) tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Data Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.27.



Gambar 2.27 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2024

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan Harapan Lama Sekolah pada periode 2019-2023 mencapai 14,66 per tahun. Berdasarkan data tersebut, terjadi perkembangan yang positif dimana terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah dibanding tahun

sebelumnya. Kesadaran akan pentingnya pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta program dan kebijakan pemerintah yang mempermudah akses pendidikan menjadi pendorong utama semakin baiknya nilai angka rata-rata lama sekolah.

4. Balita yang mendapatkan Imunisasi

Data yang menunjukkan jumlah pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2. 26 Rasio Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Posyandu	704	704	704	705	705
Jumlah Balita	90.994	90.461	86.268	86.512	86.858
Rasio	129	123	123	123	123

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Berdasarkan data di atas rasio pos pelayanan terpadu tahun 2019 lebih tinggi dengan nilai 129, yang mana menunjukkan bahwa posyandu pada tahun tersebut melayani lebih banyak balita per posyandu dibandingkan dengan periode 2020 hingga 2023 dengan nilai 123. Penurunan rasio ini bisa menunjukkan peningkatan jumlah posyandu atau penurunan jumlah balita yang membutuhkan layanan, yang keduanya bisa dianggap sebagai perkembangan positif dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Apabila dibandingkan dengan rasio ideal secara nasional dimana 1 posyandu melayani 50 balita, menunjukan Kota Bandar Lampung masih kekurangan Posyandu guna melayani balita yang ada.

Tabel 2.27 Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Tahun 2019 2023 (persen)

Tahun	Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi
2019	96,90
2020	89,16
2021	92,90
2022	96,80
2023	95,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Dari Tabel 2.27 di atas terlihat bahwa cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kota Bandar Lampung berada di angka 95,60 persen di tahun 2023. SDGs bertujuan untuk mengurangi angka stunting sebesar 40 persen pada tahun 2030, dibandingkan dengan angka awal pada tahun 2012. Tujuan Indonesia sendiri adalah menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024, dengan fokus pada kesehatan dan gizi. Kerjasama multisektoral juga dilakukan untuk mengatasi akar penyebab stunting: kemiskinan, infrastruktur pendidikan dan Kesehatan. Melalui kerja sama berbagai sektor diharapkan tujuan SDG dapat cepat tercapai sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia khususnya anak-anak.

5. Persentase Balita Gizi Buruk/Stunting

Masa baduta (bawah dua tahun) merupakan “*Window of Opportunity*”. Pada masa ini, seorang anak memerlukan asupan zat gizi yang seimbang baik dari segi jumlah maupun proporsinya untuk mencapai berat dan tinggi badan yang optimal.

Masalah baduta pendek dan sangat pendek (*stunting*) menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/baduta, termasuk penyakit yang diderita selama masa baduta. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan.

Tabel dibawah ini menunjukkan prevalensi *stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung. Data Tahun 2019 diperoleh berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan Bulan Maret Tahun 2019, sedangkan untuk Tahun 2019-2022 data diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berdasarkan data penimbangan langsung di Posyandu dan data tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Tabel 2.28 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023

Prevalensi Stunting pada Anak Baduta	2019	2020	2021	2022	2023
Bandar Lampung	-	-	19,40	11,10	13,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Berdasarkan data di atas prevalensi stunting pada anak baduta meningkat dengan nilai 13,40%. Adapun upaya menurunkan target *prevalensi* stunting di Kota Bandar Lampung juga selaras dengan kebijakan Provinsi Lampung dan Nasional yang sangat fokus dalam menurunkan angka *stunting* yang ada, hal ini sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMN. Berikut data Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak Balita (Bawah Lima Tahun) pada level Provinsi dan Nasional. Data Tahun 2019 diperoleh berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan RI Bulan Maret Tahun 2019, sedangkan data Tahun 2019-2022 berdasarkan data hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).

Tabel 2.29 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Tahun 2019-2023

Prevalensi Stunting pada Anak Balita	2019	2020	2021	2021	2023
Provinsi Lampung	26,26	26,26	18,50	15,20	14,90
Nasional	30,88	27,67	26,92	24,40	17,80

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2024

6. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. *Underweight*/Berat Badan Kurang/Gizi Kurang adalah gabungan dari gizi buruk. Anak Balita rentan untuk menjadi gizi buruk karena balita merupakan anak yang dalam masa tumbuh Kembang, sehingga masa balita merupakan masa kehidupan yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang serius. Oleh karena itu, masalah kekurangan gizi pada anak balita masih memerlukan perhatian untuk penanganannya.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan Bulan Maret Tahun 2019, data Prevalensi kekurangan gizi

(*underweight*) pada anak balita pada level Nasional, Provinsi dan di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel berikut ini. Sedangkan untuk Tahun 2019–2023 data prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita diperoleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berdasarkan data penimbangan langsung di Posyandu :

Tabel 2. 30 Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita Tahun 2019-2023

Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita	2019	2020	2021	2022	2023
Bandar Lampung	3,08	5,77	4,09	1,56	6,5
Provinsi Lampung	15,94	14,6	14,6	14,8	10,6
Nasional	16,3	15	17	17,1	14,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

7. Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk

Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk Tahun 2019-2023:

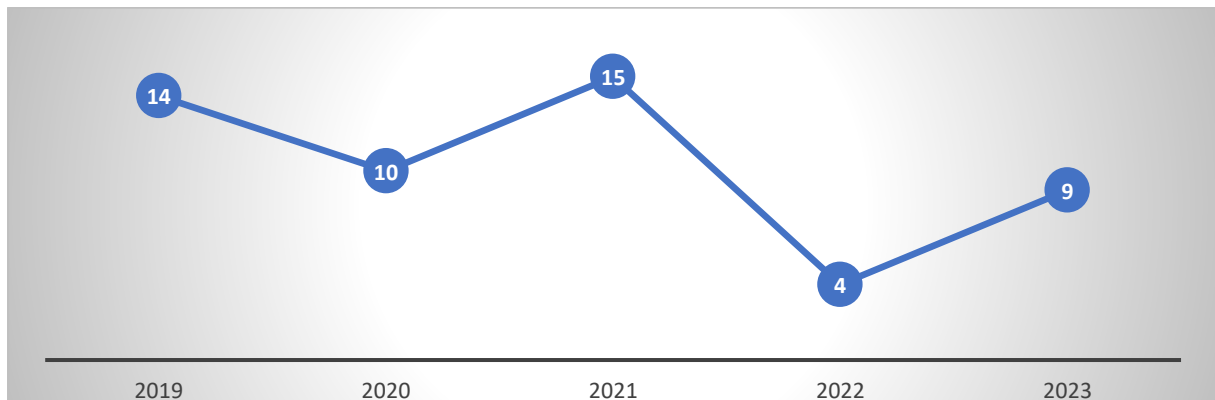
Tabel 2. 31 Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk Tahun 2019-2023

Kasus	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka kematian Ibu melahirkan (Kasus)	14	10	15	4	5
Angka kematian bayi dan balita (Kasus)	36	34	60	69	91
Gizi buruk (Kasus)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 di Kota Bandar Lampung tidak terdapat kasus gizi buruk, hal ini disebabkan karena semua balita yang mengalami gizi buruk dilakukan pemantauan, pengobatan jika ada penyakit penyerta dan pemberian makanan tambahan oleh Puskesmas setempat. Pemantauan dilakukan terhadap status gizi anak sehingga apabila ada kecenderungan anak mengalami kekurangan gizi dapat segera diatasi dan tidak sampai menimbulkan gizi buruk. Kriteria gizi buruk ini didasarkan pada grafik pertumbuhan anak dari Kementerian Kesehatan dengan indikator berat badan menurut tinggi badan. Seorang anak dikatakan gizi buruk apabila kondisi berat badan menurut tinggi badan berada pada posisi garis/kurva dibawah -3 *standar deviasi* (SD).

8. Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2019-2023

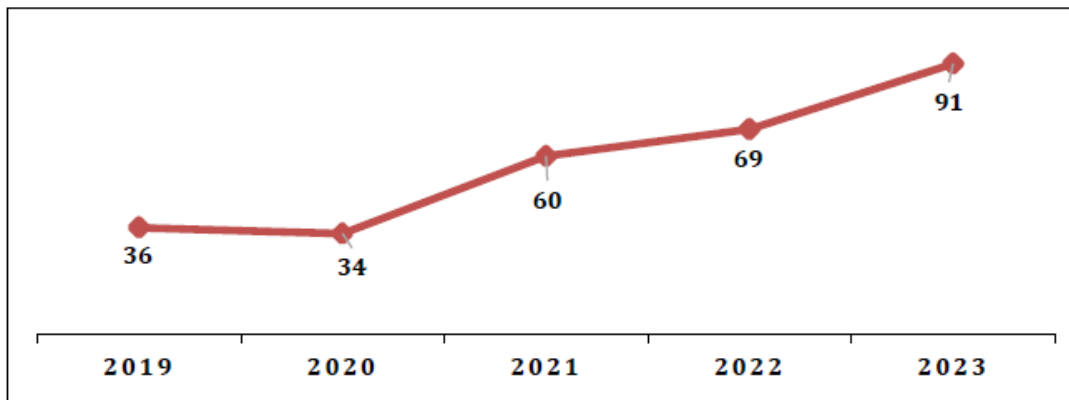


Gambar 2.28 Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2019--2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Kondisi Maternal tergambarkan dari besarnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 angka kematian ibu di Kota Bandar Lampung berjumlah 10 kasus (2 per 100.000 kelahiran hidup). Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu melahirkan naik menjadi 15 kasus (3 per 100.000 kelahiran hidup). Jumlah kelahiran hidup tahun 2021 berjumlah 18.066 orang. Kenaikan jumlah kasus kematian ibu ini dikarenakan komplikasi Covid-19 dimana pada tahun 2021 jumlah kasus Covid-19 meningkat. Kondisi ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya, cakupan kunjungan ibu hamil belum optimal, status gizi yang masih rendah. Kondisi pandemi Covid-19 juga berperan dalam peningkatan kasus kematian ibu melahirkan. Pembatasan aktifitas dalam upaya penurunan kasus kematian ibu. seperti pertemuan peningkatan kapasitas petugas kesehatan, koordinasi lintas sektor dan kegiatan pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat dilakukan secara langsung/tatap muka dibatasi untuk dilakukan karena untuk mencegah penularan Covid-19 di masyarakat. Seiring penurunan kasus Covid-19, kasus kematian ibu melahirkan menurun signifikan di tahun 2022.

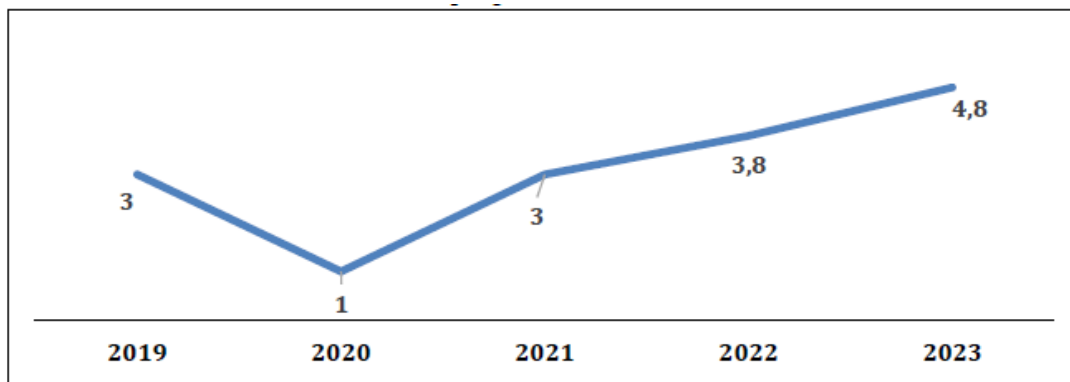
9. Kasus Kematian Bayi dan Balita Tahun 2019-2023



Gambar 2.29 Kasus Kematian Bayi dan Balita Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2019-2023



Gambar 2. 30 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Angka kematian bayi dan balita di Kota Bandar Lampung dari tahun 2021 cenderung meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2020). Angka kematian bayi dan balita per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2020 berjumlah 34 kasus (1 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup). Namun di tahun 2021 jumlah kasus kematian bayi dan balita kembali meningkat menjadi 60 kasus (3 per 1.000 kelahiran hidup) dan meningkat lagi di tahun 2022 sebanyak 4 per kelahiran hidup dan meningkat ditahun 2023 sebanyak 5 per kelahiran hidup. Kenaikan kasus ini tentunya menjadi perhatian dan memerlukan upaya untuk penanggulangannya. Kenaikan

kasus kematian bayi dan balita ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih rendahnya pemberian asi eksklusif, kualitas kesehatan lingkungan belum optimal, cakupan air bersih dan air minum yang masih rendah. Kondisi ini diperburuk lagi dengan *Pandemi Covid-19*. Banyaknya pembatasan kegiatan pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat dilakukan secara langsung tatap muka namun tidak dapat dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah lebih lagi penularan kasus *Covid-19* di masyarakat.

10. Cakupan Pelayanan Demam Berdarah dan Malaria

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah kasus demam berdarah dan malaria Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 32 Jumlah Kasus Demam Berdarah dan Malaria Tahun 2019-2023

Tahun	Kasus Demam Berdarah	Kasus Malaria
2019	1.198	379
2020	1.048	80
2021	623	98
2022	1.440	250
2023	202	218

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Jumlah kasus demam berdarah di Kota Bandar Lampung masih cukup tinggi, per tahunnya jumlah kasus meningkat sebanyak kurang lebih 500 kasus. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencegahan terhadap sumber penyakit yaitu nyamuk *Aedes Aegypti*. Pelaksanaan *fogging* atau pemberian pencegahan petumbuhan jentik nyamuk kepada masyarakat lebih ditingkatkan. Edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat juga perlu lebih ditingkatkan.

Pengendalian Penyakit Menular yang termasuk dalam komitmen global seperti malaria juga telah menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. *Annual Parasite Incidence* (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 2.33 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2019-2023 (persen)

Tahun	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
2019	97
2020	95
2021	100
2022	100
2023	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

11.Cakupan Pelayanan Tuberculosis

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah kasus penyakit Tuberculosis Tahun 2019-2023

Tabel 2.34 Jumlah Kasus Penyakit Tuberculosis Kota Bandar Lampung Tahun 2019--2023

Tahun	Kasus Tuberkulosis
2019	3.349
2020	2.240
2021	2.252
2022	3.849
2023	5.206

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Data tersebut menunjukkan fluktuasi kasus penyakit Tuberculosis dalam 5 Tahun terakhir. Kedepannya diperlukan peningkatan upaya pencegahan dengan sosialisasi pentingnya melakukan vaksinasi Tuberculosis untuk meningkatkan imun tubuh sehingga meminimalisir tertularnya penyakit Tuberculosis dan menghindari kontak fisik langsung dengan penderita Tuberculosis.

Tabel 2. 35 Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR) Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023

Tahun	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR)
2019	331
2020	211
2021	207
2022	347
2023	258

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

12. Cakupan Pelayanan Pengendalian HIV dan AIDS

Berikut adalah data yang menunjukkan prevalensi kasus HIV Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 36 Jumlah Kasus Prevalensi Kasus HIV Kota Bandar Lampung Tahun 2019--2023

Tahun	Prevalensi Kasus HIV pada Penduduk Usia 15-49
2019	283
2020	257
2021	213
2022	272
2023	167

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Data tersebut menunjukkan jumlah prevalensi penyakit HIV dan AIDS di Kota Bandar Lampung masih cukup tinggi. Hal ini diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan dengan sosialisasi perilaku seks yang bersih dan sehat. Sosialisasi tentang bahaya seks bebas dan penyalahgunaan narkoba harus terus digalakkan. Potensi yang dimiliki Kota Bandar Lampung dalam pengendalian HIV-AIDS diantaranya adalah telah memiliki persiapan yang cukup baik, mencakup tata laksana penanganan pasien, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, dan laboratorium kesehatan.

13. Penderita Diare yang ditangani

Penderita diare yang ditangani mencapai 20 ribu jiwa, data yang naik turun di tiga tahun terakhir, hal ini menunjukkan terjadi kenaikan dan penurunan jumlah kasus diare dengan rata-rata 20.555 penderita diare setiap

tahunnya. Hal ini dipengaruhi juga dengan peningkatan kualitas lingkungan dan ketersediaan layanan kesehatan juga layanan pada akses air bersih dan sanitasi misalnya, kasus/penderita diare dapat menjadi indikasi dalam menilai sektor lainnya sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif.

Tabel 2. 37 Penderita Diare yang Ditangani di Kota Bandar Lampung Tahun 2019--2023

2019	2020	2021	2022	2023
22.304	16.989	12.371	14.702	18.968

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

14. Angka Kejadian Malaria

Angka kejadian malaria dari tahun 2021 hingga 2023, mengalami fluktuatif. Tahun 2021 mencatat jumlah kasus yang paling rendah, diikuti dengan lonjakan signifikan pada tahun 2022, dan sedikit penurunan pada tahun 2023. Untuk ke depannya, diperlukan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pencegahan dan pengendalian malaria guna mengurangi angka kejadian serta melindungi kesehatan masyarakat di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi terkait angka kejadian malaria perlu dilakukan secara teliti untuk dapat mengentaskan persoalan yang mulai meningkat lagi.

Tabel 2. 38 Angka Kejadian Malaria di Kota Bandar Lampung Tahun 2021--2023

2019	2020	2021	2022	2023
376	80	146	250	222

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat mencakup pendapatan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Analisis aspek-aspek ini membantu pemerintah mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas hidup warganya. Analisis kesejahteraan masyarakat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pengukuran ketidaksetaraan dan partisipasi sosial juga menjadi bagian integral dalam pemahaman kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan, aspek

kesejahteraan masyarakat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan manfaat bagi seluruh populasi.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung tahun 2021-2023 menunjukkan tanda pemulihan, bangkit dari masa krisis yang melanda ekonomi dunia. Perlahan namun pasti, ekonomi Bandar Lampung merangkak naik. Hal ini terlihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (harga berlaku maupun harga konstan) yang terus mengalami peningkatan.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 74.103,68 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 6.222,01 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang bernilai 67.881,67 miliar rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan produksi di beberapa kategori dan inflasi di tahun berjalan.

Tabel 2. 39 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.180,13	2.213,98	2.280,54	2.383,27	2.541,71
B	Pertambangan dan Penggalian	1.976,42	2.096,37	2.040,72	2.156,32	2.295,26
C	Industri Pengolahan	12.594,05	12.268,10	12.973,36	13.565,90	13.867,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	65,47	68,53	71,68	76,59	78,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	158,99	168,09	181,28	194,68	200,84
F	Konstruksi	6.482,85	6.466,41	7.021,00	7.649,96	8.166,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.547,72	7.853,15	8.487,47	10.102,15	11.141,33
H	Transportasi dan Pergudangan	8.016,24	7.821,85	8.085,73	10.343,05	13.252,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.714,61	1.515,81	1.531,97	1.762,22	1.987,19
J	Informasi dan Komunikasi	3.491,19	3.782,84	3.899,90	3.954,49	4.222,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.943,19	3.011,42	3.138,45	3.256,83	3.375,56
L	Real Estate	3.533,27	3.550,98	3.616,49	3.807,13	3.928,01
M,N	Jasa Perusahaan	211,44	208,75	210,78	251,55	267,62

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.262,63	3.482,25	3.535,94	3.590,25	3.649,54
P	Jasa Pendidikan	1.893,30	2.156,16	2.196,50	2.319,01	2.398,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.101,78	1.238,32	1.294,52	1.344,29	1.400,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.030,68	967,14	959,19	1.123,98	1.329,67
Produk Domestik Regional Bruto		59.203,98	58.869,44	61.480,56	67.881,67	74.103,68

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, angka PDRB pada tahun 2021-2023 juga mengalami kenaikan, dari 39.838,17 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 41.801,13 miliar rupiah pada tahun 2022 kemudian terus meningkat menjadi 43.887,42 miliar rupiah pada tahun 2023. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh kenaikan produksi pada beberapa kategori dan tidak dipengaruhi inflasi. Hal ini menunjukkan tahun 2021-2023 Kota Bandar Lampung mengalami pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.40 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.504,75	1.494,25	1.492,51	1.493,48	1.515,20
B	Pertambangan dan Penggalian	1.083,46	1.130,89	1.080,83	1.090,46	1.121,44
C	Industri Pengolahan	8.031,86	7.682,01	8.003,80	8.056,83	8.133,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	59,71	62,83	63,00	66,93	68,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	103,74	109,23	116,65	122,34	124,08
F	Konstruksi	4.419,90	4.420,18	4.599,36	4.755,95	4.943,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.939,61	5.345,72	5.715,90	6.281,42	6.626,89
H	Transportasi dan Pergudangan	5.278,98	5.054,29	5.166,28	6.078,43	7.026,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.006,81	882,20	886,22	997,09	1.106,40
J	Informasi dan Komunikasi	2.882,79	3.135,21	3.297,93	3.316,80	3.493,72
K	Jasa Keuangan dan	1.809,59	1.848,43	1.848,79	1.804,54	1.828,91

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
	Asuransi					
L	Real Estate	2.447,96	2.416,13	2.425,76	2.497,01	2.504,66
M,N	Jasa Perusahaan	135,77	131,75	132,01	148,87	155,15
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.995,38	2.099,07	2.140,42	2.111,52	2.120,41
P	Jasa Pendidikan	1.212,33	1.303,22	1.319,98	1.350,26	1.378,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	755,09	839,86	862,53	862,47	872,69
R,S,T,U	Jasa Lainnya	705,50	676,94	666,11	766,73	868,56
Produk Domestik Regional Bruto		39.373,24	38.632,20	39.838,17	41.801,13	43.887,42

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Nilai PDRB dari sisi Pengeluaran Kota Bandar Lampung (ADHB) juga menunjukkan angka perbaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2023. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2023 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandar Lampung menurut jenis pengeluaran mencapai 74.103,68 miliar rupiah. Kondisi tersebut meningkat bila dibandingkan Tahun 2022 sebesar 67.881,67 miliar rupiah.

Tabel 2. 41 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	35.903,29	36.128,24	37.527,62	41.368,85	45.326,52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.031,56	1.000,94	1.064,17	1.130,00	1.313,51
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11.192,05	11.247,32	11.437,66	11.061,68	11.534,58
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19.237,81	19.053,61	21.011,54	22.487,47	24.165,19
Perubahan Inventori	12,95	188,37	179,95	225,32	657,49
Net Ekspor Barang dan Jasa	-8.173,69	-8.748,34	-9.708,19	-8.391,65	-8.893,61
Produk Domestik Regional Bruto	59.203,98	58.869,44	61.480,56	67.881,67	74.103,68

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau hanya secara kuantitas (tanpa ada pengaruh perubahan harga). Gambaran tentang perkembangan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 42 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	23.983,86	23.662,33	24.081,75	25.251,10	26.481,97
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	605,30	578,06	594,99	606,12	676,35
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.141,89	7.022,47	7.038,98	6.683,51	6.822,72
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	12.926,95	12.477,99	13.176,11	13.501,53	14.032,87
Perubahan Inventori	-74,01	18,76	-145,89	-174,57	28,77
Net Ekspor Barang dan Jasa	-5.210,74	-5.127,41	-4.915,57	-4.066,57	-4.155,26
Produk Domestik Regional Bruto	39.373,24	38.632,20	39.838,17	41.801,13	43.887,42

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Angka pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan data laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha. Untuk menghitung laju pertumbuhan riil dalam satu kurun waktu, lazimnya digunakan tahun dasar yang sama dan menggunakan penghitungan tanpa migas. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun pertumbuhan sektor lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Bandar Lampung tumbuh cukup bervariasi. Berikut adalah data yang menunjukkan laju pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 43 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,04	-0,70	-0,51	0,46	1,45
Pertambangan dan Penggalian	5,51	4,38	-5,05	1,55	2,84
Industri Pengolahan	6,95	-4,36	4,20	0,65	0,95
Pengadaan Listrik dan Gas	6,51	5,23	1,22	5,23	1,61
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,43	5,29	7,90	3,81	1,43
Konstruksi	5,56	0,01	3,49	3,97	3,95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,09	-10,00	8,42	8,38	5,50
Transportasi dan Pergudangan	6,94	-4,26	2,00	17,91	15,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,56	-12,38	0,01	13,01	10,96
Informasi dan Komunikasi	8,01	8,76	5,00	0,76	5,33
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,23	2,15	0,10	-2,47	1,35
Real Estat	5,83	-1,30	0,40	2,94	0,31
Jasa Perusahaan	4,41	-2,96	0,20	12,77	4,22
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,79	5,20	1,97	-,135	0,42
Jasa Pendidikan	7,73	7,50	0,98	2,60	2,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,02	11,23	2,88	-0,18	1,19
Jasa lainnya	7,84	-4,05	-2,04	15,63	13,28
Produk Domestik Regional Bruto	6,17	-1,88	3,12	4,93	4,99

*) Angka sementara

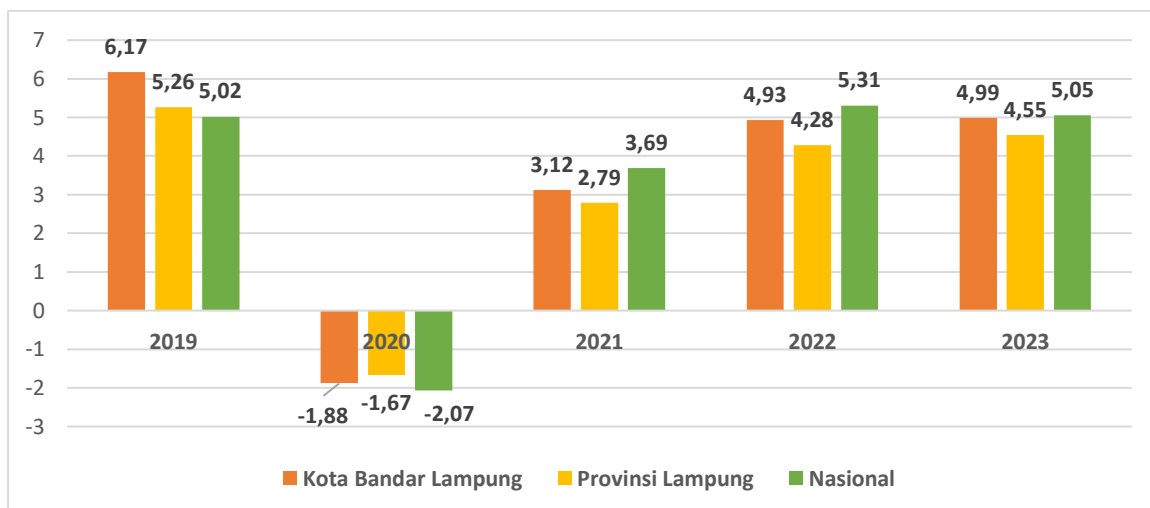
**) Angka sangat sementara

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung sebesar 4,99 persen dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha/kategori transportasi dan pergudangan yakni sebesar 15,59 persen. Dari 17 (tujuh belas) kategori/lapangan usaha, seluruhnya mengalami pertumbuhan positif dengan tiga kategori/lapangan usaha yang nilai pertumbuhannya diatas 10 persen.

Selama kurun waktu Tahun 2019 perekonomian Bandar Lampung mampu tumbuh stabil di kisaran 6 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional.

Namun pada Tahun 2020, perekonomian Bandar Lampung berkontraksi sebesar 1,88% (yoy) yang dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan hampir di semua kategori lapangan usaha. Pada Tahun 2021 ekonomi Kota Bandar Lampung mampu bangkit kembali dan tumbuh mencapai angka 3,12 persen dan terus meningkat pada tahun 2022 yakni sebesar 4,93 persen. Selanjutnya pada tahun 2023 ekonomi Kota Bandar Lampung mampu tumbuh sebesar 4,99 %. Pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023 ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 2.31 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023 (Persen)

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2024

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah salah satu komponen penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan investasi dalam perekonomian suatu daerah. Berdasarkan data PMTB pada distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran dari tahun 2019 hingga 2023 PMTB menunjukkan trend yang relatif stabil dengan beberapa fluktuasi.

Tabel 2. 44 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,64	61,37	61,10	60,94	61,17
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,74	1,70	1,73	1,66	1,77
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,90	19,11	18,65	16,30	15,57
Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,49	32,37	34,00	33,13	32,61
Perubahan Inventori	0,02	0,32	0,29	0,33	0,89
Net Ekspor Barang dan Jasa	-13,81	-14,87	-15,77	-12,36	-12,00
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

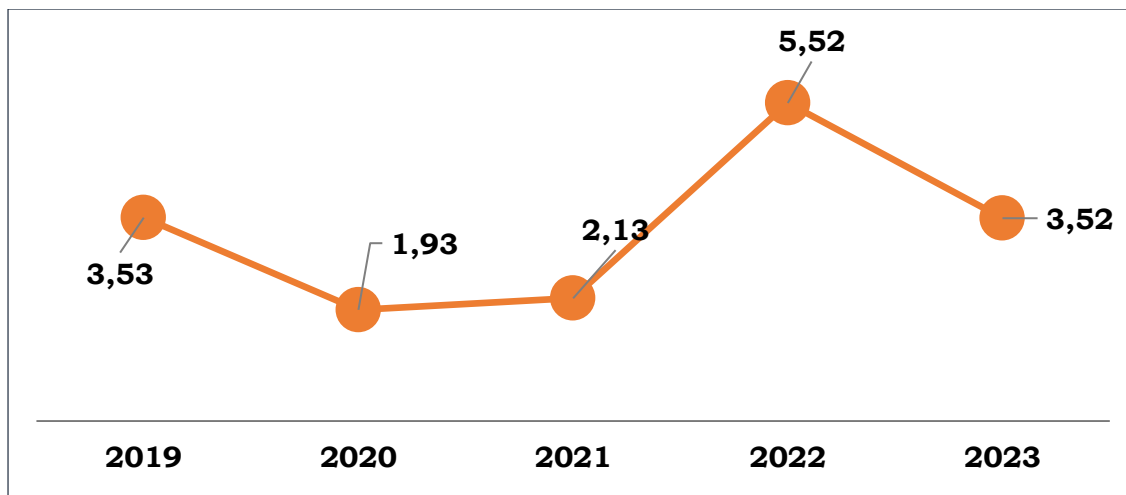
Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Perubahan PMTB dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika investasi di daerah tersebut. Meskipun ada penurunan pada tahun 2020 karena pandemi, PMTB kembali meningkat pada tahun 2021 dan tetap stabil dalam dua tahun berikutnya. Ini mencerminkan komitmen yang kuat terhadap investasi infrastruktur dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka Panjang.

Dari data Net Ekspor Barang dan Jasa pada distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran dari tahun 2019 hingga 2023 di atas menunjukkan bahwa terdapat trend defisit neraca perdagangan dari tahun 2019 hingga 2023, namun dengan peningkatan dan penurunan yang signifikan di tengah-tengah periode. Pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena dampak pandemi covid-19, namun pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan perbaikan dengan penurunan defisit, menandakan adanya pemulihan dalam sektor perdagangan barang dan jasa.

3. Laju Inflasi

Berikut adalah data yang menunjukkan laju inflasi Tahun 2019 –2023:



Gambar 2.32 Laju Inflasi Tahun 2019-2023 (Persen)

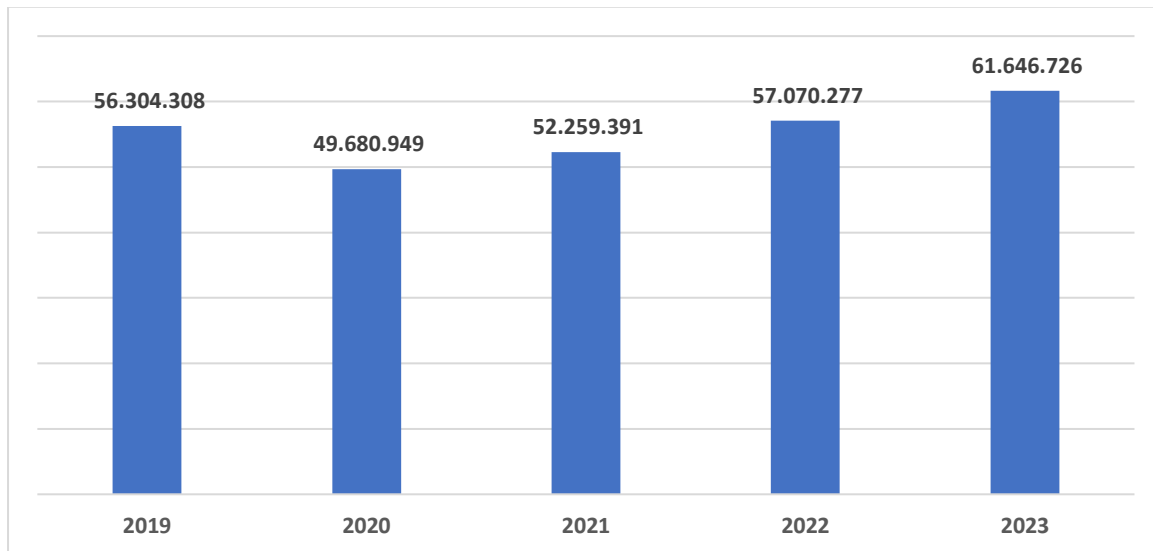
Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Perkembangan inflasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cukup fluktuatif. pada tahun 2019, inflasi Kota Bandar Lampung sebesar 3,53 persen. Dalam perkembangannya, pada Tahun 2020 inflasi Kota Bandar Lampung sebesar 1,93 persen. Laju inflasi tahun 2020 yang cukup rendah tersebut dikarenakan terbatasnya/tertahannya permintaan pada tahun 2020 akibat Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2021 inflasi Kota Bandar Lampung sebesar 2,13 persen. Kemudian pada tahun 2022 inflasi Kota Bandar Lampung cukup besar hingga mencapai 5,52 persen. Tingginya angka inflasi tahun 2022 tersebut merupakan akibat tekanan eksternal dan domestik. Tekanan eksternal yakni dampak dari meningkatnya ketegangan geo politik dunia yang kemudian memicu gangguan rantai pasokan global dan mengakibatkan naiknya harga energi dan pangan global. Namun demikian pada tahun 2023 inflasi Kota Bandar Lampung kembali berada pada angka kisaran 3 ± 1 persen yakni sebesar 3,52 persen. Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

4. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah

penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2023 PDRB Per Kapita tercatat sebesar Rp61.646.726,06. Berikut adalah data yang menunjukkan PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023:



Gambar 2.33 PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Tabel 2. 45 PDRB Per Kapita Tahun 2019–2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Miliar Rupiah)	59.203,98	58.869,44	61.480,56	67.881,67	74.103,68
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rupiah)	56.304.308	49.680.948	52.259.390	57.070.276	61.646.726

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Tabel 2. 46 PDRB Per Kapita Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah/Tahun)

PDRB Per Kapita	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bandar Lampung	56,30	49,68	52,25	57,07	61,64
Propinsi Lampung	42,17	39,29	40,81	44,98	48,19
Nasional	59,32	57,27	62,26	71,04	74,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan data tersebut, PDRB Per Kapita Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada diatas PDRB Per Kapita Provinsi Lampung, namun masih dibawah PDRB Per Kapita Nasional.

5. Indeks Gini (Rasio Gini)

Rasio gini merupakan merupakan salah satu ukuran untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1. Rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Berikut adalah data yang menunjukkan Rasio Gini Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 47 Rasio Gini Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Gini
2019	0,316
2020	0,359
2021	0,344
2022	0,369
2023	0,381

Sumber : Badan Pusat Ststistik Provinsi Lampung, 2024

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan rasio gini menjadi sebesar 0,381 dibandingkan dengan rasio gini tahun 2022 sebesar 0,369. Peningkatan Angka

rasio gini ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Bandar Lampung berada pada tingkat ketimpangan yang semakin meningkat sehingga perlu mendapat perhatian.

Tabel 2.48 Rasio Gini Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023

Rasio Gini	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bandar Lampung	0,316	0,359	0,343	0,369	0,381
Provinsi Lampung	0,331	0,320	0,323	0,313	0,324
Nasional	0,380	0,385	0,384	0,381	0,388

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data tersebut, angka Rasio Gini Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada diatas angka Provinsi Lampung, namun masih dibawah angka nasional.

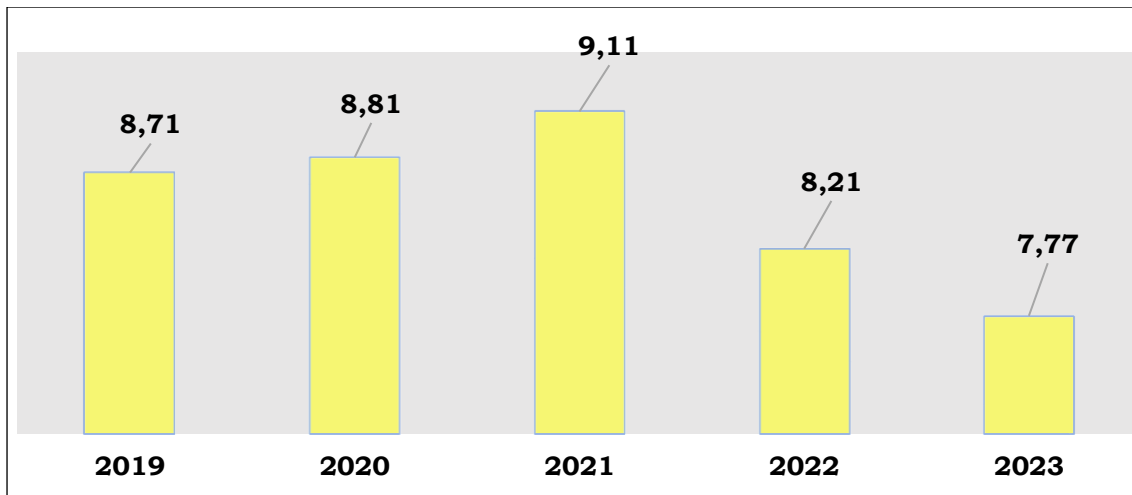
6. Persentase Penduduk Miskin

Berikut adalah data yang menunjukkan persentase penduduk miskin Tahun 2019-2023:

Tabel 2.49 Penduduk Miskin Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2019	588.177	91,24	8,71
2020	634.743	93,74	8,81
2021	654.576	98,76	9,11
2022	698.598	90,51	8,21
2023	761.790	87,08	7,77

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024



Gambar 2.34 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Tabel 2. 50 Persentase Penduduk Miskin Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023

Persentase Penduduk Miskin	2019	2020	2021	2022	2023
Bandar Lampung	8,71	8,81	9,11	8,21	7,77
Provinsi Lampung	12,62	12,34	12,62	11,57	11,11
Nasional	9,41	9,78	10,14	9,57	9,36

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kota Bandar Lampung dibawah angka Provinsi Lampung maupun Nasional.

Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung sebesar 8,71 persen. Namun demikian akibat pandemi *Covid-19* menyebabkan tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,81 persen atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Di sepanjang tahun 2021, pandemi *Covid-19* masih terasa dampaknya sehingga pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung menjadi sebesar 9,11 persen atau sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 sejalan dengan upaya meningkatkan perekonomian di Kota Bandar Lampung, tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung dapat diturunkan. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung sebesar 8,21 persen dan terus menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 7,77 persen.

Selanjutnya berikut adalah data yang menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 51 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 (Persen)

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan
2019	1,49
2020	1,61
2021	1,52
2022	1,34
2023	1,16

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Tabel 2. 52 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 (Persen)

Tahun	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	0,38
2020	0,45
2021	0,39
2022	0,35
2023	0,27

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

7. Kedalamam Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Tabel 2. 53 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023 (Persen)

Data	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kedalaman Kemiskinan :					
Bandar Lampung	1,49	1,61	1,52	1,34	1,16
Provinsi Lampung	1,93	1,90	1,88	1,82	1,64
Nasional	1,55	1,61	1,71	1,56	1,53
Indeks Keparahan Kemiskinan					
Bandar Lampung	0,38	0,45	0,39	0,35	0,27
Provinsi Lampung	0,44	0,41	0,42	0,41	0,36
Nasional	0,37	0,38	0,42	0,38	0,38

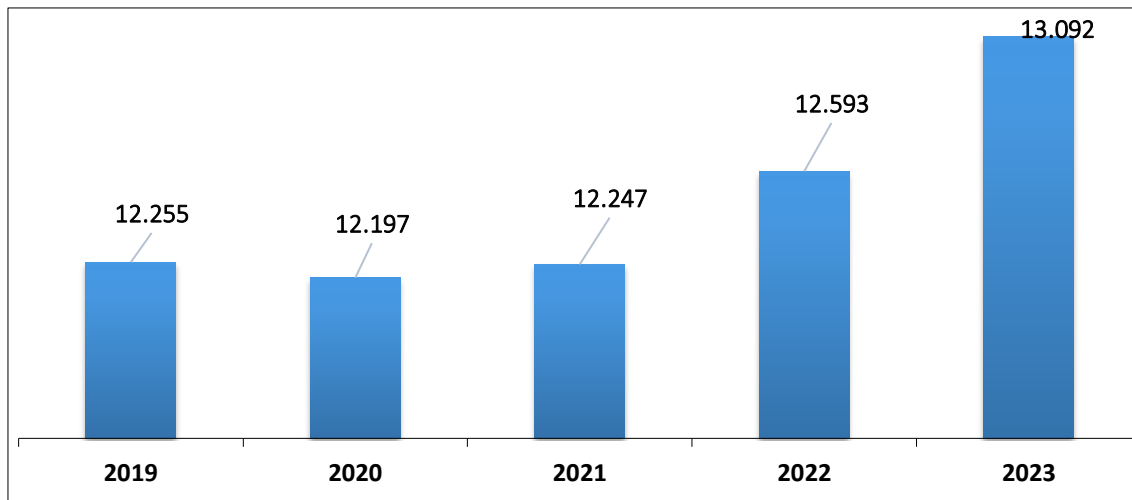
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa baik angka indeks kedalaman kemiskinan maupun angka indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan pada saat pandemi covid-19 terjadi, namun demikian seiring meredanya pandemi, angka-angka indeks tersebut kembali mengalami penurunan bahkan lebih rendah dari angka indeks di tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi. Selain itu, berdasarkan tabel diatas tergambar bahwa secara umum Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung dibawah angka Provinsi Lampung maupun Nasional.

Pada Tanggal 8 Juni 2022, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang kemudian pada Tanggal 16 Juni 2022, Menteri Koordinator PMK Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 dimana seluruh Kabupaten/Kota menjadi lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kota Bandar Lampung sangat berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dengan telah mengalokasikan program dan kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan yang tersebar pada OPD terkait.

8. Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan

Berikut adalah data yang menunjukkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan Tahun 2019-2023:



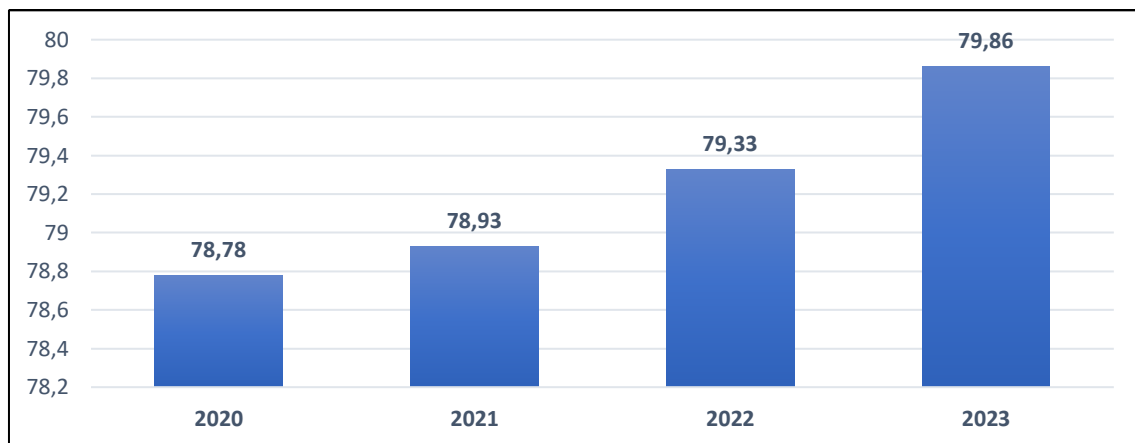
Gambar 2.35 Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Tahun 2019-2023 (ribu rupiah/orang/tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

Data tersebut menunjukkan peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat semakin meningkat pada Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022.

9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara menjadi negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, serta untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berikut adalah data yang menunjukkan IPM Tahun 2020–2023:

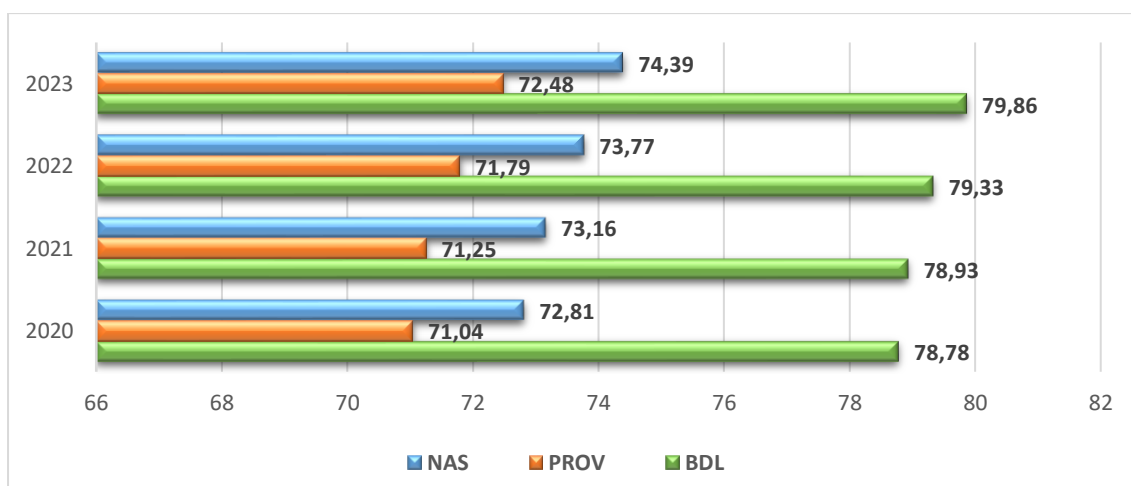


Gambar 2.36 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2023

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Sebagai catatan, berdasarkan keterangan BPS bahwa publikasi nilai IPM di tahun 2023 telah menggunakan metode penghitungan baru yang didasarkan pada data Sensus Penduduk Tahun 2020. Berdasarkan metode penghitungan IPM tersebut Tren capaian IPM Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2023 semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Selama periode 2019-2023, IPM Kota Bandar Lampung lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Lampung dan Nasional. Pada tahun 2019 IPM Kota Bandar Lampung sebesar 77,33 sedangkan IPM Provinsi Lampung sebesar 69,57 dan IPM nasional sebesar 71,92. Selanjutnya IPM Tahun 2020-2023 ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 2.37 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

10. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berikut adalah data yang menunjukkan IPG Tahun 2019-2023:

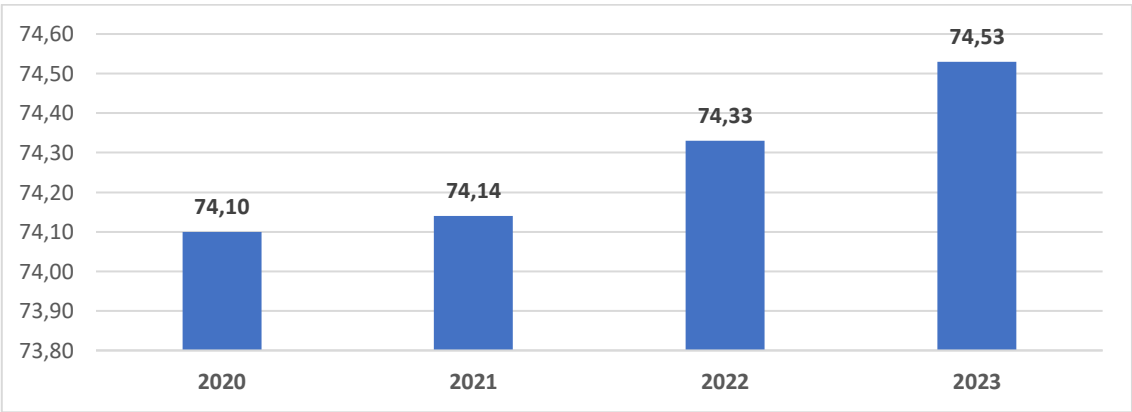
Tabel 2. 54 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019-2023

Tahun	IPG
2019	93,96
2020	93,86
2021	93,93
2022	94,02
2023	95,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

11. Angka Usia Harapan Hidup

Pada tahun 2019 Angka Harapan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar 71,28. Selanjutnya berdasarkan keterangan BPS bahwa publikasi Usia Harapan Hidup tahun 2023 berdasarkan pada data Sensus Penduduk Tahun 2020. Berdasarkan data tersebut Usia Harapan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2023 semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 2.38 Angka Harapan Hidup Tahun 2020-2023

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Dalam kurun waktu Tahun 2020-2023 terjadi peningkatan persentase angka usia harapan hidup. Hal tersebut berarti terjadi peningkatan dari faktor pendukung angka usia harapan hidup seperti kesadaran hidup sehat, ketersediaan tenaga dan sarana prasarana pendukung kesehatan seperti rumah sakit dan apotek.

12. Luas Kawasan Kumuh

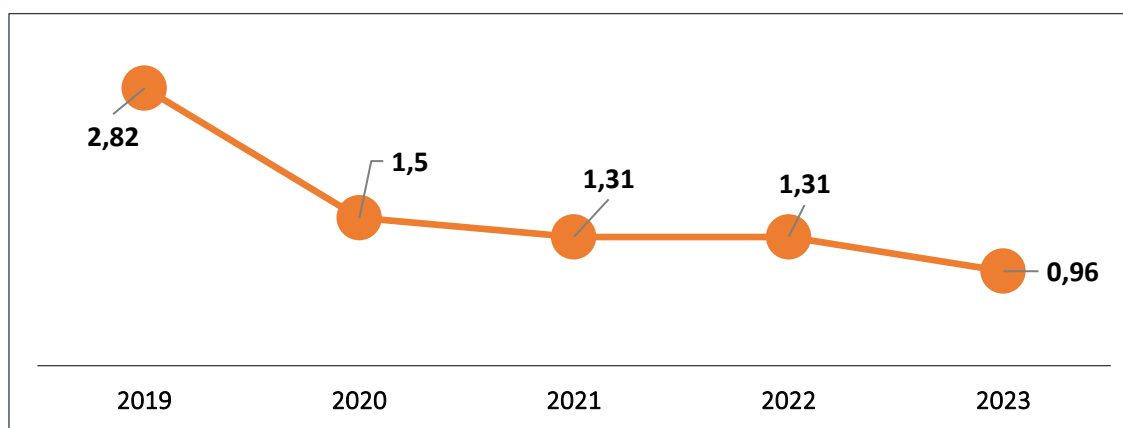
Berikut adalah data yang menunjukkan luas kawasan kumuh berdasarkan data dokumen pengurangan luasan kumuh pokja PKP Kota Bandar Lampung:

Tabel 2. 55 Luas Kawasan Kumuh Tahun 2019-2023

Tahun	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan
2019	556,52	18
2020	311,85	29
2021	297,25	29
2022	259,78	29
2023	190,97	27

Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2024

Sampai pertengahan tahun 2023 besar luasan permukiman kumuh menurun hingga 190,97 hektar. Penurunan yang signifikan dalam enam tahun lebih dari 80% penurunan luasan permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung, hal tersebut membuat optimisme Kota Bandar Lampung memiliki 0 hektar Kawasan kumuh di tahun 2045. Persentase kumuh pun menurun drastis hingga 0,8 persen dari 5,41 persen pada tahun 2018.



Gambar 2.39 Persentase Luas Kawasan Kumuh Tahun 2019-2023

Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2024

Terkait pengurangan luas kawasan kumuh, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan pemutakhiran data dengan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 165/IV.01/HK/2021 tanggal 6 Juni 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

13. Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan. Pada dasarnya rumah layak huni memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat itu sendiri. Manfaat terbesar dengan memiliki rumah layak huni yakni datangnya kenyamanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kenyamanan, tentunya kehidupan dalam berkeluarga menjadi tentram, rukun, aman, dan bahagia.

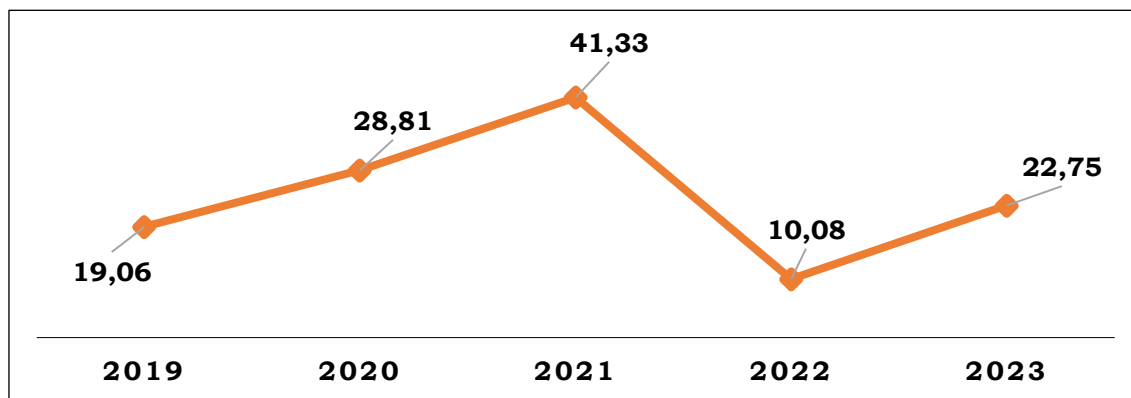
Manfaat lainnya dengan memiliki rumah layak huni adalah, terselenggaranya kesehatan dari setiap masing-masing individu dalam keluarga. Sebab rumah yang layak huni, senantiasa bersih. Selain itu juga sebagai penunjang dalam pendidikan anak-anak. Karena rumah layak huni juga membuat anak memiliki konsentrasi penuh dalam belajar, sehingga prestasi akademik anak lebih meningkat.

Rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui stakeholder terkait berkomitmen untuk memberikan akses kepada masyarakat agar dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Sampai dengan Tahun 2023, penanganan untuk Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bandar Lampung mencapai 1.849 unit yang rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 56 Penanganan untuk Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2019-2023

Tahun	Unit Rumah Layak Huni
2019	542
2020	277
2021	356
2022	320
2023	354
Jumlah	1.849

Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2024



Gambar 2.40 Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2019-2023

Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2024

Adapun Rumah Tidak Layak Huni yang disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni, Sedangkan Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).

Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu

adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.

Dari beberapa pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa definisi RTLH menurut HRC Caritra merupakan rumah atau hunian yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi persyaratan:

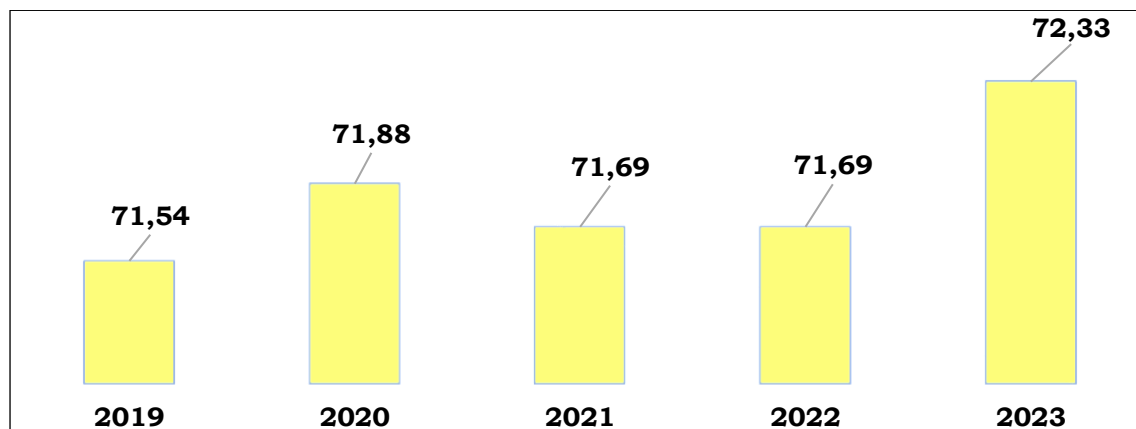
1. keselamatan dan keamanan konstruksi bangunan
2. kecukupan minimum luas bangunan
3. keadilan sosial dan kesehatan penghuni

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 sebanyak 2.843 unit, tahun 2020 sebanyak 2.962 unit; tahun 2021 sebanyak 2.606 unit; tahun 2022 sebanyak 2.286 unit dan tahun 2023 mencapai 1.932 unit

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berikut adalah data yang menunjukkan IDG Tahun 2019-2023:



Gambar 2.41 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan setiap tahun. Namun Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bandar Lampung periode 2019 sampai 2023 masih berada di bawah capaian nasional sebesar 91,63.

2. Indeks Perlindungan Anak,

Berikut adalah data yang menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung yang tercatat melalui Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polresta Bandar Lampung :

Tabel 2.57 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2019-2023

Tahun	Kekerasan pada Perempuan (Kasus)	Kekerasan Pada Anak (kasus)
2019	85	33
2020	105	43
2021	99	101
2022	64	78
2023	42	83

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Trend kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kemungkinan masih banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap dengan alasan berbagai faktor, salah satunya karena masih kental budaya malu, takut, dan tidak ingin melaporkan kasus tersebut. Masyarakat menganggap bahwa kasus kekerasan yang menimpa keluarga mereka itu dinilai sebagai aib keluarga. Maraknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak menuntut Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama stakeholder terkait untuk dapat menekan/meminimalisir jumlah kasus melalui upaya pencegahan dan sosialisasi, serta memfasilitasi lembaga yang melakukan pendampingan korban tindak kekerasan

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan pada Tahun 2018 sebesar 3,23 persen, Tahun 2019 menjadi sebesar 3,24

persen, dan tahun 2020 sebesar 3,03 persen. Angka tersebut menunjukkan jumlah pegawai Negeri Sipil perempuan di Pemerintah Kota Bandar Lampung dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan di Kota Bandar Lampung.

Untuk membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal penanganan dan pecegahan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat 6 (enam) Lembaga perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung (LPA)
2. Lembaga Advokasi Perempuan Damar (Damar)
3. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
4. *Children Crisis Center* (CCC)
5. Lembaga Advokasi Anak (Lada)
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Keberadaan *Non Governmental Organizations* dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai wujud partisipasi masyarakat dan menjadi mitra aktif pemerintah dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

1. Lembaga Advokasi Damar mendorong/ advokasi dalam berbagai kebijakan yang peduli kepada perempuan; bekerja sama dalam penanganan kasus terhadap perempuan baik dalam pendampingan maupun dalam penyelesaian kasus.
2. Melalui Forum Komunikasi Puspa (Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Forum Puspa terdiri dari berbagai Lembaga/ Organisasi perempuan dan Anak termasuk juga dari disabilitas dan organisasi yang berbasis agama, Organisasi Profesi (IDI, IBI, HIMPSI, AJI) dan Dunia Usaha, yang bekerja bersama melalui lembaga masing-masing dan bersinergi dalam upaya perlindungan perempuan dan Anak.
3. Dengan pembentukan UPT PPA akan semakin terbuka kerjasamanya dalam penanganan terhadap kasus-kasus baik perempuan dan Anak (dalam penjangkauan, pendampingan, rehabilitasi terhadap korban serta untuk penyelesaian kasus sampai kepada pengadilan).

4. Pembentukan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), sebagai layanan dalam pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi, edukasi dan konseling terhadap permasalahan terhadap anak, perempuan dan keluarga, dalam sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan keberbagai lapisan masyarakat, secara berkelompok, maupun lewat komunitas dimana dapat bekerja sama dengan lembaga non pemerintah dalam pelaksanaannya.
5. Dalam Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga Non Pemerintah, melalui layanan pengaduan dan pendampingan, pemulangan dan reintegrasi terhadap korban TPPO. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sudah membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Bandar Lampung melalui Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 628/III.08/HK/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

Selain lembaga sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memiliki kader-kader binaan yang tersebar di Kelurahan dan Kecamatan yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat. Adapun kader-kader sebagaimana dimaksud adalah :

1. Kader Pelihara Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang berjumlah 252 orang dan tersebar di 126 Kelurahan se Kota Bandar Lampung;
2. Kader Pos Curhat yang tersebar di 20 Kecamatan dengan jumlah 10 orang per kecamatan.

3. Indeks Keluarga Sehat,

Urusan kesehatan berkaitan dengan peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam urusan kesehatan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan program kesehatan untuk masyarakat seperti Jamkeskot (Jaminan Kesehatan Kota), Jampersal (Jaminan Persalinan) dan menyediakan fasilitas Ambulance gratis bagi masyarakat. Hal tersebut sebagai pendukung atas peran untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan seperti tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, alat kesehatan dan bentuk lainnya.

a. Tenaga Kesehatan

Berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah tenaga kesehatan berdasarkan jenisnya tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 58 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2019-2023

Jenis Tenaga Kesehatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Dokter Ahli/Spesialis	234	332	417	280	405
Dokter Umum	847	501	405	430	718
Dokter Gigi	279	79	287	73	109
Bidan	697	1.045	814	704	1.158

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data jumlah dokter dan bidan secara keseluruhan di Kota Bandar Lampung baik yang berstatus PNS Kota Bandar Lampung maupun lainnya, berikut adalah data yang menunjukkan Rasio Dokter dan Bidan per 100.000 penduduk Tahun 2019-2023 :

Tabel 2.59 Rasio Dokter dan Bidan per 100.000 penduduk Tahun

Tahun	Rasio	
	Dokter	Bidan
2019	103,47	66,29
2020	71,44	89,62
2021	75,49	91,75
2022	46,53	95,32
2023	58,17	64,64

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Berdasarkan Rasio Indonesia Sehat, rasio ideal dokter per 100.000 penduduk adalah 40, dan berdasarkan tabel diatas Rasio Dokter di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 sebesar 58,17 orang, artinya setiap 100.000 penduduk Kota Bandar Lampung dilayani oleh 58 orang dokter. Sedangkan

untuk Bidan, berdasarkan Rasio Indonesia Sehat, rasio ideal bidan per 100.000 penduduk adalah 100, artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 100 orang bidan. Sedangkan kondisi yang ada saat ini pada Tahun 2023 setiap 100.000 penduduk Kota Bandar Lampung dilayani oleh 64 orang bidan. Sementara itu, berdasarkan data Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung yang berstatus PNS Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 60 Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2019-2023

Jenis Tenaga Kesehatan Lainnya	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Dokter Umum	143	147	192	515	1139
Dokter Gigi	51	58	64	81	224
Perawat	329	340	641	2820	5630
Bidan	330	335	610	1055	1547
Kesehatan Masyarakat	40	41	90	132	133
Kesehatan Lingkungan	40	41	59	90	76
ATML	41	45	67	79	300
Farmasi	32	41	78	301	320
Gizi	44	42	56	104	102
JUMLAH	1.050	1.090	1.857	5.177	9.395

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

b. Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Berikut adalah data yang menunjukkan data jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu Tahun 2019-2023

Tabel 2. 61 Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Puskesmas	30	31	31	31	31
Jumlah Poliklinik	80	79	88	96	96
Jumlah Pustu	50	50	50	50	50
Jumlah Penduduk	1.051.500	1.166.066	1.088.924	1.184.949	1.184.949
Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk	35.050	37.615	35.126	38.224	38.224
Rasio Puskesmas persatuan Penduduk (Nasional)	1 Puskesmas Melayani 20.000 penduduk (Indonesia Sehat)				
Rasio Poliklinik persatuan Penduduk	13.144	14.760	12.374	12.343	12.343

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Pada Tahun 2023, rasio puskesmas persatuan penduduk di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 38.224 (1 puskesmas melayani 38.224 penduduk) sedangkan menurut Indonesia Sehat 1 (satu) puskesmas melayani 20.000 penduduk. Sejak Tahun 2019 jumlah puskesmas yang telah terakreditasi mencapai 100 persen, demikian juga untuk tahun 2023.

c. Rumah Sakit

Berikut data yang menunjukkan jumlah rumah sakit tahun 2019-2023:

Tabel 2. 62 Jumlah Rumah Sakit Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI	2	2	2	2	2
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit Umum Swasta	6	6	8	9	9
Jumlah Rumah Sakit Khusus (Ibu dan Anak/ Mata)	10	10	8	6	7
Jumlah seluruh Rumah Sakit (Swasta dan Pemerintah/ Daerah)	20	20	20	19	20
Jumlah Penduduk	1.051.500	1.166.066	1.184.949	1.184.949	1.184.949
Rasio	52.575	55.526	59.247	62.365	60.247

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rasio jumlah penduduk terhadap ketersediaan rumah sakit pada tahun 2023. Namun demikian, ketersediaan sarana dan prasarana serta kualitas layanan rumah sakit terus mengalami peningkatan dalam hal melayani kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penduduk misalnya melalui ketersediaan jumlah ruangan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki 1 (satu) Rumah sakit yang terakreditasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah A. Dadi Tjokrodipo, dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan RSUD Tahun 2020 terjadi peningkatan pencapaian SPM

Pelayanan RSUD mencapai angka 95,45 persen, demikian pula dengan Tahun 2021.

4. Indeks Kualitas Keluarga,

a. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berikut adalah data cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 63 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 (Dua Puluh) Tahun

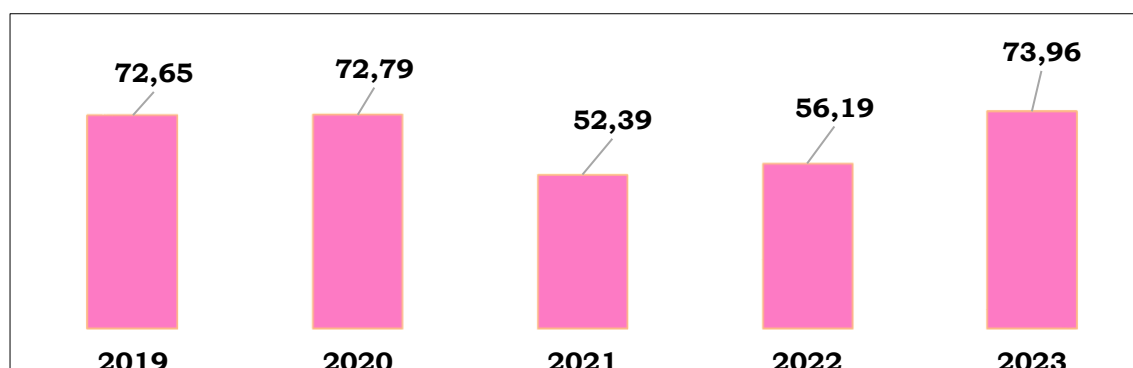
Tahun	Cakupan
2019	0,28
2020	0,30
2021	0,32
2022	0,32
2023	0,26

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2024

Data tersebut menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan terhadap PUS yang Istrinya di Bawah usia 20 Tahun pada kurun waktu tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pendewasaan usia perkawinan di Kota Bandar Lampung cukup berhasil.

b. Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif

Berikut adalah data cakupan PUS menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2019-2023:



Gambar 2.42 Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa sejak Tahun 2017 s.d. 2020 terjadi peningkatan jumlah cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif sebagai dampak yang muncul atas meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana (KB) sekaligus keberhasilan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengendalikan jumlah penduduk. Namun pada tahun 2021, terjadi penurunan cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif sebagai dampak tidak langsung dari Pandemi *Covid-19*. Angka ini kembali naik di tahun 2022 seiring membaiknya dampak kondisi Pandemi *Covid-19*.

c. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*)

Unmeet need dapat didefinisikan sebagai kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. Berikut adalah data cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2018-2022:

Tabel 2. 64 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2019-2023

Tahun	Cakupan (%)
2019	11,62
2020	11,50
2021	12,25
2022	20,75
2023	15,36

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2024

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan *Unmeet Need* pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 yaitu menjadi sebesar 20,75 %. Hal ini dikarenakan rata-rata peserta aktif memang tidak mau ber-KB, baik yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau pun menunda kelahiran berikutnya, bukan karena tidak adanya pelayanan KB.

d. Angka Pemakaian Kontrasepsi usia 15-49 Tahun Menurut Jenis Kontrasepsi

Angka pemakaian kontrasepsi / KB mengalami peningkatan setiap tahun, dengan persentasi pada Wanita usia 15-49 tahun sebesar 38,65% hal ini memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan akses terhadap alat dan layanan penggunaan kontrasepsi. Hal ini cukup baik dalam mengendalikan penduduk dan pencegahan penyakit.

Tabel 2. 65 Angka Pemakaian Kontrasepsi usia 15-49 Tahun Menurut Jenis Kontrasepsi Tahun 2019-2023

Data	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Pemakaian Kontrasepsi usia 15-49 Tahun Menurut Jenis Kontrasepsi	35,50	35,75	36,78	37,55	38,65

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2024

e. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat

Peningkatan angka pemakaian kontrasepsi dibarengi dengan peningkatan cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat, terlihat angka meningkat setiap tahun hingga 96,75 persen di pertengahan tahun 2023. Hal ini menunjukkan keseriusan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi urusan kesehatan masyarakatnya.

Tabel 2. 66 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Tahun 2019-2023

Data	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat	95,50	95,75	96,00	96,50	96,75

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2024

f. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Penyediaan layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS memberikan ruang yang lebih luas lagi untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan mudah / accessible dengan tanpa mengurangi standar pelayanan. Fasilitas layanan kesehatan di Kota Bandar Lampung hamper seluruhnya telah bekerja sama sekitar 99,8 persen telah bekerja sama dengan BPJS, sehingga setiap warga kota Bandar Lampung dapat dilayani dengan baik di seluruh fasilitas layanan kesehatan dengan gratis.

Tabel 2. 67 Persentase Faskes dan Jejaring Kerjasama dengan BPJS Tahun 2019-2023

Data	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	98,75	99,00	99,50	99,75	99,80

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2024

5. Indeks Pembangunan Pemuda

a. Pemuda Pelopor

Pemuda Pelopor adalah pemuda yang memiliki semangat dalam mengembangkan potensi diri guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelaan, tanggung jawab dan keperdualian untuk menciptakan sesuatu dan atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta diakui oleh berbagai pihak dan pemerintah.

Guna mendorong munculnya para pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan di Kota Bandar Lampung, maka pemerintah melalui Dinas Pemuda dan

Olahraga menetapkan predikat pemuda pelopor kepada para pemuda yang telah menunjukkan semangat dalam mengembangkan potensi diri, merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, yang kemudian menjadi perwakilan Pemuda Pelopor Kota Bandar Lampung untuk mengikuti seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah pemuda pelopor Tahun 2010-2023 :

Tabel 2. 68 Pemuda Pelopor Tahun 2019-2023

Tahun	Pemuda Pelopor (orang)
2019	8
2020	8
2021	3
2022	3
2023	3

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung, 2024

Pada Tahun 2022, dari 8 orang Pemuda Pelopor Kota Bandar Lampung yang mengikuti seleksi di Tingkat Propinsi Lampung, ditetapkan 3 orang sebagai Pemuda Pelopor.

b. Cabang Olahraga yang Berprestasi

Olahraga tidak hanya sebagai kebutuhan untuk menjaga kebugaran tubuh, akan tetapi olahraga telah merasuk dalam semua sektor kehidupan. Lebih jauh lagi, prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat manusia baik secara individu, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara.

Membangun prestasi olahraga daerah bukanlah tugas yang mudah tetapi dengan perencanaan yang matang, komitmen dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pusat pelatihan, klub olahraga dan masyarakat setempat. Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah ada berbagai kebijakan dan strategi yang dibutuhkan. Kebijakan dan strategi yang dibutuhkan melingkupi indentifikasi kebutuhan dan potensi daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur olahraga, program pembinaan atlet yang konfrensif dan terstruktur berbagai kelompok umur, pemilihan pelatih yang berkualitas, membangun kemitraan. Kebijakan dan

strategi ini adalah satu kesatuan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk dibutuhkan dalam membangun sinergitas antara kebijakan pemerintah, organisasi olahraga dan masyarakat.

Hasil kompetisi atau kejuaraan yang ditandai dengan perolehan medali harus memperhatikan proses dari pembinaan yang dimulai dari usia dini sehingga diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlit. Sebagai langkah berikutnya perlu melakukan kerja sama antara Pemerintah dengan induk organisasi keolahragaan seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung, pada Porprov IX Lampung tahun 2022, Kota Bandar Lampung mengirimkan 644 atlet yang berpartisipasi pada 32 (tiga puluh dua) cabang olahraga dan mendapatkan 195 medali emas, 179 medali perak, dan 232 medali perunggu, dengan total perolehan medali sebanyak 605 medali.

c. Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan data Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bandar Lampung, organisasi pemuda yang aktif di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sebanyak 97 organisasi dari 130 organisasi pemuda yang ada. Berikut adalah data yang menunjukkan persentase organisasi pemuda yang aktif Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 69 Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
2019	45	32	70
2020	38	32	85
2021	130	97	75
2022	130	95	73
2023	130	95	73

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandar Lampung, 2024

Dari data diatas terlihat bahwa pada Tahun 2023 tidak terdapat peningkatan jumlah organisasi pemuda, dan jumlah organisasi pemuda yang aktif menurun jumlahnya Kedepan diharapkan jumlah organisasi pemuda yang aktif semakin meningkat lagi diiringi dengan meningkatnya peran dan partisipasi pemuda di Kota Bandar Lampung.

d. Jumlah Event Olahraga Tingkat Kota/Kabupaten yang Terlaksana

Pengembangan kawasan olahraga terpadu di Kota Bandar Lampung saat ini didasarkan pada upaya untuk menciptakan atlet-atlet handal di berbagai bidang di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu perlu didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang berskala nasional dan internasional, baik untuk latihan maupun melaksanakan event-event olahraga tingkat Kota sebagai upaya peningkatan kemampuan atlet di kancah nasional maupun internasional. Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan 2 (dua) event olah raga tingkat Kota, yaitu Kejuaraan Wushu dan Kejuaraan Bola Volley. Terdapat peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 11 (sebelas) event olah raga yaitu Kejuaraan Kempo, Futsal, Wushu, Tennis Meja, Tekwondo, Sepak Bola, Judo, Pencak Silat, Karate, Atletik, dan Bola Volly. Pada Tahun 2020, event olahraga tidak diadakan dikarenakan *Pandemi Covid-19*. Pada Tahun 2021 terdapat event olahraga, yaitu Kejuaraan Popda Kota Bandar Lampung dengan 4 (empat) cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu Bola Volley, Basket, Bulutangkis, dan Pencak Silat. Pada tahun 2022 terdapat event olahraga, yaitu kejuaraan Porprov Lampung dengan 32 cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu atletik, basket, billiar, binaraga dan fitness, bola volley, bridge, bulu tangkis, catur, dansa, e-sport, gulat, hapkido, judo, karate, kempo, kick boxing, muay thai, panahan, panjat tebing, pencak silat, renang, sambo, sepak bola, sepak takraw, sepeda, softball, taekwondo, tarung drajat, tenis lapangan, tenis meja, tinju dan wushu. Pada kejuaraan Porprov tahun 2022, Kota Bandar Lampung keluar sebagai juara umum dan memenangkan perolehan medali terbanyak.

e. Sarana Olahraga

Berikut adalah data sarana olahraga umum yang dimiliki Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2023:

Tabel 2.70 Sarana Prasarana Olahraga sampai dengan Tahun 2023

Sarana/Prasarana	Jumlah	Lokasi
Lapangan Tenis Indoor	1	Pahoman, Bandar Lampung
Lapangan Tenis Outdoor	1	Kemiling, Bandar Lampung
Lapangan Kalpataru	1	Kemiling, Bandar Lampung
Lapangan Waydadi	1	Sukarame, Bandar Lampung

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung, 2024

6. Indeks Pembangunan Kebudayaan

a. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal, pemerintah berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian daerah. Warisan budaya bendawi atau cagar budaya (sumber daya arkeologi) mempunyai sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karenanya perlu ada langkah-langkah untuk penyelamatan dan melestarikan cagar budaya daerah.

Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada Tahun 2023 mencapai 50 persen atau 20 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya dan Karya Budaya yang terdiri dari 2 Objek Budaya dan 18 Karya Budaya dengan rincian sebagai berikut :

1. Cagar Budaya Keratuan Balau
2. Cagar Budaya Kebandaran Marga Negeri Olok Gading
3. Tari Sigeh Pengunten
4. Tari Bedana
5. Tari Panji Negarou
6. Songket Benang Emas
7. Rebana/Kompang
8. Tapis Mata Kibau/Dewa Sano/Jung Sarat

9. Cetik/Gamolan
10. Gong Lunik
11. Gong Balak
12. Canang Bende
13. Kulintang
14. Gelang Kano
15. Gambus Lunik
16. Kalung Papan Jajar
17. Bebe Sulam Usus
18. Sigekh
19. Kopiah Emas
20. Belangiran

Karya budaya tersebut, pada Tahun 2023 beberapa telah terdaftar/teregistrasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan memiliki sertifikat sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

2.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) sekarang ini telah menjadi suatu keharusan bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), dan Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip *clean governance* dan *good governance*. Dengan dorongan penuh dari Presiden RI, seluruh K/L dan Pemda ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan RB. Dari tahun ke tahun setiap instansi berlomba untuk meningkatkan Indeks RB-nya, mengingat setiap tahunnya dilaksanakan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia terhadap setiap K/L dan Pemda.

Hasil penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan yang diperoleh Pemerintah Kota Bandar Lampung oleh KemenPAN-RB pada Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 71 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023

Tahun	Skor	Predikat
2019	60,01	B
2020	59,98	CC
2021	58,81	CC
2022	58,77	CC
2023	56,69	CC

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2024

2. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai suatu bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Target Indikator Indeks Inovasi Pemerintah Daerah pada tahun 2023 adalah mendapatkan kategori Sangat Inovatif sebagaimana yang telah dicapai oleh Kota Bandar Lampung pada tahun sebelumnya (Tahun 2022). Adapun realisasinya, pada tahun 2023, Kota Bandar Lampung mendapatkan kategori Sangat Inovatif dengan menginput 313 inovasi dengan skor 70,33 atau Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 70,33 persen. Pada tahun 2022, Kota Bandar Lampung mendapatkan kategori Inovatif dengan menginput 201 inovasi dengan skor 57,17 atau Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 57,17 persen.

3. Indeks Pelayanan Publik

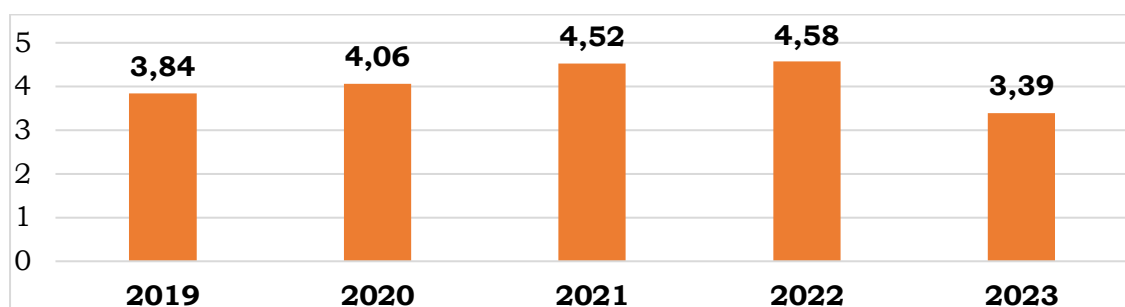
Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Bentuk respon tuntutan tersebut adalah munculnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik yang wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN&RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN&RB) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Atas dasar tersebut, sebagaimana hasil penilaian kualitas pelayanan public Pemerintah Daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB), sesuai dengan Surat Keputusan MenPAN&RB Nomor 86 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pemerintah Kota Bandar Lampung memperoleh predikat Pelayanan Prima (A) pada Tahun 2022. Berikut adalah data yang menunjukkan IPP Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 72 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2019- 2023

Tahun	Skor	Predikat
2019	3,84	Baik (B)
2020	4,06	Sangat Baik (A-)
2021	4,52	Pelayanan Prima (A)
2022	4,58	Pelayanan Prima (A)
2023	3,39	Baik (B-)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2024



Gambar 2.43 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2019-2023 (Skor)

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2024

Terkait dengan aspek pelayanan umum, berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Sistem Perintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 mendapatkan nilai indeks 1,5 dengan predikat Kurang. Penilaian ini berdasarkan 47 Indikator yang dijadikan dasar Penghitungan Nilai Indeks SPBE.

Selanjutnya indeks SPBE Tahun 2023 Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan nilai indeks yaitu 2,15 dengan predikat Cukup. Peningkatan pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, akan tetapi perlu ditingkatkan pada aspek kebijakan, perencanaan dan TIK.

2.4 Aspek Daya Saing

2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Peningkatan Produktivitas Koperasi

Berikut adalah data yang menunjukkan Peningkatan Produktivitas Koperasi Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 73 Peningkatan Produktivitas Koperasi Tahun 2019-2023

Tahun	Volume Usaha (Milyar)	Peningkatan (%)
2019	488,676	-2,44
2020	464,635	-2,26
2021	458,864	-1,24
2022	441,307	-3,97
2023	456,217	3,37

Sumber: *Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*, 2024

Data tersebut menunjukkan terjadi penurunan pada produktivitas koperasi.

b. Peningkatan Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan unsur utama pembangunan ekonomi yang saat ini menjadi prioritas untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan UKM mampu mengurangi masalah kesenjangan antargolongan pendapatan dan antar pelaku usaha, pengentasan kemiskinan dan

penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangan UKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan nasional. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan perannya dalam membina UKM dan menciptakan iklim usaha yang baik sehingga produktivitas UKM tiap tahun selalu meningkat. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 74 Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM
2019	51.709
2020	57.019
2021	59.545
2022	60.696
2023	63.108

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung, 2023

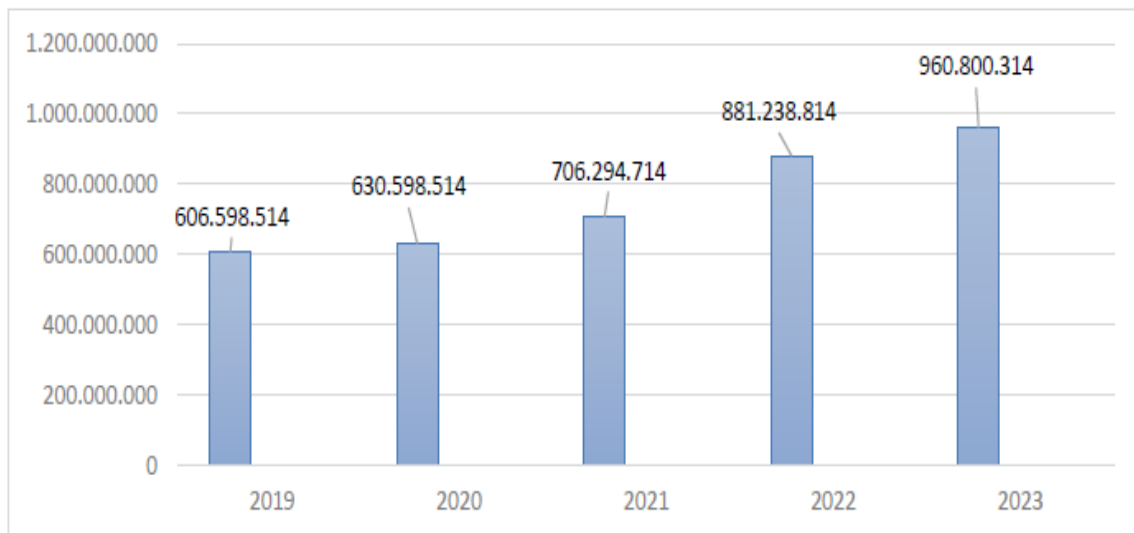
c. Pertumbuhan Penanaman Modal Asing

Berikut adalah data yang menunjukkan Pertumbuhan Penanaman Modal (PMA) Asing Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 75 Pertumbuhan Penanaman Modal Asing Tahun 2019-2023

Tahun	PMA (Dolar)	Pertumbuhan (%)
2019	606.031.814	16,37
2020	630.598.514	4,05
2021	706.294.714	12,00
2022	881.238.814	24,77
2023	960.800.314	9,02

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2024



Gambar 2.44 Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2019-2023 (Dolar)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa PMA di Bandar Lampung terus meningkat walaupun pertumbuhannya selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif.

d. Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri

Berikut adalah data yang menunjukkan Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 76 Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2019-2023

Tahun	PMDN (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2019	1.922.222.324.677	30,39
2020	2.210.330.624.677	14,99
2021	3.480.180.424.677	57,45
2022	5.009.521.724.677	43,94
2023	7.454.783.824.677	48,81

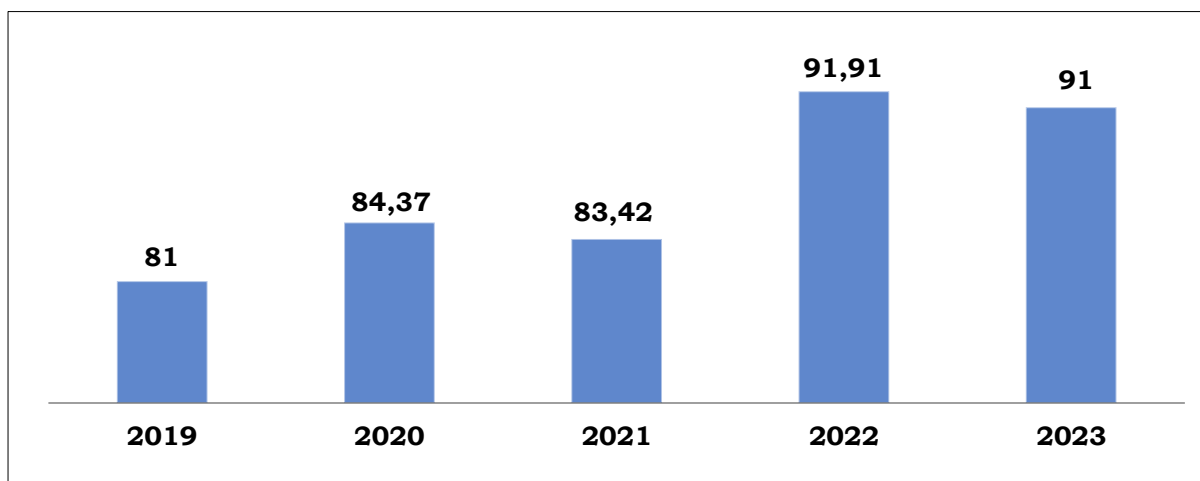
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2024

Data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan jumlah modal yang diinvestasikan di Kota Bandar Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2021 terjadi peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada Tahun 2022 pertumbuhan investasi daerah di Kota Bandar Lampung

juga mengalami pertumbuhan yang meningkat juga di tahun 2023. Pertumbuhan investasi daerah dapat didorong dengan berbagai strategi diantaranya adalah penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses pembiayaan, pemanfaatan potensi lokal dan peningkatan iklim investasi. Pertumbuhan ekonomi daerah Kota Bandar Lampung akan menguatkan berbagai strategi pembangunan daerah meliputi strategi pembangunan fisik/lokalitas, pengembangan dunia usaha dan pengembangan masyarakat. Hal ini berarti Kota Bandar Lampung memiliki potensi yang menjanjikan bagi investor. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga kondisi ini adalah menjaga iklim investasi agar tetap kondusif seperti ketersediaan jaminan sarana transportasi, keamanan, perizinan, dan lain lain.

e. IKM Bidang Perizinan

Berikut adalah data yang menunjukkan IKM Bidang Perizinan Tahun 2019-2023:



Gambar 2.45 Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2024

f. Kebudayaan

Sebagai bentuk dan upaya dalam mempromosikan kebudayaan daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung setiap tahunnya selalu mengikuti berbagai festival seni dan budaya baik lokal maupun luar daerah, yang terdiri dari Pentas Seni Budaya, Pagelaran Seni Budaya, Pentas Tari Kreasi,

Festival dan Parade, Pawai Budaya, Carnaval Budaya/Pawai Budaya Nusantara, Gebyar Pesona Budaya. Hal tersebut akan selalu ditingkatkan agar budaya Lampung lebih dikenal dan berdampak pada kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung.

Peranan Kota Bandar Lampung dalam mengembangkan kebudayaan juga dapat terlihat dari pengembangan dan pemeliharaan peninggalan budaya yang ada di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah beberapa objek wisata Seni Budaya yang ada di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. 77 Objek Wisata Seni Budaya di Kota Bandar Lampung

Objek Wisata Budaya	Alamat Objek Wisata Budaya
Bunker Peninggalan Jepang	Jl. Amir Hamzah Teluk Betung
Goa Jajar	Jl. Juanda/Kesehatan Pahoman
Goa Cepit	Gunung Betung Tanjungkarang
Kelanteng Vihara Thay Hin Bio, Jl.Ikan Kakap, Telukbetung Selatan	Bangunan peribadatan umat Budha
Masjid Tua Al-Anwar, Jl. Laks. Mahayati, Telukbetung Selatan	Bentuk arsitektur dan nilai historisnya
Pura Way Lunik	Bangunan peribadatan besar bagi umat Hindu
Monumen Krakatau (Taman Dipangga), Jl. W.R. Supratman, Telukbetung Utara	Monumen bersejarah dan taman
Museum Lampung “Ruwa Jurai”, Jl. Z.A. P. Alam Gedung Meneng	Museum dengan koleksi hasil kebudayaan masyarakat Lampung
Anjungan Lampung, Way Halim	Pusat Cindera Mata, Kuliner dan Kegiatan Seni Budaya, serta Replika Rumah Adat Lima Belas kabupaten/kota.
Rumah Adat Lampung Dalam Olok Gading, Jl. Basuki Rachmat, Telukbetung Utara	Bentuk arsitektur tradisional Lampung
Taman Budaya, Jl. Cut Nyak Dien, Tanjung Karang Pusat	Taman tempat rekreasi dan pertunjukan budaya
Lamban Balak Kedatun Keagungan Lampung	Rumah adat, dan perabot peninggalan Kerajaan Lampung
Kampung De Berow	Replika Kapal De Berow di Kampung De”Brow
Situs Keratuan Dibalaw	Peninggalan sejarah kerajaan Keratuan Balau di kedamaian
Reservoir PDAM Way Rilau	Peninggalan sejarah Belanda di Imam Bonjol
Jembatan Beton	Peninggalan sejarah Belanda di Kecamatan Telukbetung Selatan
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Peninggalan Belanda	Di Telukbetung Selatan
Stasiun Kereta Api Jl Kotaraja Tanjung	Peninggalan sejarah Belanda

Objek Wisata Budaya	Alamat Objek Wisata Budaya
Karang Pusat	
Rumah Adat Jajar Intan Kedamaian	Bentuk arsitektur tradisional Lampung
Gereja Marturia Jl Imam Bonjol Tanjung Karang	Peninggalan sejarah Belanda

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2024

g. Perpustakaan

Perpustakaan diarahkan untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan literasi serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi. Perpustakaan berbasis *Inklusi* sosial juga telah dilaksanakan antara lain dengan melakukan pendampingan ke Perpustakaan Kelurahan sebagai mitra TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) yang mendapat bantuan berupa buku, komputer dan printer dari Perpustakaan Nasional sekaligus memberikan pelatihan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk meningkatkan keterampilan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan selanjutnya mereplikasi kegiatan tersebut dengan melaksanakan Sosialisasi program TPBIS, melaksanakan Bimtek pengembangan perpustakaan, memberikan bantuan buku, dan pelatihan keterampilan dan pengelolaan perpustakaan kepada perpustakaan Kelurahan. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah perpustakaan di Kota Bandar Lampung :

Tabel 2. 78 Jumlah Perpustakaan di Kota Bandar Lampung

Uraian	Jumlah Perpustakaan
Perpustakaan Perguruan Tinggi	41
Perpustakaan Sekolah dan Madrasah	428
Perpustakaan Umum Kota	1
Perpustakaan Umum Kecamatan	0
Perpustakaan Umum Kelurahan	8

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung, 2024

Peningkatan jumlah koleksi buku perpustakaan juga mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan. Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya memajukan perpustakaan daerah dengan cara meningkatkan kualitas perpustakaan baik dari segi koleksi buku maupun sarana penunjang lainnya. Minat baca masyarakat Kota Bandar Lampung dapat terlihat dari jumlah pengunjung di perpustakaan daerah Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 79 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)
2019	8.012
2020	3.791
2021	1.246
2022	3.121
2023	5.809

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung, 2024

Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan lebih dikarenakan *Pandemi Covid-19* yang menyebabkan adanya pembatasan sosial sehingga mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung perpustakaan secara drastis, namun terjadi peningkatan kembali di tahun 2022. Berikut adalah data yang menunjukkan Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Daerah Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 80 Tingkat Kunjungan Perpustakaan Tahun 2019-2023

Tahun	Peningkatan Pengunjung (Persen)
2019	-35,68%
2020	-52,68%
2021	67,14%
2022	150.40%
2023	86,11%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung, 2024

Sejumlah perbaikan pelayanan dan peningkatan sarana prasarana perpustakaan yang telah dilakukan pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung yang datang, sehingga pada Tahun 2018 pengunjung perpustakaan meningkat sebesar 10,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan yang disebabkan karena pelaksanaan pembangunan rehab kantor sehingga menyebabkan operasional perpustakaan terganggu. Sedangkan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, penurunan jumlah pengunjung perpustakaan dikarenakan Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan pembatasan sosial dimasyarakat dan berdampak pula kepada kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Seiring dengan meredanya pandemi, jumlah pengunjung perpustakaan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2022, dan selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2023.

h. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pengelolaan, pembinaan serta pengawasan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Berikut adalah data arsip terpilah berupa arsip statis dan dinamis yang berasal dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 81 Jumlah Data Arsip Terpilah Tahun 2019-2023

Tahun	Data Arsip Terpilah
2019	2.400 berkas
2020	611 berkas
2021	100 berkas
2022	130 berkas
2023	415 berkas

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung, 2024

i. Produksi Perikanan Per Tahun

Berikut adalah data yang menunjukkan produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022:

Tabel 2. 82 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2019-2023 (Ton)

Kategori	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Perikanan Tangkap (ton)	3.404	3.232,02	3.265,8	3.270	3.270
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	115,55	131,40	153,56	155,24	155,24
Jumlah	3.519,55	3.363,42	3.419,36	3.425,24	3.425,24

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 2024

Sejak tahun 2018 sumber data produksi perikanan tangkap diperluas yaitu (1) bersumber dari TPI atau disebut dengan sumber data pelabuhan dan (2) bersumber dari data yang bukan dari pelabuhan atau non pelabuhan. Sumber data non pelabuhan ini dijadikan data perikanan tangkap dikarenakan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada nelayan-nelayan skala kecil yang hasil tangkapannya tidak dilelang di TPI dikarenakan hasil tangkapannya tidak banyak. Namun demikian, jumlah nelayan kecil di Kota Bandar Lampung ini cukup banyak sehingga terjadi kenaikan produksi perikanan tangkap yang signifikan yang merupakan gabungan dari dua sumber data tersebut. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi perikanan tangkap akibat adanya *Pandemi Covid-19* yang juga berdampak terhadap penjualan hasil tangkapan (ikan banyak tetapi pembelinya yang berkurang) sehingga trip untuk melakukan penangkapan ikan semakin jarang. Pada tahun 2022, produksi perikanan tangkap kembali mengalami kenaikan, namun di tahun 2023 produksi perikanan tangkap tidak meningkat dibandingkan produksi di tahun 2022.

Sedangkan untuk perikanan budidaya terjadinya terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan produksi perikanan budidaya antara lain disebabkan oleh adanya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dananya bersumber dari APBN dan juga bantuan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada kelompok-kelompok pembudidaya ikan di Kota bandar Lampung baik berupa bantuan bibit/benih, pakan, *bioflog* dan juga pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan.

j. Kunjungan Wisata

Berikut adalah data kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Bandar Lampung berdasarkan jumlah tamu hotel Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 83 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023

Wisatawan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nusantara	1.064.493	819.492	852.673	1.923.858	2.010.547
Mancanegara	22.218	1.767	1.411	6.688	9.839

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, 2024

Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung khususnya pada sektor Pariwisata. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan berdasarkan jumlah tamu hotel baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang cukup signifikan pada Tahun 2019. Namun pada Tahun 2020-2021 telah terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan kunjungan wisata daerah baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Pada Tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan nusantara kembali mulai mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Lama kunjungan wisatawan merupakan hari dimana rata-rata jumlah wisatwan menghabiskan waktunya berkunjung dan menikmati liburan di Kota Bandar Lampung. Pada tabel di atas menunjukkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandar Lampung setiap tahunnya, terjadi trend

yang meningkat meskipun sempat turun pada tahun 2020 kemungkinan disebabkan karena wabah covid 19.

Tabel 2. 84 Rata-rata Lama Tinggal Pengunjung Wisata Tahun 2019-2023

ITEM	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-Rata Lama Tinggal	1,80	1,51	1,74	1,83	1,84
Nusantara	2,03	1,56	1,56	1,38	1,36
Mancanegara	1,57	1,46	1,91	2,27	2,32

Sumber: Dinas Pariwisata, 2024

k. Produksi Tanaman Pangan

Berikut adalah data yang menunjukkan Produksi Tanaman Pangan di Tahun 2019–2023:

Tabel 2. 85 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2019–2023

Tanaman	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Padi Sawah					
Luas panen (Ha)	1.642,5	1.226,3	1.074,0	1.017,5	900,1
Produksi (ton)	9446,02	7075,75	6.229,20	5.952,38	4950,9
Padi Ladang					
Luas panen (Ha)	-	-	-	-	-
Produksi (ton)	-	-	-	-	-
Ubi Kayu					
Luas panen (Ha)	75	53	61,3	39,0	40,3
Produksi (ton)	1.785	1.240,2	1440,55	928,2	945,88
Ubi Jalar					
Luas panen (Ha)	11	13	12	6	8
Produksi (ton)	107,47	117,91	114	59,1	73,88
Jagung					
Luas panen (Ha)	157	217	235	359,3	311,5
Produksi (ton)	771,91	1043,22	1.139,75	1.760,57	1.526,11
Kacang Tanah					
Luas panen (Ha)	3	6	1	2	0
Produksi (ton)	5,56	8,2	1,35	2,09	0

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, 2024

Terdapat penurunan luas panen dan produksi padi sawah sejak tahun 2019, demikian juga dengan produktivitasnya. Alih fungsi lahan seperti untuk perumahan, industri, dan penggunaan lainnya akan berpengaruh terhadap produksi pertanian dan luas panen di masa yang akan datang. Hal ini perlu disikapi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan mengefektifkan lahan pekarangan untuk dijadikan kebun rumah tangga.

Diharapkan dengan adanya kebun rumah tangga ini akan menambah sisi ekonomi keluarga sekaligus menjaga ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di Kota Bandar Lampung.

1. Produksi Tanaman Holtikultura (Sayuran)

Berikut adalah data yang menunjukkan Produktivitas Tanaman Sayuran Tahun 2019–2023:

Tabel 2. 86 Produktivitas Tanaman Sayuran Tahun 2019–2023

Tanaman	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Buncis					
Luas panen (Ha)	11	4,9	5	4,25	4,25
Produksi (ton)	93,5	41,65	42,5	36,13	27,9
Kacang Panjang					
Luas panen (Ha)	12	35	15	3	3
Produksi (ton)	96	280	120	24	32
Kangkung					
Luas panen (Ha)	99	107	77,5	94	94
Produksi (ton)	2277	2461	1792,5	2162	1428,3
Bayam					
Luas panen (Ha)	94	88	74,4	74,4	48,65
Produksi (ton)	1880	1760	1488	1488	973
Terong					
Luas panen (Ha)	21	33	38	17	21,75
Produksi (ton)	525	825	950	425	543,75
Ketimun					
Luas panen (Ha)	17	16	21	5	3
Produksi (ton)	204	192	252	60	36
Sawi					
Luas panen (Ha)	114	117	95,75	79,5	81
Produksi (ton)	1197	1228,5	1005,38	831,6	850,5
Cabe					
Luas panen (Ha)	24	23	13,2	10,5	9,33
Produksi (ton)	216	207	118,8	94,5	83,97
Tomat					
Luas panen (Ha)	17	37	5	3	3,5
Produksi (ton)	204	444	60	36	42

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, 2023

Mengefektifkan lahan pekarangan untuk menjadi kebun rumah tangga menjadi solusi untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat dan produktivitas pertanian di Kota Bandar Lampung kedepan.

m. Populasi Ternak

Berikut adalah data yang menunjukkan Populasi ternak Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 87 Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas Tahun 2019–2023

Ternak	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sapi potong	1.108	1.064	1.346	1.426	1.556
Sapi perah	13	-	-	-	-
Kerbau	54	24	14	14	20
Kuda	36	70	90	90	90
Kambing	3.207	2.895	3.064	3.132	3.239
Kambing perah	8	-	-	-	-
Domba	358	295	352	352	368
Kelinci	1.575	1.055	690	707	707
Ayam Buras	38.413	29.339	26.250	28.784	28.290
Ayam Petelur	11.500	4.500	5.000	4.500	4.500
Ayam pedaging	21.500	12.700	24.500	42.100	42.000
Layer	-	-	-	-	-
Broiler	-	-	-	-	-
Itik/entok	2.657	2.470	2.045	2.452	2.835
Puyuh	10.660	8.446	3.000	500	0
Merpati	4.752	4.643	3.901	4.047	3.994

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, 2024

n. Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB

Berikut adalah data yang menunjukkan Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 88 Persentase Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,68	3,76	3,67	3,51	3,43

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Bandar Lampung cenderung menurun tiap tahunnya.

o. Perdagangan

Berikut adalah data pasar tradisional dan pasar modern Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 89 Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Tahun 2019-2023

Pasar	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tradisional	34	33	33	33	33
Moderen	22	31	31	31	31

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 2023

Adapun data Pertumbuhan Kategori Perdagangan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 90 Persentase Pertumbuhan Kategori Perdagangan Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,09	-10,00	8,42	8,38	5,50

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada Tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif yang signifikan yaitu sebesar 8,42 persen setelah berkontraksi sebesar 10,00 persen pada Tahun 2020. Pada tahun 2022, sektor ini kembali mengalami peningkatan sebesar 8,38 persen dan tahun 2023 tumbuh sebesar 5,50 persen.

Kontribusi kategori perdagangan (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 berturut-turut sebesar 14,44 persen; 13,34 persen; 13,94 persen; 14,88 persen dan 15,03 persen. Jika dilihat dari angka tersebut, kontribusi Kategori Perdagangan terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir berada diatas 13 persen.

p. Perindustrian

Pertumbuhan Industri Kecil menengah di Kota Bandar Lampung cenderung berfluktuasi dari Tahun 2019-2023. Berikut data yang menunjukkan Pertumbuhan IKM Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 91 Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
IKM	4,03	2,38	1,95	14,65	8,56

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, 2024

Berikut adalah data Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 92 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Industri Pengolahan	6,95	-4,36	4,20	0,65	0,95

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa Kategori Industri Pengolahan mengalami peningkatan selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 meskipun sempat mengalami pertumbuhan yang terkontraksi sebesar -4,36 persen pada tahun 2020 akibat *Pandemi Covid-19*. Namun setelah terdampak *Pandemi Covid-19*, pada Tahun 2021, pertumbuhan industri pengolahan kembali mengalami pertumbuhan positif menjadi sebesar 4,20 persen dan terus tumbuh sebesar 0,65 persen pada tahun 2022 dan sebesar 0,95 persen pada tahun 2023.

q. Transmigrasi

Urusan transmigrasi merupakan urusan pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan urusan ini baru dilaksanakan pada Tahun 2017. Program

transmigrasi di Kota Bandar Lampung bertujuan untuk membantu daerah-daerah yang padat penduduknya, terutama untuk wilayah kumuh yang padat penduduk.

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan sosialisasi di 5 (lima) kecamatan guna menjangkau animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan peserta sebanyak 80 orang. Sehingga selama kurun waktu Tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan sosialisasi di 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Panjang, Teluk Betung Selatan, Bumi Waras, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Enggal, Way Halim, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, dan Tanjung Karang Timur. Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, sosialisasi program transmigrasi tidak dapat dilaksanakan karena terkendala adanya *Pandemi Covid-19*.

r. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2. 93 Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2023

Data	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi perikanan (Tangkap+ Budidaya)	3.519,24	3.363,42	3.419,36	3.425,24	3.270

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 2024

Jumlah produksi perikanan Kota Bandar Lampung cukup tinggi berada di 3.270 Ton pada tahun 2023, Kota Bandar Lampung punya centra penjualan ikan, pelelangan ikan, dan bahkan ikan nya di ekspor ke luar kota dan negara. Area teluk betung merupakan wilayah pengagrapannya. Hal ini membuat Perikanan Kota Bandar Lampung memiliki potensi pengembangan ekonomi di area pesisir Kota Bandar Lampung.

Begitu juga dengan konsumsi ikan, persentasi konsumsi terus meningkat setiap tahunnya hal ini mengartikan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Kota Bandar Lampung dalam mengkonsumsi ikan mengalami kenaikan dan dapat menjadi indikator pendukung akan ketersediaan dan ketercakupan makanan bergizi yang cukup baik juga. Sampai tahun 2022 terdapat 45% masyarakat mengkonsumsi ikan.

Cakupan binaan kelompok nelayan pun terus diperhatikan selaras dengan tren kenaikan konsumsi, kelompok nelayan pun mengalami peningkatan jumlah pembinaannya, tahun 2022 telah mencapai 35,2 persen yang terbina. Hal ini menjadi kunci dari keberlanjutan produksi ikan di Kota Bandar Lampung dan roda perekonomian dari laut. Perlu ada peningkatan melihat potensi perikanan Kota Bandar Lampung yang cukup besar sehingga dalam hal ini nelayan dapat disejahterakan apabila pekerjaan para nelayan dapat didukung penuh dan ekosistem perekonomian di pesisir dapat dikelola dengan baik.

s. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Berikut adalah data Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023

Tabel 2. 94 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun

Tahun	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
2019	27,34
2020	25,05
2021	26,52
2022	29,71
2023	30,21

Sumber: Bapenda Kota Bandar Lampung, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Tahun 2021, terjadi kenaikan persentase dari 26,57% pada Tahun 2021 menjadi 30,29% pada Tahun 2022.

t. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandar Lampung

Dalam lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung, BUMD merupakan unit usaha milik Pemerintah Kota Bandar Lampung. Alasan ekonomis yang biasanya dijadikan acuan pertama mendirikan BUMD adalah mengoptimalisasi potensi ekonomi daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat atau *public service*, dan mencari keuntungan. Alasan strategis mendirikan

BUMD adalah mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik.

Maksud dan tujuan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendirikan PD/BUMD adalah :

- 1) Sebagai aparat perekonomian daerah dalam rangka mengisi otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab, PD/BUMD harus dapat membantu kelancaran pembangunan daerah;
- 2) Sebagai unit perekonomian daerah PD/BUMD harus mampu berfungsi sebagai aparat pengembangan dan pembangunan ekonomi daerah yang secara aktif langsung melakukan usaha-usaha di berbagai sektor industri, jasa, perdagangan disamping menyelenggarakan usaha pelayanan bagi masyarakat dan kemanfaatan umum, yang sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja;
- 3) Sebagai sumber keuangan daerah guna meningkatkan kemampuan dan kekuatan daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan penyelenggaraan pelayanan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2018, PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung berubah bentuk badan hukum dan nama perusahaan daerah menjadi PT BPR Waway Lampung (Perseroda). Sehingga sampai dengan Tahun 2019 Kota Bandar Lampung memiliki 5 BUMD yaitu BPR Bank Waway, BPR Syariah Bandar Lampung, PDAM Way Rilau, PD Pasar dan PD Kebersihan; yang mana 2 (dua) PD berstatus Perseroan Terbatas (PT) yaitu BPR Bank Waway dan BPR Syariah.

Pada Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) Perusahaan Daerah yang sedang mengajukan penyesuaian bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), yaitu :

1. PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung;
2. PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;
3. PD Kebersihan Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.

Penyesuaian bentuk badan hukum ini sedang diproses di DPRD Kota Bandar Lampung dan diharapkan dapat diselesaikan di Tahun 2022. Dengan berubahnya bentuk badan hukum tersebut diharapkan dapat dilakukan penilaian terhadap nilai aset sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pengurus PD. Terkait dengan pencapaian kinerja BUMD Perusahaan Daerah sudah memiliki 5 (lima) perusahaan dalam kategori sehat yaitu:

1. PT BPR WAWAY Kota Bandar Lampung;
2. PT BPR SYARIAH;
3. PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung;
4. PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;
5. PD Kebersihan Tapis Berseri Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung.

Berikut adalah data kontribusi masing-masing BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 95 Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2023

Nama BUMD	Jumlah Kontribusi Terhadap PAD (Rupiah)				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PDAM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.750.000.000,00	0	0
PT. BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)	6.918.439.531,00	8.071.743.172,00	4.500.000.000,00	11.500.000.000,00	3.595.942.991
PT. BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNG	1.280.088.574,00	1.404.034.830,00	630.000.000,00	1.843.114.814	2.251.459.149
PD PASAR TAPIS BERSERI	150.000.000,00	62.591.151,00	150.000.000,00	45.000.000,00	0
PD KEBERSIHAN TAPIS BERSERI	60.000.000,00	0	14.183.000,00	30.501.000,00	0

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Bandar Lampung, 2024

u. Koperasi Sehat dan Cukup Sehat

Berikut adalah data perkembangan koperasi Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 96 Perkembangan Koperasi Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi	Unit	662	664	410	397	409
Aktif	Unit	167	175	193	146	160
Tidak Aktif	Unit	495	489	217	247	249

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Anggota	Orang	84.878	82.814	69.515	77.866	66.103
Persentase Koperasi Aktif	%	25,22	26,35	47,07	37,15	39,11
Permodalan						
- Modal Sendiri	Rp. Milyar	284.529	309.839	280.150	293.326	303.231
- Modal Luar	Rp. Milyar	249.022	239.969	246.432	232.200	231.017
Volume Usaha	Rp. Milyar	488.676	464.635	458.864	441.307	456.217
Sisa Hasil Usaha	Rp. Milyar	29.856	32.156	24.388	22.181	22.887

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2024

Keberadaan koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang turut menopang perekonomian di Kota Bandar Lampung, namun masih belum banyak yang tergolong dalam kategori koperasi sehat dan cukup sehat. Koperasi tergolong sehat jika koperasi tersebut menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT), punya usaha yang jelas, ada iuran wajib dan sukerela, sisa hasil usaha (SHU) dibagi dan punya Nomor Induk Koperasi (NIK) dari Kementerian. Berikut adalah data perkembangan koperasi sehat Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 97 Perkembangan Koperasi Sehat Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
I.	Koperasi Aktif	167	175	193	196	160
II.	Yang sudah melaksanakan RAT	91	107	109	103	116
III.	Kategori Koperasi					
	Sehat	1	5	4	8	19
	Cukup Sehat	50	57	62	73	66
	Dalam Pengawasan	37	43	42	20	
	Dalam Pengawasan Khusus	3	2	2	2	2

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2024

Berikut adalah data Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 98 Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Tahun 2019-2023

Tahun	Koperasi Sehat dan Cukup Sehat
2019	6,05
2020	8,28
2021	16,09
2022	18,83
2023	19,12

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2024

v. UMKM yang Meningkatkan Labanya

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok.

UMKM yang terdapat di semua sektor ekonomi merupakan usaha yang banyak memberikan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan maupun keahlian khusus. Perkembangan jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung cukup pesat dari tahun ke tahun, idealnya adalah jika perkembangan jumlah UMKM tersebut idealnya diikuti oleh laba usaha, sehingga UMKM tersebut dapat terus bertahan dan berkembang. Berikut adalah data perkembangan UMKM Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 99 Perkembangan UMKM Tahun 2019-2023

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah Keseluruhan
2019	30.696	15.568	5.445	51.709
2020	35.988	15.584	5.447	57.019
2021	38.494	15.605	5.447	59.546
2022	39.637	15.612	5.447	60.696
2023	41.970	15.682	5.456	63.108

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2024

w. Skor Pola Pangan Harapan

Masalah kekurangan gizi pada anak merupakan masalah gizi yang belum pernah tuntas. Tingkat konsumsi gizi yang masih rendah, tidak seimbang,

dan tidak beragam diduga berkorelasi dengan masih tingginya prevalensi pendek (*stunting*), berat badan kurang (*underweight*), dan kurus (*wasting*).

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan kedepan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen sederhana untuk menilai mutu gizi konsumsi pangan kelompok baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor. PPH juga sebagai instrumen untuk mengevaluasi pola konsumsi pangan masyarakat dan sekaligus sebagai bahan untuk merencanakan kebutuhan pangan tingkat regional dan nasional.

Penghitungan skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH ini berfungsi sebagai :

- a. Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan;
- b. Baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah;
- c. Baseline data untuk menghitung proyeksi konsumsi dan penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.

Beberapa hal yang mempengaruhi skor PPH konsumsi yaitu :

- ✓ Tingkat pendapatan masyarakat (Rumah Tangga);
- ✓ Pengetahuan masyarakat terutama ibu rumah tangga tentang pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) semakin membaik dengan adanya sosialisasi;
- ✓ Lingkungan (sumber daya/kebiasaan/budaya).

Berikut adalah data skor Pola Pangan Harapan Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 100 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2019-2023

Tahun	Skor
2019	85,20
2020	85,50
2021	85,40
2022	88,20
2023	93,20

Sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2024

2.4.2 Daya Saing SDM

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut adalah data TPT Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 101 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023

TPT	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bandar Lampung	7,12	8,79	8,85	7,91	7,43
Propinsi Lampung	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk usia kerja berkaitan erat dengan besarnya penduduk itu sendiri, karena penduduk usia kerja merupakan segmen dari jumlah total penduduk secara keseluruhan. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari separuh penduduk Bandar Lampung termasuk dalam angkatan kerja. Berikut adalah data TPAK Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 102 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
TPAK	65,52	67,79	67,18	66,70	66,05

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

3. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandar Lampung

Berikut adalah data yang menunjukkan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 (orang) :

Tabel 2. 103 Jumlah ASN Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
ASN	8.347	8.568	8.395	7.625	7.202
Non ASN	5.005	5.401	5.529	5.529*	5436

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung, 2024

4. Indeks Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Berikut adalah data yang menunjukkan APM SD/MI Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 104 Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2019-2023

Tahun	APM SD/MI
2019	96,20
2020	91,32
2021	93,71
2022	86,73
2023	99,14

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Data tersebut menunjukkan jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan APM untuk SD/MI di Kota Bandar Lampung. Namun, pada Tahun 2023 terdapat peningkatan kembali.

a. APM SMP/MTs

Berikut adalah data yang menunjukkan APM SMP/MTs Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 105 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Tahun 2019-2023

Tahun	APM SMP/MTs
2019	89,63
2020	80,17
2021	80,41
2022	80,15
2023	81,06

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/MTs pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap nilai APM untuk SMP/MTs di Kota Bandar Lampung.

b. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Berikut adalah data yang menunjukkan APK PAUD Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 106 Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2019-2023

Tahun	APK PAUD
2019	49,46
2020	49,36
2021	36,12
2022	43,15
2023	43,45

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Penurunan APK PAUD yang signifikan pada Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 disebabkan karena terjadinya data ganda pada setiap lembaga sekolah pada saat pendataan Tahun 2017. Setelah dilakukan verifikasi ulang melalui data DAPODIK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka data tersebut menjadi berkurang.

c. Angka Partisipasi Kasar SD/MI

Berikut adalah data Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Tahun 2019-2023:

Tabel 2.107 Angka Partisipasi Kasar SD/MI Tahun 2019-2023

Tahun	APK SD/MI
2019	109,23
2020	108,14
2021	111,05
2022	104,72
2023	94,44

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Tahun 2019-2023:

Tabel 2.108 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Tahun 2019-2023

Tahun	APK SMP/MTs
2019	107,16
2020	96,37
2021	103,86
2022	100,80
2023	108,50

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

e. Persentase Satuan PAUD Berakreditasi

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan PAUD Berakreditasi Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 109 Persentase Satuan PAUD Berakreditasi Tahun 2019-2023

Tahun	Persentase
2019	40,84
2020	54,00
2021	52,47
2022	58,70
2023	58,70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2024

f. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 110 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A Tahun 2019-2023

Tahun	Persentase
2019	31,50
2020	29,80
2021	31,67
2022	31,95
2023	32,50

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2024

g. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 111 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B Tahun 2019-2023

Tahun	Persentase
2019	65,16
2020	67,74
2021	66,13
2022	58,51
2023	55,42

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2024

h. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP yang Berakreditasi A

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan dasar SMP Berakredetasi A Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 112 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakredetasi A Tahun 2019-2023

Tahun	Persentase
2019	39,10
2020	36,60
2021	36,50
2022	36,23
2023	35,97

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2024

i. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP yang Berakreditasi B

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan dasar SMP Berakredetasi B Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 113 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakredetasi B Tahun 2019-2023

Tahun	Persentase
2019	45,30
2020	39,60
2021	39,42
2022	42,03
2023	42,45

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2024

j. Jumlah Tenaga Pendidik (Guru)

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah guru PAUD, SD dan SMP berdasarkan Jenis Kelamin dan status kepegawaian (PNS atau Non PNS) sampai dengan Tahun 2023:

Tabel 2.114 Data Keadaan Guru PAUD, SD, dan SMP sampai dengan Tahun 2023

Jenjang	PNS		Jumlah	Non PNS		Jumlah	Guru PNS dan Non PNS
	Laki	Perempuan		Laki	Perempuan		
PAUD	3	172	175	91	1.916	2.007	2.182
SD	351	2.074	2.425	485	1.866	2.351	4.776
SMP	313	1.214	1.527	510	1.052	1.562	3.089
Jumlah	667	3.460	4.127	1.086	4.834	5.990	10.041

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2024

k. Kualifikasi Tenaga Pendidik

Berikut adalah data yang menunjukkan kualifikasi guru PAUD, SD dan SMP Tahun 2023:

Tabel 2.115 Kualifikasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik

Jenjang	Jumlah Guru	Kualifikasi		Sertifikasi	
		< S1/D-IV	≥S1/D-IV	Sudah	Belum
TK	2.182	895	1.296	389	1.793
SD	4.776	1.181	4.313	1.447	3.329
SMP	3.089	197	2.892	1.710	1.379
Total	10.041	2.273	8.501	3.546	6.501

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2024

Tabel 2. 116 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jenjang	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
PAUD	59,40
SD	90,31
SMP	93,63

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2024

1. Jumlah Siswa PAUD, SD dan SMP

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah Siswa PAUD, SD, dan SMP berdasarkan status sekolah negeri/swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2023:

Tabel 2. 117 Jumlah Siswa PAUD, SD, dan SMP Tahun 2023

Jenjang	Negeri			Swasta			Jmlah Siswa
	Laki	Perempuan	Total	Laki	Perempuan	Total	
PAUD	123	114	237	11.417	10.931	22.348	22.585
SD	34.095	37.640	71.735	11.888	12.929	24.817	96.552
SMP	16.674	16.858	33.352	6.139	5.647	11.786	45.318
Jumlah	50.892	54.612	105.504	29.444	29.507	58.951	164.455

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2024

m. Rasio Guru terhadap Siswa PAUD, SD dan SMP

Rasio guru terhadap siswa dihitung berdasarkan jumlah guru secara keseluruhan baik yang berstatus PNS dan Non PNS. Berikut adalah data yang menunjukkan Rasio Guru terhadap Siswa PAUD, SD, dan SMP Tahun 2023:

Tabel 2. 118 Rasio Guru terhadap Siswa

Jenjang	Rasio
PAUD	6,84
SD	19,79
SMP	12,24

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2024

Dari rasio diatas terlihat bahwa secara keseluruhan rasio guru terhadap murid/siswa sudah mencukupi, hal ini karena dipenuhi dari tenaga guru berstatus Non PNS yang jumlahnya cukup banyak di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data yang menunjukkan kondisi ruang kelas PAUD, SD dan SMP Tahun 2023:

Tabel 2. 119 Perbandingan Kondisi Ruang Kelas dengan Rombongan Belajar Tahun 2023

Jenjang	Ruang Kelas			Rombongan Belajar
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang/Berat	
PAUD	275	67	15 / 2	359
SD	944	406	153 / 119	1.662
SMP	913	249	35 / 30	1.227
Total	2.132	722	203 / 151	3.208

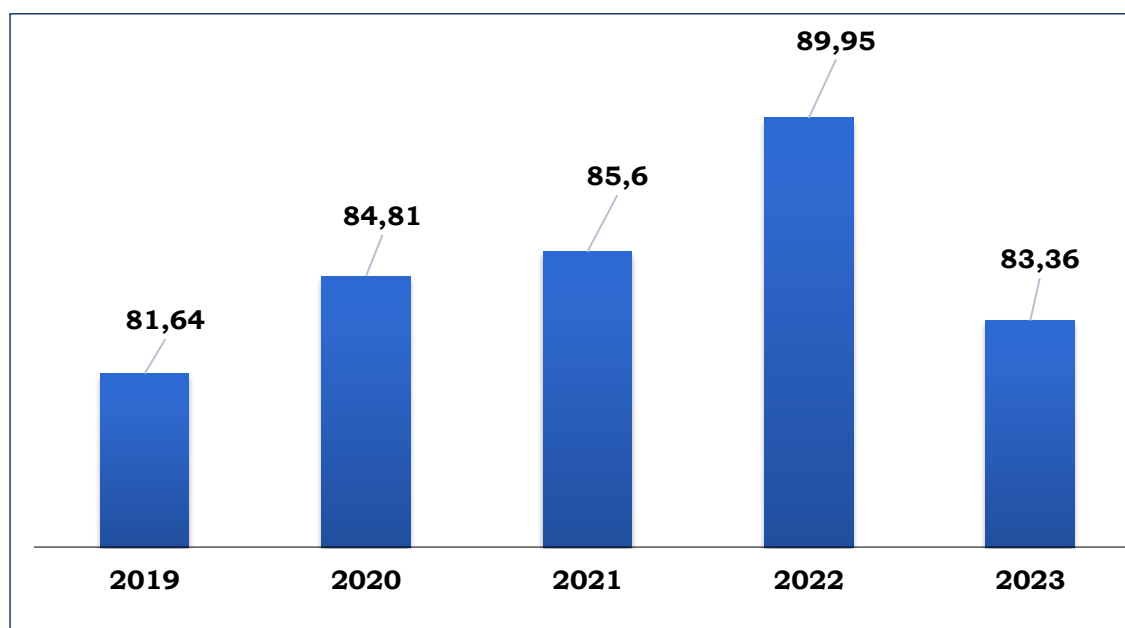
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2024

2.4.3 Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur Jalan. Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih terbatasnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Transportasi merupakan salah satu kunci utama pengembangan wilayah dan kemajuan ekonomi

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap

Berikut adalah data Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2023 :



Gambar 2.46 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2024

Sedangkan untuk Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 120 Persentase Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Tahun

Tahun	Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap
2019	81,64
2020	84,41
2021	84,81
2022	89,02
2023	83,36

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2024

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2022, Panjang Jalan Kota sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 204.1/III.03/HK/2018 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Satusnya sebagai Jalan Kota di Kota Bandar Lampung dan Panjang Jalan Lingkungan sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 29/III.03/HK/2021 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Satusnya sebagai Jalan Lingkungan di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data yang menggambarkan infrastruktur jalan sampai dengan tahun 2023:

Tabel 2. 121 Infrastruktur Jalan Tahun 2023

Status Jalan	Jumlah Ruas	Panjang (Km)
Jalan Lingkungan	6.064	1.162,056
Jalan Kota	407	394,160
Jalan Provinsi	3	9,379
Jalan Nasional	12	57,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2024

Pembangunan *fly over* merupakan salah satu tindakan penyediaan prasarana transportasi untuk menambah kapasitas jalan sehingga dapat lebih banyak menampung volume lalu lintas dan memperlancar lalu lintas. Ketersediaan prasarana transportasi yang cukup efektif dapat memberikan keamanan dan keselamatan berkendara kepada para pelaku pergerakan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahun maka pembangunan *fly over* perlu dilaksanakan untuk mengimbangi volume lalu lintas yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah kendaraan. Oleh karena itu, pada

Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandar Lampung memulai pembangunan *fly over* Sultan Agung-Riyacudu. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah *fly over* dan *Underpass* di Kota Bandar Lampung yang telah terbangun:

Tabel 2. 122 Jumlah Fly Over dan Underpass

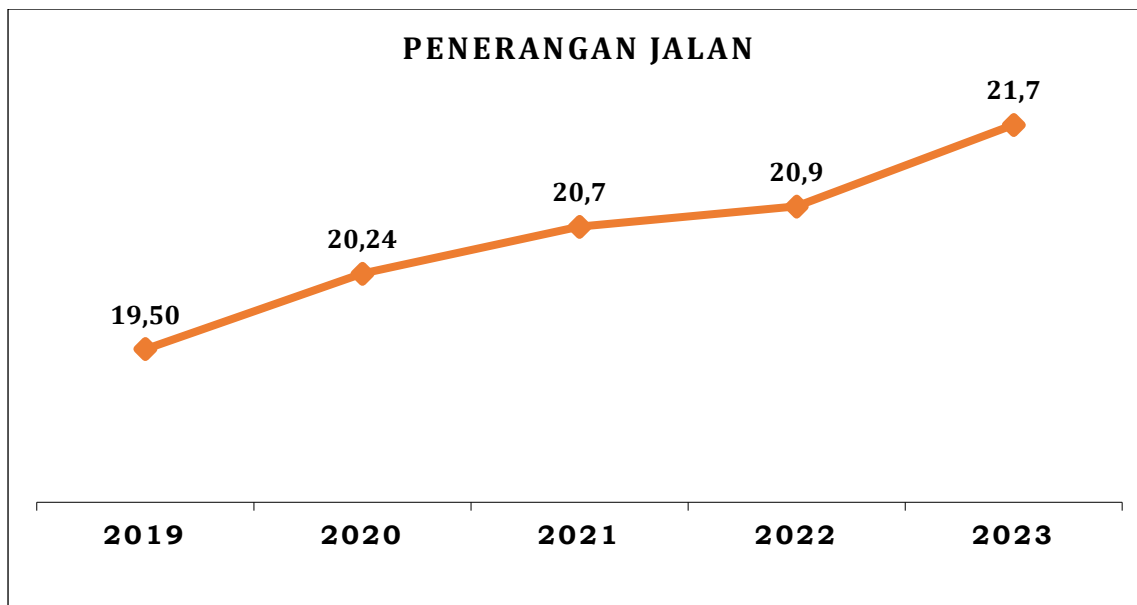
FLY OVER	KETERANGAN
<i>Fly Over</i> Sultan Agung – Riyacudu	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Antasari – Tirtayasa	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Gajah Mada - Ir. Juanda	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Kimaja - Ratu Dibalau	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Gajah Mada - Antasari	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Teuku Umar (MBK)	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Cik Dik Tiro - Pramuka	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Pramuka – Indra Bangsawan	Sudah Terbangun
<i>Underpass</i> Pagar Alam – Soemantri BJ	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Untung Suropati – RA. Basyid	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Abdul Haq – Komarudin	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Sultan Agung	Sudah Terbangun

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2024

Selain memprioritaskan jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, Pemerintah Kota bandar Lampung juga cukup memperhatikan kebutuhan para pejalan kaki yakni dengan memperbaiki kondisi pedestrian antara lain pada trotoatr Jalan Diponegoro, Jalan Ikan Hiu dan Jalan Sultan Agung.

2. Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya jalan. Tujuan utama dari penerangan jalan adalah untuk menghasilkan keakuratan, dan kenyamanan penglihatan di waktu malam hari, menjaga kualitas jarak pandang, serta memudahkan bagi kendaraan yang melintas dan juga pejalan kaki. Fungsi penerangan jalan umum selain untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari juga untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas serta untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Berikut adalah data Rasio jumlah lampu penerangan jalan umum terhadap panjang jalan kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 :



Gambar 2.47 Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota Tahun 2019-2023 (titik/km)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2024

Dengan demikian artinya pada tahun 2023 setiap 1 km jalan kota memiliki 21,70 titik lampu jalan.

3. Pengelolaan Drainase

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, *drainase* Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 sepanjang 117,551 km. Terdapat beberapa sistem *Drainase* yang direncanakan di Kota Bandar Lampung diantaranya adalah:

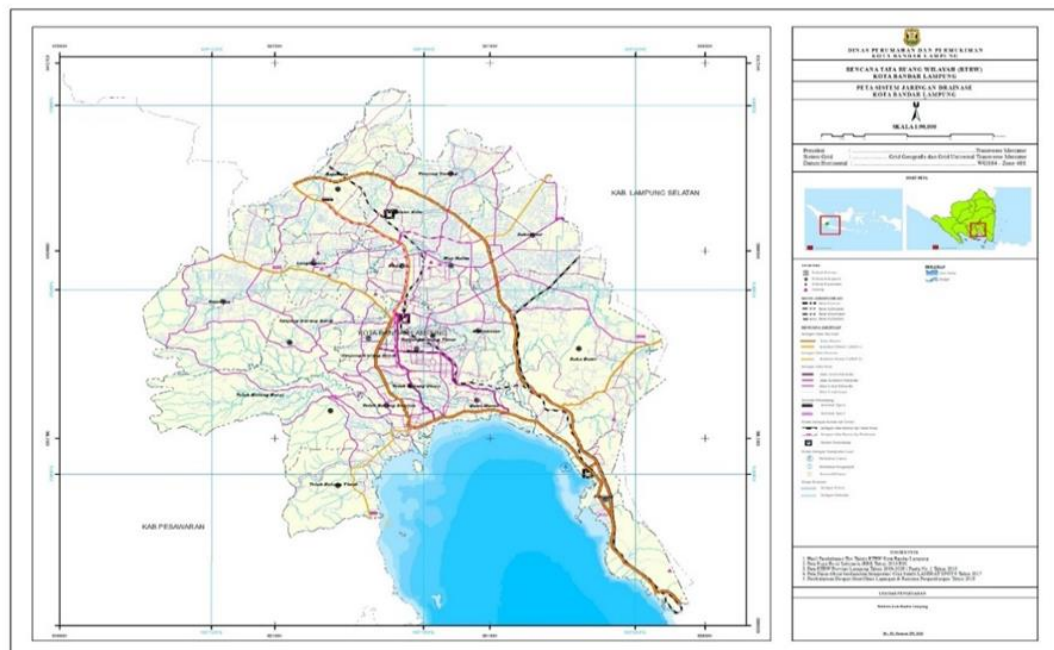
a. Sistem *Drainase* permukaan

Dilakukan dengan membuat penampungan kemudian dengan sistem retensi air akan diresapkan kedalam tanah dengan menggunakan sumur-sumur resapan dan sisanya akan merupakan limpasan permukaan yang akan ditampung oleh sistem *drainase* yang ada.

b. Sistem *Drainase* terpadu

a. Pada bagian atas saluran akan dimanfaatkan sebagai prasarana umum, seperti sambungan telephon, listrik bawah tanah, pipa air minum dan lain-lain.

- b. Pada bagian bawah saluran dimanfaatkan sebagai saluran *drainase*, seperti limbah rumah tangga dan air hujan pada musim hujan.
 - c. Pada sistem *drainase* terpadu akan dibuatkan tempat-tempat penampungan sampah sehingga sampah yang ada tidak langsung terbawa dan masuk pada sistem Drainase yang ada.
- c. Sistem *Drainase* secara retensi
- Dilakukan dengan membuat kolam-kolam di sekitar hunian atau pada daerah yang lebih luas sehingga dapat digunakan untuk menyimpan air dan penanggulangan banjir.
- d. Sistem *Drainase* secara infiltrasi
- Diterapkan pada daerah yang padat penduduknya dengan menggunakan:
- a. *Drainase* sumur resapan, dimaksudkan menampung air dari atap yang diteruskan melalui selokan keliling tritisan kemudian masuk kedalam sumur resapan. Resapan ini dilengkapi dengan pipa peluap untuk menyalurkan air ke saluran *drainase* jika air mengalami kelebihan.
 - b. *Drainase* saluran porous, diterapkan pada kawasan permukiman yang elevasi air tanahnya tidak terlalu dalam.



Gambar 2.48 Peta Sungai dan Jaringan Drainase

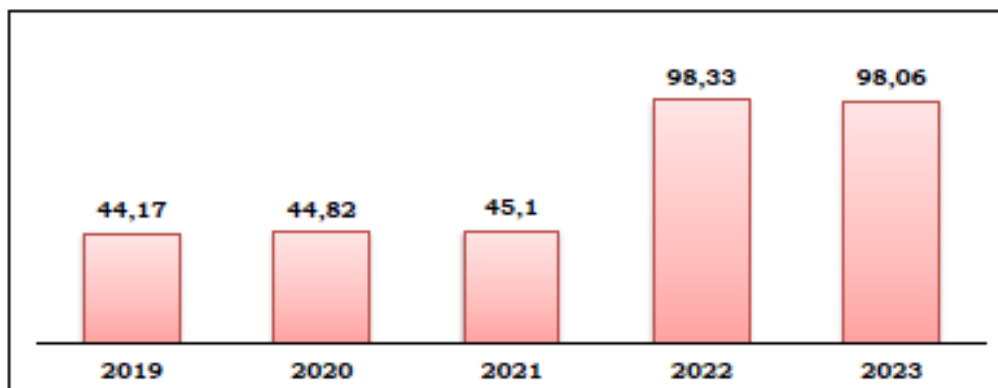
Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2024

4. Rumah Tinggal Bersanitasi Layak

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2024, pada Tahun 2023 terjadi peningkatan persentase rumah tinggal bersanitasi layak menjadi sebesar 92,85 persen dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai sebesar 89,07 persen. Dari data tersebut menunjukkan terdapatnya peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pada tingkat pendapatan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Namun demikian penyediaan prasarana sanitasi layak masih perlu untuk menjadi perhatian daerah sesuai dengan target pemerintah pusat 100 persen akses sanitasi layak. Disisi lain, kesadaran masyarakat akan kesehatan dengan memiliki dan menjaga rumah dengan sanitasi yang sehat juga tetap perlu untuk lebih ditingkatkan.

5. Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak

Berikut adalah data yang menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak Tahun 2019-2023:



Gambar 2.49 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2019-2023

6. Cakupan Layanan SPAM Perkotaan

Berikut adalah data yang menunjukkan cakupan layanan SPAM Perkotaan Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 123 Persentase Cakupan Layanan SPAM Perkotaan Tahun 2019-2023

Tahun	Cakupan
2019	32,14
2020	33,25
2021	32,15
2022	24,75*
2023	26,66*

*) Angka cakupan menurun karena perbedaan cara perhitungan dengan tahun sebelumnya.

Sumber : PDAM Kota Bandar Lampung, 2024

7. Aspek Angkutan Umum

Pelayanan transportasi yang ada saat ini dilayani oleh :

a. Bus Rapi Trans (BRT) Bandar Lampung

Berikut adalah data jumlah Bus Rapi Transit (BRT) Bandar Lampung Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 124 Bus Rapi Transit Bandar Lampung Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah BRT
2019	30
2020	30
2021	10
2022	10
2023	10

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2024

Jumlah Bus Rapi Trans (BRT) dengan rute pelayanan di gambarkan pada tabel bawah ini :

Tabel 2.125 Pelayanan Bus Rapi Trans Bandar Lampung Tahun 2019-2023

Jurusan	Jumlah (unit)		
	2019 dan 2020	2021	2022 dan 2023
Rajabasa – Panjang	30	10	10

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2024

b. Angkutan Perkotaan

Berikut adalah data jumlah Angkutan Perkotaan dan jumlah trayek angkutan pada Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 126 Angkutan Perkotaan Bandar Lampung Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Angkutan Perkotaan
2019	107
2020	107
2021	29
2022	78
2023	67

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2024

Tabel 2. 127 Jurusan, Warna dan Jumlah Trayek Angkutan Tahun 2019-2023

Jurusan	Warna	Jumlah Trayek				
		2019	2020	2021	2022	2023
T.Karang – Rajabasa	Biru Laut	4	4	1	3	3
T.Karang - Sukaraja	Ungu	13	13	1	12	11
Sukaraja – Serengsem	Orange	21	21	6	15	12
T.Karang – Garuntang	Hijau	5	5	3	2	2
T. Karang – Way Kandis	Cream	6	6	-	6	5
T.Karang - Jl. P.Tirtayasa – Ir. Sutami	Putih/Hijau	14	14	2	12	11
Tanjung Karang – Kemiling	Merah Hati	23	23	9	14	11
Tanjung – Sukarame	Abu-Abu	1	1	-	1	1
Tanjung Sukarame – Permata Biru	Abu-Abu/Biru	7	7	2	5	3
Tanjung Karang – Sam Ratulangi	Merah/Biru	10	10	5	5	5
Pasar Cimeng-Lemapasing	Biru Dongker	1	1	-	1	1
Sukaraja – Lempasing	Biru Dongker	2	2	-	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2024

2) Angkutan Taksi

Angkutan Taksi Perkotaan berbasis Argometer tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

3) Angkutan Berbasis Online

Terdapat beberapa perusahaan berbasis online yang membantu pelayanan angkutan yaitu Grab, Go-Jek, dan Maxim.

8. Aspek Lalu Lintas

Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung mengalami perkembangan kehidupan kota yang dinamis. Pertambahan jumlah penduduk dan dinamika kehidupan penduduk kota mendorong bertambahnya prasarana sarana perkotaan seperti perumahan, kendaraan, jaringan jalan, dan sarana-sarana perkotaan lainnya. Kondisi tersebut juga berdampak pada perubahan dan terjadinya alih fungsi lahan kota. Kawasan yang dulunya hanya lahan kosong sekarang sudah banyak beralih fungsi menjadi pemukiman maupun pusat perdagangan.

Pergerakan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung saat ini sangat pesat dan dapat melayani sampai ke wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kota Bandar Lampung. Kondisi tingkat pelayanan lalu lintas saat ini sebagai berikut :

- (1) Tingkat pelayanan pada Jalan arteri primer
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan arteri primer di Kota Bandar Lampung adalah C seperti Jl. Soekarno Hatta
- (2) Tingkat pelayanan pada Jalan arteri sekunder
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan arteri sekunder di Kota Bandar Lampung adalah C seperti Jl. ZA. Pagar Alam.
- (3) Tingkat pelayanan pada Jalan kolektor primer
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan kolektor primer di Kota Bandar Lampung adalah D seperti Jl. RA. Kartini.
- (4) Tingkat pelayanan pada Jalan kolektor sekunder
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan kolektor sekunder di Kota Bandar Lampung adalah C seperti Jl. Urip Sumoharjo.
- (5) Tingkat pelayanan pada Jalan lokal sekunder
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan lokal sekunder di Kota Bandar Lampung adalah B seperti Jl. M. Yamin.

Kondisi fasilitas pendukung jalan yang ada di Kota Bandar Lampung :

(1) Marka Jalan

Berikut adalah data jumlah marka jalan yang dikerjakan pada Tahun 2018-2022 :

Tabel 2. 128 Marka Jalan yang dikerjakan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah
2019	2.792,57 m ²
2020	24.781,01 m ²
2021	1.350 m ²
2022	2.775 m ²
2023	780 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2024

(2) Rambu Jalan

Berikut adalah data jumlah rambu-rambu lalu lintas Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 129 Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rambu kondisi baik	974	1.117	95	12	12
Rambu kondisi rusak	-	-	12	-	23
Rambu kondisi hilang	7	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2024

(3) Persimpangan

Berikut adalah data jumlah persimpangan Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 130 Jumlah Persimpangan Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Simpang Tiga Prioritas	45	44	44	44	44
Simpang Tiga APILL	10	7	7	7	7
Simpang Tiga Bundaran	-	3	3	3	3
Simpang Tiga Fly Over	-	3	3	3	3
Simpang Tiga Underpass	-	1	1	1	1
Simpang Empat Prioritas	9	9	9	9	9
Simpang Empat APILL	14	12	12	12	12
Simpang Empat Bundaran	-	7	7	7	7

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2024

4) Data Kasus/Kejadian Kecelakaan per Tahun

Berikut adalah data kejadian kecelakaan Tahun 2019-2023:

Tabel 2.131 Kasus/Kejadian Kecelakaan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kejadian
2019	297
2020	220
2021	175
2022	175
2023	145

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan data kecelakaan POLRESTA Kota Bandar Lampung, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama 2 (dua) tahun terakhir. Namun demikian berbagai upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap terus dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

9. Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi)

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah jaringan komunikasi Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 132 Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2019-2023

Keterangan	Jumlah Jaringan Komunikasi (Unit)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Menara di atas Gedung	184	165	164	164	165
Menara di atas tanah	378	393	397	397	398
Menara eksisting	562	558	561	561	563
Menara baru	-	-	2	-	3
Menara terbangun	-	-	-	-	-
Menara tahap pembangunan	-	-	-	-	-
Jumlah	1.035	1.124	1.116	1.114	1.129

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, 2024

Data tersebut menunjukkan Kota Bandar Lampung sudah memiliki ketersediaan sarana dan prasarana untuk informasi dan telekomunikasi yang mendukung kegiatan masyarakat dan pembangunan.

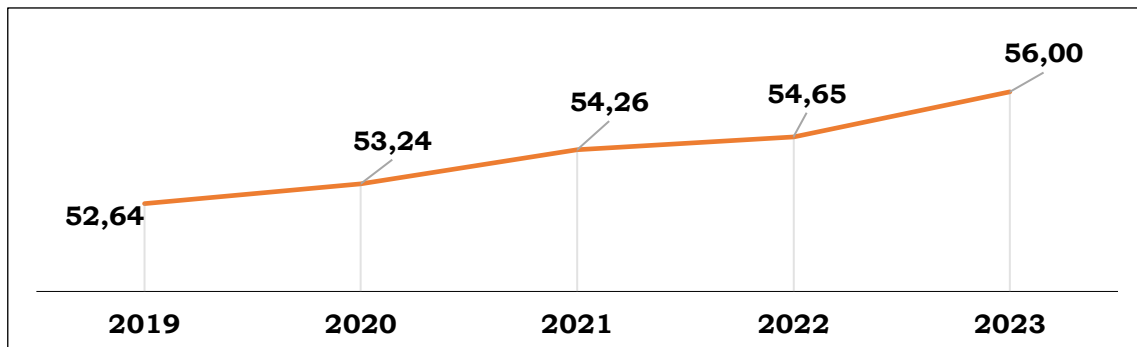
10. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya

Berikut adalah data yang menunjukkan pelanggaran PERDA Penataan Ruang Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 133 Pelanggaran Peraturan Daerah Penataan Ruang Tahun

Uraian	Jumlah /Kasus				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pelanggaran PERDA Penataan Ruang yang ditangani	79,23%	58,51%	75%	89,9%	95%
Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	130	94	60	63	58
- Yang terselesaikan	103	55	45	56	55
- Yang terus ditangani untuk dilakukan penyesuaian aturan	27	39	15	7	3

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2024

**Gambar 2.50 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukannya Tahun 2019-2023**

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2024

11. Rasio Ruang Terbuka Hijau dari Luas Wilayah Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 30 persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari publik 20 persen dan privat 10 persen. Kondisi eksisting di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau saat ini jika dilihat dari luasannya belum dapat memenuhi ketentuan tersebut, dan ruang terbuka hijau yang sudah ada perlu direvitalisasi fungsinya kembali.

RTH publik terdiri dari taman kecamatan, taman kota, pemakaman, sempadan sungai dan sempadan pantai, sempadan mata air dan kawasan ekosistem mangrove yang tersebar diseluruh kecamatan wilayah Kota

Bandar Lampung. Sedangkan RTH *private* tersebar pada lahan dengan fungsi permukiman di seluruh bagian wilayah kota. Selain itu RTH *private* juga tersebar pada kawasan industri yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Panjang, Sukabumi dan Kecamatan Bumi Waras. Luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bandar Lampung saat ini berjumlah 658,57 Ha atau sekitar 4,37% dari total luas lahan terbangun Kota Bandar Lampung yang terdiri dari taman kota sebesar 355 Ha, taman kecamatan sebesar 22 Ha, pemakaman sebesar 62 Ha, sempadan sungai dan sempadan pantai sebesar 181,2 Ha, sempadan mata air 0,37 Ha dan kawasan ekosistem mangrove sebesar 38 Ha.

12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas/ Pencemaran Air, Indeks Kualitas/Pencemaran Udara, dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan. Berikut adalah data IKLH Tahun 2019-2023:

Tabel 2.134 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023

Tahun	IKLH
2019	58,81
2020	59,67
2021	62,98
2022	58,86
2023	58,38

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2024

Berdasarkan data diatas Bandar Lampung pad tahun 2023 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masuk dalam kategori sedang, dimana Perhitungan IKLH tahun 2020-2024 didasarkan pada surat edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

1. Angka Kriminalitas

Berikut adalah data jumlah tindak kriminalitas Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 135 Jumlah Tindak Kriminalitas Tahun 2019-2023

Tahun	Kriminalitas
2019	1.734
2020	3.349
2021	2.504
2022	1.632
2023	2.795

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, 2024

2. Lama Proses Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, pendelegasian yang dimaksud yaitu:

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI;
- Perizinan Berusaha Non KBLI;
- Perizinan Non Berusaha Non KBLI;
- Non Perizinan.

Tabel 2. 136 Data Realisasi Berdasarkan Jenis Perizinan DPM-PTSP T.A. 2023

No.	Jenis izin	Jumlah Izin
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Ber KBLI;	26.741
	- Nomor Induk (NIB) Berisiko Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, Tinggi	
2.	Perizinan Berusaha Non KBLI	-
3.	Perizinan Non Berusaha Non KBLI; dan	4.030
	- Izin Kesehatan, Izin Reklame, Izin Pendidikan	
4.	Non Perizinan	
	- Surat Keterangan Penelitian, Lembaga Sosial, PBG, PKKPR	3.204
	JUMLAH	33.975

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2024

Dukungan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung Nomor 500.16.7.2/475 Tahun 2024 tentang Perizinan Daerah pada pasal 15 yaitu Pemberian insentif dan pemberian kemudahan perizinan.

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan dalam perizinan dan penanaman modal kepada perseorangan dan/atau badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Pemberian insentif dapat berbentuk :
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah
- 3) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
 - b. Percepatan pemberian perizinan
 - c. Pemberian bantuan teknis
- 4) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan dalam pemberian perizinan dan penanaman modal meliputi:
 - a. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
 - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan
 - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya

- d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu
 - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus
- 5) Sektor atau usaha kegiatan yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan dalam pemberian perizinan dan penanaman modal meliputi:
- a. Sektor listrik, gas dan air bersih
 - b. Sektor konstruksi dan bangunan
 - c. Sektor pariwisata dan kebudayaan termasuk sektor pendukungnya
 - d. Sektor industri diprioritaskan industri yang ramah lingkungan
 - e. Sektor transportasi dan komunikasi

Adapun jumlah dan macam pajak serta retribusi daerah di Kota Bandar Lampung ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 137 Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah

Jenis Pajak dan Retribusi	Tahun		
	2021	2022	2023
Pajak Hotel	1	1	1
Pajak Restoran	1	1	1
Pajak Hiburan	6	6	6
Pajak Reklame	6	6	6
Pajak Penerangan Jalan	1	1	1
Pajak Parkir	1	1	1
Pajak Air Tanah	1	1	1
Pajak Mineral Batuan Bukan Logam	1	1	1
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1	1	1
Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	1	1	1
Retribusi Jasa Umum	5	5	7
Retribusi Jasa Usaha	6	5	7
Retribusi Perizinan Tertentu	2	2	2

Sumber: Bapenda Kota Bandar Lampung, 2024

Permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung di dominasi oleh masalah persampahan. Masalah persampahan yang timbul sebagai dampak atas meningkatnya aktivitas penduduk di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penanganan sampah yang telah dilakukan di Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.138 Penanganan Sampah Tahun 2019-2023

Tahun	Produksi Sampah Perhari (Ton)	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton)	Persentase
2019	683	650	95
2020	757	700	92
2021	770	750	97
2022	775	760	98
2023	786	767	98

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2024

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pemukiman di Kota Bandar Lampung menuntut kesiapan pemerintah dalam mengatasi masalah persampahan. Berikut adalah data yang menunjukkan UPT Pengelolaan Sampah dan lokasi TPS di Kota Bandar Lampung :

Tabel 2. 139 UPT Pengelolaan Sampah dan Lokasi TPS

UPT Pengelolaan Sampah	Lokasi TPS
Panjang	1 Candy Baypass
	2 Srengsem
	3 Ketapang Kuala Ki Agus Anang
	4 Karang Maritim
	5 Pasar Panjang
	6 LDC Belakang
	7 Ketapang Kuala Atas
Sukabumi	1 TPS Villa Marina Jl. P. Singkep 7
	2 TPS Griya Abdi Negara Jl. P. Tirtayasa
	3 TPS Perumahan Nusantara Permai
	4 TPS Container Campang Raya Jl. Alimudin Umar
	5 TPS Jl. Soekarno Hatta
	6 TPS Karunia Indah Jl. P. Bangka
	7 TPS Puskud
Way Halim	1 TPS Jl. Belia Jagabaya Ii
	2 TPS Ismail, Jl. Pulau Buton
	3 TPS Kali Paman, Jl. Pulau Seram
	4 TPS Villa Citra, Jl. Hj Said
	5 TPS Dom, Jl. Morotai
	6 TPS Gantung BTN 3 Way Halim Permai
	7 TPS Gantung Jl. Griya Utama WHP
	8 TPS Pkor Jl. Sumpah Pemuda
	9 TPS Pasar Perumnas Jl. Gunung Rajabasa Raya
Sukarame	1 TPS UIN Kel-Sukarame
	2 TPS Umbul Rakub Kel- Way Dadi
	3 TBS Gamtung Man, Kel- Kopri Jaya
Teluk Betung Timur	1 TPS Teluk Bone Jl. Telukbone
	2 TPS Jl. Ikan Sebelah
	3 TPS Jl. RE Martadinata Putra Wisata
	4 TPS Jl. Zulkarnaen Subing
	5 TPS Lempasing Jl. Remartadinata
Rajabasa	1 TPS UPT Rajabasa
	2 TPS Pasar Rajabasa Raya
	3 TPS Gedung Meneng

UPT Pengelolaan Sampah	Lokasi TPS
Labuhan ratu	1 TPS Gantung Jl. Sultan Haji
	2 TPS Labuhan Ratu Gg. Family 1 Labuhan Dalam
	3 Kampung Baru
Teluk Betung Barat	1 TPS Container Jl. Dr. Setia Budi Kuripan
	2 TPS Konatainer Jl. Wan Abdurahman Batu putuk
Kedamaian	1 TPS Jl. Merbau Kel. Kupang Raya
	2 TPS Jl. Putri Balau Kel. Bumi Kedamaian
Tanjung Karang Timur	1 Pasar Tugu
	2 Bukit Klutum
Enggal	1 Jl. Way Sekampung
Kedaton	1 TPS Gantung Sidodadi Jl. Badak
	2 TPS Ratulangi
Kemiling	1 BKP
	2 Beringin Raya Jl. Garuda
	3 Beringin Jaya, Kalpataru
Tanjung Karang Barat	1 Gang Jeruk
	2 Ps. Tamin
	3 TPS Ratulangi
Teluk Betung Selatan	1 Cimeng
	2 Sumur Putri
	3 Kali Akar
	4 Talang Polda
	5 Gunung Mas
	6 Pesawahan
Langkapura	1 TPS Gantung Langkapura Gang Swadaya
	2 TPS Induk Gang Senen
Bumi Waras	1 TPS Kunyit Bw
	2 TPS Payang Bw
	3 TPS Nila Kandi Bw
	4 TPS Container Kangkung Bw
Teluk Betung Utara	1 TPS Dewi Sartika
	2 TPS Alfurqon Jl. Dipenogoro
	3 TPS Container Jl. Dr. Cipto Mangunnkusumo
	4 TPS Gantung Gg. Nusa Indah
	5 Bak Sampah Depan Kejaksaan Tinggi
Tanjung Senang	1 TPS Tanjung Senang
Tanjung Karang Pusat	1 TPS Bambu Kuning
	2 TPS Terminal Ramayana
	3 TPS Pasar Bawah
	4 TPS Hanoman
	5 TPS Pasar Tamin
	6 TPS Pasar Gintung
	7 TPS Gunung Botak
TPA Bakung	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2024

TPA Bakung merupakan satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. TPA Bakung mempunyai luas 14,01 ha dan mulai beroperasi pada Tahun 1994. Hingga saat ini TPA Bakung sudah beroperasi selama $\pm$ 27 Tahun dengan sampah yang masuk ke TPA $\pm$ 600 ton/hari dan pada saat ini meningkat menjadi $\pm$ 750 ton/hari. Pengelolaan sampah di TPA Bakung masih menggunakan sistem *open dumping* dikarenakan sampah di TPA Bakung yang *overload* dan sudah

terlalu tinggi untuk dikelola (saat ini ketinggian sampah mencapai ± 20 m) sehingga sampah yang masuk dibuang dengan cara menumpuk. Hanya sekitar 10% sampah yang masuk ke TPA dikelola dengan cara *control Landfill*, yaitu dengan cara penimbunan tanah secara berkala pada tumpukan sampah. Ketinggian sampah di TPA Bakung saat ini tentunya sangat membahayakan keselamatan para pemulung yang beroperasi di TPA Bakung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mengupayakan pengelolaan sampah dengan skema *Waste to Energi* melalui pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) atau pemanfaatan sampah untuk dijadikan *Pelet/RDF (Refuse - Derived Fuel)* dengan mencari alternatif pembiayaan di luar APBD.

3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Indeks Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah Kota Bandar Lampung. Tim Penegakan Peraturan Daerah dan Tim Ketertiban Umum Kota Bandar Lampung telah melaksanakan beberapa penertiban antara lain Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima; Operasi Penertiban Tempat Hiburan Pada Bulan Suci Ramadhan; Operasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis Serta Anak Jalanan; Pendataan Perizinan serta Objek-objek Pajak Tempat-tempat Usaha di Wilayah Kota Bandar Lampung; Pengamanan Unjuk Rasa; Penertiban Spanduk dan Banner Yang Pemasangannya Melanggar Peraturan Daerah dan yang Telah Habis Masa Izin dan lain sebagainya. Berikut adalah data terkait aktifitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2019-2023:

Tabel 2.140 Persentase Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	Penegakan Perda (Persen)
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, 2024

Data diatas menggambarkan aktifitas penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

4. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Berikut adalah data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 141 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Anak terlantar	1.307	220	230	225	70
Lanjut usia terlantar	1.635	628	866	866	440
Perempuan rawan sosial ekonomi	427	900	635	635	37
Anak Jalanan	1	61	64	64	0
Anak yang berhadapan dengan hukum	-	10	2	2	89
Korban penyalahgunaan NAPZA	43	129	115	115	0
Penyandang cacat	820	817	963	963	249
Gelandangan dan pengemis	8	48	47	47	65
Tuna susila	47	144	172	172	0
Bekas warga binaan LP (napi)	19	69	79	79	0
Fakir miskin	43.322	43.332	55.948	55.948	66.505
Pemulung	151	264	391	391	0

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2024

Berikut adalah data Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 142 Persentase PPKS yang Tertangani Tahun 2019-2023

Tahun	PPKS yang Tertangani (persen)
2019	50,00
2020	70,00
2021	74,00
2022	77,00
2023	69,82

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2024

5. Tempat Pemakaman

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah tempat pemakaman sampai dengan Tahun 2023 :

Tabel 2. 143 Jumlah Tempat Pemakaman Penduduk sampai dengan Tahun 2023

Jenis Tempat Pemakaman	Jumlah Tempat Pemakaman (Lokasi)
Tempat Pemakaman Umum	103
Tempat Pemakaman Khusus	43
Tempat Pemakaman Bukan Umum	138
Total	284

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2024

Data menunjukkan jumlah tempat pemakaman yang tersedia di Kota Bandar Lampung yang terdiri dari tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman khusus. Jumlah tersebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman di Kota Bandar Lampung.

Saat ini terdapat 6 (enam) areal pemakaman milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 3 (tiga) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Kemiling dengan luasan sebesar 38.600 m², 1 (satu) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Barat dengan luasan sebesar 14.449 m², dan 1 (satu) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Langkapura dengan luasan 6.150 m², serta 1 (satu) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Timur yang diperuntukkan untuk korban *Covid-19* dengan luasan sebesar 30.000 m². Pengelolaan areal pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah terkait penyediaan infrastruktur penunjang pemakaman seperti pagar, talud/bronjong dan akses jalan ke areal pemakaman baik milik pemerintah maupun pemakaman milik masyarakat/umum. Berikut adalah rincian luasan pemakaman milik Pemerintah Kota Bandar Lampung :

Tabel 2. 144 Luasan Areal Pemakaman Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung

Lokasi Pemakaman	Luasan (m²)
Kelurahan Beringin Kecamatan Kemiling	20.000
Kelurahan Bukit Kemiling Permai Kecamatan Kemiling	18.000
Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling	600
Kelurahan Batu putuk Kecamatan Teluk Betung Barat	14.449
Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura	6.150
Kelurahan Teluk Betung Barat Kecamatan Teluk Betung Timur	30.000

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2024

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1 Capaian Kinerja Makro Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2005-Tahun Berjalan

Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Secara umum, tujuan dari Pembangunan daerah adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berikut adalah capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2005 - Tahun Berjalan.

Tabel 2.145 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2005 - 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Kinerja Tahun 2010	Capaian Kinerja Tahun 2015	Capaian pada Tahun 2022*	Pertumbuhan / Penurunan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,52**	75,70**	74,81	78,01	6,11	Tahun 2014 terdapat perubahan metode perhitungan
2	Angka Kemiskinan (Persen)	9,63	14,58	10,33	8,21	-14,75	-
3	Angka Pengangguran (TPT) (Persen)	13,14***	11,92	8,51	7,91	-39,80	Data kinerja awal periode perencanaan yang tersedia adalah data tahun 2008
4	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,03	6,01	6,33	4,95	-1,59	Perekonomian Kota Bandar Lampung mulai pulih secara bertahap pada tahun 2021 dan 2022 yang sempat berkontraksi pada tahun 2020 akibat covid-19
5	Pendapatan Per kapita	-	-	-	-	-	Konsep dasar pendapatan per kapita sama dengan PDRB per kapita
6	Ketimpangan Pendapatan	0.325****			0.369	13,54	Pada tingkat Kab/Kota mulai dilakukan perhitungan pada tahun 2011
7	PDRB Per Kapita (Rp)	8.391.126	25.413.395	40.262.886	56.152.403	569,19	ADHB

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung dan BPS Provinsi Lampung

Ket: *) Capaian Tahun 2022

***) Perhitungan dengan metode lama

****) Data Tahun 2008

*****) Data Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian indikator kinerja makro pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2005 - tahun berjalan (2022). Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi makro pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2022 menunjukkan kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan (2005). Capaian indikator kinerja makro pembangunan tersebut merupakan ukuran keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan di Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2005 s.d. tahun berjalan (2022). Adapun secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja makro pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Selama kurun waktu tahun 2005-2022, pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandar Lampung pada Tahun 2005 sebesar 73,52 dan pada tahun 2023 sebesar 79,86.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2014 perhitungan IPM menggunakan metode baru dengan indikator dan metode penghitungan yang berubah yakni :

- Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah
- Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
- Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks Pendidikan dan indeks pengeluaran atau dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Berdasarkan data dari BPS Kota Bandar Lampung IPM Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 sebesar 74,34. Adapun Posisi IPM Kota Bandar Lampung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 menduduki posisi teratas diantara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

2.5.1.2 Angka Kemiskinan

Sejalan dengan terus meningkatnya pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung, persentase penduduk miskin di Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2005 s.d. 2022 dapat terus mengalami penurunan. Pada tahun 2005 persentase penduduk miskin di kota Bandar Lampung sebesar 9,63 persen kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar 7,77 persen atau mengalami penurunan sebesar 14,75 persen.

Secara tahunan, pada beberapa tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 sempat mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2019 akibat pandemi *Covid-19*. Persentase penduduk miskin di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 sebesar 8,81 persen atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 8,71 persen. Di sepanjang tahun 2021, pandemi *Covid-19* masih terasa dampaknya sehingga pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kota Bandar Lampung menjadi sebesar 9,11 persen atau kembali mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Namun pada tahun 2023 angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung dapat diturunkan jika dibandingkan tahun 2021 yakni menjadi sebesar 7,77 persen.

2.5.1.3 Angka Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bandar Lampung selama periode 2008 sampai dengan 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2008 sebesar 13,14 persen dan pada tahun 2022 sebesar 7,91 persen atau mengalami penurunan sebesar 14,75 persen.

Dalam perkembangannya pada beberapa tahun terakhir, TPT Kota Bandar Lampung sempat mengalami kenaikan. TPT Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 sebesar 7,12 persen. Namun adanya pandemi covid-19 telah menyebabkan menurunnya kesempatan kerja/lapangan pekerjaan sepanjang tahun 2020 dan 2021. Hal ini berimplikasi pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 yang berlanjut pada tahun 2021. TPT di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,79 persen kemudian pada tahun 2021 tercatat sebesar 8,85 persen.

Adanya kesempatan kerja/lapangan pekerjaan dalam setahun terakhir ini berimplikasi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandar Lampung sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2022 sebesar 7,91 atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 8,85 persen.

2.5.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,03 persen kemudian pada tahun 2022 sebesar 4,95 persen. Secara umum kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2005 sampai dengan 2019, cukup baik yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi daerah berada pada kisaran 5 persen sampai dengan 7 persen. Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19* telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,88 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 ditengah masih berlangsungnya pandemi *Covid-19*, perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan perbaikan yakni kembali mengalami pertumbuhan sebesar 3,10 persen seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Lampung. Selanjutnya pada tahun 2022, kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung terus mengalami pemulihan dan mampu tumbuh sebesar 4,95 persen.

2.5.1.5 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan di Kota Bandar Lampung selama periode/kurun waktu 2011 sampai dengan 2022 relatif sedikit mengalami perubahan namun cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari angka gini ratio Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 yang sebesar 0,325 kemudian pada tahun 2022 sebesar 0,369. Angka gini rasio tersebut menunjukkan kesenjangan pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif sedikit mengalami perubahan namun cenderung meningkat. Terkait angka gini rasio, berdasarkan data BPS beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa gini ratio di Kota Bandar Lampung berfluktuatif. Pada Tahun 2018 gini ratio di Kota Bandar Lampung sebesar

0,342 konstan dibanding Tahun 2017. Selanjutnya gini rasio di Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 menurun menjadi sebesar 0,316. Kemudian di tengah pandemi *Covid-19*, rasio gini Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 0,359. Namun demikian pada Tahun 2021, rasio gini di Kota Bandar Lampung kembali menurun menjadi sebesar 0,344. Namun pada tahun 2022 rasio gini di Kota Bandar Lampung kembali meningkat menjadi sebesar 0,369.

2.5.1.6 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menginterpretasikan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita menandakan bahwa semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya penurunan menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun.

PDRB per kapita Kota Bandar Lampung (ADHB) pada tahun 2022 mampu mengalami peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2005 seiring dengan meningkatnya kinerja perekonomian Kota Bandar Lampung selama tahun 2005 sampai dengan 2022. PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk pada tahun tersebut. PDRB per kapita (ADHB) Kota Bandar Lampung pada Tahun 2005 sebesar Rp8.391.126 kemudian pada Tahun 2022 mencapai Rp56.152.403 atau meningkat sebesar 569,19 persen. Secara tahunan, selama periode tahun 2005 sampai dengan 2019 nilai PDRB per kapita (ADHB) Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19* menyebabkan PDRB per kapita (ADHB) Kota Bandar Lampung mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2021 ditengah

masih berlangsungnya pandemi *Covid-19*, perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan perbaikan sehingga PDRB per kapita (ADHB) Kota Bandar Lampung kembali mengalami peningkatan dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp56.152.403.

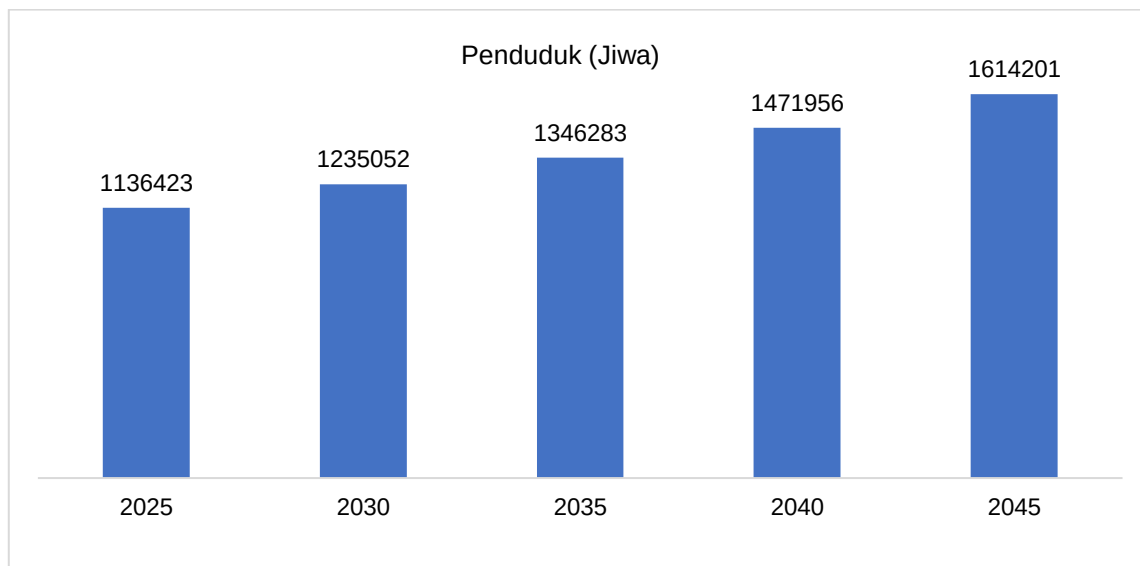
2.6 Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan Per Lima Tahun

Aspek kependudukan adalah elemen penting dalam perencanaan pembangunan. Dengan memahami gambaran demografi masa depan, suatu wilayah dapat menetapkan arah pengembangan layanan publik di masa depan, terutama dalam hal memperkirakan kebutuhan infrastruktur layanan dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, bagian ini akan secara khusus menyajikan hasil proyeksi kependudukan Kota Bandar Lampung tahun 2025 sampai tahun 2045. Selain berfungsi sebagai pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan infrastruktur layanan dasar masyarakat, proyeksi demografi kependudukan Kota Bandar Lampung juga dapat memberikan gambaran umum tentang kondisi sumber daya manusia di masa depan, sehingga rasio ketergantungan penduduk, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif dan usia non-produktif, dapat diketahui. Dalam RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045 ini, proyeksi kependudukan diharapkan akan menjadi landasan penting dalam proses penyusunan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Dalam melakukan proyeksi demografi kependudukan Kota Bandar Lampung memperhatikan laju pertumbuhan penduduk tahun selama lima tahun terakhir yakni tahun 2019 (1,71 persen), tahun 2020 (10,89 persen), tahun 2021 (0,89 persen), tahun 2022 (1,10 persen) dan tahun 2023 (1,06 persen). Berdasarkan hasil perhitungan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2025 sebanyak 1.136.423 jiwa. Sementara itu pada tahun 2045 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung mencapai 1.614.201 jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi yang signifikan, terutama dalam hal tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM), dan potensi pasar domestik untuk perekonomian. Namun, di sisi lain, jumlah penduduk yang besar juga menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mengembangkan

kualitas SDM yang lebih sehat, terdidik, dan berdaya saing. Tantangan lainnya mencakup penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, menjaga kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, dan menyediakan fasilitas layanan dasar bagi penduduk,



Gambar 2.51 Proyeksi Penduduk Kota Bandar Lampung

Sumber : Hasil Analisis Tim RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045

Tingginya jumlah masyarakat pada usia produktif di Kota Bandar Lampung menjadi peluang kota ini mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi merupakan keuntungan yang didapat oleh suatu wilayah akibat dari banyaknya sumber daya manusia yang siap bekerja atau bisa dikatakan banyaknya tenaga kerja yang tersedia sehingga keuntungan yang didapat merupakan pendapatan perkapita sebagai output dari tenaga kerja yang ada. Namun pada sisi lain diperlukan upaya penting dari pemerintah dan pemangku kepentingan ekonomi untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja dan investasi dalam sektor-sektor yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi juga dapat menjadi tantangan jika tidak ada cukup peluang kerja yang tersedia untuk memenuhi harapan angkatan kerja yang besar.



Gambar 2.52 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia Kota Bandar Lampung

Sumber : Hasil Analisis Tim RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045

Tabel 2.146 Proyeksi Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2024 - 2045

Kecamatan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Teluk Betung Barat	39682	40872	42098	43360	44661	46000	47380	48800	50264	51771	53324	54923
Teluk Betung Timur	51036	52171	53331	54517	55729	56968	58235	59530	60853	62206	63589	65003
Teluk Betung Selatan	39512	39665	39819	39973	40128	40284	40440	40597	40755	40913	41072	41231
Bumi Waras	58569	58944	59322	59702	60085	60470	60857	61247	61640	62035	62432	62832
Panjang	75203	75549	75897	76247	76598	76951	77306	77662	78020	78379	78740	79103
Tanjung Karang Timur	38838	39136	39437	39740	40045	40353	40663	40975	41290	41607	41926	42248
Kedamaian	53751	54047	54345	54644	54945	55247	55552	55857	56165	56474	56785	57098
Teluk Betung Utara	50782	50977	51174	51371	51569	51768	51967	52167	52368	52570	52772	52976
Tanjung Karang Pusat	50441	50557	50672	50788	50904	51021	51138	51254	51372	51489	51607	51725
Enggal	25629	25506	25384	25262	25141	25020	24901	24781	24663	24544	24427	24310
Tanjung Karang Barat	64359	65546	66755	67986	69240	70517	71817	73141	74490	75864	77263	78688
Kemiling	89037	91862	94775	97782	100883	104083	107385	110791	114305	117931	121672	125531
Langkapura	44620	45905	47226	48585	49983	51422	52902	54425	55991	57603	59261	60966
Kedaton	52938	53493	54054	54621	55194	55773	56358	56949	57546	58150	58760	59376
Rajabasa	57039	58142	59265	60411	61578	62768	63981	65217	66478	67762	69072	70407
Tanjung Senang	64615	66906	69278	71735	74279	76913	79640	82464	85388	88416	91551	94797
Labuhan Ratu	48746	49290	49840	50396	50958	51527	52102	52683	53271	53865	54466	55074
Sukarame	68520	69930	71369	72837	74336	75866	77427	79021	80647	82306	84000	85729
Sukabumi	75273	77428	79644	81924	84270	86682	89164	91716	94342	97043	99821	102679
Wayhalim	69476	70498	71535	72588	73656	74740	75840	76956	78089	79238	80404	81587
Total	1118066	1136423	1155221	1174470	1194183	1214373	1235052	1256235	1277935	1300166	1322944	1346283

Kecamatan	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Teluk Betung Barat	56570	58266	60013	61813	63667	65576	67543	69568	71654	73803
Teluk Betung Timur	66449	67926	69437	70980	72559	74172	75821	77507	79230	80992
Teluk Betung Selatan	41391	41552	41713	41875	42037	42200	42364	42528	42693	42859
Bumi Waras	63235	63640	64048	64458	64871	65287	65705	66126	66550	66976
Panjang	79467	79834	80201	80571	80942	81315	81690	82066	82444	82824
Tanjung Karang Timur	42573	42900	43229	43561	43896	44233	44573	44915	45260	45608
Kedamaian	57412	57728	58046	58366	58687	59010	59335	59662	59990	60320
Teluk Betung Utara	53180	53384	53590	53797	54004	54212	54421	54630	54841	55052
Tanjung Karang Pusat	51843	51962	52081	52200	52320	52439	52559	52679	52800	52921
Enggal	24193	24077	23962	23847	23733	23619	23506	23393	23281	23170
Tanjung Karang Barat	80139	81617	83122	84655	86216	87806	89425	91074	92754	94464
Kemiling	129513	133621	137859	142232	146744	151398	156201	161155	166267	171541
Langkapura	62721	64526	66383	68294	70260	72282	74362	76503	78704	80970
Kedaton	59999	60628	61264	61907	62556	63213	63876	64546	65223	65907
Rajabasa	71767	73154	74568	76009	77478	78975	80501	82057	83643	85259
Tanjung Senang	98159	101640	105244	108976	112840	116841	120984	125274	129716	134316
Labuhan Ratu	55688	56310	56938	57573	58216	58865	59522	60186	60858	61537
Sukarame	87493	89293	91131	93006	94920	96874	98867	100902	102978	105097
Sukabumi	105618	108642	111752	114951	118242	121627	125109	128691	132375	136164
Wayhalim	82788	84006	85242	86497	87770	89061	90372	91702	93051	94420
Total	1370198	1394707	1419824	1445568	1471956	1499005	1526735	1555165	1584313	1614201

Sumber : Hasil Analisis Tim RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per Lima Tahun

2.6.2.1 Air Bersih

Dalam menentukan kebutuhan jumlah air bersih yang akan dipergunakan untuk keperluan domestik dan lainnya yang memerlukan air dilakukan perkiraan yang mendekati besarnya kebutuhan air sehari-hari. Besarnya kebutuhan air yang digunakan dalam perhitungan diperkirakan berdasarkan kondisi penduduk dan perkembangannya. Rencana penyediaan sistem air bersih yang memadai bagi penduduk Kota Bandar Lampung disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2017 mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.

Kebutuhan air bersih penduduk mempertimbangkan standar pemenuhan kebutuhan air bersih seperti *standard coverage* (90%), *household connection* (HC) dengan kebutuhan per kapita sebesar 150 liter/orang/hari, dan *public connection* (PC) dengan kebutuhan per kapita sebesar 30 liter/orang/hari. Kebutuhan air bersih total untuk domestik adalah penjumlahan kebutuhan air bersih dari *Household Connection* (HC) dan *Public Connection* (PC) serta non-domestik (20% dari total kebutuhan air bersih domestik).

Rencana ini bertujuan untuk memastikan setiap penduduk mendapatkan akses air bersih yang cukup dan sesuai standar kesehatan, serta mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan air di masa mendatang. Kebutuhan air penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 sebesar 225,740,065 lt/orang. Sementara itu pada tahun 2045 sebesar 324,987,477 lt/orang. Rincian kebutuhan air bersih untuk setiap Kecamatan di Kota Bandar Lampung periode tahun 2025-2045 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.147 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Bandar Lampung

Kecamatan	Total Kebutuhan air bersih Domestik dan Non-Domestik (lt/orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Teluk Betung Barat	8,116,841	9,409,103	10,907,102	12,643,595	14,656,550
Teluk Betung Timur	10,360,617	11,564,833	12,909,014	14,409,429	16,084,238
Teluk Betung Selatan	7,877,074	8,031,076	8,188,088	8,348,170	8,511,382
Bumi Waras	11,705,732	12,085,613	12,477,823	12,882,761	13,300,841
Panjang	7,772,085	8,075,182	8,390,099	8,717,297	9,057,255
Tanjung Karang Timur	10,733,245	11,031,988	11,339,047	11,654,651	11,979,040
Kedamaian	10,123,618	10,320,112	10,520,419	10,724,614	10,932,772
Teluk Betung Utara	10,040,022	10,155,396	10,272,097	10,390,138	10,509,535
Tanjung Karang Pusat	5,065,201	4,945,014	4,827,679	4,713,128	4,601,295
Enggal	13,016,829	14,262,156	15,626,625	17,121,632	18,759,668
Tanjung Karang Barat	18,242,802	21,325,535	24,929,200	29,141,825	34,066,315
Kemiling	9,116,192	10,505,822	12,107,281	13,952,859	16,079,768
Langkapura	10,623,134	11,192,095	11,791,528	12,423,067	13,088,429
Kedaton	11,546,352	12,705,972	13,982,055	15,386,298	16,931,570
Rajabasa	13,286,855	15,815,682	18,825,809	22,408,841	26,673,815
Tanjung Senang	9,788,457	10,346,859	10,937,117	11,561,047	12,220,571
Labuhan Ratu	13,887,333	15,376,288	17,024,883	18,850,236	20,871,298
Sukarame	15,376,395	15,376,288	17,024,883	18,850,236	20,871,298
Sukabumi	14,000,192	17,707,045	20,390,958	23,481,681	27,040,874
Wayhalim	15,061,089	15,061,089	16,202,378	17,430,152	18,750,963
Kota Bandar Lampung	225,740,065	245,293,148	268,674,086	295,091,657	324,987,477

Sumber : Hasil Analisis Tim RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045

2.6.2.2 Energi Listrik

Tenaga listrik merupakan salah satu infrastruktur yang cukup penting dalam menunjang sebuah kawasan. Tenaga listrik merupakan salah satu energi yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan daya Listrik Kota Bandar Lampung tahun 2025 sebesar 511,391 kVa. Sementara itu pada tahun 2045 kebutuhan daya Listrik sebesar 726.390 kVa. Berikut adalah kondisi kebutuhan daya listrik di Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 dengan ketentuan bahwa satu jiwa penduduk dengan kebutuhan pemenuhan daya listriknya adalah 450 VA.

Tabel 2.148 Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik Kota Bandar Lampung

Kecamatan	Total Kebutuhan Daya Listrik (kVa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Teluk Betung Barat	18,393	21,321	24,715	28,650	33,211
Teluk Betung Timur	23,477	26,206	29,252	32,651	36,446
Teluk Betung Selatan	17,849	18,198	18,554	18,917	19,287
Bumi Waras	26,525	27,386	28,274	29,192	30,139
Panjang	33,997	34,788	35,596	36,424	37,271
Tanjung Karang Timur	17,611	18,298	19,012	19,753	20,524
Kedamaian	24,321	24,998	25,694	26,409	27,144
Teluk Betung Utara	22,940	23,385	23,839	24,302	24,773
Tanjung Karang Pusat	22,750	23,012	23,276	23,544	23,814
Enggal	11,478	11,205	10,939	10,680	10,426
Tanjung Karang Barat	29,496	32,318	35,410	38,797	42,509
Kemiling	41,338	48,323	56,489	66,035	77,193
Langkapura	20,657	23,806	27,435	31,617	36,436
Kedaton	24,072	25,361	26,719	28,150	29,658
Rajabasa	26,164	28,791	31,683	34,865	38,367
Tanjung Senang	30,108	35,838	42,659	50,778	60,442
Labuhan Ratu	22,180	23,446	24,783	26,197	27,692
Sukarame	31,468	34,842	38,578	42,714	47,294
Sukabumi	34,843	40,124	46,205	53,209	61,274
Wayhalim	31,724	34,128	36,714	39,496	42,489
Kota Bandar Lampung	511,391	555,773	605,827	662,380	726,390

Sumber : Hasil Analisis Tim RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045

2.6.2.3 Persampahan

Permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung di dominasi oleh masalah persampahan. Masalah persampahan yang timbul sebagai dampak

atas meningkatnya aktivitas penduduk di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan kota di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk terbanyak. Semua sampah dari masing-masing sumber akan bermuara ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Bakung. TPA Bakung mempunyai luas 14,01 ha dan mulai beroperasi pada Tahun 1994. Hingga saat ini TPA Bakung sudah beroperasi selama + 27 Tahun dengan sampah yang masuk ke TPA + 600 ton/hari dan pada saat ini meningkat menjadi + 750 ton/hari.

Pengelolaan sampah di TPA Bakung masih menggunakan sistem open dumping dikarenakan sampah di TPA Bakung yang overload dan sudah terlalu tinggi untuk dikelola (saat ini ketinggian sampah mencapai + 20 m) sehingga sampah yang masuk dibuang dengan cara menumpuk. Hanya sekitar 10% sampah yang masuk ke TPA dikelola dengan cara control Landfill, yaitu dengan cara penimbunan tanah secara berkala pada tumpukan sampah. Ketinggian sampah di TPA Bakung saat ini tentunya sangat membahayakan keselamatan para pemulung yang beroperasi di TPA Bakung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mengupayakan pengelolaan sampah dengan skema Waste to Energi melalui pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) atau pemanfaatan sampah untuk dijadikan Pelet/RDF (Refuse - Derived Fuel) dengan mencari alternatif pembiayaan di luar APBD.

Konsep pengolahan sampah dapat dilakukan dengan mengubah paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) mulai dari rumah tangga sebagai penyumbang sampah terbesar sampai ke sampah industri. Pengurangan Pengelolaan sampah juga dapat dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke

media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, untuk kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dilakukan proyeksi timbulan persampahan Kota Bandar Lampung dengan menggunakan hitungan faktor timbulan sampah yang ditentukan dengan memperhitungkan proyeksi penambahan jumlah penduduk. Dimana pada tahun 2025 sebesar 3096510.64 lt/hari, sedangkan pada akhir periode RPJPD yaitu 2045 4410251,16 lt/hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.149 Proyeksi Timbulan Kota Bandar Lampung

Kecamatan	Timbulan Sampah Domestik (lt/hari)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Teluk Betung Barat	110355.36	127924.76	148291.3367	171900.43	199268.26
Teluk Betung Timur	140861.41	157233.74	175509.0246	195908.45	218678.90
Teluk Betung Selatan	107095.53	109189.31	111324.0242	113500.48	115719.48
Bumi Waras	159149.38	164314.20	169646.6223	175152.10	180836.25
Panjang	203983.24	208725.62	213578.2595	218543.71	223624.61
Tanjung Karang Timur	105668.10	109788.96	114070.5291	118519.07	123141.09
Kedamaian	145927.60	149989.27	154163.9844	158454.90	162865.24
Teluk Betung Utara	137639.20	140310.70	143034.0452	145810.25	148640.34
Tanjung Karang Pusat	136502.64	138071.25	139657.8915	141262.76	142886.07
Enggal	68865.72	67231.67	65636.40085	64078.98	62558.52
Tanjung Karang Barat	176974.87	193906.15	212457.2561	232783.16	255053.64
Kemiling	248026.41	289938.79	338933.6836	396207.91	463160.53
Langkapura	123942.38	142835.59	164608.7848	189700.99	218618.13
Kedaton	144430.55	152166.05	160315.8613	168902.16	177948.33
Rajabasa	156982.48	172748.51	190097.9383	209189.80	230199.10
Tanjung Senang	180646.09	215027.65	255952.8945	304667.26	362653.21
Labuhan Ratu	133082.39	140674.35	148699.4108	157182.27	166149.06
Sukarame	188810.10	209053.71	231467.773	256285.00	283763.05
Sukabumi	209055.17	240742.34	277232.4217	319253.43	367643.69
Wayhalim	190344.51	204768.32	220285.119	236977.74	254935.29
Kota Bandar Lampung	3096510.64	3366916.74	3672932.89	4018722.64	4410251.16

Sumber : Hasil Analisis Tim RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045

2.6.2.4 Fasilitas Kesehatan

Pertumbuhan populasi dan perubahan demografi, seperti peningkatan usia harapan hidup dan perubahan pola penyakit, menuntut penyesuaian dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Sebagai upaya untuk mencapai *"health for all"*, salah satu langkah penting adalah memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan. Proyeksi kebutuhan masa depan membantu mengidentifikasi dan memastikan bahwa fasilitas kesehatan dapat memenuhi kebutuhan ini, baik di tingkat primer maupun sekunder. Berdasarkan analisis gap yang dilakukan kebutuhan rumah sakit Kota Bandar Lampung tahun 2045 sudah memenuhi kebutuhan dimana jumlah kondisi eksisting rumah sakit sebanyak 20. Begitu pula kebutuhan apotek di tahun 2024 sudah memenuhi kebutuhan. Namun untuk kebutuhan puskesmas belum memenuhi, dimana kondisi eksisting puskesmas hanya sebanyak 31. Sementara itu, kebutuhan di tahun 2045 sebanyak 54 puskesmas. Berikut adalah proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan hingga akhir tahapan RPJPD.

Tabel 2.150 Proyeksi Kebutuhan fasilitas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Uraian	Eksisting 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.100.136	1.136.423	1.235.052	1.346.283	1.471.956	1.614.201
Rumah Sakit	20	20	21	22	23	26
Puskesmas	31	38	41	45	49	54
Apotek	300	338	379	421	450	480

Sumber : Hasil Analisis Tim RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045

2.6.2.5 Fasilitas Pendidikan

Puncak bonus demografi diperkirakan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2035. Salah satu upaya pemanfaatan secara optimal bonus demografi, dapat melalui peningkatan kualitas pada generasi muda yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan bagi suatu bangsa harus diprioritaskan karna sangat penting ketahanan hidup di masa depan. Peningkatan kualitas pendidikan ini harus melalui akses pendidikan yang meluas, merata dan adil. Perubahan demografi dan pertumbuhan populasi Kota Bandar Lampung memerlukan penyesuaian

dalam penyediaan fasilitas pendidikan untuk memastikan akses dan kualitas yang memadai bagi seluruh penduduk. Proyeksi ini membantu mengidentifikasi kebutuhan pendidikan masa depan sehingga perencanaan dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan perhitungan analisis gap fasilitas Pendidikan Kota Bandar Lampung dibandingkan dengan kondisi eksisting belum mencukupi sampai di tahun 2045.

Tabel 2.151 Proyeksi Kebutuhan fasilitas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Uraian	Eksisting	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.100.136	1.136.423	1.235.052	1.346.283	1.471.956	1.614.201
PAUD	599	618	667	723	784	853
SD	244	313	338	366	397	432
SMP	144	173	187	203	220	239
SMA	71	137	148	160	174	189

Sumber : Hasil Analisis Tim RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045

Adapun terkait kebutuhan rumah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.152 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Bandar Lampung

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2030	Tahun 2035	Tahun 2040	Tahun 2045
RM (600 m ²)	22728	24701	26926	29439	32284
RM (400 m ²)	45457	49402	53851	58878	64568
RM (200 m ²)	90914	98804	107703	117756	129136
RM (70 m ²)	68185	74103	80777	88317	96852

sumber : Hasil Pengolahan, 2024

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Pusat Pertumbuhan Wilayah

Kota Bandar Lampung yang selanjutnya dalam lingkup perencanaan dikembangkan menjadi 5 (lima) Wilayah Perencanaan selanjutnya disingkat menjadi WP, yang meliputi:

- a. WP I yang memiliki fungsi utama sebagai perdagangan dan jasa skala regional serta pusat pemerintahan dan fungsi tambahan sebagai

simpul transportasi darat, permukiman perkotaan dan sarana olah raga terpadu meliputi Kecamatan Telukbetung Selatan, Telukbetung Utara, Enggal, Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Pusat, Kedamaian, Kedaton dan Way Halim;

- b. WP II memiliki fungsi utama sebagai pusat pendidikan tinggi serta simpul utama transportasi darat dan fungsi tambahan sebagai kawasan peruntukan industri, permukiman perkotaan, infrastruktur perkotaan serta perdagangan dan jasa skala kawasan meliputi Kecamatan Sukarame, Tanjung Senang, Rajabasa dan Labuhan Ratu;
- c. WP III memiliki fungsi utama sebagai pelabuhan utama serta kawasan peruntukan industri dan fungsi tambahan sebagai permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala kota serta pariwisata meliputi Kecamatan Panjang, Sukabumi dan Bumi Waras;
- d. WP IV memiliki fungsi utama sebagai kawasan konservasi dan fungsi tambahan sebagai wisata alam dan bahari, industri pengolahan hasil laut, pusat pengolahan akhir sampah terpadu dan pelabuhan perikanan meliputi Kecamatan Telukbetung Timur dan Telukbetung Barat; dan
- e. WP V memiliki fungsi utama sebagai ruang terbuka hijau kota dan fungsi tambahan sebagai pusat pendidikan khusus, permukiman perkotaan, agrowisata dan ekowisata, perdagangan dan jasa skala kawasan, sarana olah raga dan Pendidikan tinggi meliputi Kecamatan Langkapura, Kemiling dan Tanjungkarang Barat.

Dengan pembagian Kota Bandar Lampung ke dalam lima Wilayah Perencanaan (WP) yang memiliki fungsi utama dan tambahan yang spesifik, perencanaan pembangunan kota ini diharapkan mampu mendukung pengelolaan ruang yang lebih efektif dan berkelanjutan. Data spasial yang dihasilkan dari analisis pola ruang dan struktur ruang menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang terintegrasi, memastikan konektivitas antarwilayah, serta mendukung optimalisasi fungsi tiap WP sesuai dengan karakteristik dan potensi lokalnya. Pendekatan ini juga memperkuat peran Bandar Lampung sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi dan layanan regional yang mampu mengakomodasi perkembangan jangka panjang secara inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2.7.2 Arah Pengembangan Wilayah

2.7.2.1 Kota yang Prospektif

Kota Bandar Lampung memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi kota besar dalam skala regional, nasional, bahkan internasional.

Potensi Kota Bandar Lampung yang mendukung antara lain adalah:

- a. Lokasi geografis yang sangat strategis.
- b. Kedudukan yang dituju dalam kebijaksanaan tingkat nasional dan regional.
- c. Pemandangan alam yang indah yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan.
- d. Keanekaragaman suku bangsa (*multi ethnic*).
- e. Dukungan wilayah sekitarnya (*hinterland*) yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandar Lampung.

Dalam RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 dijelaskan bahwa dengan potensi serta kecenderungan perkembangan yang ada, ditunjang dengan lokasi yang strategis, potensi alam, penduduk, dan potensi wilayah belakangnya, Kota Bandar Lampung terlihat menuju perkembangan yang prospektif. Dengan kedudukan potensi tersebut, Kota Bandar Lampung dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan bagi Sumatera bagian Selatan, serta pendukung Provinsi Lampung sebagai pusat produksi pertanian nasional (perdagangan dan jasa). Sektor yang tengah difokuskan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah pariwisata, baik dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata di Sumatera bagian Selatan maupun mendayagunakan potensi keindahan alam Kota Bandar Lampung. Pengembangan obyek wisata pantai dan laut serta perbukitan dalam Kota Bandar Lampung menciptakan daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun nusantara. Kelengkapan yang dapat dipersiapkan oleh Kota Bandar Lampung adalah penyediaan prasarana dan jasa pariwisata seperti

perhotelan, restoran, agen perjalanan, perbankan, dan infrastruktur pendukung lain.

Berbagai peluang perkembangan yang prospektif juga membawa prasyarat agar kehidupan kota yang diharapkan dapat tercapai. Pertama adalah restrukturisasi trend perkembangan fisik dan kedua adalah penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan Kota Bandar Lampung. Selain prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi, penyiapan kebijaksanaan, peraturan, dan program pembangunan menuju pemantapan Kota Bandar Lampung dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, dan perlu disiapkan pula sumber daya manusia yang menunjang.

2.7.2.2 Lokasi yang Strategis

Kota Bandar Lampung menempati posisi geografis yang sangat strategis, baik dalam konstelasi internasional, nasional, maupun regional. Posisinya terhadap Singapura dan Jakarta merupakan potensi bagi pengambilan peran dalam kerjasama ekonomi regional IMS-AFTA. Aspek yang menjadikan Kota Bandar Lampung strategis adalah:

- a. Aspek Ekonomi: Kawasan Perdagangan Jasa Pusat Kota, Kawasan pusat perdagangan dan jasa, Aktivitas campuran komersial dengan rumah tinggal (ruko), pemukiman, kawasan perdagangan (super blok perdagangan dan jasa) di Jalan R.A. Kartini–Jalan Radin Intan–Jalan Ahmad Yani berikut beberapa kawasan yang berada di sekitarnya.
- b. Aspek SDA dan teknologi: Kawasan Pendidikan Tinggi dan munculnya aktivitas pendidikan tinggi di sepanjang Jalan ZA Pagar Alam (Kedaton, Gedong Meneng, Rajabasa) dan sekitarnya (fungsi sosial budaya) dan wilayah Sukarame.
- c. Aspek Lingkungan Hidup: Kawasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Wan Abdurahman (Reg 19), Kawasan Hutan Serampok, sebagian Kawasan Batu putuk, dan sebagian Sukadanaham. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kawasan ini merupakan daerah tangkapan air serta hulu beberapa sungai besar di Kota Bandar Lampung. Menjaga kelestarian air permukaan sebagai alternatif utama dalam pemenuhan sumber air baku Kota Bandar Lampung.

- d. Aspek Sosial Budaya: Kawasan bersejarah situs budaya di wilayah Kedamaian merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan.

2.7.2.3 Potensi Alam

Selain memiliki wilayah yang cukup luas, Kota Bandar Lampung juga memiliki potensi alam yang indah, terutama laut dan perbukitannya. Kekhasan morfologinya mulai dari pegunungan, perbukitan, daratan, hingga pantai yang terletak di bagian dalam Teluk Lampung, menjadikan Kota Bandar Lampung sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan. Citra endogenik “Laut dan Gunung” tersebut merupakan potensi keindahan dan daya tarik alam di Kota Bandar Lampung.

Pantai yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung memiliki pemandangan yang mempesona. Pantai ini memiliki keistimewaan tersendiri yaitu terletak di suatu teluk yang nyaman, dengan keindahan panorama laut dan beberapa gugusan pulau kecil di tengah teluk, yang potensial dikembangkan untuk wisata rekreasi bahari. Hal ini juga ditunjang oleh letaknya yang tidak jauh dari pusat kota. Perbukitan yang terletak di Pusat Kota dan bagian kota lainnya, juga merupakan potensi alam yang secara khas dimiliki oleh Kota Bandar Lampung. Selain berfungsi lindung bagi pelestarian tata air dan konservasi tanah, perbukitan dengan tanaman hijaunya akan berfungsi pula sebagai paru-paru Kota. Pemanfaatan yang terbatas dapat diselaraskan dengan pengembangan Wisata Hutan Raya.

2.7.2.4 Keanekaragaman Suku Bangsa

Salah satu ciri khas Kota Bandar Lampung adalah keanekaragaman suku bangsanya. Sejak dimulainya program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera khususnya ke Provinsi Lampung, penduduk Provinsi Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa. Dengan keanekaragaman suku bangsa, Provinsi Lampung dikenal sebagai negeri “Ruwa Jurai” (dua unsur) karena dihuni oleh masyarakat asli dan pendatang. Keanekaragaman suku bangsa ini harus dipandang sebagai potensi atau kekuatan untuk

membangun Kota Bandar Lampung, dalam arti Kota Bandar Lampung menjadi semakin mudah beradaptasi dan menerima pendatang baru, sehingga juga semakin terbuka menerima pengaruh pembangunan wilayahnya.

2.7.2.5 Dukungan Wilayah Belakang (*Hinterland*)

Kota Bandar Lampung didukung oleh *Hinterland* yang merupakan wilayah penghasil perikanan, perkebunan, dan lokasi berbagai industri. Dengan wilayah seluas 35.376,50 Km², Provinsi Lampung dijuluki wilayah unggulan, sentra pertumbuhan industri baru dan pintu gerbang lintas Pulau Jawa-Pulau Sumatera. Provinsi Lampung tumbuh menjadi wilayah penyangga bagi kegiatan pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian.

2.7.2.6 Pusat Pertumbuhan

Sebagai pusat kegiatan Provinsi Lampung, sekitar 12,45 persen penduduk Provinsi Lampung berada di Kota Bandar Lampung (berdasarkan data BPS tahun 2019). Berbagai pelayanan bagi wilayah yang lebih luas disediakan oleh Kota Bandar Lampung, baik di bidang pemerintahan, niaga, jasa keuangan, pendidikan, dan sebagainya. Peran sebagai pusat pertumbuhan ditunjang oleh rencana peningkatan aksesibilitas dari dan ke Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung siap berfungsi sebagai *transshipment point* dari berbagai moda angkutan.

2.7.2.7 Pusat Koleksi dan Distribusi

Perkembangan sektor ekonomi, khususnya pertanian di wilayah Provinsi Lampung maupun Sumatera bagian Selatan, mendorong fungsi Kota Bandar Lampung sebagai pusat koleksi dan distribusi berbagai komoditi yang dihasilkan oleh wilayah belakangnya. Fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi berbagai komoditi yang dihasilkan oleh Sumatera Bagian Selatan dilangsungkan oleh rencana pengembangan jaringan jalan tol dan kereta api, jaringan jalan Trans Sumatera, serta rencana pengembangan Pelabuhan Panjang. Kelengkapan fasilitas yang tersedia di Kota Bandar

Lampung juga mendukungnya sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa pada berbagai skala pelayanan.

2.7.2.8 Aksesibilitas yang Semakin Baik

Kota Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan akan memperoleh pengaruh yang signifikan dari pergerakan tersebut melalui kemungkinan peningkatan investasi di sektor regional, nasional, dan internasional. Kota Bandar Lampung menjadi salah satu alternatif pilihan setelah Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Rencana dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung aksesibilitas seperti rencana jalan tol, jalan (nasional, provinsi dan kabupaten/kota), terminal, pelabuhan menjadi akses pendukung pembangunan perekonomian khususnya di Kota Bandar Lampung.

2.7.2.9 Pengembangan Transshipment Point Akibat Perkembangan Akses

Peran Kota Bandar Lampung sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa didukung oleh Pelabuhan Panjang yang telah diminati oleh berbagai pihak untuk dikembangkan sebagai pelabuhan antarnegara, terutama dalam konteks region Sumatera bagian Selatan. Peranan yang dituju oleh pelabuhan ini adalah sebagai pelabuhan ekspor bagi komoditi dan produk yang dihasilkan oleh Sumatera Bagian Selatan. Pilihan ini mempertimbangkan posisi strategis Pelabuhan Panjang sebagai gerbang lintas dua kawasan ekonomi penting yaitu Sijori (Singapura-Johor-Riau) dan pusat pasar nasional Jakarta dan Jawa Barat bagian Barat, terutama dalam mengisi kerjasama ekonomi regional IMS-GT

2.7.3 Rencana Pengembangan Wilayah

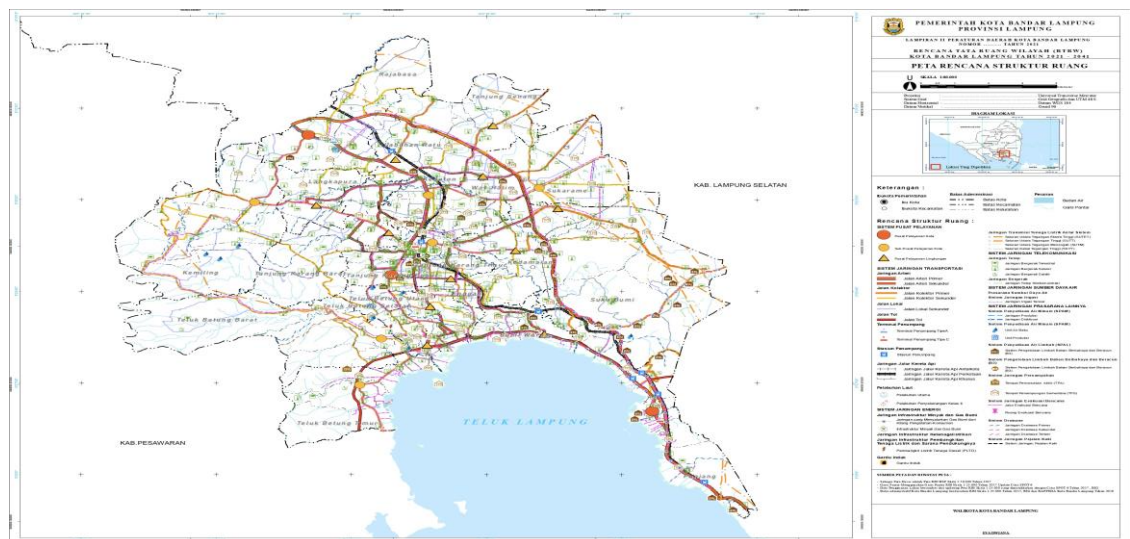
Kondisi potensi pengembangan wilayah dapat ditinjau dari rencana tata ruang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2021-2041 dengan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis sebagai berikut:

1. Rencana Stuktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana susunan pusat-pusat pelayanan (rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota dan mengintegrasikan wilayah kota. Sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat.

1.1. Rencana Sistem Pusat Pelayanan

- 1) Pusat pelayanan kota meliputi Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Panjang.
- 2) Sub pusat pelayanan kota meliputi Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Sukarampe, Kecamatan Telukbetung Barat, Kecamatan Telukbetung Timur, dan Kecamatan Kemiling.
- 3) Pusat pelayanan lingkungan meliputi Kecamatan Enggal, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Langkapura, Kecamatan Labuan Ratu, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Telukbetung Utara, Kecamatan Tanjungkarang Barat dan Kecamatan Telukbetung Selatan.



Gambar 2.53 Peta Struktur Ruang Kota Bandar Lampung

Sumber : RTRW Kota Bandar Lampung 2021-2041

1.2 Rencana Sistem Jaringan Transportasi

1) Sistem Jaringan Jalan

- Jaringan jalan arteri primer lintas tengah meliputi:
 - a. Sp. Tj. Karang- Sp. Tiga Teluk Ambon (Jln. Soekarno Hatta) (Bandar Lampung);
 - b. Sp. Tiga Teluk Ambon-Km.10 (Panjang) (Bandar Lampung);
 - c. Km.10 (Panjang)-Bts. Kota (Sukamaju) (Bandar Lampung);
 - d. Jln. Malahayati (Bandar Lampung);
 - e. Jln. Tengiri (Bandar Lampung);
 - f. Sp. Teluk Betung-Sp. Pelabuhan Panjang (Bandar Lampung);
 - g. Sp. Pelabuhan Panjang-Km. 10;
 - h. Jln. Teluk Ambon (Bandar Lampung);
 - i. Jln. Kartini (Bandar Lampung); dan
 - j. Jln. Monginsidi (Bandar Lampung).
- Peningkatan jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional, meliputi ruas jalan:
 - a. Jalan Imam Bonjol;
 - b. Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami; dan
 - c. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam.
- Rencana pembangunan jalan tol, meliputi:
 - a. Ruas *exit toll* Lematang - Pelabuhan Panjang;
 - b. Ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung
- Pembangunan Flyover Pelabuhan Panjang.
- Jalan kolektor primer dua (JKP-2) terdiri dari:
 - a. Jalan Mayjen. H.M. Ryacudu (Bandar Lampung);
 - b. Jalan Tenggiri (Bandar Lampung); dan
 - c. Jalan R.E. Martadinata (Bandar Lampung);
- Jaringan jalan strategis provinsi meliputi:
 - a. Lingkar Barat Bandar Lampung; dan
 - b. Lingkar Utara Bandar Lampung;

- 2) Rencana Terminal
 - a. Rencana Terminal Lempasing di Kecamatan Telukbetung Timur;
 - b. Rencana Terminal Lapangan Tembak di Kecamatan Sukarame; dan
 - c. Rencana Terminal Sutami di Kecamatan Sukabumi.
- 3) Rencana Jaringan Kereta Api
 - a. Jaringan jalur kereta api antarkota yang merupakan jaringan jalur kereta api nasional, meliputi:
 - rencana jalur kereta api ganda (double track) Tanjungkarang-Kertapati;
 - reaktivasi jalur kereta api menuju Pelabuhan Panjang; dan
 - rencana pembangunan Shortcut Tegineneng – Tarahan.
 - b. Jaringan jalur kereta api perkotaan yang merupakan jaringan jalur kereta api provinsi yaitu pengembangan jalur kereta api Tanjungkarang - Pringsewu.
- 4) Rencana Pelabuhan

Rencana pengembangan pelabuhan di Kota Bandar Lampung meliputi:

 - a. Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung;
 - b. Pelabuhan pengumpul meliputi Pelabuhan Teluk Betung di Kota Bandar Lampung;

1.3. Sistem Jaringan Energi

Rencana system jaringan energi meliputi jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan/atau jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.

Pengembangan jaringan infrastruktur gas di Kota Bandar Lampung berupa pengembangan jaringan pipa gas bumi yang meliputi:

- a. infrastruktur minyak dan gas bumi berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBG) di Kecamatan Sukabumi; dan
- b. jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen melewati Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Panjang.

Jaringan infrastruktur gas bumi meliputi jaringan distribusi yang melalui:

- a. Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan; dan
- b. Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur.

Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri dari:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ditetapkan PLTD Teluk Betung di Kota Bandar Lampung
- b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV meliputi jaringan Gumiwang - Lampung-I melewati Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Labuhan Ratu, dan Kecamatan Rajabasa;
- c. Pengembangan pusat-pusat distribusi tegangan berupa gardu-gardu induk meliputi:
 - Pengembangan jaringan transmisi baru yang meliputi: Jaringan transmisi Garuntang-Inc. 2 Pi (New Tarahan-Teluk Betung) dan Jaringan transmisi GIS Rajabasa/Kedaton-Inc. 2 Pi (Natar-Sukarame);
 - Pengembangan pusat-pusat distribusi tegangan berupa gardu-gardu induk yang meliputi:
 1. Peningkatan jaringan Gardu Induk (GI) eksisting yang meliputi GI Langkapura di Kota Bandar Lampung;
 2. Peningkatan jaringan Gardu Induk (GI) eksisting yang meliputi: GIS Garuntang di Kota Bandar Lampung;

1.4. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi yang dikembangkan di Kota Bandar Lampung yaitu Pengembangan jaringan mikro digital berupa jaringan kabel bawah laut yang melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.

1.5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Berdasarkan RTRWP Lampung, Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yaitu Wilayah Sungai Seputih-Sekampung.

1.6 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari:

1. Sistem penyediaan air minum (SPAM) regional lintas kabupaten/kota meliputi SPAM Regional Bandar Lampung;
2. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) lintas kabupaten/kota di Kawasan permukiman pada kawasan Perkotaan Bandar Lampung;

1.7 Sistem Pengelolaan Air Limbah

Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah Kota Bandar Lampung bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu pengelolaan limbah kota baik rumah tangga maupun industri sangat penting terkait dengan upaya peningkatan mutu air baku Kota Bandar Lampung.

Adapun rencana pengembangan Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) diperuntukan pada kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan meliputi :

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berada di Kecamatan Enggal, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kecamatan Telukbetung Utara, Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Telukbetung Selatan; dan
- b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa Sistem

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada di Kecamatan Telukbetung Timur.

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Dalam klasifikasi pola ruang wilayah kota terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung Kota Bandar Lampung:

- a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa kawasan hutan lindung dan Kawasan resapan air;
- b. Kawasan Konservasi berupa Kawasan taman hutan raya adalah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman;
- c. Kawasan perlindungan setempat berupa Kawasan sempadan pantai dan Kawasan sempadan sungai; dan
- d. Kawasan Rawan Bencana Rawan bencana longsor, Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Sedangkan untuk kawasan peruntukan budidaya meliputi:

- a. Kawasan Pertanian berupa Kawasan tanaman pangan dan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)
- b. Kawasan Peruntukkan Industri berupa Kawasan Industri Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung.
- c. Kawasan pariwisata, Kawasan wisata unggulan Kota Bandar Lampung meliputi kawasan wisata di jalur lintas barat yang mencakup Gedungtataan-Rantau Tijing-Kota Agung-Wonosobo-Sangga-Bengkunat-Biha-Krui-Simpang Gunung Kemala-Pugung Tampak sampai dengan perbatasan Provinsi Bengkulu.
- d. Kawasan permukiman Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan berupa Wilayah pertahanan darat yang meliputi: KOREM-043 di

Sumber : RTRW Kota Bandar Lampung 2021-2041

- KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa skala regional di Kecamatan Tanjungkarang Pusat dan Kecamatan Enggal;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kecamatan Bumi Waras; dan
 - c. kawasan minapolitan di Lempasing dan Pulau Pasaran di Kecamatan Telukbetung Timur.
- KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
 - a. Kawasan kota lama Masjid Anwar dan sekitarnya berada di Kecamatan Telukbetung Selatan, Kecamatan Telukbetung Utara dan Kecamatan Bumi Waras;
 - b. kawasan situs kelurahan Negeri Olok Gading berada di Kecamatan Telukbetung Barat;
 - c. kawasan situs keratuan dibalau berada di Kecamatan Kedamaian; dan
 - d. kawasan publik terpadu Way Halim berada di Kecamatan Way Halim.

- [illegible]

II-189

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

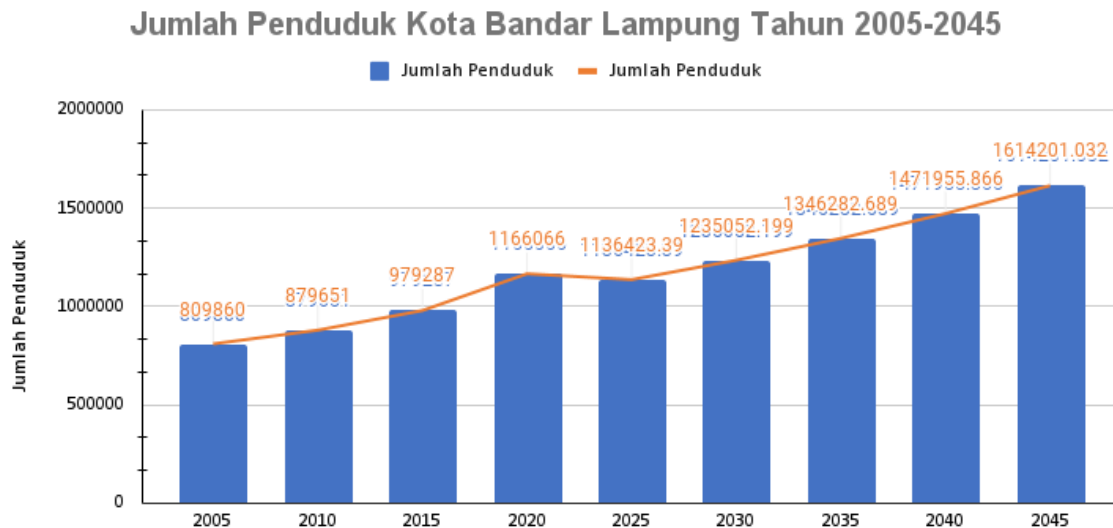
Bab ini akan menjelaskan mengenai permasalahan dan isu strategis yang muncul dalam lingkup pembangunan Kota Bandar Lampung, dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan, identifikasi permasalahan dan isu strategis merupakan langkah penting dalam menentukan prioritas tindakan dan alokasi sumber daya. Memahami permasalahan dan isu strategis dengan baik, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan, program, dan proyek yang efektif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan yang diperlukan intervensi untuk memberikan alternatif solusi atau tindakan penyelesaian. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik yang berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

3.1.1 Permasalahan Pembangunan Pada Aspek Sosial

Penduduk Kota Bandar Lampung mengalami **kenaikan jumlah penduduk yang relatif tinggi**, pada tahun 2005 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 809.860 jiwa sedangkan pada tahun 2023 telah mencapai 1.100.136 jiwa (BPS Kota Bandar Lampung, 2024). Bila dilakukan perhitungan data tahun 2005-2023 **laju pertumbuhan** penduduk mengalami kenaikan rata-rata 1,7% per tahun.



Gambar 3. 1 Jumlah Penduduk dari 2005-2045

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dengan trend yang terus mengalami kenaikan di atas 1,7% per tahun, **jumlah penduduk tahun 2045 akan mencapai 1.614.201 jiwa**. Trend pertambahan penduduk menjadi isu yang cukup besar, karena dengan begitu permintaan terhadap suatu produk dan jasa juga akan meningkat termasuk penggunaan lahan, apabila tidak diikuti dengan perencanaan yang baik tentu dapat berdampak negatif. Hal-hal esensial seperti pendidikan, kesehatan dan utilitas dasar seperti sanitasi dan air bersih tentu harus tersedia secara layak untuk semua, selain kebijakan pemerintah dalam program keluarga berencana yang sampai saat ini pelaksanaan program KB belum optimal, karena kesadaran masyarakat yang tervalidasi dari menurunnya angka akseptor KB sebesar 125.989 (2021) menjadi 66.323 (2023). Kebijakan yang dapat meningkatkan sistem kesehatan dan ketahanan keluarga harus segera dilakukan sehingga secara bijak pengendalian penduduk dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

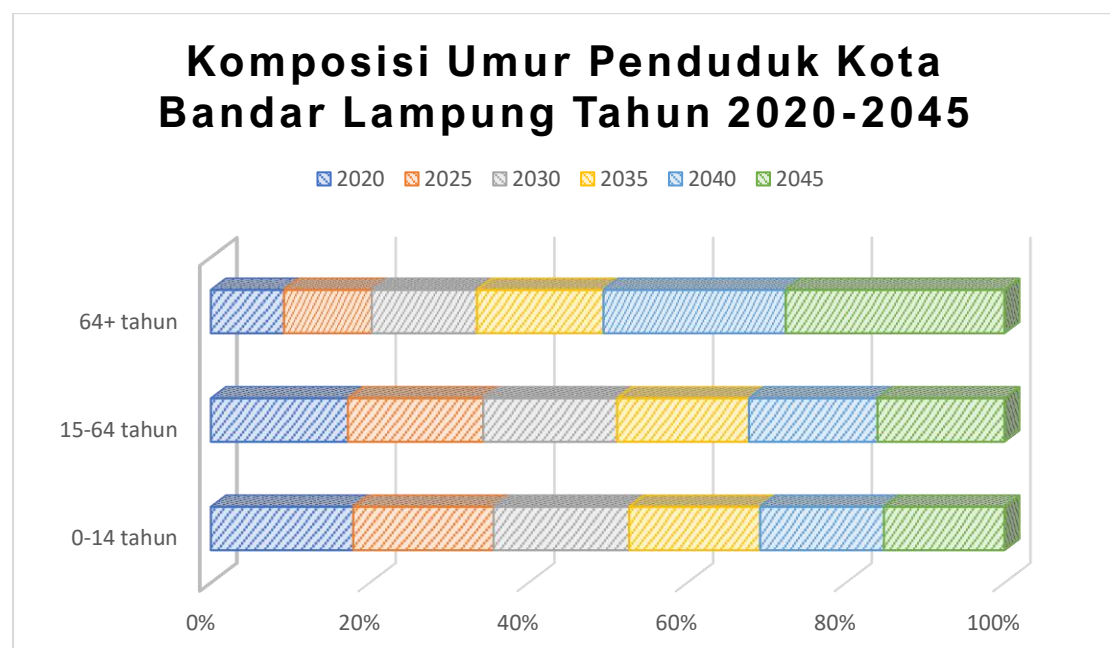
Secara global trend demografi pada tahun 2045 terjadi pergeseran fenomena, yaitu usia produktif cenderung untuk tidak memiliki anak dan menunda pernikahan. Terlebih perilaku berisiko seksual juga

meningkatkan angka kelahiran dan perceraian, sehingga banyak anak yang lahir dari keluarga yang tidak siap yang berdampak pada peningkatan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (AKI), dan balita dengan stunting, meskipun Kota Bandar Lampung memiliki **trend penurunan prevalensi stunting yang cukup baik** dan telah di bawah target nasional yaitu sebesar 13,4% setelah sebelumnya tahun 2021 di angka 19,4% (SKI, 2023) namun permasalahan kesehatan belum benar-benar selesai, seperti AKB misalnya pada sensus tahun 2020 mencapai angka 13,94%. Angka-angka tersebut juga berkorelasi dengan trend meningkatnya pengeluaran masyarakat dalam membeli makanan instan seperti mie pada tahun 2023 sebesar 3.342,61 per kapita perminggu, tentu hal ini membuat masyarakat semakin rentan terhadap kesehatan mereka.

Perhatian dalam peningkatan layanan kesehatan juga tentunya memperhatikan penyakit lainnya seperti penyakit menular dan tidak menular, Tuberkulosis misalnya yang tren kasus TBC di Kota Bandar Lampung masih cukup tinggi, pada 2022 mencapai 3.606 kasus terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 2.559 kasus. Hal tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat tahun 2024 Kota Bandar Lampung mengalami inflasi kesehatan sebesar 0,53% biaya pengeluaran jasa rawat inap, 1,09% biaya rawat jalan, dan 0,43% biaya obat-obatan dan produk kesehatan, per Februari 2024 Kota Bandar Lampung menempati urutan 16 tertinggi inflasi kesehatan di Indonesia. Tentu hal ini akan mempengaruhi akses, kualitas, dan biaya layanan kesehatan yang pada akhirnya berdampak negatif pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut juga perlu diimbangi dengan peningkatan intervensi dalam memberikan layanan promotif dan preventif kesehatan.

Hal tersebut menjadi tantangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan ketahanan keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal. Misalnya **trend peningkatan usia harapan hidup** secara nasional dalam

5 (lima) tahun terakhir terjadi **peningkatan 0,56% menjadi 73,93 tahun** dan di **Provinsi Lampung** sendiri **meningkat 0,37% menjadi 71,25 tahun**. Begitu juga **Kota Bandar Lampung** berdasarkan proyeksi tahun 2045 **penduduk usia lansia akan naik menjadi 18,41% atau 233.314 jiwa**. Sehingga fokusnya bukan hanya melakukan pencegahan dan promosi kesehatan melainkan memberikan upaya pemberdayaan pada keluarga mulai dari orang tua, anak, hingga lansia untuk mempersiapkan hari tuanya untuk dapat hidup nyaman dan sejahtera. Berikut grafik komposisi umur penduduk Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun kedepan.



Gambar 3. 2 Komposisi Umur Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2045

Sumber: Bapperida Kota Bandar Lampung, 2024

Ketimpangan kesejahteraan masyarakat masih tinggi, di Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari **trend peningkatan angka rasio gini** dan masih berada di atas provinsi yaitu **0,369**. Indikasi lainnya masih banyak **Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)** menghadapi kemiskinan, akses terbatas ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, makanan, sanitasi, dan air

bersih. Para PMKS tersebut sering kali tidak memiliki pekerjaan tetap karena kurangnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan, serta menghadapi masalah kesehatan mental dan fisik tanpa akses layanan kesehatan. PMKS rentan terhadap perilaku berisiko dan kriminalitas yang tinggi. Penyelesaian masalah ini memerlukan upaya kolaboratif dari seluruh aktor pembangunan, untuk dapat meningkatkan akses layanan sosial dan kesehatan, pelatihan keterampilan, perumahan yang terjangkau, pendidikan murah dan berkualitas, dan strategi pengurangan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan wilayahnya.

Fenomena Urbanisasi dan Ketimpangan Pembangunan antara urban dan sub-urban, menyebabkan berbagai akses dan utilitas dasar sulit terpenuhi. Akses terbatas terhadap rumah layak dan perkembangan permukiman kumuh misalnya, terutama di area perkotaan dan pesisir. *Urbanisasi* meningkatkan aktivitas sosial dan migrasi ke kota, mengakibatkan banyak warga bekerja di sektor informal. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Bandar Lampung yang tinggi (67% pada 2022), pemerintah perlu mengatasi pengangguran dan ketimpangan sosial. Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik belum optimal di **daerah kumuh**, yang luasnya mencapai **190,97 hektar** menurut SK Walikota Bandar Lampung 2023.

Tingkat kriminalitas yang tinggi di perkotaan, data menunjukkan Tren kasus kriminalitas yang masih tinggi di Kota Bandar Lampung pada **5 (lima) tahun terakhir terdapat 2.218 kasus pertahun**. mencakup pencurian, perampokan, kekerasan, dan vandalisme. Pemicu utama adalah ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, pengangguran tinggi, serta keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti narkoba dan perdagangan manusia. *Urbanisasi* cepat juga menciptakan tekanan sosial yang mempengaruhi kriminalitas. Penanganan memerlukan pendekatan holistik, termasuk perbaikan ekonomi, akses pendidikan dan pelatihan, peningkatan kehadiran

aparatur penegak hukum, kebijakan pencegahan kriminalitas, serta rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan, serta perlindungan terhadap kelompok marjinal dan kelompok rentan seperti orang dengan disabilitas, kondisi khusus, lansia, perempuan dan anak untuk mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi.

Peningkatan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender perlu dilakukan intervensi lebih, mengingat masih rendahnya kesetaraan gender terutama bagi Perempuan dibidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengampilan keputusan, hal ini tercermin dari angka indeks keterlibatan Perempuan dalam parlemen yang hanya 22.00 tahun 2020 dan indeks pemberdayaan gender 72.30 tahun 2020.

Selain itu perilaku hidup bersih dan sehat juga harus ditingkatkan, mengingat masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan, hal ini juga tercermin dari maraknya oermukiman kumuh di pesisir Kota Bandar Lampung.

3.1.2 Permasalahan Pembangunan Pada Aspek Ekonomi

Belum optimalnya kontribusi beberapa sektor PDRB seperti industri pengolahan, perdagangan dan jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Fluktuasi angka inflasi Kota Bandar Lampung juga menunjukkan masih belum stabilnya kondisi perekonomian wilayah dan kota Bandar Lampung sehingga dibutuhkan realisasi program yang dapat mendukung atau menstimulus kegiatan ekonomi di sektor-sektor unggulan kota Bandar Lampung.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bandar Lampung menurun signifikan dari 13,14% pada 2008 menjadi 7,43% pada 2023, meskipun sempat naik menjadi 8,79% pada 2020. Angka kemiskinan dan TPT di kota ini menurun seiring pemulihan ekonomi pasca Covid-19, mencerminkan tren nasional. Pemerintah Daerah berupaya memanfaatkan sumber daya produktif dan memperkuat perlindungan

sosial, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) yang mencapai 95% cakupan pada 2023, serta program Jamkeskot yang memastikan akses kesehatan gratis bagi warga dengan KTP dan KK Kota Bandar Lampung.

Selain itu, **Jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung** juga telah mencapai angka tertinggi di Provinsi Lampung yaitu 121.104 jumlah penerima tahun 2022, yang mana untuk memastikan para pekerja mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.

Bukan hanya itu **korelasi terkait kualitas sumber daya manusia yang belum memadai menjadi satu hal yang tidak terpisahkan dalam hal daya saing ekonomi dan investasi**. Indeks Pembangunan Manusia menjadi penting (UHH, RLS, HLS, dan pengeluaran perkapita) sering dijadikan tolak ukur kualitas SDM dan potensi ekonomi dan investasi di suatu daerah. Lima tahun terakhir Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan dan tahun 2023 telah mencapai 79,86 berada di atas Provinsi Lampung dan Nasional. Hal ini dapat menjadi indikasi modal pertumbuhan ekonomi kedepan.

Alih fungsi lahan dan profesi masyarakat Kota Bandar Lampung, alih fungsi lahan tidak bisa dihindarkan, bukan hanya lahan pertanian yang hilang melainkan lahan resapan. Beberapa tahun terakhir Kota Bandar Lampung hanya menyisakan sedikit lahan pertanian, tentu hal tersebut berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian di masa mendatang. Proses Kota Bandar Lampung yang mengkota juga berdampak pada beralih nya profesi, terjadi pergeseran jumlah yang cukup besar pekerja di sektor pertanian ke berbagai sektor lain termasuk perdagangan, manufaktur dan jasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara linier telah terjadi dengan pengurangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bandar Lampung sementara disisi lain terjadi peningkatan *share* sektor perdagangan,

industry dan sektor jasa terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung.

Tingginya penduduk miskin menjadi salah satu indikasi bahwa masih terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat kota, tahun 2023 mencapai 91 ribu jiwa, hal ini disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan masyarakat Kota Bandar Lampung.

Belum optimalnya pengembangan pada potensi ekonomi dan BUMD dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung, terindikasi dari tidak meratanya distribusi pendapatan, penyediaan lapangan kerja yang masih rendah, serta pengembangan ekonomi dari sektor potensial seperti pengembangan ekonomi di wilayah pesisir sebagai potensi ekonomi di sektor pariwisata yang masih diperlukan stimulus, termasuk infrastruktur penunjang ekonomi dan pengembangan UMKM serta BUMD untuk memberikan ruang-ruang kegiatan ekonomi di masyarakat. Peningkatan daya tarik dan iklim investasi yang belum tercipta dengan baik terindikasi dari rendahnya penanaman modal asing.

3.1.3 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur

Kota Bandar Lampung memiliki peran penting dalam transportasi darat dan logistik antara Jawa dan Sumatera, dengan Pelabuhan Panjang untuk ekspor-impor dan Pelabuhan Srengsem untuk distribusi batubara. Kota ini berpotensi menjadi metropolis, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pendidikan, terutama dalam Wilayah Pengembangan Strategis Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-API.

Kemacetan di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh kepadatan kendaraan pribadi, kurangnya infrastruktur transportasi publik, pertumbuhan penduduk yang pesat, pembangunan dan perubahan penggunaan lahan, jalan yang sempit dan tidak memadai, titik

perlintasan dan persimpangan yang padat, kegiatan komersial dan perbelanjaan dan pembangunan infrastruktur yang belum merata, kepadatan penduduk yang tinggi, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan transportasi publik yang tidak efisien, terbukti dengan jumlah operasional BRT yang terus menurun, bersisa 10 armada pada rute rajabasa-panjang. Volume jalan yang perlu ditingkatkan, serta pemeliharaan jalan yang buruk juga memperparah kemacetan. Pada 2022, rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah adalah 7,89 dan dibandingkan jumlah penduduk adalah 1,31. Upaya perbaikan jalan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan mobilitas di perkotaan.

Dalam 20 tahun mendatang, Kota Bandar Lampung sebagai kota metropolitan akan menghadapi masalah serius terkait kemacetan lalu lintas karena pertumbuhan populasi dan ekonomi yang cepat. Meskipun sudah ada infrastruktur transportasi seperti flyover, lonjakan kendaraan dapat melampaui kapasitas jalan. Solusi pintar diperlukan, termasuk teknologi untuk pengaturan lalu lintas, transportasi publik yang efisien, dan promosi transportasi berkelanjutan. Selain itu permintaan perumahan dan permukiman yang tinggi perlu dipetakan dan ditingkatkan melalui kerja sama antar wilayah untuk memenuhi permintaan dalam 20 tahun mendatang, termasuk skema pembiayaan dan model yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan.

Infrastruktur drainase yang buruk merupakan akibat pengelolaan sistem drainase yang tidak efektif atau tidak memadai, yang dapat berdampak pada berbagai aspek pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Drainase yang tidak baik dapat menyebabkan banjir dan genangan air yang semakin memburuk, kerusakan infrastruktur, penyebaran penyakit, penghambat pembangunan daerah, kenyamanan hidup dan pencemaran lingkungan. Drainase tersumbat, pertumbuhan

permukaan beton dan aspal, tata guna lahan yang terus mengurangi area resapan, dampak perubahan iklim, dan sedimentasi sungai memperburuk masalah banjir perkotaan dan banjir rob. Perlu perencanaan tata kota yang baik, sistem drainase efisien, pengelolaan lahan bijak, dan kesadaran lingkungan masyarakat.

Infrastruktur pengelolaan sampah yang buruk menimbulkan risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan, termasuk polusi udara, pencemaran air tanah dan sungai, serta kerusakan ekosistem laut. Pengelolaan sampah adalah salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius. Penyebab pengelolaan sampah yang buruk adalah kurangnya infrastruktur yang memadai (tempat pembuangan sampah akhir dan keterbatasan tempat sampah di ruang publik), kurangnya pengolahan sampah terpadu, kepadatan penduduk dan urbanisasi, kurangnya sarana dan prasarana penunjang, penyuluhan dan keterlibatan masyarakat masih minim dan keterbatasan teknologi dan inovasi.

Pengelolaan sampah yang buruk di TPA memperparah masalah ini. Terlebih belum optimalnya penanganan sampah perkotaan dan sistematisasi pengelolaannya mulai dari timbulan sampah pada sumber atau ditingkat individu hingga pengelolaan secara komunal yang lebih ramah lingkungan. Sehingga diperlukan kolaborasi stakeholders, antara masyarakat pemerintah dan swasta, edukasi kepada masyarakat, kampanye pengurangan penggunaan plastik, penegakan hukum atau regulasi pengelolaan sampah, dan petunjuk teknis pengelolaan sampah di perkotaan dari hulu ke hilir yang lebih ramah lingkungan.

Infrastruktur penyediaan sanitasi dan air bersih yang layak dan aman belum sepenuhnya tersedia, berdasarkan penelitian koefisien jasa ekosistem lingkungan Kota Bandar Lampung didominasi kelas rendah dan sangat rendah pada tahun 2031. Hal ini berdasarkan alih fungsi lahan yang membuat tutupan lahan didominasi dengan lahan

permukiman dan lahan bukan pertanian, sehingga membuat Kota Bandar Lampung tidak mampu memenuhi kebutuhan air bersih baik untuk kebutuhan air bersih domestik maupun pertanian (Ermawati, 2022). Sedangkan berdasarkan hasil kajian rencana induk sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota Provinsi Lampung, beberapa permasalahan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana dan sumber air. Termasuk area permukiman pesisir kota yang sampai saat ini masih dalam memenuhi kebutuhan air nya mereka membeli air dirigent. Sekalipun lebih dari 65,54% air bersih telah disalurkan di Kota Bandar Lampung melalui saluran air lintas kabupaten/kota kepada hampir 50 ribu pelanggan. Melakukan pengendalian pembangunan pada hulu sungai hingga hilir dan alih fungsi lahan hijau yang berlebih untuk menjaga Cadangan air, optimalisasi pemanfaatan sumber air secara efektif dan efisien, pembangunan intake, pemanfaatan sumber air lainnya termasuk secara konvensional, penambahan saluran air bersih domestik khususnya pada kawasan yang kekeringan dan permukiman padat, dan pemanenan air hujan secara komunal dan mandiri.

Maraknya permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung khususnya di kawasan informal permukiman pesisir terdapat berbagai permasalahan mulai dari peningkatan kerentanan dengan adanya potensi penyakit berbasis lingkungan, kerusakan *mangrove* dan ekosistem pesisir, pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah ilegal, serta peningkatan dampak dari banjir rob, karena permukiman kumuh terus tumbuh dan menjorok ke arah lautan.

3.1.4 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Lingkungan

Intensitas Banjir Kota Bandar Lampung yang terus meningkat, bukan hanya banjir rob di pesisir melainkan banjir perkotaan yang terus meningkat titik banjir dan tingkat keparahannya, tahun 2022 terdapat 14 kecamatan yang terkena banjir mulai dari Tanjung Senang, Sukarame, Sukabumi, Panjang, Way Halim, Tanjung Karang Timur, Enggal, Kedamaian, Tanjung Karang Barat, Rajabasa, Labuhan Ratu,

Kemiling dan Tanjung Karang Pusat, namun tahun 2024 terdapat penambahan kecamatan seperti kecamatan Kedaton dan Teluk Betung, tingkat keparahan banjir akibat intensitas hujan tinggi ini juga meningkat **berdasarkan riwayat ketinggian air hanya di 30-100cm**, namun **banjir** sepanjang **tahun 2024** dapat **mencapai 150-200cm**, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan intensitas kejadian juga keparahan. Infrastruktur mitigasi dan kebijakan yang saat ini ada perlu diperketat, mulai dari menjaga wilayah resapan, infrastruktur drainase, termasuk infrastruktur air lain nya sehingga limpasan air hujan cepat terserap dan teralirkan. Terlepas dari hal tersebut, banjir rob di pesisir/ teluk kota bandar lampung juga semakin parah pasalnya permukiman yang terbangun juga dapat dikatakan kurang layak dan cukup rentan, apabila ada banjir bangunan bisa saja bukan hanya terendam melainkan terbawa dan risiko penyakit juga tinggi. Oleh karena itu peningkatan pengelolaan *mangrove* dan sampah di pesisir dan pulau pasaran juga harus menjadi perhatian sebagai respons dari perbaikan lingkungan.

Alih fungsi lahan diarea resapan/hijau dan sempadan sungai/pantai semakin meningkat, lahan hijau berubah menjadi permukiman, industri dan Pembangunan lainnya dapat memperparah kondisi banjir Kota Bandar Lampung, terlebih isu perubahan iklim yang membuat bukan hanya intensitas banjir semakin tinggi karena cuaca ekstrem curah hujan tinggi, melainkan krisis air bersih dan kekeringan terjadi dan membuat masyarakat semakin rentan. Berdasarkan penelitian, kota Bandar Lampung telah mengalami gejala perubahan iklim dan menjadi kota yang rentan terhadap perubahan iklim terutama peningkatan intensitas banjir perkotaan, banjir rob, kekeringan, dan penyakit epidemi seperti malaria dan demam berdarah (W Z Ilmi dkk, 2021; F N Pratiwi dkk, 2022).

Kepadatan penduduk meningkatkan risiko kebakaran, terutama di Kecamatan Tanjung Karang Timur dengan kepadatan penduduk 22.018 jiwa per km², Bumi Waras 17.478 jiwa per km², dan Tanjung

Karang Pusat 14.328 jiwa per km². Termasuk wilayah komersial seperti pasar, ruko, dan mall juga rentan. Tidak terkecuali permukiman kumuh dan illegal yang padat. Penting memastikan peralatan pemadam kebakaran memadai, perawatan sistem listrik rutin, dan rencana darurat untuk keselamatan. Selain itu, memiliki rencana kontigensi di daerah perkotaan yang rawan kebakaran.

Belum terpenuhi luasan ruang terbuka hijau (RTH) yang ideal, saat ini RTH Kota Bandar Lampung baru terpenuhi sekitar 9,86% bahkan di RTRW hanya tercatat 440 hektar, sedangkan kebutuhan RTH Publik 20% sebesar 3.944 ha dan RTH Privat 10% sekitar 1.973 ha. Tren penurunan luas RTH terus terjadi, yang tahun 2009 pernah di angka 12,62% (Nanda dkk, 2015). Berdasarkan hasil riset lahan potensial pun belum mampu mencukupi baru sekitar 1.229 ha yaitu lapangan Kemiling dan Kebun Bibit (Armijon, 2019). Hal ini akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan meningkatnya intensitas banjir, karena luasan area serapan sangat sedikit, kualitas udara memburuk, dan suhu perkotaan meningkat. Sehingga perlu adanya peningkatan RTH guna memperbaiki kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Ancaman pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan di Kota Bandar Lampung, mulai dari pengelolaan sampah yang belum optimal dari dalam maupun luar wilayah Kota Bandar Lampung, polusi udara dari industri, transportasi, dan berbagai pencemaran terhadap air sungai akibat sampah domestik, Limbah minyak di laut lampung, limbah cari domestic, stockpile batu bara yang merusak ketersediaan air tanah, tanah, dan air laut. Oleh karena itu diperlukan konservasi alam, konservasi air tanah, air baku, tanah, dan udara dengan berbagai intervensi yang dapat dilakukan, seperti pengelolaan sampah yang tersistematik dan ramah lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, infrastruktur dasar yang ramah lingkungan, serta berbagai regulasi yang dapat mengintervensi adanya

peningkatan kerentanan lingkungan yang berdampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat kota Bandar Lampung.

Infrastruktur bencana alam dan dampak perubahan iklim belum optimal dilakukan, ancaman seperti bencana banjir, longsor, tsunami, gempa, dan lainnya harus bisa diakomodasi dalam setiap rencana pembangunan dan strategis kota Bandar Lampung. Termasuk belum tersedianya Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca Kota Bandar Lampung dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim juga menjadi indikasi bahwa belum ada keseriusan yang mendalam untuk penanganan isu iklim, lingkungan, dan ancaman bencana yang ada.

Pengembangan wilayah yang lebih humanis juga masih harus ditingkatkan, konsep kota ramah anak, lansia, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya harus menjadi panduan dalam setiap pengembangan ruang-ruang perkotaan di Kota Bandar Lampung, sehingga hak-hak mereka dan segala kebutuhan dapat diakses secara mudah dan layak.

3.1.5 Permasalahan Pembangunan pada Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kawasan Pendidikan Tinggi dan munculnya aktivitas pendidikan tinggi di sepanjang Jalan ZA Pagar Alam (Kedaton, Gedong Meneng, Rajabasa) dan sekitarnya (fungsi sosial budaya) dan wilayah Sukarame. Sehingga membuka peluang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama antara universitas dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan, bukan hanya pada tingkat kajian melainkan pengambilan keputusan dan kebijakan pada forum lintas sektoral. Sehingga pembangunan bisa diciptakan dengan lebih cepat.

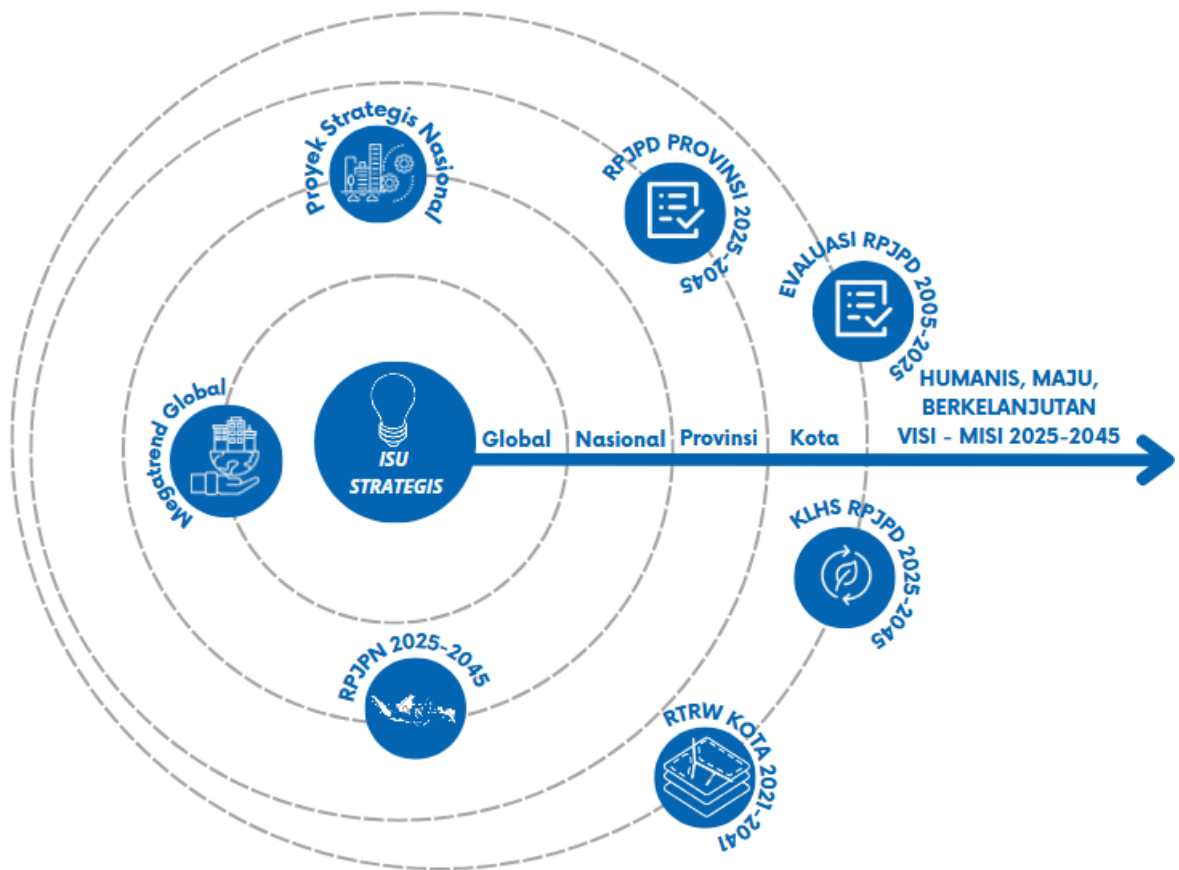
Internet, kecerdasan buatan (AI), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membawa dampak negatif seperti berita hoax, ujaran kebencian, penipuan finansial, akses pornografi, dan pergaulan bebas.

Pemerintah berupaya menangkal hal ini, tetapi kesadaran masyarakat juga diperlukan. Peningkatan sistem pendidikan yang mengedukasi masyarakat tentang berbagai jenis penipuan keuangan, seperti *phising*, *impersonation*, *vishing*, *smishing*, dan *carding*, dapat menurunkan risiko menjadi korban. Pendidikan berkualitas dapat membantu individu menjaga diri dan orang-orang di sekitarnya dari dampak negatif tersebut, sementara pendidikan moral penting untuk mencegah masyarakat menjadi pelaku penipuan.

Termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola seperti integrasi data atau satu data dalam menunjang pemerintahan yang belum optimal harus segera difasilitasi dan dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang intervensinya *multisector* dan berbasis bukti.

3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Perumusan isu strategis Kota Bandar Lampung untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berasal dari permasalahan-permasalahan yang timbul saat ini dan berbagai isu yang terjadi di Kota Bandar Lampung melalui berbagai telaah dokumen seperti RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2021-2041 dan KLHS RPJPD 2025-2045. Selain itu sumber lain seperti kajian dari eksternal pemerintah baik akademisi, dunia usaha, masyarakat, lembaga non-profit dan lain-lain, selain itu ditinjau juga secara vertikal dilakukan dengan penelaahan isu Global, Nasional, dan Isu Strategis Provinsi Lampung.



Gambar 3. 3 Tahapan Penentuan Isu Strategis Kota Bandar Lampung

Sumber: Bapperida Kota Bandar Lampung, 2024

3.2.1 Isu Strategis Global

1. Megatren Global 2045

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang cepat di segala bidang mengharuskan kita melakukan transformasi ke arah yang lebih baik. *Megatrend global* merupakan transformasi dengan skala yang besar dan jangka panjang yang harus direspons dengan baik, adaptasi, ketangguhan dan fleksibility menjadi kunci. Adapun beberapa *megatrend global* yang akan dihadapi menuju 2045 sebagai berikut:



Gambar 3. 4 Megatren Dunia 2045

Sumber: *bappenas.go.id*

a. Megatrend Demografi:

Dalam 30 tahun ke depan, pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan melambat, dengan peningkatan migrasi antar negara dan proporsi penduduk usia lanjut yang semakin tinggi. Di Kota Bandar Lampung, ini bisa berarti meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan dan fasilitas untuk lansia, serta tantangan integrasi bagi penduduk migran.

b. Megatrend Urbanisasi:

Pada 2050, diperkirakan 65 persen penduduk dunia akan tinggal di perkotaan, dengan 95 persen pertumbuhan terjadi di negara-negara berkembang. Kota Bandar Lampung, sebagai pusat perkotaan yang berkembang, harus mempersiapkan infrastruktur dan layanan publik yang memadai untuk mengakomodasi pertumbuhan ini, termasuk perumahan, transportasi, dan fasilitas umum.

c. Megatrend Perdagangan Internasional:

Kawasan Asia Pasifik akan tetap menjadi poros perdagangan dan investasi dunia. Pengaruh perubahan global, seperti "*Trump effects*", mendorong keseimbangan baru dalam jaringan produksi global. Kota Bandar Lampung harus memperkuat kerja sama internasional serta perdagangan dan investasi regional untuk mengantisipasi dampak ini.

d. Megatrend Kemunculan Kelas Menengah:

Di Asia dan Amerika Latin, kelas menengah akan tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi dengan meningkatnya pendapatan per kapita yang mendorong pengeluaran, tabungan, dan investasi. Di Kota Bandar Lampung, peningkatan kelas menengah dapat mendorong pertumbuhan sektor jasa dan konsumsi, serta memerlukan peningkatan kualitas hidup dan fasilitas.

e. Megatrend Persaingan Sumber Daya Alam (SDA) dan Geostrategis:

Persaingan untuk SDA akan tetap tinggi karena pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan perubahan gaya hidup. Bandar Lampung harus fokus pada pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan inovasi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas.

f. Revolusi Industri 4.0:

Fase ini melibatkan *internet of things*, otomatisasi, dan big data dalam manufaktur, menciptakan proses yang lebih efisien (*smart factory*) dan pengelolaan rantai nilai yang lebih baik. Kota Bandar Lampung dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi industri lokal dan menarik investasi di sektor teknologi tinggi.

g. Megatrend Keuangan Internasional

Perubahan dalam lanskap keuangan global, termasuk digitalisasi dan inovasi dalam sistem keuangan, mempengaruhi arus modal dan

investasi. Bandar Lampung harus beradaptasi dengan tren ini melalui penguatan sistem keuangan lokal dan menarik investasi asing dengan kebijakan yang mendukung inovasi dan inklusivitas.

h. Megatrend Luar Angkasa

Kemajuan eksplorasi luar angkasa dan teknologi satelit membuka peluang baru dalam pemantauan lingkungan, telekomunikasi, dan navigasi. Kota Bandar Lampung bisa memanfaatkan teknologi satelit untuk meningkatkan manajemen kota, seperti pemantauan kualitas udara, pengelolaan bencana, dan perencanaan kota berbasis data.

2. Perubahan Iklim

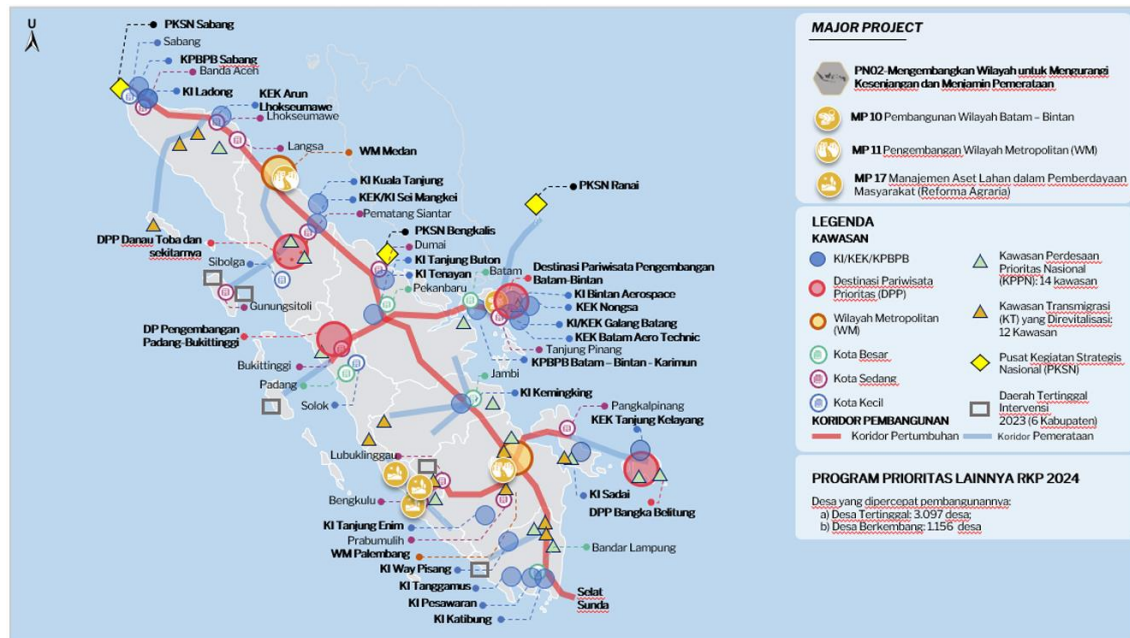
Perubahan iklim global membawa tantangan besar, termasuk peningkatan suhu, pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan laut. Kota Bandar Lampung perlu mengembangkan strategi adaptasi dan mitigasi untuk menghadapi dampak ini, seperti pengelolaan air yang lebih baik, infrastruktur hijau, dan kebijakan ramah lingkungan.

Dengan memahami dan mengantisipasi megatrend ini, Kota Bandar Lampung dapat merencanakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, memastikan bahwa kota ini siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

1. Isu Wilayah dan Sarana Prasarana

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Kota Bandar Lampung menjadi Kawasan Pengembangan Perkotaan 5 Kota Besar di Pulau Sumatera selain Padang, Pekanbaru, Jambi, dan Padang. Hal ini memperkuat rencana pengembangan Kota Metropolitan Bandar Lampung Raya yang juga telah diamanatkan dalam RTRW dan RPJMD periode sebelumnya.



Gambar 3. 5 Rencana

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Kota Bandar Lampung diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan dan simpul pembentukan rantai nilai wilayah, serta pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Pembangunan perkotaan akan difokuskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, penguatan kesetaraan antara kota-kota utama dan kota-kota penyangga, penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pemenuhan layanan infrastruktur.

Sejalan dengan pendekatan pertumbuhan, pada tahun 2024, pemerataan pembangunan antardaerah akan dilakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan permukiman.

Langkah ini akan menggabungkan kebijakan afirmatif pemerintah dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal, terutama di kawasan dan daerah yang relatif tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Fokus pemerataan pembangunan wilayah pada tahun 2024 adalah percepatan penyediaan pelayanan dasar di daerah 3T, khususnya di pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta di kawasan rawan bencana. Kebijakan afirmatif juga akan meningkatkan

konektivitas daerah 3T dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah terdekat.

Dengan demikian, upaya pembangunan dan pemerataan di Kota Bandar Lampung dan wilayah sekitarnya akan memastikan peningkatan kualitas hidup dan integrasi ekonomi yang lebih baik, mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2.3 Isu Strategis Provinsi Lampung

Potensi sumber daya laut dan pesisir menjadi fokus penting dalam pembangunan ekonomi Lampung, meskipun masih ada pekerjaan rumah terkait kualitas lingkungan, keberlanjutan, dan aksesibilitas. Revitalisasi kawasan pesisir, pengembangan pelabuhan perikanan, serta pemenuhan infrastruktur dasar menjadi langkah kunci dalam mengoptimalkan potensi wilayah ini.

Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Di antara wilayah Lampung, Kota Bandar Lampung menjadi pusat penting dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang signifikan

Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Di antara wilayah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menjadi pusat penting dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan proyek strategis nasional yang dititipkan kepada Provinsi Lampung. Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Industri Pesawaran, Kawasan Industri Way Pisang dan Kawasan Industri Katibung yang berlokasi di Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung memiliki ketergantungan pada peningkatan jumlah tenaga kerja dan modal, meskipun potensi pariwisata tinggi, infrastruktur dan pemasaran pariwisata belum optimal.

Aktivitas ekonomi seperti e-commerce, akses pasar global dan pertumbuhan ekonomi daerah cukup baik pembangunan ekonomi syariah inklusif dan pemanfaatan zakat dapat menjadi solusi pengurangan kemiskinan. Tentu dengan dukungan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kota Bandar Lampung harus memprioritaskan revitalisasi kawasan pesisir, pengembangan pelabuhan perikanan, dan pemenuhan infrastruktur dasar untuk mengoptimalkan potensi sumber daya laut dan pesisir. Meskipun terdapat pembangkit listrik tenaga panas bumi yang signifikan, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, keberlanjutan, dan aksesibilitas. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga kerja dan modal, optimalisasi infrastruktur pariwisata, serta pengembangan ekonomi syariah inklusif dengan memanfaatkan zakat juga perlu diperhatikan sebagai solusi untuk mengurangi kemiskinan, dengan dukungan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.2.4 Isu Strategis Kota Bandar Lampung

1. Kota Metropolitan yang Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan

Pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai kota metropolitan telah diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) periode sebelumnya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, merujuk kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 memberikan amanat yang mendukung Kota Bandar Lampung menjadi Kawasan Pengembangan Perkotaan di Pulau Sumatera.

Sejalan dengan Upaya menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai Kota Metropolitan yang Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan, dilakukan dengan memposisikan Kota Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan dan simpul pembentukan rantai nilai wilayah, serta pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya.

Selanjutnya, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, menjadi focus bagi Pembangunan perkotaan dengan memastikan terlaksananya penguatan kesetaraan antara kota-kota utama dan kota-kota penyangga, penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pemenuhan layanan infrastruktur.

Upaya pemerataan pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergi dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah yang akan dilakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan permukiman.

Langkah berikutnya adalah mengupayakan pengembangan ekonomi lokal melalui bauran kebijakan afirmatif pemerintah dengan pemberdayaan Masyarakat serta memfokuskan Upaya pemerataan pembangunan melalui percepatan penyediaan pelayanan dasar di seluruh wilayah yang terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah terdekat. Upaya pembangunan dan pemerataan di Kota Bandar Lampung dan wilayah sekitarnya akan memastikan peningkatan kualitas hidup dan integrasi ekonomi yang lebih baik, mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kota Bandar Lampung masuk dalam tipe kota metropolitan, karena memiliki jumlah penduduk yang telah mencapai 1.100.109 jiwa (BPS Kota Bandar Lampung 2024), dimana populasi penduduknya sudah lebih dari 1 juta jiwa juga merupakan pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan, keuangan, perdagangan, pendidikan dan budaya, didukung juga dengan infrastruktur yang maju, sesuai yang diamanatkan Kota Bandar Lampung menjadi kota cerdas terutama dalam bidang transportasi. Sebagai upaya dalam mewujudkan hal tersebut Kota Bandar Lampung memiliki 11 flyover dan 1 (satu) *underpass* beserta jaringan transportasi yang lengkap, dengan 6 (enam) terminal sekunder/penunjang yaitu: 1) Terminal Kemiling; 2)

Terminal Rajabasa; 3) Terminal Sukaraja; 4) Terminal Panjang; 5) Terminal Lempasing; 6) Terminal Pasar Bawah.

Selain itu Kota Bandar Lampung merupakan pusat pendidikan bagi Provinsi Lampung karena memiliki kawasan pendidikan dan kelengkapan infrastruktur yang memadai seperti 1 (satu) RSUD dan 15 puskesmas rawat inap, 16 puskesmas rawat jalan, 50 puskesmas pembantu dan 126 pos kesehatan kelurahan. Kota Bandar Lampung telah menggunakan sistem digitalisasi dalam berbagai kegiatan lintas sektor.

Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dan posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi Sumatera Bagian Selatan, pemerintah Kota Bandar Lampung harus dapat menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas. Karena potensi terjadi lonjakan populasi tentu akan dibarengi dengan tekanan baru. Oleh karena itu, peningkatan konektivitas antara wilayah dan penerapan teknologi digital di seluruh sektor sangat penting dilakukan untuk menjaga kualitas hidup dan produktivitas kota di masa depan.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas, Efektif, Transparan, mudah diakses serta melibatkan partisipasi publik yang aktif

Dalam konteks Kota Bandar Lampung, penerapan konsep *good governance* menjadi esensial dalam menghadapi kompleksitas pembangunan perkotaan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan di Provinsi Lampung, kota ini menghadapi berbagai persoalan tata kelola yang memerlukan solusi yang efektif dan inklusif. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik, khususnya dalam hal keuangan dan pengambilan keputusan, menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap warganya. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme konsultasi publik dan forum partisipatif lainnya, Kota Bandar Lampung dapat menghasilkan

kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga.

Responsivitas pemerintah terhadap isu-isu perkotaan, seperti kemacetan lalu lintas, ketersediaan fasilitas publik, dan perlindungan lingkungan, menjadi krusial dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keadilan sosial dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kota Bandar Lampung dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh penduduknya. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Dengan memanfaatkan platform digital, Kota Bandar Lampung dapat mempercepat transformasi menuju kota cerdas dan inklusif, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota.

3. Perekonomian yang Inklusif, Berdaya saing dan Berkelanjutan

Industri pariwisata membuka peluang kerja bagi masyarakat Kota Bandar Lampung di usia produktif. Selain itu, pariwisata juga menjadi penopang bagi usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM), yang merupakan pilar utama pembangunan ekonomi yang sedang diprioritaskan. Dengan meningkatkan UMKM, kesenjangan pendapatan dan peluang usaha dapat dikurangi, dan hal ini merupakan langkah penting dalam pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja.

Lebih dari itu, pengembangan UMKM memiliki potensi untuk memperluas basis ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah serta ketahanan nasional. Kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung juga telah membawa dampak positif pada pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum, menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang

signifikan di masa depan. Namun, perlu perhatian khusus terhadap infrastruktur pariwisata, termasuk akses transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum, yang akan menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan dan transformasi pariwisata di Kota Bandar Lampung ke depan.

Pariwisata Kota Bandar Lampung juga beriringan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan destinasi wisata, perhatian terhadap konservasi alam dan kebersihan lingkungan menjadi penting untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Dalam membangun pariwisata Kota Bandar Lampung adalah dengan mengedepankan “Pariwisata Cerdas”, yang menekankan pentingnya kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan juga memanfaatkan teknologi digital.

Dengan mengedepankan konsep ekonomi kerakyatan, diharapkan dapat terwujud sistem ekonomi yang memperkuat partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan kesetaraan ekonomi yang lebih besar di Kota Bandar Lampung.

4. Infrastruktur Perkotaan dan Sistem Transportasi yang Ramah Lingkungan dan Terintegrasi

Jalan Tol Trans-Sumatra, proyek sepanjang 2.818 km yang menghubungkan Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh, menjadi landasan utama untuk pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas Exit Tol Trans-Sumatera di pusat Kota Bandar Lampung penting untuk memenuhi kebutuhan umum. Dengan keberadaan jalan tol ini, akses ke berbagai sektor ekonomi meningkat, termasuk logistik dan UMKM. Kota Bandar Lampung berpotensi menjadi pusat ekonomi baru dengan pertumbuhan UMKM di sepanjang rute tol, memberikan dampak positif secara sosial dan budaya.

Transportasi Massal, seperti bus kota, menjadi tulang punggung akses transportasi di Kota Bandar Lampung. Layanan ini, diselenggarakan oleh BUMN, seperti PT.KAI, PT.ASDP, dan PT.Angkasa Pura, menjadi sarana vital bagi masyarakat. Infrastruktur perkotaan, termasuk jalan, drainase, dan penerangan jalan umum, di Kota Bandar Lampung telah mencapai standar yang memadai. Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap di Kota Bandar Lampung yang mencapai 89,95%, serta kondisi jalan kota yang juga sudah mencapai 89,02%, menjadi indikator kuat akan infrastruktur yang mapan. Dukungan dari 11 flyover dan 1 underpass menambah efisiensi dalam mobilitas kota.

Namun, kondisi lalu lintas yang padat menimbulkan tantangan tersendiri, walaupun masih dalam batas kondusif. Namun transportasi publik massal dan sistem informasi terpadu dan konektivitas wilayah dengan kabupaten/kota sekitarnya belum baik, Trend penurunan operasional BRT dan kenaikan jumlah kendaraan pribadi tentu membuat kemacetan terjadi, belum lagi para pekerja komuter yang terus meningkat dari Luar Kota bandar Lampung. Untuk memfasilitasi mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu sistem transportasi publik dan konektivitas antar wilayah yang baik tentu ditunjang dengan moda transportasi yang aman, inklusif dan terjangkau, serta kebijakan yang dapat mengintervensi penggunaan kendaraan pribadi beralih kepada transportasi publik.

5. Pengembangan SDM yang Berkualitas, Terampil, Inklusif, dan Berkarakter.

Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan tanggung jawab bersama dalam membangun bangsa yang tangguh dan negara yang sejahtera. Ini melibatkan berbagai aspek, seperti memastikan SDM memiliki kualitas fisik dan mental yang unggul, yang akan memberikan dampak positif tidak hanya pada peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, tetapi juga dalam

mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sistem pendidikan yang baik dan bermutu tidaklah cukup, perlu ada penguatan peran agama dan budaya yang mengajarkan moral dan etika. Oleh karena itu, perlunya akselerasi dalam pendidikan di masa mendatang, dengan fokus pada pengembangan pendidikan vokasi, menjadi krusial karena Kota Bandar Lampung membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan berbudaya.

Transisi Epidemiologi, ancaman pandemi, dan masalah gizi telah menjadi fokus utama yang membutuhkan penanganan dini. Demografi pada tahun 2045 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk lansia dibandingkan dengan usia produktif, sehingga penanganan penyakit degeneratif menjadi prioritas yang mendesak. Selain itu, dampak perubahan iklim global, khususnya bagi Indonesia yang beriklim tropis, meningkatkan risiko penyakit seperti menular. Di sisi lain, biaya kesehatan terus meningkat baik di tingkat nasional maupun daerah, sementara kemampuan fiskal daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan alternatif dan inovasi dalam mobilisasi pembiayaan kesehatan di daerah.

Pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung perlu memperhatikan aspek-aspek seperti akses dan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, integrasi dengan sistem digitalisasi, promosi kesehatan berbasis *real-time*, akses ke layanan kesehatan digital seperti *telemedicine*, SDM kesehatan yang terampil dalam menggunakan teknologi digital, dan jaminan kesehatan nasional yang berkualitas untuk semua dan tanpa diskriminasi seperti kriteria Universal Health Coverage (UHC) yang didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu semua orang tanpa terkecuali memiliki akses layanan kesehatan berkualitas kapanpun dan dimanapun tanpa memikirkan biaya, baik promosi kesehatan, pencegahan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif. Sehingga bukan hanya pada sektor kesehatan yang perlu diperbaiki untuk bisa meningkatkan kualitas hidup

manusia, seluruh sektor non kesehatan juga harus terlibat, karena menurut riset, Studi menunjukkan bahwa determinan sosial kesehatan bertanggung jawab atas 50% outcomes kesehatan dan ketidaksetaraan kesehatan (Hood et al, 2016; McGinnis et al, 2002). Sehingga perbaikan seperti sanitasi dan air bersih, keterjangkauan terhadap kebutuhan pangan dan bahkan lingkungan yang sehat seperti penyediaan RTH adalah penentu dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga penting untuk mendorong konsep *Health in All Policies* dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar terciptanya kesehatan untuk semua dari kerja-kerja kolaborasi lintas sektor dan aktor pembangunan.

6. Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penanggulangan PMKS merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Daerah. Beberapa strategi yang dapat dijalankan dalam menanggulangi PMKS meliputi: (i) temu kenali penyebab akar masalah PMKS; (ii) kerjasama antar instansi terkait; (iii) Pemberdayaan masyarakat dibarengi dengan program pendidikan dan pelatihan; (v) meningkatkan kelas sosial penduduk berpendapatan rendah; (vi) layanan kesehatan, baik fisik maupun mental bagi PMKS yang mudah diakses dan terjangkau. Paling penting dari masalah kesejahteraan sosial adalah pada fungsi pendampingan, karena dengan dilakukan pendampingan yang baik individu maupun keluarga PMKS tidak difokuskan kepada besaran manfaat yang diterima tapi progress menuju terbebas dari masalah kesejahteraan itu sendiri artinya secara mandiri telah naik kelas ke status sosial yang lebih baik.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah dua aspek penting dalam pembangunan sosial berkelanjutan. Upaya pemerintah daerah dalam kesetaraan gender merupakan wujud dari aktualisasi pemberdayaan perempuan itu sendiri, yang meliputi (i) akses

pendidikan dan ketrampilan bagi perempuan; (ii) akses mudah dan terjangkau bagi pelayanan kesehatan reproduksi; (iii) kesempatan perempuan dalam berpolitik dan peluang ekonomi bagi kemudahan kredit usaha dan pelatihan wirausaha; (iv) perlindungan hukum KDRT dan keadilan gender; (v) jaringan pemerhati perempuan dan instansi terkait secara optimal. Perlindungan Anak, salah satu hak anak yang harus dikedepankan kepentingannya yaitu pencegahan kekerasan pada anak dengan cara kampanye publik dan edukasi di sekolah. Selain itu menghindari eksploitasi terhadap anak. Perlindungan hukum kepada anak, sistem parenting yang positif serta kerjasama berbagai pihak terkait masalah anak.

Pengendalian pertumbuhan penduduk memerlukan perencanaan keluarga yang matang dan berkelanjutan, dengan fokus pada pendidikan, kesadaran masyarakat, layanan kesehatan reproduksi, dan kebijakan keluarga berencana. Pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, terutama di sekolah menengah, sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Stabilitas dan ketertiban umum, melalui keamanan, penegakan hukum, dan pencegahan gangguan sosial, juga harus diprioritaskan.

Dengan pendekatan holistik ini, Kota Bandar Lampung dapat menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pentingnya menyelesaikan masalah sosial melalui kaca mata GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) tidak dapat diabaikan. Dengan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, dilibatkan dalam proses pembangunan, kita dapat menciptakan kota yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang kuat dan komitmen

bersama, kita dapat mewujudkan visi Kota Bandar Lampung sebagai kota yang humanis.

7. Ketahanan masyarakat dan kota melalui Pembangunan yang Rendah Emisi dan Adaptif terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Nature-Based Solutions (NBS) adalah solusi yang memanfaatkan cara kerja alam untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan, seperti perubahan iklim, kesehatan, ketahanan pangan, polusi air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Konsep ini diperkenalkan oleh Bank Dunia dan diperjuangkan oleh *International Union for Conservation of Nature and Natural Resource* (IUCN) pada akhir tahun 2000-an. NBS fokus pada konservasi, restorasi, dan pengelolaan ekosistem serta menawarkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Solusi ini dapat menyumbang sekitar 20% dari upaya mitigasi perubahan iklim hingga tahun 2050, tetapi perlu didukung oleh pengurangan emisi dari sektor lainnya.

Di Kota Bandar Lampung, penerapan NBS sangat relevan mengingat kota ini menghadapi berbagai masalah lingkungan, termasuk banjir akibat drainase yang buruk, kekurangan ruang terbuka hijau (RTH), dan polusi. Upaya konservasi dan restorasi ekosistem, seperti memperluas RTH dan memperbaiki sistem drainase alami, dapat membantu mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan. Selain itu, pengelolaan ekosistem pesisir dan hutan kota dapat mendukung keberlanjutan dan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung menargetkan 20% RTH publik dan 10% RTH private pada tahun 2041, sesuai Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021. RTH, atau Ruang Terbuka Hijau, merupakan area terbuka yang

mengandung fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. Strategisnya, RTH di perkotaan menjadi fokus penting dalam perencanaan dan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya RTH terletak pada aksesibilitas masyarakat terhadap taman kota, serta perlunya menjaga keberlanjutan RTH di tengah ancaman perkembangan kota yang dapat mengancam fungsi ekologisnya. Sementara itu, perubahan iklim di Kota Bandar Lampung, seperti kenaikan suhu udara, berpotensi memicu krisis energi dan konsumsi air, serta meningkatkan risiko penyakit vektor seperti malaria. Salah satu solusi pencegahan penyakit akibat perubahan iklim adalah dengan memperbanyak RTH yang memiliki tumbuhan penyerap karbon dioksida.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Kota Bandar Lampung difokuskan pada pemenuhan sumber energi sekunder. Sumber energi sekunder memegang peran krusial dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari, seringkali lebih efisien atau bersih dalam penggunaannya daripada sumber energi primer. Namun, pemanfaatan sumber energi sekunder juga bergantung pada ketersediaan dan produksi sumber energi primer yang memadai. Pengembangan sumber energi sekunder yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi semakin penting dalam menangani masalah perubahan iklim dan pelestarian sumber daya alam.

Sebagai ibukota Provinsi Lampung, masyarakat Kota Bandar Lampung memiliki potensi untuk menggunakan sumber energi matahari, seperti panel surya, sebagai salah satu cara paling sederhana dan efisien untuk menghasilkan tenaga listrik yang bersih dan efisien. Contoh pemanfaatannya adalah pada pemanas air panas rumah dan lampu jalan. Keunggulan potensi energi terbarukan ini adalah keberadaannya yang permanen dan tidak terbatas, kemampuannya menghasilkan energi bersih dan ramah lingkungan, serta menyediakan lapangan kerja lokal, yang pada akhirnya mendukung kemandirian energi.

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pemanfaatan potensi energi terbarukan ini, seperti investasi awal yang tinggi, ketergantungan pada cuaca dan musim, kompleksitas interkoneksi dengan jaringan energi saat ini, dan keterjangkauan yang terbatas hanya untuk penduduk menengah ke atas. Dengan memahami tantangan ini, Kota Bandar Lampung dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan demi mendukung keberlanjutan lingkungan dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

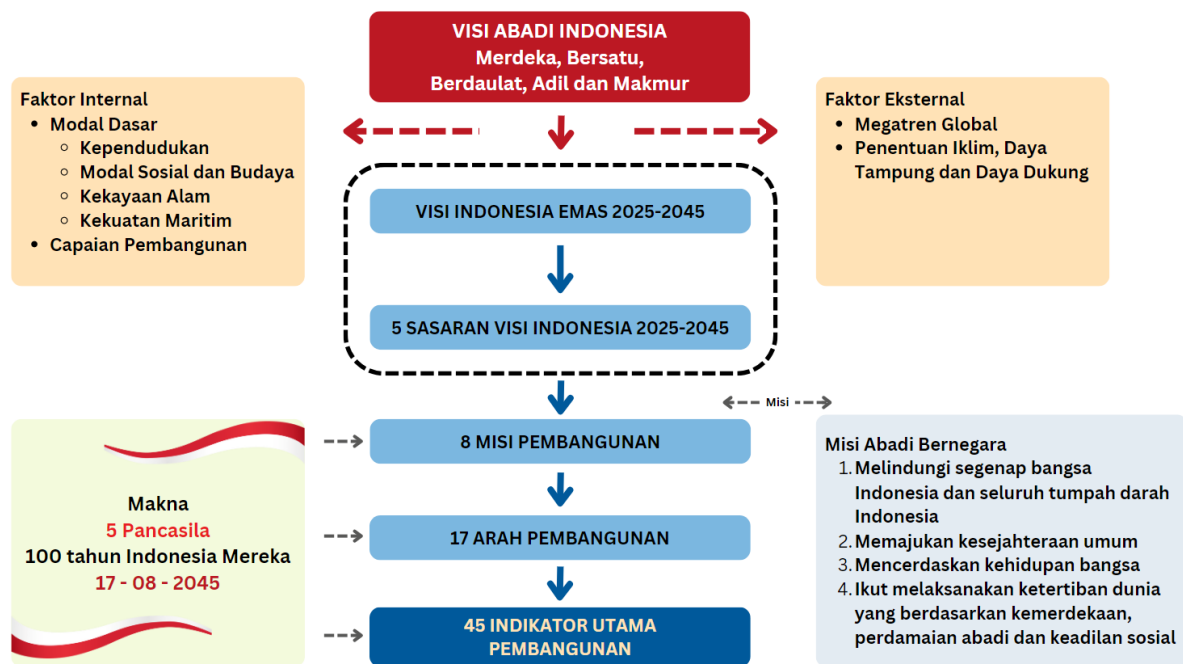
BAB IV . VISI DAN MISI DAERAH

Pada hakikaatnya pembangunan merupakan yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Salah satu upaya dalam pembangunan yaitu terciptanya visi sangat berperan dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya, sebuah visi tidak dapat berdiri sendiri. Maka dari itu, visi atau gambaran masa depan tersebut sangat perlu penjelasan terkait bagaimana rencana untuk melangkah tersebut. Dalam upaya penjabaran visi dapat diakomodir oleh misi merupakan arahan dalam rangka perwujudan Kota Bandar Lampung.

4.1 Tinjauan Visi Pembangunan Nasional

4.2.1 Visi Pembangunan Nasional 2025-2045

Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu **Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur**. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. **Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.**



Gambar 4. 1 Visi Indonesia Emas 2045

Sumber: RPJPN 2025-2045 (diolah), 2024

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan. Delapan misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) misi (agenda) transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi tersebut dijabarkan ke dalam 17 arah (tujuan) pembangunan sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Tujuh belas arah (tujuan) pembangunan tersebut diukur dengan 45 indikator utama keberhasilan pembangunan. Lebih jelasnya dapat ditinjau pada gambar 4.1.

Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan

berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola.

Transformasi sosial dilakukan dalam rangka pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan dapat melakukan ketiga transformasi tersebut. Kemudian transformasi ekonomi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian secara menyeluruh dan menjadi negara maju. Dalam rangka melakukan transformasi sosial dan transformasi ekonomi, maka transformasi tata kelola diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya dengan baik sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Fondasi yang kuat perlu dilengkapi dengan diplomasi yang tangguh agar Indonesia mampu bersaing di dunia internasional yang sangat kompetitif. Diplomasi tangguh merupakan diplomasi total yang strategis meliputi diplomasi ekonomi, kedaulatan, kepemimpinan, perlindungan, dan publik. Diplomasi ini dilakukan oleh para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah dengan modalitas diplomasi yang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Selanjutnya dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan

mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Transformasi menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung dengan sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu, diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Visi bernegara Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada:

- 1) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim;
- 2) perkembangan megatren global; dan
- 3) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada Tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada Tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

Visi Indonesia 2045:
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan



Gambar 4. 2 Visi Indonesia Emas 2045

Sumber: RPJPN 2025-2045 (diolah), 2024

Bersatu

Pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu sistem hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara terpusat dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional. Walaupun memiliki

keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat, semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh. Pembangunan ekonomi akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan kebijakan ekonomi nasional yang menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan serta kesatuan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia

Berdaulat

Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Ketahanan: Indonesia semakin kuat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman internal dan eksternal, serta mampu menghadapi berbagai tantangan global secara mandiri dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan yang tinggi untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di tengah perubahan geopolitik dan geopolitik.

Kesatuan: Indonesia mempertahankan jati dirinya sebagai negara kesatuan yang menjunjung tinggi kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Berlandaskan kekuatan ini, Indonesia mempunyai kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan dapat mempertahankan keutuhan wilayah serta persatuan bangsa. Secara nyata, Bhinneka Tunggal Ika tetap kukuh. Meskipun terdapat beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia tetap satu dalam kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain; karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam

negerinya sendiri, seperti pangan, energi dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Aman: Indonesia mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya di segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dalam negeri, sehingga memberikan lingkungan yang kondusif bagi rakyat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif. Rakyat juga memiliki kebebasan berpartisipasi dalam proses demokrasi dan mengeluarkan pendapat tanpa takut akan adanya intimidasi.

Maju

Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berdasarkan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Berdaya: Indonesia memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat. Indonesia juga memiliki kekuatan dalam berdiplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional dengan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Tangguh: Indonesia memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat baik dari segi ekonomi, sosial politik, maupun keamanan. Indonesia juga memiliki sistem ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri.

Adil: Rakyat Indonesia menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Rakyat Indonesia menikmati kehidupan yang sejahtera, dan nyaman dengan lingkungan yang aman. Semua rakyat Indonesia hidup layak didukung sistem jaminan sosial yang kuat.

Berkelanjutan

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi 5 (lima) sasaran visi yaitu

- 1) Pendapatan per Kapita setara negara maju (GNI per kapita sebesar USD 30.300, kontribusi PDB Maritim mencapai 17,5 persen, serta PDB Industri 28 persen);
- 2) Kemiskinan menuju Nol Persen (tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5 - 0,8 persen) dan ketimpangan berkurang (Rasio Gini 0,290 - 0,320 dan peningkatan Kontribusi PDRB KTI menjadi 26 persen);
- 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (Global Power Index masuk 15 besar dunia);
- 4) Daya Saing Sumber Daya Manusia juga terus meningkat (skor HCI menjadi 0,73); dan
- 5) Intensitas Emisi GRK menurun menuju Emisi Nol Netto (net zero emission) dengan tingkat penurunan mencapai 93,5 persen.



Gambar 4. 3 Lima Sasaran dari tujuan pada Visi Indonesia Emas 2045

Sumber: RPJPN 2025-2045 (diolah), 2024

4.2.2 Misi Pembangunan Nasional 2025-2045

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan 8 (delapan) Misi (agenda) Pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:



Gambar 4. 4 Transformasi dan Agena Pembangunan Indonesia Emas 2045

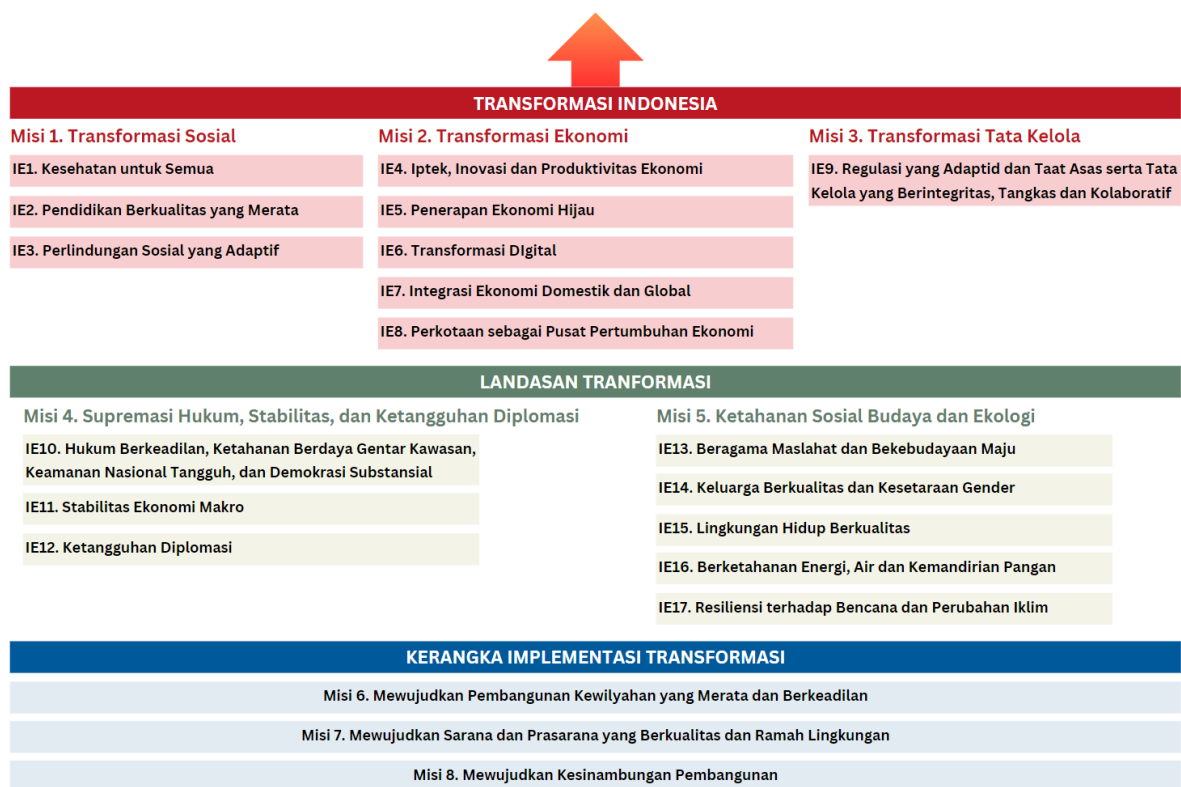
Sumber: RPJPN 2025-2045 (diolah), 2024

Misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penejemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kesyukuran pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Delapan Misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui Tujuh Belas Arah (tujuan) Pembangunan sebagai berikut:



Gambar 4. 5 Tujuh Belas Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045

Sumber: RPJPN 2025-2045 (diolah), 2024

4.2 Tinjauan Visi Pembangunan Provinsi Lampung

4.3.1 Visi Provinsi Lampung 2025-2045

Penyusunan RPJPD Lampung Tahun 2020-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi yang dicanangkan harus memiliki kekuatan, menjadi spirit, mencerminkan sikap dan merupakan cita-cita seluruh komponen masyarakat Lampung untuk meningkatkan kualitas hidup dan eksistensi Provinsi Lampung di kancah regional, nasional hingga global dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.



Gambar 4. 6 Kerangka Berfikir Visi dan Misi Lampung 2045

Sumber: RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045 (diolah), 2045

Dengan memperhatikan faktor internal berupa Lampung memiliki modal dasar pada aspek geografis dan demografi; Daya dukung dan Daya tampung lingkungan, Capaian pembangunan sebelumnya, yang dikombinasikan dengan perhatian terhadap Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan lingkup daerah. Serta memperhatikan faktor eksternal : Tantangan dan Isu strategis pembangunan pada lingkup global, Arah kebijakan pembangunan nasional, dan lingkup kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

VISI LAMPUNG 2025-2045 :

***“SEJAHTERA, MAJU, MERATA DAN
BERKELANJUTAN”***

Sejahtera memiliki arti bahwa di tahun 2045, Lampung yang SEJAHTERA diarahkan pada kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan fisik dan spiritual. Masyarakat lebih sejahtera secara ekonomi ditandai dengan terpenuhinya ketersediaan bahan PANGAN dan SANDANG masyarakat serta akses terhadap perumahan aman dan layak dengan biaya terjangkau. Penduduk terkendali kuantitasnya dan meningkat kualitasnya. Derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan tertib, religius dan bermoral, rukun, harmonis, mengembangkan ekspresi budaya, kesenian, dan olahraga menjadi prestasi. Kehidupan masyarakat yang kondusif, ditandai dengan tindak kriminal, penyalahgunaan NAPZA, dan kejahatan perdagangan anak dalam kondisi minim. Lembaga demokrasi dan masyarakat politik mantap, kuat, dan mandiri. Kehidupan masyarakat didukung dengan tata kelola pemerintahan berlandaskan hukum dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, berlandaskan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.

Maju memiliki arti bahwa Provinsi Lampung perlu melakukan perubahan positif di berbagai aspek pembangunan dengan inklusif sehingga dapat bersaing dan menjadi unggul baik individu maupun

seluruh masyarakat dengan kapasitas kewilayahan yang dimiliki. Hal ini dapat dicapai dengan salah satunya target pada tahun 2045 yaitu tingkat pendapatan penduduk Provinsi Lampung yang sudah memasuki level *high income* dan pertumbuhan ekonomi pada rentang 6-7 serta perlu didorong dengan peran industri dan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Maju dalam hal ini juga berkaitan dengan aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, aspek pemerintahan, penegakan hukum dan kehidupan demokrasi, dan aspek infrastruktur dan wilayah, serta aspek lingkungan. Kemajuan daerah juga mencirikan karakter pelaku pembangunan yang berketuhanan, taat hukum, humanis, nasionalis, dan peduli lingkungan.

Merata memiliki arti bahwa pembangunan yang merata ditujukan untuk memastikan bahwa keterlibatan dalam menyusun rencana pembangunan, kesempatan dan manfaat serta hasil pembangunan didistribusikan secara adil dan merata kepada semua elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang, jenis kelamin, atau faktor lainnya, yang melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan bagi semua orang.

Berkelanjutan memiliki arti bahwa Provinsi Lampung dalam mencapai visinya berlandaskan untuk menjami ketersediaan sumber daya antarwaktu dan antargenerasi dan konsistensi serta keselarasan antara pusat dan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya yang bijaksana dan menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung untuk keseimbangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, keberlanjutan pembangunan juga perlu didukung mengembangkan sumber pendanaan pembangunan yang lebih mengedepankan peran antar pihak secara lebih terintegrasi, inovatif dan tepat sasaran.

Untuk lebih mempertegas bagaimana ukuran keberhasilan dari Visi Lampung 2045, maka visi tersebut juga dilengkapi dengan 5 (lima) Indikator Tujuan dari Visi, yaitu:

- 1) Pendapatan per Kapita penduduk Provinsi Lampung masuk pada level High Income, pada kisaran Rp. 328-384 juta (21.867 – 25.600 US Dollar), dengan kontribusi sektor Industri dalam PDRB sebesar 26-28 persen; dan pembangunan ekonomi biru dengan nilai indeks mencapai 250,73.
- 2) Pengentasan Kemiskinan akan terus ditekan pada kisaran 3,0 - 2,5 persen; dan tingkat Ketimpangan yang rendah pada angka Indeks Gini di level 0,202-0,197 dan kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional mencapai 2,50 persen; serta persentase Desa Mandiri 30-33 persen.
- 3) Daya Saing Daerah di level nasional mencapai 4,0
- 4) Kualitas Sumber Daya Manusia yang meningkat, tercermin dari nilai Indeks Modal Manusia (IMM) pada rentang 0,68–0,70 dan IPM berkisar 83,51-85,13
- 5) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 93,17 persen.

4.3.2 Misi Provinsi Lampung 2025-2045

Pembangunan Lampung ke depan perlu mengubah pendekatan dengan menggunakan paradigma baru. Langkah reformasi saja tidak cukup. Untuk mewujudkan Visi Lampung SMART 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan” akan dituangkan dalam 3 (tiga) pilar transformasi daerah dan ditempuh melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, yaitu :

a. Transformasi Daerah

1. Misi ke-1: Transformasi Sosial (Mewujudkan SDM yang Unggul, Adaptif, dan Produktif)

Misi ini untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan produktif. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, setiap penduduk di Provinsi Lampung harus hidup lebih sehat, mendapatkan pendidikan inklusif dan adaptif serta perluasan nilai manfaat perlindungan sosial.

2. Misi ke-2: Transformasi Ekonomi (Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan).

Misi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi Lampung dengan meningkatkan produktivitas, daya saing, serta digitalisasi pasar, dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Disamping itu, potensi dan keunggulan yang dimiliki terus dikembangkan dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru di sektor riil (dalam bentuk PMA dan PMDN) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.

3. Misi ke-3: Transformasi Tata Kelola (Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Merata)

Misi ini bertujuan Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang menerapkan tata kelola pemerintahan efektif dan akuntabel serta pemantapan kapasitas dan kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata.

b. Landasan Transformasi Daerah

4. Misi ke-4: Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan penegakan supremasi sebagai kondisi perlu yang akan mendukung stabilitas makro ekonomi daerah serta mendorong kehidupan demokrasi bertanggungjawab dalam masyarakat. Dengan landasan yang kuat tersebut, maka diharapkan dapat terwujud Provinsi Lampung yang aman, demokratis dan stabil.

5. Misi ke-5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui perwujudan ketangguhan dan keseimbangan antara kebutuhan aktifitas manusia dengan terpeliharanya kualitas lingkungan secara terus menerus.

c. Kerangka Implementasi Transformasi Daerah

6. Misi ke-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi ini bertujuan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah, mengurangi ketimpangan Ekonomi dengan meningkatkan Akses terhadap layanan dasar wilayah dengan memperkuat infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat sehingga menciptakan peluang kerja dan sumber penghidupan yang lebih merata di seluruh wilayah dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah berjalan

seimbang dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

7. Misi ke-7: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini bertujuan pada pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan ketahanan ekologi dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Dengan populasi global yang terus meningkat dan dampak perubahan iklim yang semakin terasa, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Misi ini menekankan pada pengelolaan sumber daya alam, konservasi energi, pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan perlindungan biodiversitas serta pengelolaan sumber daya air. Misi ini melibatkan implementasi kebijakan yang berkelanjutan serta mengupayakan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Menjamin bahwa proyek infrastruktur dan lingkungan tidak hanya berkelanjutan dari perspektif lingkungan, tetapi juga secara ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang baik melalui teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan infrastruktur dan memastikan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dari sumber daya alam.

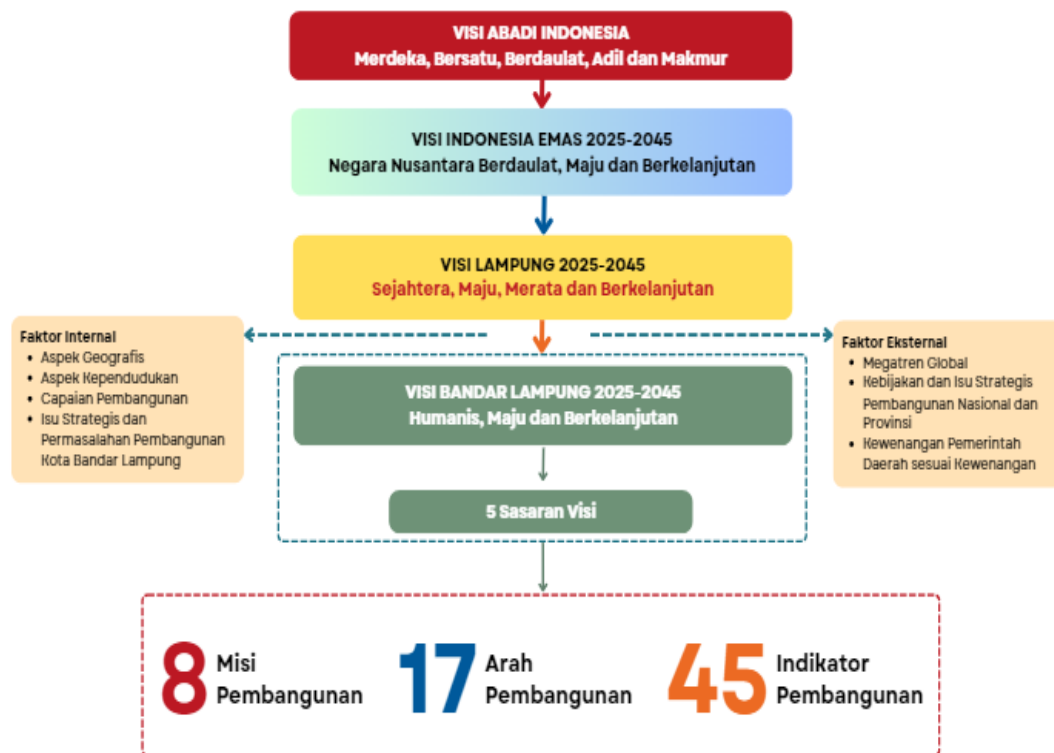
8. Misi ke-8: Kestinambungan Pembangunan

Misi ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kestinambungan perencanaan pembangunan secara antarwaktu, antar periode dan antarjenjang pemerintahan; dan terbentuknya ekosistem pendanaan pembangunan daerah yang mencirikan kemandirian.

4.3 Visi Pembangunan Kota Bandar Lampung

4.3.1 Visi Kota Bandar Lampung 2025-2045

Visi RPJPD merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 20 (dua puluh) tahun. Penyusunan Visi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 secara vertikal diturunkan berdasarkan Visi Abadi Indonesia, Visi Indonesia Emas 2045, Visi Lampung 2045 hingga berbagai pertimbangan yang terbagi berdasarkan faktor internal dan eksternal yang ada, faktor internal berupa aspek geografis (kondisi geografis, risiko bencana, kerentanan perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan potensi daerah), aspek kependudukan (kependudukan, modal sosial dan budaya), pencapaian pembangunan, dan isu strategis serta permasalahan pembangunan Kota Bandar Lampung. Sedangkan faktor eksternal berupa megatrend global, kewenangan daerah, dan kebijakan serta isu strategis nasional dan provinsi yang berkaitan dengan pembangunan Kota Bandar Lampung.



Gambar 4. 7 Visi Kota Bandar Lampung 2045

Sumber: Data diolah, 2024

Berikut adalah Visi Kota Bandar Lampung untuk periode RPJPD Tahun 2025-2045 adalah:

Bandar Lampung 2045:

“Humanis, Maju dan Berkelanjutan”

Visi Bandar Lampung 2045 ini memuat konsep-konsep dengan nilai dan makna tertentu yang diharapkan akan menjadi ruh dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung 2045 mengandung makna bahwa Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandar Lampung yang akan dilaksanakan selama 20 tahun kedepan diharapkan dapat mewujudkan visi bersama mencapai Indonesia Emas tahun 2045 dalam bingkai 100 (seratus) tahun Kemerdekaan Indonesia (Negara Indonesia Emas).

Humanis mengandung makna dalam setiap pembangunan Kota Bandar Lampung selalui di wujudkan melalui rasa kemanusiaan yang tinggi di atas segalanya, melalui interaksi sosial yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan dan perikeadilan. Sehingga pembangunan yang tercipta selalu beroorientasi pada nilai manfaat bagi masyarakatnya. Nilai Humanis disematkan sebagai manifestasi dalam mewujudkan kota yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dalam berkehidupan bermasyarakat. Tanpa membedakan, mengelompokkan, dan mendiskriminasi suku, ras, etnis, dan agama tertentu, seluruh masyarakat dipastikan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan yang terdistribusi secara merata. Kata humanis juga terdapat nilai religius, yaitu memandang manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki drajat hidup yang sama dihadapanNya. Sehingga dalam konteks ini menjadikan manusia setara dan seutuhnya menjalani hidup dengan penuh rasa tanggungjawab terhadap sesama dan alam semesta sehingga muncul rasa toleransi tinggi, menjadi manusia yang berintegritas, bertanggungjawab, memuat nilai belas kasih bagi seluruh makhluk dan alam semesta.

memastikan bahwa keterlibatan dalam menyusun rencana pembangunan, kesempatan dan manfaat serta hasil pembangunan didistribusikan secara adil dan merata kepada semua elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang, jenis kelamin, atau faktor lainnya, yang melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan bagi semua orang

Dalam konteks pengembangan kota, konsep kota humanis mengutamakan faktor kemanusiaan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi penduduknya. Kota humanis ideal memiliki tata guna lahan campuran yang memperhatikan kebersihan, kerapian, dan fasilitas yang terjaga dengan baik. Hunian disediakan dengan manajemen yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan

masyarakat. Sistem transportasi terintegrasi dengan baik, mengurangi jumlah kendaraan di jalan melalui *car sharing* dan transportasi publik yang terintegrasi antar wilayah, dan menyediakan ruang parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu jalan utama. Kota humanis adalah kota yang kompak, melindungi dari pertumbuhan sporadis (*smart growth*), ramah lingkungan, hemat energi, dan ekologis, dengan transportasi yang layak huni. Visi kota humanis yang berkelanjutan mencakup keseimbangan ekologis, penggunaan sumber daya alam yang efisien, dan kualitas lingkungan hidup yang terjaga. Untuk mencapai tujuan ini, perencanaan kota dan wilayah harus mampu mengatasi permasalahan transportasi dan tata ruang, serta memperhatikan karakteristik lokal Kota Bandar Lampung.

Maju mengandung makna tercapainya suatu kondisi yang lebih baik dan ideal dalam segala hal dalam sendi kehidupan. Kota yang maju dapat ditinjau dari berbagai aspek mulai dari aspek ekonomi, kependudukan, tata kelola pemerintahan, infrastruktur dan pembangunan wilayah, hingga aspek sosial dan budaya. Kata maju pada tata kelola kota sering diasosiasikan dengan kota cerdas, kota yang mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan melalui penerapan teknologi digital dapat mewujudkan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan yang terjaga dengan lebih efektif dan efisien. Kota cerdas didasari dengan *smart governance* yang membangun *smart people*, *smart economy*, *smart mobility*, *smart environment*, *smart living* yang berbasis pada *smart culture*. Dari aspek tata kelola pemerintahan, kemajuan daerah ditunjukkan oleh kualitas pelayanan publik yang sangat baik, yang membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi dan layanan publik serta tanpa diskriminasi.

Dari aspek ekonomi, kemajuan daerah ditandai oleh integrasi elemen dan institusi ekonomi yang menghasilkan efek pengganda dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah serta daya saing regional.

Implementasi ekonomi cerdas menjadi indikator utama kemajuan ekonomi dan hampir mendekati nol persen angka penduduk miskin serta ketimpangan ekonomi di semua sektor dan aktor di Kota Bandar Lampung.

Dari aspek kependudukan, kemajuan terlihat dalam perkembangan pola pikir, kepribadian, dan akhlak masyarakat, pertumbuhan penduduk yang terkendali dan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing serta memiliki kualitas hidup dan kesehatan yang paripurna. Kemajuan ini direpresentasikan oleh masyarakat cerdas yang memiliki akses luas terhadap layanan dasar seperti, pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman layak, kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan, ketertiban dan keamanan, serta fasilitas penunjang kehidupan lainnya yang dapat diakses dengan mudah untuk semua dan tanpa diskriminasi.

Dari aspek infrastruktur dan pembangunan wilayah, kemajuan ditandai oleh munculnya wilayah pertumbuhan baru dan infrastruktur yang inklusif serta Tangguh dan berkelanjutan. Infrastruktur berkualitas harus ramah lingkungan, hemat energi, atau menggunakan energi terbarukan. Dalam konstelasi regional, nasional, dan internasional, kemajuan berarti Kota Bandar Lampung kompetitif secara regional dan global sebagai kota perdagangan dan jasa dengan layanan perkotaan berstandar nasional dan internasional.

Dari aspek sosial budaya, kemajuan ditandai oleh peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi nilai-nilai sosial yang inklusif serta toleran. Ini juga mencakup partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya, serta pengembangan kreativitas dan inovasi di bidang seni dan budaya. Secara global, kemajuan sosial budaya berarti kemampuan masyarakat beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan identitas budaya lokal.

Berkelanjutan mengandung makna bahwa setiap pembangunan Kota Bandar Lampung diwujudkan dengan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembangunan ini selalu mempertimbangkan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Nilai keberlanjutan diterapkan melalui infrastruktur yang tahan perubahan iklim, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pengelolaan lingkungan yang efektif.

Sehingga, pembangunan yang tercipta selalu berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Nilai berkelanjutan ini disematkan sebagai manifestasi komitmen kota dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan warga, sekarang dan di masa depan. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan juga mencakup penanganan masalah banjir perkotaan dan banjir rob di daerah pesisir secara inklusif, melibatkan semua pemangku kepentingan.

Dengan demikian, konsep berkelanjutan menjadikan manusia sebagai pusat dari setiap keputusan pembangunan, setara dan bertanggung jawab terhadap sesama dan alam. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi, memupuk integritas, dan menumbuhkan belas kasih bagi seluruh makhluk dan lingkungan.

Untuk lebih mempertegas bagaimana ukuran keberhasilan dari Visi Bandar Lampung 2045, maka visi tersebut juga dilengkapi dengan 5 (lima) Indikator Tujuan dari Visi, yaitu :

1. Pendapatan per Kapita penduduk Kota Bandar Lampung pada level berpendapatan tinggi pada kisaran Rp 250,00-384,50 juta (lebih dari 15.000 US Dollar), dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7-7,0 dan kontribusi sektor Industri dalam PDRB sebesar 21,40-23.00 persen, serta dengan indikator Indeks Ekonomi Biru sebesar 65,16.
2. Pengentasan Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan = 1,50 – 1,00 %) dan Penurunan Ketimpangan (Rasio Gini = 0,269-0,250)

3. Daya Saing Daerah ditandai dengan kontribusi PDRB Kota Bandar Lampung di Provinsi sebesar 17,30% – 17,50%, Indeks Daya saing Daerah 3,90 – 4,00 dan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4-5.
4. Kualitas Sumber daya Manusia yang meningkat (Indeks Pembangunan Manusia 83,00 – 83,99 dan Indeks Modal manusia sebesar 0,69-0,71).
5. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 1033689,66 (ton CO2e), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 68,06

4.3.2 Misi Kota Bandar Lampung 2025-2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Tabel 4. 1 Penyelarasan Misi Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045

Misi Ke-	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi 2025-2045	RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045
1	Transformasi Sosial	Mewujudkan SDM yang Unggul, Adaptif, dan Produktif	Transformasi Sosial (Mewujudkan SDM yang Sehat, Unggul, Adaptif, dan Berkarakter)
2	Transformasi Ekonomi	Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Transformasi Ekonomi (Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global)
3	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Merata	Transformasi Tata Kelola (Membangun Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Inklusif dan Adaptif)
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan	Pemerintahan yang tangguh, Demokrasi secara substantif, dan Stabilitas Ekonomi

Misi Ke-	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi 2025-2045	RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045
	Kepemimpinan Indonesia	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	
5	Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Sosial Budaya dan Ekologi yang Berketahanan dan Berkelanjutan
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Berbasis Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan
7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8	Kesinambungan Pembangunan	Kesinambungan Pembangunan	Kesinambungan Pembangunan

Pembangunan Kota Bandar Lampung ke depan perlu mengubah pendekatan dengan menggunakan paradigma baru. Langkah reformasi saja tidak cukup. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan Lampung 2045, maka Kota Bandar Lampung juga harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan. Untuk mewujudkan Visi Kota Bandar Lampung 2045 “Humanis, Maju dan Berkelanjutan” akan ditempuh melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, yaitu:

a. Transformasi Daerah

1. Misi ke-1: Transformasi Sosial (Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul, Adaptif, dan Berkarakter))

Dalam konteks pembangunan Kota Bandar Lampung, transformasi sosial berarti mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, adaptif, produktif, dan berkarakter. Hal ini dilakukan melalui upaya yang menyeluruh untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembangunan karakter dan nilai-nilai moral. Transformasi ini juga mencakup pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdaya saing bagi semua lapisan masyarakat. Dengan SDM yang tangguh dan berintegritas, Kota Bandar Lampung akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan meraih kesuksesan dalam era globalisasi yang terus berkembang.

2. Misi ke-2: Transformasi Ekonomi (Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global)

Dalam konteks pembangunan Kota Bandar Lampung, transformasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing global. Hal ini dilakukan melalui kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang beragam, termasuk UMKM dan ekonomi kreatif, serta melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan. Transformasi ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap pasar global, memperkuat infrastruktur ekonomi, serta mendukung inovasi dan investasi dalam teknologi terbaru. Dengan menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sambil tetap mempertahankan daya saingnya di tingkat global.

3. Misi ke-3: Transformasi Tata Kelola (Membangun Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Inklusif dan Adaptif)

Dalam konteks pembangunan Kota Bandar Lampung, transformasi tata kelola bertujuan untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas. Hal ini dilakukan dengan melakukan reformasi kebijakan dan peraturan yang transparan dan akuntabel, serta dengan memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan untuk menjaga integritas dan responsivitasnya terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi ini juga melibatkan pengembangan sistem pelayanan publik yang memprioritaskan keadilan dan keterjangkauan bagi semua lapisan masyarakat, serta menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dengan mengimplementasikan tata kelola yang baik, Kota Bandar Lampung dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, sambil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

b. Landasan Transformasi Daerah

4. Misi ke-4: Pemerintahan yang Tangguh, Demokrasi secara substantif, dan Stabilitas Ekonomi

Sebagai landasan transformasi daerah, Keamanan Daerah Tangguh, Kehidupan Demokrasi Substantif, dan Stabilitas Ekonomi dan Trantibum merupakan pilar-pilar utama yang memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan Kota Bandar Lampung. Keamanan daerah yang tangguh memastikan lingkungan yang aman dan stabil bagi masyarakat, sementara kehidupan demokrasi yang substansial memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Stabilitas ekonomi dan trantibum mengarah

pada keberlanjutan ekonomi yang kuat dan tatanan sosial yang teratur, menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Dengan memperkuat landasan ini, Kota Bandar Lampung dapat melangkah maju dalam arah yang berkelanjutan dan inklusif, mewujudkan visi sebagai kota yang dinamis, damai, dan sejahtera bagi semua warganya.

5. Misi ke-5: Sosial Budaya dan Ekologi yang Berketahanan dan Berkelanjutan

Sosial budaya dan ekologi yang berketahanan dan berkelanjutan menjadi pijakan penting dalam transformasi Kota Bandar Lampung. Melalui pemeliharaan dan pengembangan kearifan lokal serta pelestarian lingkungan, kota ini mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan kelestarian alam. Dengan membangun masyarakat yang sadar akan pentingnya keberlanjutan ekologi dan kearifan lokal, serta melaksanakan kebijakan yang mendukung penggunaan sumber daya alam secara bijak, Kota Bandar Lampung akan menjadi contoh kota yang mengutamakan harmoni antara manusia dan lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan.

c. Kerangka Implementasi Transformasi Daerah

6. Misi ke-6: Pembangunan Berbasis Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan

Pembangunan berbasis kewilayahan yang merata dan berkelanjutan menjadi kerangka implementasi utama dalam transformasi daerah Kota Bandar Lampung. Melalui pendekatan ini, pembangunan tidak hanya terfokus pada pusat kota, tetapi juga merambah ke seluruh wilayah dengan memastikan distribusi sumber daya dan manfaat yang merata. Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan memperhatikan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi

kebutuhan mereka. Dengan memperkuat pembangunan berbasis kewilayahan yang merata dan berkelanjutan, Kota Bandar Lampung dapat memastikan pertumbuhan yang inklusif, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat di seluruh wilayahnya.

7. Misi ke-7: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kota Bandar Lampung. Dengan menginvestasikan dalam infrastruktur yang memadai dan ramah lingkungan, seperti transportasi publik yang efisien, jaringan jalan yang terkoneksi dengan baik, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, kota ini dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan lestari bagi penduduknya. Melalui pendekatan ini, Kota Bandar Lampung dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan kualitas hidup warganya, dan memperkuat daya saingnya sebagai kota yang berwawasan masa depan.

8. Misi ke-8: Kestinambungan Pembangunan

Kestinambungan pembangunan menjadi penutup yang kuat bagi misi Kota Bandar Lampung. Dengan komitmen untuk menjaga momentum pembangunan yang telah dicapai, kota ini berusaha untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan memperbaiki diri secara berkelanjutan. Dengan demikian, Kota Bandar Lampung dapat menjamin bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembangunan selaras dengan visi jangka panjangnya untuk menjadi kota yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

4.4 Upaya Transformatif Super Prioritas Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menjadi pedoman yang memuat seluruh aspek pembangunan. Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat **14 Upaya Super Prioritas untuk Transformasi Indonesia**, dan **6 Upaya Super Prioritas untuk Landasan Transformasi**, yaitu :

Terdapat 14 (empat belas) Upaya Super Prioritas untuk Transformasi Indonesia, terdiri dari:

1. Transformasi Sosial:

- (1) Percepatan **wajib belajar 13 tahun** (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar menengah);
- (2) Peningkatan **partisipasi pendidikan tinggi** dan **lulusan STEAM berkualitas** termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
- (3) **Rekonstruksi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan** seperti guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- (4) **Investasi pelayanan kesehatan primer** serta penuntasan stunting dan penyakit terabaikan (terutama: TBC dan Kusta);
- (5) **Penuntasan kemiskinan** dengan satu sistem Regsosek dan **perlindungan sosial adaptif terintegrasi**.

2. Transformasi Ekonomi:

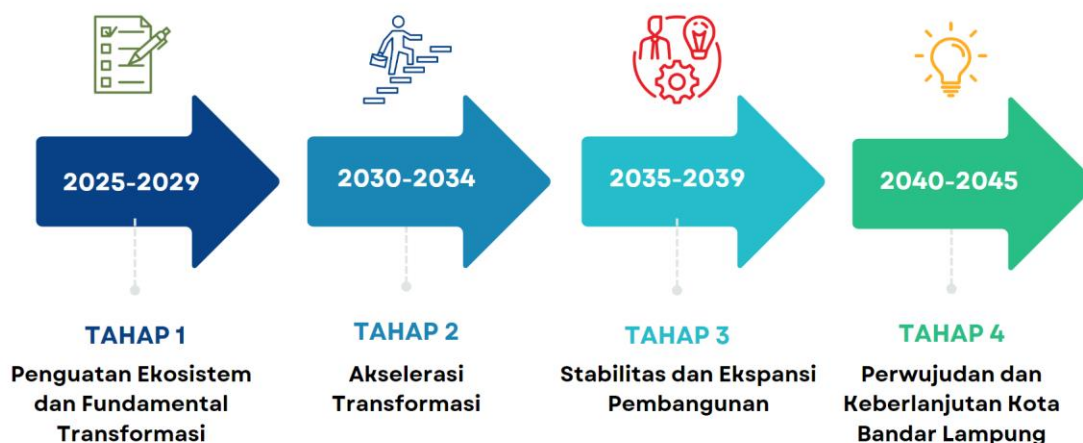
- (6) **Peningkatan anggaran IPTEKIN** termasuk swasta dan menuju komersialisasi oleh Industri;
- (7) **Industrialisasi**: hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
- (8) **Percepatan transisi energi berkeadilan** menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi, serta transportasi hijau;
- (9) **Superplatform** untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

- (10) **Integrasi infrastruktur konektivitas** dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - (11) Pembangunan **Ibu Kota Nusantara (IKN)**.
3. Transformasi Tata Kelola:
- (12) **Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN** (terutama single salary system dan pensiun ASN), serta pemberantasan korupsi;
 - (13) **Penguatan integritas partai politik**.
- Serta, 7 (enam) Upaya Super Prioritas untuk Landasan Transformasi, yaitu :
- 1. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi;
 - (14) **Transformasi sistem penuntutan** menuju *single prosecution system* dan **transformasi lembaga kejaksaan** sebagai *adcocaat generaal*;
 - (15) **Transformasi Industri Pertahanan** menuju kemandirian melalui skema inovatif dan penguatan value chain industri nasional;
 - (16) **Transformasi Perencanaan dan Fiskal**: Perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis resiko, penerapan fiscal rule adaptive, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
 - (17) **Reformasi Subsidi** terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
 - 2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
 - (18) **Penguatan Karakter dan jati diri bangsa**
 - (19) **Reformasi pengelolaan sampah** terintegrasi dari hulu ke hilir; dan
 - (20) **Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan** dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (Food, Energy, Water).

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan merupakan bentuk diferensial dari visi misi pembangunan dua puluh tahunan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Proses pelaksanaan arah kebijakan pembangunan 20 tahunan ini dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan prioritas, kemampuan pembiayaan, serta kondisi riil pembangunan di Kota Bandar Lampung saat ini. Adapun pentahapan kebijakan pembangunan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang di Kota Bandar Lampung terbagi menjadi 4 tahap pembangunan. Tiap tahapan pembangunan Kota Bandar Lampung ini mempunyai target dan tema sesuai dengan prioritas pembangunan sehingga prosesnya seperti anak tangga dimana tahapan selanjutnya dapat dilaksanakan jika tahapan sebelumnya sudah dapat dilaksanakan. Adapun pentahapannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. 1 Tahapan Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045

Selanjutnya, pelaksanaan 4 (empat) tahapan pembangunan lima tahunan dalam RPJPD juga akan dijabarkan pada masing-masing Misi dari RPJPD, dengan skenario yang dirancang sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Indikator Sasaran Visi Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045

Visi Bandar Lampung 2025-2045 : Bandar Lampung Humanis, Maju dan Berkelanjutan							
No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2023	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB perkapita ADHB (juta rupiah)	61,65	87,00-108,74	155,00-177,00	202,91-250,00	250,00-384,50
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	5,5-6,2	6,0-6,7	6,2-7,0	5,7-7,0
		Kontribusi Sektor Industri di PDRB (%)	18,71	20,38-20,68	20,68 – 20,99	21,00 – 22,31	21,40 – 23,00
		Indeks Ekonomi Biru	N/A	40	50	60	65,16
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,77	6,15 – 5,50	4,60 – 3,50	3,05 – 2,00	1,50 - 1,00
		Rasio Gini (Indeks)	0,381	0,340-0335	0,295-0,290	0,285-0270	0,269-0,250
3	Daya Saing Daerah	Kontribusi PDRB Kota Terhadap Provinsi	16,51	16,62-16,76	18,80-17,01	17,10-17,25	17,30 - 17,5
		Indek Daya Saing Daerah (poin)	3,54	3,63 - 3,66	3.72 -3,77	3,80 -3,89	3,90 - 4,00
4	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	79,86	80,10 - 80,99	81,00 - 81,9	82,00 - 82,99	83,00 – 83,99
		IMM (Indeks)	N/A	0,58 – 0,60	0,61 – 0,63	0,65 – 0,67	0,69 – 0,71
5	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi GRK	N/A	57582,91	191055,57	455606,11	1033689,66
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,38	64,02	65,28	66,54	68,06

5.1.1 Arah Kebijakan Misi 1: Transformasi Sosial (Mewujudkan SDM yang Sehat, Unggul, Adaptif, dan Berkarakter)

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, setiap penduduk Kota Bandar Lampung memiliki kualitas kesehatan dan kehidupan yang baik dan layak, memiliki kemampuan dan kompetensi yang mumpuni disetiap sektornya, memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, serta berkarakter dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, kebudayaan untuk menghadapi dan mewujudkan pembangunan di masa depan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial atau manusia nya melalui pemenuhan infrastruktur, layanan, dan utilitas dasar yang berkualitas



Gambar 5. 2 Tahapan Transformasi Sosial

Kebijakan transformasi sosial akan diwujudkan melalui yang sehat dan produktif dalam menjangkau pelayanan kesehatan primer dan universal. Upaya kesehatan mengacu pada siklus hidup manusia dengan perluasan promotif dan preventif kesehatan serta pembudayaan perilaku hidup sehat.

Penanggulangan kasus gizi buruk, stunting, dan penurunan angka kematian ibu serta bayi harus terus dilakukan dengan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

Pemberantasan penyakit menular perlu diperkuat sambil mewaspadai pergeseran ke arah penyakit degeneratif akibat gaya hidup serta mitigasi penyakit infeksi. Dengan meningkatnya angka harapan hidup dan proporsi penduduk > 60 tahun di Kota Bandar Lampung, kebijakan pembangunan kesehatan harus lebih adaptif bagi lansia. Hal tersebut juga harus didukung melalui riset kesehatan dan diperkuat melalui kolaborasi dengan akademisi dan praktisi untuk membangun ekosistem riset yang kokoh.

Pendidikan diarahkan pada pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan, serta percepatan wajib belajar 13 tahun. Pendidikan harus adaptif dengan tuntutan global melalui prinsip lifelong learning dan metode blended learning. Selain itu, pengembangan sistem pendidikan modern berbasis soft skill dan entrepreneur diperlukan untuk menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks.

Transformasi sosial, termasuk perlindungan sosial, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibumlimas), serta perbaikan perumahan rakyat dan infrastruktur pekerjaan umum juga sangat penting. Sistem perlindungan sosial harus adaptif, menjamin kebutuhan dasar dan pemberdayaan sepanjang siklus kehidupan. Dengan demografi yang menuju populasi menua, perlu penataan sistem pensiun dan perbaikan layanan kesehatan untuk menghindari kemiskinan di usia tua.

Tabel 5. 2 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 1			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Misi : Transformasi Sosial	• Pemenuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlimas, dan sosial). • Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan	• Percepatan pembangunan sumber daya manusia. • Percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.	• Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. • Kemiskinan dan Ketimpangan semain menurun	• Perwujudan sumber daya manusia yang sehat, unggul, adaptif, dan berkarakter. • Kemiskinan dan ketimpangan sangat rendah.

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 1			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
IE.1. Kesehatan Untuk Semua	- Penguatan dan perluasan upaya promotif preventif dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. - Penguatan dan pemerataan layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup dan akses layanan kesehatan universal. - Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap melalui pendekatan budaya. - Penguatan kompetensi tenaga kesehatan. - Penguatan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang Kesehatan - Penyediaan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas, aman bencana, inklusif untuk semua.	- Percepatan perluasan upaya promotif preventif dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. - Percepatan Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup dan akses layanan kesehatan universal. - Percepatan Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap melalui pendekatan budaya. - Percepatan Pemerataan dan Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. - Percepatan Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang Kesehatan - Percepatan penyediaan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas, aman bencana dan	- Pemantapan upaya promotif preventif dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. - Pemantapan Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup dan akses layanan kesehatan universal. - Pemantapan Pencegahan dan pengendalian penyakit. - Pemantapan Pemerataan dan Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. - Pemantapan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang Kesehatan - Pemantapan penyediaan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas, aman bencana dan	- Perwujudan Upaya promotif preventif dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang efektif. Melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. - Perwujudan Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup dan akses layanan kesehatan universal yang merata. - Perwujudan Pencegahan dan pengendalian penyakit yang optimal. - Perwujudan Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang merata. - Perwujudan Kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang tercapai. - Perwujudan Penyediaan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas, aman bencana

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 1			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
		inklusif untuk semua.	inklusif untuk semua.	dan inklusif untuk semua yang memadai.
IE2. Pendidikan yang Berkualitas, Unggul dan Berkarakter	- Penguatan kurikulum pendidikan disemua usia berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, numerasi, kearifan lokal, promosi kesehatan dan kebencanaan daerah - Penguatan kurikulum berbasis proyek dan entrepreneurship (dunia usaha dan industri) - Penguatan sistem wajib belajar 13 tahun (pra dan pendidikan dasar) yang didukung bantuan pembiayaan - Penyediaan sarana prasarana sekolah aman bencana dan inklusif untuk semua. - Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Matematics) - Peningkatan kualitas pendidikan disemua usia wajib belajar dan	- Percepatan penguatan kurikulum pendidikan disemua usia berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, numerasi, kearifan lokal, promosi kesehatan dan kebencanaan daerah - Percepatan penguatan kurikulum berbasis proyek dan entrepreneurship (dunia usaha dan industri) - Percepatan wajib belajar 13 tahun (pra dan pendidikan dasar) yang didukung bantuan pembiayaan - Percepatan penyediaan sarana prasarana sekolah aman bencana dan inklusif untuk semua. - Percepatan Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Matematics) - Percepatan peningkatan kualitas pendidikan disemua usia wajib	- Pemantapan kurikulum pendidikan disemua usia berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, numerasi, kearifan lokal, promosi kesehatan dan kebencanaan daerah - Pemantapan kurikulum berbasis proyek dan entrepreneurship (dunia usaha dan industri) - Pemantapan program wajib belajar 13 tahun (pra dan pendidikan dasar) yang didukung bantuan pembiayaan - Pemantapan sarana prasarana sekolah aman bencana dan inklusif untuk semua. - Pemantapan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Matematics) - Pemantapan kualitas pendidikan disemua usia	- Perwujudan Kurikulum pendidikan di semua usia yang berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, numerasi, kearifan lokal, promosi kesehatan, dan kebencanaan daerah yang efektif. - Perwujudan Kurikulum berbasis proyek dan kewirausahaan (dunia usaha dan industri) yang inovatif. - Perwujudan Program wajib belajar 13 tahun (pra-sekolah dan pendidikan dasar) yang didukung oleh bantuan pembiayaan yang memadai. - Perwujudan Sarana dan prasarana sekolah yang aman bencana dan inklusif untuk semua yang tersedia. - Perwujudan Akses pendidikan tinggi yang luas, terutama pada program studi STEM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) yang terjamin. - Perwujudan Kualitas pendidikan di semua usia wajib

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 1			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	keterampilan pada usia produktif - Menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill. - Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. - Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	belajar dan keterampilan pada usia produktif - Percepatan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill. - Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. - Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	wajib belajar dan keterampilan pada usia produkti - Pemantapan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill. - Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. - Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	belajar dan keterampilan pada usia produktif yang optimal. - Perwujudan Keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau keterampilan digital yang kuat. - Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. - Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	- Penguatan bantuan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. - Penyediaan bantuan sosial tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan kelompok rentan. - Penguatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik	- Percepatan bantuan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. - Percepatan pemberian bantuan sosial tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan kelompok rentan. - Percepatan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum melalui	- Pemantapan penerima manfaat bantuan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. - Pemantapan penerima manfaat bantuan sosial tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan kelompok rentan. - Pemantapan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik	- Terwujudnya bantuan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang kuat. - Perwujudan bantuan sosial tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan yang memadai. - Perwujudan Kualitas sumber daya manusia pada usia produktif yang meningkat, terutama melalui

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 1			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	melalui upskilling maupun reskilling. - Penguatan Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, - Penguatan upaya dalam peningkatan jumlah serta keragaman lapangan kerja yang ramah terhadap kelompok rentan - Penguatan tenaga kerja terlatih dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja - Penguatan upaya peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. - Penguatan pengarusutamaan gender yang inklusif sosial dalam pembangunan. - Penguatan SDM yang berdaya saing berkualitas - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas,	upskilling maupun reskilling. - Percepatan upaya penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, - Percepatan jumlah serta keragaman lapangan kerja yang ramah terhadap kelompok rentan - Percepatan tenaga kerja terlatih dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja - Percepatankepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. - Penguatan pengarusutamaan gender yang inklusif sosial dalam pembangunan. - Percepatan SDM yang berdaya saing berkualitas - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas,	melalui upskilling maupun reskilling. - Pemantapan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, - pemantapan jumlah serta keragaman lapangan kerja yang ramah terhadap kelompok rentan - pemantapan tenaga kerja terlatih dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja - pemantapan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. - Penguatan pengarusutamaan gender yang inklusif sosial dalam pembangunan. - pemantapan SDM yang berdaya saing berkualitas - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas,	upskilling dan reskilling untuk masyarakat umum. - Perwujudan jaminan sosial yang meluas, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. - Tercapainya Jumlah serta keragaman lapangan kerja yang ramah terhadap kelompok rentan yang meningkat. - Terwujudnya Tenaga kerja terlatih yang meningkat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. - Tercapainya Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang meningkat dengan pengarusutamaan gender yang inklusif dalam pembangunan. - Terwujudnya Sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas. - Terpenuhinya Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 1			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan - Penguatan upaya ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal - Penertiban dan Penagakan hukum. - Menjaga kerukunan masyarakat. - Penguatan Upaya keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan - Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal - Penertiban dan Penagakan hukum. - Menjaga kerukunan masyarakat. - Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan - Pemantapan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal - Penertiban dan Penagakan hukum. - Menjaga kerukunan masyarakat. - Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	disabilitas, dan lansia yang tercapai melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. - Perwujudan Ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal yang meningkat. - Terwujudnya Penertiban dan penegakan hukum yang efektif. - Terwujudnya Kerukunan masyarakat yang terjaga. - Terwujudnya Keamanan dan ketertiban yang meningkat untuk mengurangi tingkat kriminalitas.

Tabel 5. 3 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-1

Misi 1 : Transformasi Sosial (Mewujudkan SDM yang Sehat, Unggul, Adaptif, dan Berkarakter)						
No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline - Target 2025	Target 2025 -2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE.1. Kesehatan Untuk Semua						
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,53 (2023)	75,5 – 76,0	79,5 – 80,0	79,5 – 80,0	80,05 - 82,00
2	Kesehatan Ibu dan Anak:					
a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup, persen)	28 (2023)	23-25	17-20	12-15	8-10
b.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) *SKI	13,4 (2023)	10 - 8	8 - 7	7 - 6	5 - 3

Misi 1 : Transformasi Sosial (Mewujudkan SDM yang Sehat, Unggul, Adaptif, dan Berkarakter)						
No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline - Target 2025	Target 2025 -2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
3	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	84,6 (2023)	85 - 86	87 - 88	89 - 90	90 -95
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	97,27	97,35	97,45	97,72	98,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96,10	97-98	97 - 98	98 - 99	100,0
IE.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata						
5	Hasil Pembelajaran: *(ikut angka Provinsi)					
a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	Literasi Membaca SD	84,96-90,00	90-95	95-100	100	100
	Literasi Membaca SMP	81,7-85	85-90	90-95	95-100	100
	Numerasi SD	74,25-80	81-85	85-90	90-95	95-100
	Numerasi SMP	76,61-80	81-85	85-90	90-95	95-100
b.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	Literasi Membaca SD	62,67-70	70-75	75-80	80-90	90-100
	Literasi Membaca SMP	43,76-50	50-60	70-80	80-90	90-100
	Numerasi SD	62,02-65	66-70	70-80	81-90	90-100
	Numerasi SMP	30,40-65	66-70	70-80	81-90	90-100
c.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,97	11,9-12,5	12,5-13,00	13,00-13,5	13,5 - 14
d.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,72	14,8-14,9	14,9-15,0	15,0-15,5	15,5 - 16
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	7,43	7,63	7,83	8,00	8,36
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	74,42	75,00	77,00	79,00	80,00
IE.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif						
8	Tingkat Kemiskinan (%)	7,7 (2023)	6,15-5,50	4,60-3,50	3,05-2,0	1,5 - 1,0
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) *(ikut angka Provinsi)	26,69	30 - 40	40 - 55	55 - 70	70 -80
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%) *(masih angka Provinsi)	22	30,00-35,00	36,00-46,00	47,00-52,00	53,00-55,00

5.1.2 Arah Kebijakan Misi 2: Transformasi Ekonomi (Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global)

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung diperlukan transformasi ekonomi yang didukung oleh penguatan ekosistem ekonomi yang baik dan pemerataan pembangunan melalui pembangunan berbasis wilayah dan berkelanjutan.



Gambar 5. 3 Tahapan Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi Kota Bandar Lampung bertujuan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat dari pendapatan rendah ke tingkat yang lebih tinggi melalui pengembangan potensi ekonomi daerah. Pendekatan ini melibatkan industrialisasi yang didukung oleh riset dan inovasi, serta penerapan konsep transformasi hijau dan biru untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah Kota Bandar Lampung akan menerapkan kebijakan yang ramah investasi dan meningkatkan kapasitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur dan sistem pembiayaan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan akan dapat dicapai secara bertahap.

Untuk mencapai kesejahteraan pulau usaha di Kota Bandar Lampung, fokus utama adalah pada peningkatan produktivitas sektor pertanian dan

perikanan. Hal ini melibatkan modernisasi teknik pertanian, peremajaan perkebunan, serta pengembangan kawasan sentra produksi pangan. Kebijakan jangka panjang yang dirancang termasuk adopsi pertanian presisi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan daya saing produk pertanian.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan juga dilakukan melalui perluasan kelembagaan ekonomi, regenerasi petani, dan pengembangan literasi keuangan yang inklusif bagi sektor pertanian dan perikanan di Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung juga berkomitmen pada pembangunan ekonomi hijau dan biru untuk mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya pesisir. Ini mencakup penguatan ekosistem pendukung dengan kebijakan yang terintegrasi, peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor existing, dan pengembangan sektor baru seperti energi terbarukan. Ekonomi hijau dan biru yang dimaksud sebagai orientasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan lingkungan, sehingga ekosistem alam baik darat maupun lautan dapat terjaga dan produktifitas nya bisa terus memenuhi kebutuhan internal dan eksternal.

Selain itu, penerapan ekonomi sirkular yang fokus pada pengurangan limbah dan emisi, serta pengelolaan hutan dan pertanian secara berkelanjutan juga menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan destinasi pariwisata unggulan, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta koperasi, dan penguatan akses keuangan inklusif juga merupakan bagian dari upaya Kota Bandar Lampung untuk mencapai ekonomi produktif dan berdaya saing global. Dengan pengelolaan sumber daya yang optimal dan berorientasi pada keseimbangan lingkungan, serta percepatan pembangunan berkualitas yang ramah lingkungan, setiap wilayah diharapkan dapat berkembang secara merata.

Pemantapan sistem transportasi yang berkelanjutan dan konservasi alam, air, serta tanah akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui strategi ini,

diharapkan tercipta koefisien variasi antarwilayah yang rendah, mencerminkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh Kota Bandar Lampung.

Tabel 5. 4 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 2			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Misi : Transformasi Ekonomi	- Penguatan ekosistem ekonomi melalui riset dan inovasi serta pemantapan infrastruktur penunjang. - Pemerataan pembangunan	- Percepatan pembangunan sektor ekonomi perkotaan melalui peningkatan infrastruktur dan produktivitas. - Percepatan pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah.	- Pemantapan percepatan dan transformasi menjadi kota metropolitan yang inklusif dan berkelanjutan. - Percepatan kemandirian kota dan kerja sama antar wilayah perkotaan.	- Pemantapan percepatan dan transformasi menjadi kota metropolitan yang inklusif dan berkelanjutan. - Percepatan kemandirian kota dan kerja sama antar wilayah perkotaan.
IE4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	- Penguatan upaya peningkatan destinasi dan infrastruktur penunjang pariwisata berstandar nasional & internasional - Penguatan riset dan inovasi yang menunjang ekonomi hijau, ekonomi biru dan sektor unggulan. - Penguatan upaya peningkatan promosi dan city branding. - Penguatan pariwisata terintegrasi. - Penguataan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban	- Percepatan peningkatan destinasi dan infrastruktur penunjang pariwisata berstandar nasional & internasional - Percepatan riset dan inovasi yang menunjang ekonomi hijau, ekonomi biru dan sektor unggulan. - Percepatan peningkatan promosi dan city branding. - Percepatan pariwisata terintegrasi. - Peningkatan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban	- Pemantapan peningkatan destinasi dan infrastruktur penunjang pariwisata berstandar nasional & internasional - Pemantapan riset dan inovasi yang menunjang ekonomi hijau, ekonomi biru dan sektor unggulan. - Pemantapan peningkatan promosi dan city branding. - Pemantapan pariwisata terintegrasi. - Peamntapan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik	- Perwujudan Destinasi dan infrastruktur penunjang pariwisata berstandar nasional dan internasional yang meningkat dengan cepat. - Perwujudan Riset dan inovasi yang menunjang ekonomi hijau, ekonomi biru, dan sektor unggulan yang dipercepat. - Perwujudan Promosi dan city branding yang meningkat dengan cepat. - Perwujudan Pariwisata terintegrasi yang berkembang dengan cepat. - Perwujudan <i>City beautification</i> yang meningkat untuk membangun citra, karakter, dan dignity kota, serta meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism sesuai

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 2			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	tourism sesuai dengan kearifan lokal. - Penguatan upaya peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. - Penguatan Ekosistem UMKM, IKM dan Ekonomi Kreatif. - Penguatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk. - Penguatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. - Penguatan upaya peningkatan proses bisnis UMKM dan IKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Penguatan upaya peningkatan ekosistem koperasi dan diversifikasi unit	tourism sesuai dengan kearifan lokal. - Percepatan peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. - Percepatan pembangunan Ekosistem UMKM, IKM dan Ekonomi Kreatif. - Percepatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk. - Percepatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. - Percepatan proses bisnis UMKM dan IKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Percepatan ekosistem koperasi dan diversifikasi unit usaha menunjang	pariwisata urban tourism sesuai dengan kearifan lokal. - Pemantapan peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. - Pemantapan pembangunan Ekosistem UMKM, IKM dan Ekonomi Kreatif. - Pemantapan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk. - Pemantapan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. - Pemantapan proses bisnis UMKM dan IKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Pemantapan ekosistem koperasi dan diversifikasi unit usaha	dengan kearifan lokal. - Perwujudan Konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat dengan cepat. - Perwujudan Ekosistem UMKM, IKM dan Ekonomi Kreatif yang berkembang dengan cepat. - Perwujudan produktivitas sektor unggulan yang meningkat melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk. - Perwujudan Infrastruktur esensial yang terintegrasi untuk peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan yang tersedia dengan cepat. - Perwujudan Proses bisnis UMKM dan IKM yang meningkat dengan cepat melalui perluasan peran ekosistem digital dan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Perwujudan Ekosistem koperasi dan diversifikasi unit usaha yang

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 2			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	usaha menunjang ekonomi kerakyatan - Peningkatan keterkaitan UMKM dan IKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. - Penguatan proses bisnis UMKM dan IKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Peningkatan produktivitas BUMD. - Penguatan Ekosistem Ekonomi Lokal melalui Pendampingan kepada Toko Lokal dan UMKM	ekonomi kerakyatan. - Percepatan peningkatan keterkaitan UMKM dan IKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. - Percepatan peningkatan proses bisnis UMKM dan IKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Percepatan peningkatan produktivitas BUMD. - Percepatan penguatan Ekosistem Ekonomi Lokal melalui Pendampingan kepada Toko Lokal dan UMKM	menunjang ekonomi kerakyatan. - Pemantapan keterkaitan UMKM dan IKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. - Pemantapan proses bisnis UMKM dan IKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Pemantapan produktivitas BUMD. - Pemantapan ekonomi lokal melalui pendampingan kepada Toko Lokal dan UMKM	berkembang dengan cepat untuk menunjang ekonomi kerakyatan. - Terwujudnya UMKM dan IKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. - Terwujudnya ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Terwujudnya Produktivitas BUMD meningkat. - Terwujudnya Ekosistem ekonomi Lokal melalui sejahteranya Toko Lokal dan UMKM
IE5. Penerapan Ekonomi Sirkular pada Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	- Penguatan kualitas panen, kerja sama supply produksi hasil pertanian wilayah hinterland dan pemanfaatan pekarangan - Penguatan upaya peningkatan	- Percepatan peningkatan kualitas panen, kerja sama supply produksi hasil pertanian wilayah hinterland dan pemanfaatan pekarangan - Percepatan penyediaan	- Pemantapan kualitas panen, kerja sama supply produksi hasil pertanian wilayah hinterland dan pemanfaatan pekarangan - Pemantapan infrastruktur	- Terwujudnya kualitas panen yang baik, kerja sama supply produksi hasil pertanian wilayah hinterland yang efektif, dan pemanfaatan pekarangan yang optimal. - Terwujudnya infrastruktur

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 2			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	infrastruktur ketahanan pangan dan hasil pertanian kerjasama wilayah hinterland - Penguatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). - Penguatan Ekonomi Perikanan yang Berkelanjutan - Penguatan mutu keamanan dan kehalalan pangan - Penguatan ketahanan pangan melalui penguatan cadangan pangan, stabilitas harga, dan keamanan mutu pangan serta infrastruktur kemandirian pangan	infrastruktur ketahanan pangan dan hasil pertanian kerjasama wilayah hinterland - Percepatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). - Percepatan Ekonomi Perikanan yang Berkelanjutan - Percepatan Peningkatan mutu keamanan dan kehalalan pangan - Percepatan peningkatan ketahanan pangan melalui penguatan cadangan pangan, stabilitas harga, dan keamanan mutu pangan serta infrastruktur kemandirian pangan	ketahanan pangan dan hasil pertanian kerjasama wilayah hinterland - Pemantapan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). - Pemantapan Ekonomi Perikanan yang Berkelanjutan - Pemantapan mutu keamanan dan kehalalan pangan - Pemantapan ketahanan pangan melalui penguatan cadangan pangan, stabilitas harga, dan keamanan mutu pangan serta infrastruktur kemandirian pangan	ketahanan pangan dan hasil pertanian yang kuat melalui kerjasama wilayah hinterland. - Terwujudnya produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi seperti smart farming, teknologi sensor, dan modifikasi cuaca. - Terwujudnya ekonomi perikanan yang berkelanjutan. - Terwujudnya mutu keamanan dan kehalalan pangan yang terjamin. - Terwujudnya ketahanan pangan melalui penguatan cadangan pangan, stabilitas harga, keamanan mutu pangan, dan infrastruktur kemandirian pangan yang memadai.
IE6. Transformasi Digital yang Inklusif	- Penguatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan - Penguatan pembangunan ekonomi syariah/industri halal - Penguatan koordinasi antar wilayah untuk	- Percepatan peningkatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan - Percepatan peningkatan pembangunan ekonomi syariah/industri halal - Percepatan upaya koordinasi antar wilayah untuk	- Pemantapan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan - Pemantapan pembangunan ekonomi syariah/industri halal - Pemantapan koordinasi antar wilayah untuk	- Terwujudnya pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. - Terwujudnya pembangunan ekonomi syariah dan industri halal yang berkembang. - Terwujudnya koordinasi antar wilayah untuk

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 2			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	pengelolaan kawasan perkotaan Pembuatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah. • Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.	pengelolaan kawasan perkotaan Pembuatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah. • Percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.	pengelolaan kawasan perkotaan Pembuatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah. • Pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.	pengelolaan kawasan perkotaan yang efektif, serta pembuatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah. • Terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif, dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global yang Berdaya Saing	• Penguatan daya saing ekonomi melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah hinterland. • Penguatan upaya peningkatan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor perdagangan dan industri pengolahan • Penyusunan dan Penerapan strategi rekayasa lalu lintas dan transportasi publik yang terintegrasi dan	• Percepatan peningkatan daya saing ekonomi melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah hinterland. • Percepatan peningkatan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor perdagangan dan industri pengolahan • Percepatan implementasi strategi rekayasa lalu lintas dan transportasi publik yang terintegrasi dan	• Pemantapan daya saing ekonomi melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah hinterland. • Pemantapan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor perdagangan dan industri pengolahan • Pemantapan implementasi strategi rekayasa lalu lintas dan transportasi publik yang terintegrasi dan	• Terwujudnya daya saing ekonomi melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah hinterland. • Terwujudnya infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor perdagangan dan industri pengolahan. • Terwujudnya transportasi publik yang terintegrasi dan ramah lingkungan.

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 2			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	ramah lingkungan. - Penguatan upaya Peningkatan penyediaan infrastruktur penunjang sarana dan prasarana aktivitas perdagangan dan industri yang andal - Penguatan fungsi pengawasan dalam menjaga stabilitas harga.	ramah lingkungan. - Percepatan peningkatan penyediaan infrastruktur penunjang sarana dan prasarana aktivitas perdagangan dan industri yang andal - Percepatan fungsi pengawasan dalam menjaga stabilitas harga.	ramah lingkungan. - Pemantapan penyediaan infrastruktur penunjang sarana dan prasarana aktivitas perdagangan dan industri yang andal - Pemantapan fungsi pengawasan dalam menjaga stabilitas harga.	- Terwujudnya penyediaan infrastruktur penunjang sarana dan prasarana aktivitas perdagangan dan industri yang andal. - Terwujudnya fungsi pengawasan dalam menjaga stabilitas harga.
IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	- Penguatan aksesibilitas terhadap kegiatan ekonomi pada kelas menengah. - Perluasan aksesibilitas keuangan dan permodalan yang inklusif dan merata - Penguatan upaya peningkatan implementasi digitalisasi dan inovasi keuangan digital - Pengautan dalam penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis - Penguatan upaya peningkatan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan - Penguatan dan pengembangan sistem pengelolaan	- Percepatan peningkatan aksesibilitas terhadap kegiatan ekonomi pada kelas menengah. - Percepatan perluasan aksesibilitas keuangan dan permodalan yang inklusif dan merata - Percepatan peningkatan implementasi digitalisasi dan inovasi keuangan digital - PPenerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis - Percepatan peningkatan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan - Percepatan pengembangan sistem pengelolaan	- Pemantapan aksesibilitas terhadap kegiatan ekonomi pada kelas menengah. - Pemantapan aksesibilitas keuangan dan permodalan yang inklusif dan merata - Pemantapan implementasi digitalisasi dan inovasi keuangan digital - Pemantapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis - Pemantapan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan - Pemantapan pengembangan sistem pengelolaan	- Terwujudnya aksesibilitas terhadap kegiatan ekonomi pada kelas menengah yang mantap. - Terwujudnya aksesibilitas keuangan dan permodalan yang inklusif dan merata yang mantap. - Terwujudnya implementasi digitalisasi dan inovasi keuangan digital yang mantap. - Terwujudnya kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis yang mantap. - Terwujudnya akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan yang mantap. - Terwujudnya pengembangan sistem pengelolaan

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 2			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. - Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan. - Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik,	sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. - Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. - Percepatan Peningkatan Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada	sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. - Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. - Pemantapan Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik,	sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan yang mantap. - Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. - Terwujudnya kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 2			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	terutama pada ruas: Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui; - Mendorong Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkar Bandar Lampung. - Mendorong Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA Babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi) - Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang.	ruas: Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui; - Mendorong Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkar Bandar Lampung. - Mendorong Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA Babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi) - Pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang.	terutama pada ruas: Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui; - Mendorong Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkar Bandar Lampung. - Mendorong Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA Babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi) - Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang.	ruas: Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui; - Terwujudnya sarana transportasi intraregional / arteri lingkar kawasan perkotaan Bandar Lampung. - Terwujudnya sarana prasarana kereta api yang berkelanjutan dan menciptakan multiplier effect bagi ekonomi Masyarakat - Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang.

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 2			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	Pengembangan Sistem Pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan lingkungan	Percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan lingkungan	Terciptanya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan lingkungan.	Terwujudnya keberlanjutan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan bernilai ekonomis

Tabel 5. 5 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-2

Misi 2 : Transformasi Ekonomi (Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global)						
No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline - Target 2025	Target 2025 -2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE.4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi						
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,00	20,38-20,68	20,68-20,99	21,00-21,31	21.40-23,00
12	Pengembangan Pariwisata					
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,78	2,88-2,90	2,96-3,00	3,05-3,1	3,15-4,00
b.	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik (Juta Orang)*	2,15	2,5	3,0	3,8	5,13
c.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	10	13,75	17,5	21,25	25
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,82	1,91 - 2,30	2,20 - 2,60	2,49 - 2,80	2,77 -3,10
a.	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	2,43	2,74	3,1	4	5,42
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
a.	Persentase Usaha Kecil dan Menengah (%)	52,94	58,03	63,12	68,21	73,30
	Proporsi Jumlah IKM (%)	13	15,6	18,72	22,5	26,9
b.	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro (%)	28,90	37,6475	46,395	55,1425	63,89
c.	Persentase Koperasi Berkualitas (%)	13,25	16,795	20,34	23,885	27,43
d.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,54	3,3075	4,075	4,8425	5,61
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,3 - 70	5,8-6,2	4,0-5,9	3,6-4,1	2,9-3,7
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	30	36	42	48	55
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,3	56,62	56,93	57,25	57,56 - 58,06
17	Tingkat Penguasaan IPTEK					

Misi 2 : Transformasi Ekonomi (Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global)						
No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline - Target 2025	Target 2025 -2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
a.	Peringkat Indeks Inovasi Daerah (Peringkat)	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
IE.5. Penerapan Ekonomi Sirkular pada Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru						
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
a.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2 Ekuivalen)	13.373,63	57.582,91	191.055,57	455.606,11	1.033.68 9,66
b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	37,80	40,40	42,80	44,20
IE.6. Transformasi Digital yang Inklusif						
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,8	6,18	6,55	6,93	7,3
IE.7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global yang Berdaya Saing						
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	5,15	4,82	4,5	4,16	3,83
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,7	32,7 - 33,95	33,95 - 35,2	35,2 - 36,45	36,45 - 37,7
22	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,00 - 23,00	23,00 - 24,50	24,50 - 26,00	26,50 - 28,00	28,50 - 30,00
IE.8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan						
23	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
a.	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (%)	16,3	16,3 - 16,47	16,47- 16,64	16,64 - 16,81	16,82- 17,00
b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	*2023 : N/A*	70	75	78	80

5.1.3 Arah Kebijakan Misi 3: Transformasi Tata Kelola (Membangun Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Inklusif dan Adaptif

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan dan tata Kelola yang baik, efektif, berintegritas, inklusif dan berkesinambungan untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.



Gambar 5. 4 Tahapan Transformasi Tata Kelola

Tata kelola pemerintahan di Kota Bandar Lampung merupakan hasil dari kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Transformasi tata kelola ini mencakup perbaikan regulasi dan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur dan pelayanan publik. Upaya ini melibatkan penyederhanaan regulasi daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan, serta penguatan peran pemerintah daerah dan integritas partai politik untuk mencapai kehidupan demokrasi yang sehat di Kota Bandar Lampung.

Pentingnya SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan kota tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Kota Bandar Lampung. Pembangunan karir aparatur berbasis meritokrasi menjadi fokus utama, di mana sistem manajemen talenta, reward dan punishment, serta perbaikan kesejahteraan SDM berdasarkan capaian kinerja diterapkan untuk memastikan seluruh posisi dalam pelayanan publik berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Kota Bandar Lampung berkomitmen pada pembangunan zona integritas sebagai bagian dari transformasi birokrasi. Inisiatif ini bertujuan untuk mengubah budaya kerja birokrasi, meningkatkan layanan publik, dan mencegah korupsi. Selain itu, digitalisasi pelayanan publik juga merupakan fokus utama, dengan tujuan membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memudahkan akses dan penggunaan layanan oleh masyarakat. Melalui perancangan dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kota Bandar Lampung berusaha menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif dengan prinsip *data-driven government*.

Tabel 5. 6 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 3			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Misi : Transfor masi Tata Kelola	- Penguatan fondasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, manajemen risiko pemerintahan, - Penguatan sistem manajemen berbasis merit dan teknologi.	- Percepatan peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi. - Percepatan peningkatan kualitas SDM aparatur yang berintegritas	- Pembangunan kelembagaan dan tata kelola yang kolaboratif dan berintegritas. - Regulasi yang inklusif dan adaptif.	Perwujudan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Inklusif dan Adaptif
IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif serta Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkualitas	- Penguatan kualitas layanan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. - Penguatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. - Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	- Percepatan Peningkatan kualitas layanan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. - Percepatan Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. - Percepatan Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi	- Pemantapan kualitas layanan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. - Pemantapan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. - Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	- Terwujudnya kualitas layanan yang meningkat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. - Terwujudnya partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. - Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban yang efektif untuk mengurangi

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 3			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	- Penguatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara Kota melalui pelatihan dan sertifikasi. - Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. - Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. - Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. - Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. - Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi. - Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan	tingkat kriminalitas. - Percepatan Peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara Kota melalui pelatihan dan sertifikasi. - Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. - Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. - Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. - Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah - Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi. - Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan	- Pemantapan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara Kota melalui pelatihan dan sertifikasi. - Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. - Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. - Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. - Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah - Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi. - Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan	tingkat kriminalitas. - Terwujudnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara Kota yang meningkat melalui pelatihan dan sertifikasi. - Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. - Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. - Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. - Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. - Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi. - Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 3			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital - Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja - Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. - Penguatan integritas partai politik - Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. - Peningkatan keamanan dan penegakan hukum - Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan	audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital - Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja - Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. - Penguatan integritas partai politik - Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. - Peningkatan keamanan dan penegakan hukum - Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb),	audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital - Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja - Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. - Penguatan integritas partai politik - Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. - Peningkatan keamanan dan penegakan hukum - Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb),	untuk penguatan aspek pemerintahan digital - Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja - Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. - Penguatan integritas partai politik - Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. - Peningkatan keamanan dan penegakan hukum - Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan

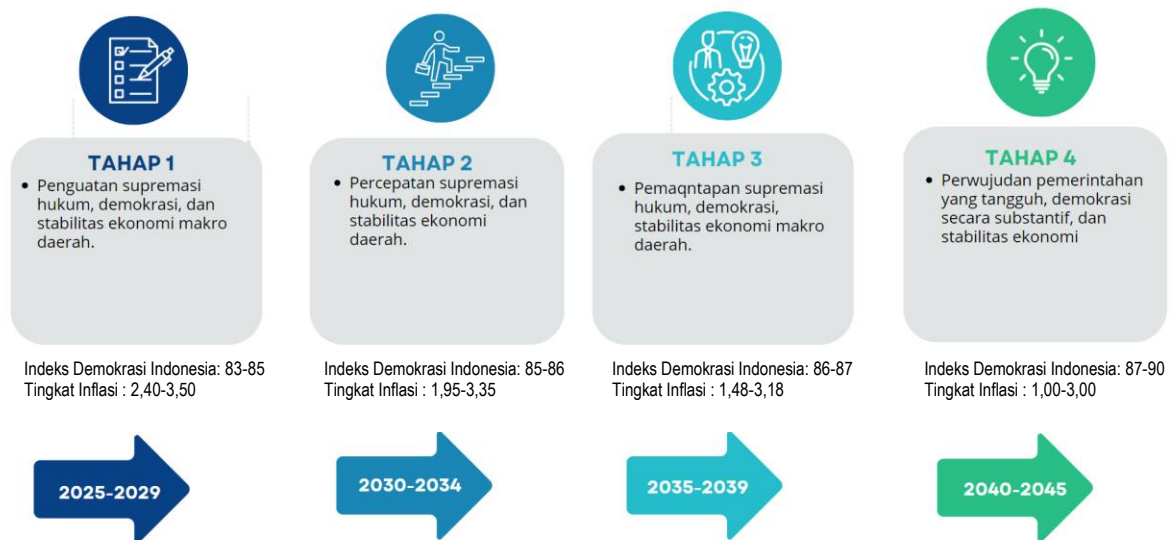
Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 3			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. • Penguatan pengendalian inflasi daerah.	peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. • Penguatan pengendalian inflasi daerah.	peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. • Penguatan pengendalian inflasi daerah.	kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. • Penguatan pengendalian inflasi daerah.

Tabel 5. 7 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-3

Misi 3 : Transformasi Tata Kelola (Membangun Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Inklusif dan Adaptif)						
No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline - Target 2025	Target 2025 -2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE.9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif serta Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkualitas						
24	Indeks Reformasi Hukum	70	76	81	86	91
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,15	3,00	3,50	3,80	4,00 - 5,00
26	Indeks Pelayanan Publik	3,39	3,54	3,69	3,84	4,00 - 5,00
27	Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)	70,35	75,85	78,35	82,85	85,35

5.1.4 Arah Kebijakan Misi 4: Pemerintahan yang tangguh, Demokrasi secara substantif, dan Stabilitas Ekonomi

Misi ini bertujuan untuk mengokohkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan penegakan kehidupan yang demokratis yang akan mendukung stabilitas ekonomi makro daerah dan terwujudnya demokrasi yang lebih substantif dengan landasan tersebut diharapkan dapat mewujudkan Kota Bandar Lampung yang Tangguh, demokratis secara substantif dan ekonomi makro yang stabil.



Gambar 5. 5 Tahapan Misi 4

Transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola adalah kunci menuju visi Indonesia Emas 2045. Untuk memastikan ketiga aspek transformasi ini berhasil, stabilitas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat diperlukan.

Keamanan daerah yang tangguh merupakan aspek penting dari stabilitas tersebut, terutama di kota Bandar Lampung yang memiliki masyarakat majemuk dan heterogen. Keamanan dan ketertiban yang terjaga akan mencegah gangguan yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat, sehingga dukungan terhadap peningkatan profesionalisme aparat keamanan sangat diperlukan.

Sejak reformasi 1998, kualitas demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, dengan pemilihan umum yang semakin demokratis dan kebebasan berpendapat yang lebih terbuka.

Namun, kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada prosedur pemilihan umum tetapi juga pada implementasi kebijakan yang mencerminkan kehendak masyarakat. Untuk mencapai kemajuan yang adil, perlu adanya peningkatan proses demokrasi, penegakan hukum yang adil, serta stabilitas ekonomi makro yang mendukung kesejahteraan masyarakat

melalui pertumbuhan ekonomi, pengendalian harga, investasi daerah, dan perluasan kesempatan kerja.

Tabel 5. 8 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-4

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 4			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Misi 4 - Pemerintahan yang tangguh, Demokrasi secara substantif, dan Stabilitas Ekonomi	Penguatan supremasi hukum, demokrasi, dan stabilitas ekonomi makro daerah.	Percepatan supremasi hukum, demokrasi, dan stabilitas ekonomi daerah.	Pemantapan supremasi hukum, demokrasi, stabilitas ekonomi makro daerah.	Perwujudan pemerintahan yang tangguh, demokrasi secara substantif, dan stabilitas ekonomi
IE10. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah	- Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas - Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan	- Percepatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas - Percepatan Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan	- Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas - Pemantapan Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan	- Terwujudnya keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas - Terwujudnya Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan
IE11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	- Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), - Peningkatan kualitas belanja daerah,	- Percepatan Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), - Percepatan Peningkatan kualitas belanja	- Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), - Peningkatan kualitas belanja daerah,	- Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang efektif untuk mengurangi tingkat kriminalitas melalui kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, serta keterlibatan KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dan lainnya. - Terwujudnya kualitas belanja daerah yang meningkat,

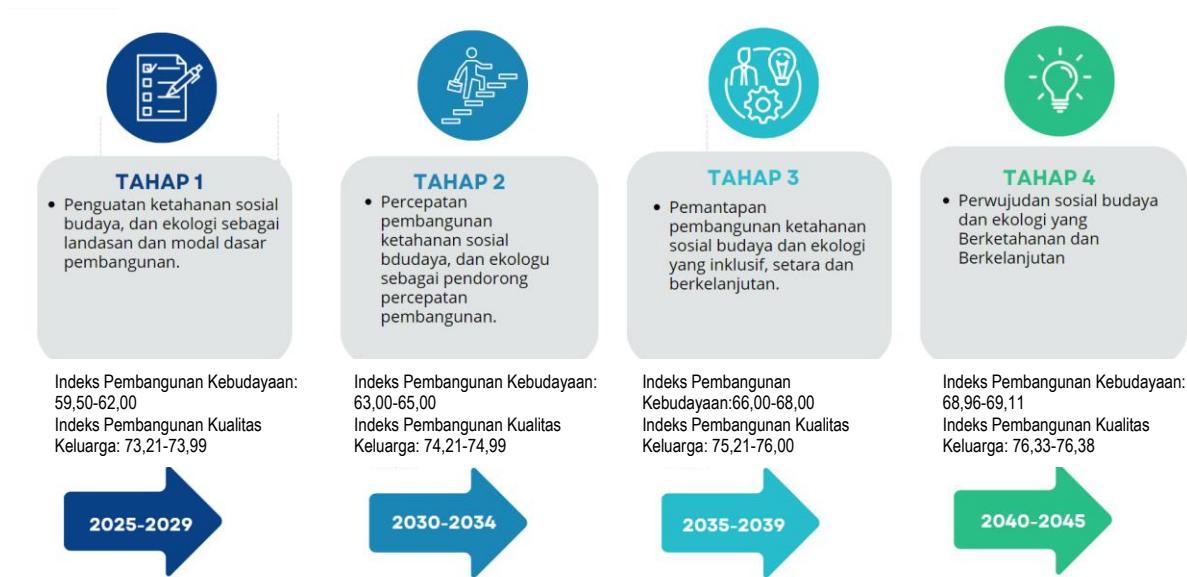
Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 4			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional Penguatan pengendalian inflasi daerah.	daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional Percepatan pengendalian inflasi daerah.	optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Pemantapan pengendalian inflasi daerah.	optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), dan sinergi antara perencanaan serta penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Terwujudnya pengendalian inflasi daerah yang kuat dan efektif
IE12. Daya Saing Daerah	- Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. - Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. - Pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	- Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. - Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. - Pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	- Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. - Pemantapan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. - Pemantapan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	- Terwujudnya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi yang efisien. - Terwujudnya kapasitas tenaga kerja yang meningkat melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. - Terwujudnya pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui pemberian insentif untuk investasi dalam penelitian dan pengembangan bagi pelaku ekonomi.

Tabel 5. 9 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-4

Misi 4 : Pemerintahan yang tangguh, Demokrasi secara substantif, dan Stabilitas Ekonomi						
No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline - Target 2025	Target 2025 -2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE.10. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah						
28	Tingkat Kriminilias (Rasio) - Buku Statistik Keamanan Provinsi Lampung	243,64 (2023)	219	196	173	150
	Persentase Penegakan Hukum Perda	80	85	90	95	100
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	72	75	80	85	90
29	Tingkat Penyelenggaraan Pelanggaran ketentraman, Keamanan dan Keindahan (K3)	71,7	76,2	80,7	85,2	89,70
30	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36 - 82,61	83 - 85	85 - 86	86 -87	87 - 90
IE.11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah						
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,15-1,19	1,20-1,50	1,51-1,82	1,82-2,00	2,05-2,15
32	Tingkat Inflasi (%)	2,50-3,50	2,40 - 3,50	1,95 - 3,35	1,48 - 3,18	1,00 – 3,00
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	16,2	25,33	34,45	43,58	52,7
b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
c.	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	3.076,48	6.444,31	9.812,14	13.180	16.547,8
d.	Total Kredit/PDRB (%)	15	24	33	42	51
34	Inklusi Keuangan (%)					
IE.12. Daya Saing Daerah						
35	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	N/A	70	80	90	100
36	Presentase Penurunan Konflik Sosial (%)	2 (2023)	35	50	75	100

5.1.5 Arah Kebijakan Misi 5: Sosial Budaya dan Ekologi yang Berketahanan dan Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi mewujudkan ketangguhan dan keberlanjutan antara kehidupan sosial budaya dan ekologi secara berkesinambungan dan berkaitan.



Gambar 5. 6 Tahapan Misi 5

Ketahanan sosial budaya dan ekologi di Bandar Lampung adalah kemampuan masyarakat dan lingkungan untuk beradaptasi dan menjaga keseimbangan di tengah berbagai tantangan. Hal ini melibatkan pemeliharaan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pencegahan konflik sosial dan kerusakan alam. Peningkatan ketahanan ini bergantung pada keseimbangan antara sumber daya alam dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim serta dampak globalisasi.

Masyarakat Bandar Lampung yang beragam perlu mengelola perbedaan etnis, budaya, dan agama dengan toleransi dan kerjasama untuk menciptakan keharmonisan. Penguatan nilai-nilai lokal serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting untuk mencapai ketahanan sosial budaya yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ekologi, Bandar Lampung harus fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana melalui prinsip ketahanan energi, air, dan pangan. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan pemeliharaan ekosistem menjadi kunci untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang serta melindungi masyarakat dari risiko bencana dan dampak perubahan iklim.

Tabel 5. 10 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-5

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 5			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Misi 5 - Sosial Budaya dan Ekologi yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Penguatan ketahanan sosial budaya, dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.	Percepatan pembangunan ketahanan sosial budaya, dan ekologi sebagai pendorong percepatan pembangunan.	Pemantapan pembangunan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang inklusif, setara dan berkelanjutan.	Perwujudan sosial budaya dan ekologi yang Berketahanan dan Berkelanjutan
IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Luhur	- Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila. - Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	- Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila. - Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	- Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila. - Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	- Terwujudnya penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat yang berasaskan kepada Pancasila. - Terwujudnya kerukunan antar etnis, agama, dan golongan yang harmonis dan saling menghormati.
IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Tangguh	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	- Percepatan Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan - Percepatan pengarusutamaan gender dan inklusi	- Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda,	- Terwujudnya ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal yang kuat dan efektif. - Terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan,

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 5			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
			penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Pemberdayaan perempuan, pemuda penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Terwujudnya pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
IE15. Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	- Revitalisasi fungsi infrastruktur lingkungan. - Pengendalian pemanfaatan ruang berorientasi mitigasi bencana banjir - Peningkatan infrastruktur mitigasi bencana kebakaran - Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah	- Revitalisasi fungsi infrastruktur lingkungan - Pengendalian pemanfaatan ruang berorientasi mitigasi bencana banjir - Peningkatan infrastruktur mitigasi bencana kebakaran - Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah	- Revitalisasi fungsi infrastruktur lingkungan - Pengendalian pemanfaatan ruang berorientasi mitigasi bencana banjir - Peningkatan infrastruktur mitigasi bencana kebakaran - Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah	- Terwujudnya revitalisasi fungsi infrastruktur lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. - Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang berorientasi pada mitigasi bencana banjir. - Terwujudnya peningkatan infrastruktur mitigasi bencana kebakaran yang memadai. - Terwujudnya peningkatan infrastruktur pengelolaan

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 5			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	- Peningkatan infrastruktur air bersih dan sanitasi masyarakat. - Peningkatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim - peningkatan edukasi masyarakat dalam berperilaku ramah lingkungan. - Peningkatan upaya mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural. - Mendorong terciptanya kebijakan yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan termasuk konservasi air tanah dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan - Peningkatan pengelolaan ekosistem perikanan dan biodiversity Kelautan	- Peningkatan infrastruktur air bersih dan sanitasi masyarakat. - Peningkatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim - peningkatan edukasi masyarakat dalam berperilaku ramah lingkungan. - Peningkatan upaya mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural. - Mendorong terciptanya kebijakan yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan termasuk konservasi air tanah dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan - Peningkatan pengelolaan ekosistem perikanan dan biodiversity Kelautan	- Peningkatan infrastruktur air bersih dan sanitasi masyarakat. - Peningkatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim - peningkatan edukasi masyarakat dalam berperilaku ramah lingkungan. - Peningkatan upaya mitigasi bencana baik struktural maupun non structural. - Mendorong terciptanya kebijakan yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan termasuk konservasi air tanah dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan - Peningkatan pengelolaan ekosistem perikanan dan biodiversity Kelautan	sampah yang efisien dan ramah lingkungan. - Terwujudnya peningkatan infrastruktur air bersih dan sanitasi masyarakat yang berkualitas. - Terwujudnya peningkatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang terencana dan implementatif. - Terwujudnya peningkatan edukasi masyarakat dalam berperilaku ramah lingkungan. - Terwujudnya peningkatan upaya mitigasi bencana baik secara struktural maupun non-struktural. - Terwujudnya terciptanya kebijakan yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan, termasuk konservasi air tanah dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. - Terwujudnya peningkatan ekosistem perikanan dan biodiversitas kelautan yang berkelanjutan.

Misi Dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 5			
	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	- Penguatan produktivitas dan daya saing produk yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity dan energi. - Penguatan akses rumah tangga terhadap pangan, air, listrik, dan energi.	- Percepatan produktivitas dan daya saing produk yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity dan energi - Percepatan akses rumah tangga terhadap pangan, air, listrik, dan energi.	- Pemantapan produktivitas dan daya saing produk yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity dan energi - Pemantapan akses rumah tangga terhadap pangan, air, listrik, dan energi.	- Terwujudnya produktivitas dan daya saing produk yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity dan energi - Terwujudnya akses rumah tangga terhadap pangan, listrik, air, dan energi.
IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.	Peningkatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.	Pemantapan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.	- Ketangguhan terhadap risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi - Ketangguhan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air

Tabel 5. 11 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-5

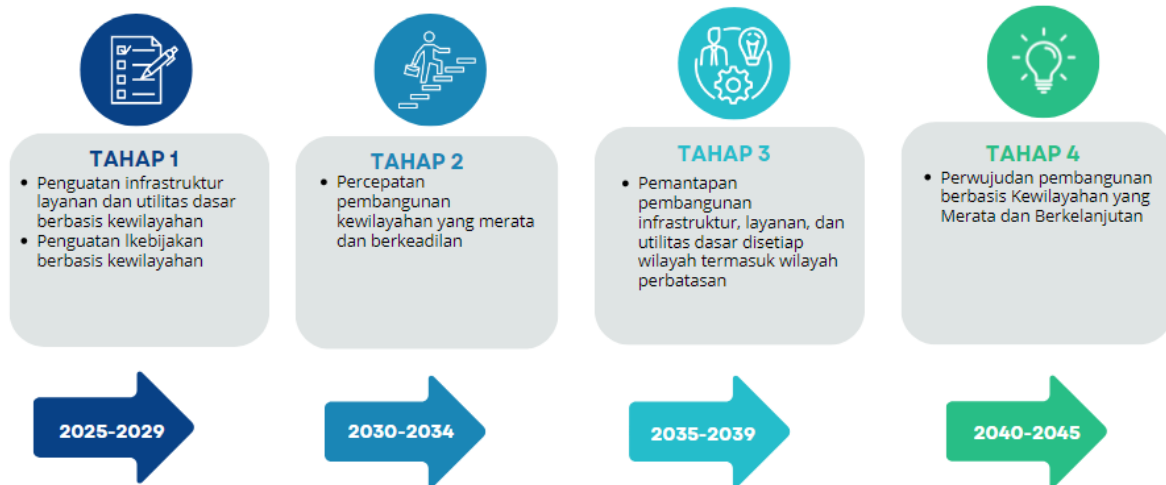
Misi 5 : Sosial Budaya dan Ekologi yang Berketahanan dan Berkelanjutan						
No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline - Target 2025	Target 2025 -2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE.13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Luhur						
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) *(ikut angka Provinsi)	59,10 – 59,12	59,50-62,00	63,00-65,00	66,00-68,00	68,96-69,11
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) *(ikut angka Provinsi)	74,07 - 74,13	76,07 - 77,95	78,07 - 79,95	80,07 - 81,00	81,24 - 81,94
IE.14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Tangguh						
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,21	73,21-73,99	74,21-74,99	75,21-76,00	76,33-76,38
a.	Indeks Perlindungan Anak	70 (2023)	74,64-76,76	77,64-79,76	80,64-82,76	83-85
b.	Indeks Pembangunan Pemuda *(ikut angka Provinsi)	49,53 (2022)	60,53 - 65,00	65,53 - 70,00	70,53 - 75,00	75 - 78
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) *(ikut angka Provinsi)	0,43 - 0,42	0,40 - 0,35	0,34 - 0,28	0,27 - 0,22	0,195 - 0,186
IE.15. Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan						
41	Kualitas Lingkungan Hidup					
a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	58,38	63,01	64,02	65,28	66,54
b.	Persentase jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	92,70	93,5	94,35	95,175	96,00
42.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20	35	50	65	80
IE.16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan						
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					
a.	Ketahanan Energi - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.197	1.385	2.060	2.060	2.649
b.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	7,43	7, 00	6,5	6	5,5
d.	Ketahanan Air					
	(i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,172	1,615	2,263	2,9	3,526
	(ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	22,02	40,0	60,0	80,0	100
IE.17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	119,79 (2023)	111,00	102,28	83,91	65,55
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
a.	Kumulatif	13.373,63	57.582,91	191.055,57	455.606,11	1.033.689,66

Misi 5 : Sosial Budaya dan Ekologi yang Berketahanan dan Berkelanjutan						
No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Baseline - Target 2025	Target 2025 -2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
b.	Tahunan	10,00	10 - 12	12 - 14	16 - 18	18 - 20

5.1.6 Arah Kebijakan Misi 6: Pembangunan Berbasis Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan

Pembangunan berbasis kewilayahan yang merata dan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung berfokus pada penguatan layanan infrastruktur dan utilitas dasar di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan. Upaya ini mencakup peningkatan jaringan transportasi, penyediaan air bersih, pengembangan energi terbarukan, serta perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas dasar, yang merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kualitas hidup yang lebih baik.

Selain itu, percepatan pembangunan yang merata dan berkeadilan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan pariwisata, serta pelestarian lingkungan. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, Bandar Lampung berusaha menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan produktif. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan, memaksimalkan potensi setiap wilayah, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.



Gambar 5. 7 Tahapan Misi 6

Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi yang sinergis antara berbagai pihak, misi pembangunan berbasis kewilayahan yang merata dan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan pembangunan yang menyeluruh. Langkah-langkah strategis ini tidak hanya memaksimalkan potensi tiap wilayah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Melalui penguatan infrastruktur, utilitas dasar, dan layanan publik, serta pemberdayaan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan, Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk menciptakan kota yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hasil dari upaya ini diharapkan memberikan manfaat langsung dan nyata bagi seluruh masyarakat, menjadikan Bandar Lampung sebagai kota yang maju dan sejahtera.

Dalam rangka mendukung pembangunan Kota Bandar Lampung secara holistik, pembangunan infrastruktur menjadi pilar penting untuk mewujudkan agenda transformasi sosial dan transformasi ekonomi serta landasan transformasi. Pembangunan infrastruktur dalam tataran transformasi sosial difokuskan untuk menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dititikberatkan untuk memastikan optimalisasi rantai nilai pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang

dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik. Program pembangunan infrastruktur ke depannya menganut konsep *green and sustainable infrastructure* serta mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkuler yang mengintegrasikan keseimbangan dalam dampak terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan didukung oleh kapasitas tata kelola yang andal.

Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi sosial mencakup:

- 1) Akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion.
- 2) Penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan sebagai upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
- 3) Penyediaan bantuan sosial tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan dalam konsidi khusus.
- 4) Percepatan upaya pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
- 5) Percepatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
- 6) Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal*.

Arah kebijakan ini terakomodir dalam Misi 1: Transformasi Sosial pada indikator Sasaran Pokok IE1. Kesehatan untuk Semua dan IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif.

Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi mencakup:

- 1) Penyediaan infrastruktur terintegrasi esensial bagi upaya peningkatan pada sektor unggulan.
- 2) Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; penyediaan akses telekomunikasi dan digital; penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; fasilitas kesehatan bagi pekerja; fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; serta pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
- 3) Infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung.
- 4) Sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.
- 5) Penguatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Pembangunan ekosistem digital dengan memperluas jaringan *broadband*.
- 7) Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).
- 8) Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
- 9) Ketahanan bencana melalui pendekatan *green infrastructure* pada kawasan perkotaan.
- 10) Penguatan *coverage* dan kecepatan akses internet di seluruh wilayah.

- 11) Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung.
- 12) Penguatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung.
- 13) Mendorong penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
- 14) Upaya *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan.
- 15) Konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 16) Penguatan pengembangan *multi-infrastructure backbone & maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan *sistem expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda).
- 17) Pengelolaan jalan daerah.
- 18) Mendorong pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Kota Bandar Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik.
- 19) Mendorong upaya penguatan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkar Bandar Lampung.
- 20) Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan *dry port* untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan

sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi).

- 21) Mendorong pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang dan pelabuhan pengumpan regional.
- 22) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan.
- 23) Mendorong pembangunan ketenagalistrikan dengan memanfaatkan energi rendah karbon, energi baru dan terbarukan, meningkatkan sistem interkoneksi, mengembangkan jaringan listrik pintar, sistem ketenagalistrikan skala kecil, dan sistem penyimpanan energi, serta memperluas pemanfaatan listrik di rumah tangga dan transportasi, didukung penelitian, pengembangan SDM bersertifikat, dan skema pendanaan serta kebijakan subsidi yang berkelanjutan.

Arah kebijakan ini telah masuk dalam Misi 2: Transformasi Ekonomi pada indikator Sasaran Pokok IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau, dan IE 6. Transformasi Digital, IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 5. 12 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6

Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 6			
Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
- Penguatan pengelolaan sumber daya yang optimal dan berorientasi pada keseimbangan lingkungan. - Penguatan sistem pembangunan yang berkesinambungan	- Percepatan pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan. - Percepatan pembangunan sistem transformasi yang berkelanjutan	- Pemantapan pembangunan yang berorientasi pada konservasi alam - Pemantapan sistem transformasi pembangunan yang berkelanjutan	Perwujudan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
Penguatan Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Pemantapan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Perluasan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	Terwujudnya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.
Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara	Terbitnya panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah	Rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain	Rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain

Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 6			
Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Standar Pelayanan Minimal, dsb)	(antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Standar Pelayanan Minimal, dsb).	termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai Panduan	termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai Panduan
Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan penataan kawasan pesisir.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan penataan kawasan pesisir	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan penataan kawasan pesisir	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan Kawasan pesisir
- Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW - Sosialisasi RPJPD dan RTRW - Penguatan Sistem Informasi Tata Ruang - Mendorong penyelesaian RDTR OSS	- Pengendalian pembangunan wilayah berbasis RTRW - Evaluasi RPJPD dan RTRW - Fasilitasi dan monitoring integrasi RDTR OSS terhadap sistem perijinan satu pintu	- Pemantapan Pembangunan wilayah berbasis RTRW - Monitoring dan evaluasi implementasi integrasi RDTR OSS terhadap sistem perijinan satu pintu	Terwujudnya kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Mendorong Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.	Implementasi reforma agrarian untuk pembangunan pusat-pusat pertumbuhan.	Implementasi reforma agrarian untuk pembangunan pusat-pusat pertumbuhan. Terfokus juga pada pesisir dan pulau kecil.	Terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah dan kesejahteraan tidak hanya bagi masyarakat

5.1.7 Arah Kebijakan Misi 7: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini bertujuan untuk menciptakan infrastruktur Kota Bandar Lampung yang tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada pembangunan fasilitas umum yang ramah lingkungan, misi ini

berusaha memperbaiki kualitas jalan, jembatan, dan ruang terbuka hijau, serta menerapkan teknologi hijau dalam sistem drainase dan pengelolaan sampah. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Bandar Lampung.

Penguatan pengelolaan sumber daya yang optimal dan berorientasi pada keseimbangan lingkungan menjadi prioritas utama. Ini mencakup penguatan sistem pembangunan yang berkesinambungan dan percepatan pembangunan berkualitas yang ramah lingkungan. Selain itu, percepatan pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan dan pemantapan pembangunan yang berorientasi pada konservasi alam, air, dan tanah akan dilakukan. Implementasi strategi ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, memastikan pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

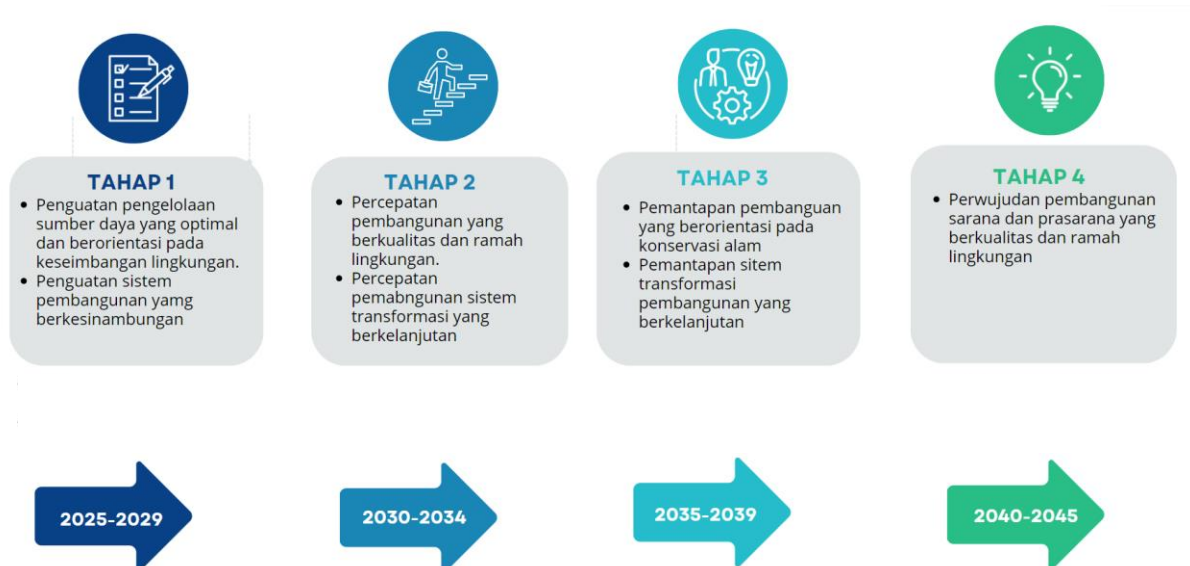
Pembangunan Kota Bandar Lampung diarahkan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal tanpa merusak kelestariannya. Beberapa langkah yang diambil meliputi:

1. Mengembangkan sistem pembangunan yang seimbang dengan ekosistem, menghindari dampak lingkungan yang merugikan.
2. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai daya dukung dan regenerasinya, khususnya untuk sumber daya yang dapat diperbaharui.
3. Meningkatkan kesadaran dan wawasan tentang pembangunan berkelanjutan untuk menjaga potensi sumber daya alam sebagai modal pembangunan dan penopang kehidupan.
4. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum yang adil.
5. Mengembangkan sistem pembangunan kehutanan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan, melibatkan partisipasi masyarakat

dalam menjaga kelestariannya, dan meningkatkan daya dukung hutan dalam pembangunan berkelanjutan.

6. Menjaga daerah resapan air untuk konservasi air bawah tanah dengan rehabilitasi lahan hijau dan penyediaan ruang terbuka hijau yang cukup.
7. Fokus pada pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Selain itu, penting untuk mendorong investasi di sektor-sektor ekonomi yang produktif dan ramah lingkungan, seperti pertanian, perikanan, industri, ekonomi biru, dan energi terbarukan. Kebijakan yang memberikan insentif fiskal untuk teknologi hijau perlu didorong, serta penerapan standar bangunan yang tahan bencana. Tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana dan daya dukung lingkungan juga menjadi prioritas, bersama dengan peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.



Gambar 5. 8 Tahapan Misi 7

Dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Bandar Lampung, penguatan pengelolaan sumber daya yang optimal dan berorientasi pada keseimbangan lingkungan menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup penerapan praktik manajemen sumber daya alam yang efisien, mulai dari pengelolaan air, tanah, hingga energi. Pendekatan ini tidak hanya

bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, tetapi juga untuk memastikan bahwa eksploitasi tersebut tidak mengorbankan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang. Melalui program-program seperti rehabilitasi lahan, pengurangan limbah, dan efisiensi energi, Bandar Lampung dapat menciptakan sebuah ekosistem yang harmonis, di mana pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan berjalan seiring penguatan Sistem Pembangunan yang Berkesinambungan dan Berkualitas.

Penguatan sistem pembangunan yang berkesinambungan melibatkan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap fase pembangunan, dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan. Ini berarti merancang proyek-proyek yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus melibatkan analisis dampak lingkungan, penerapan standar konstruksi yang ramah lingkungan, dan pelibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Bandar Lampung dapat mencapai pertumbuhan yang tidak hanya cepat tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.

Percepatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan kota yang pesat dan berkelanjutan. Fokus utama dari percepatan ini adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, dilakukan dengan memperhatikan standar kualitas yang tinggi dan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Ini termasuk penggunaan bahan bangunan yang berkelanjutan, penerapan teknologi hijau dalam konstruksi, dan perencanaan infrastruktur yang mempertimbangkan dampak ekologisnya. Dengan cara ini, Bandar Lampung dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sambil memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan perekonomian kota dalam jangka panjang.

Tabel 5. 13 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7

Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 7			
Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
- Penguatan pengelolaan sumber daya yang optimal dan berorientasi pada keseimbangan lingkungan. - Penguatan sistem pembangunan yang berkesinambungan	- Percepatan pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan. - Percepatan pembangunan sistem transformasi yang berkelanjutan	- Pemantapan pembangunan yang berorientasi pada konservasi alam - Pemantapan sitem transformasi pembangunan yang berkelanjutan	Perwujudan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai standar dan ketentuan	Peningkatan Keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai Standar dan Ketentuan	Pemantapan Keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai Standar dan Ketentuan	Perwujudan Keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai Standar dan Ketentuan
Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low- cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (Perdagangan Jasa, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low- cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (Perdagangan Jasa, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low- cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (Perdagangan Jasa, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low- cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (Perdagangan Jasa, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan
Penguatan prasarana dan sarana berbasis wilayah, inklusif dan berkelanjutan termasuk penyediaan ruang terbuka hijau yang cukup.	Peningkatan dan percepatan penyediaan prasarana dan sarana berbasis wilayah, inklusif dan berkelanjutan penyediaan ruang terbuka hijau yang cukup.	Pemantapan penyediaan prasarana dan sarana berbasis wilayah, inklusif dan berkelanjutan penyediaan ruang terbuka hijau yang cukup.	Perwujudan prasarana dan sarana berbasis wilayah, inklusif dan berkelanjutan penyediaan ruang terbuka hijau yang cukup.

5.1.8 Arah Kebijakan Misi 8: Kestinambungan Pembangunan

Kestinambungan pembangunan merupakan konsep penting dalam perencanaan pembangunan kota. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial untuk jangka panjang. Kestinambungan pembangunan adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan dari waktu ke waktu dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan besar yang memerlukan penguatan pelaksanaan dan pembiayaan. Untuk mencapainya, diperlukan kaidah yang memastikan kolaborasi semua pemangku kepentingan serta manajemen berbasis risiko. Pendekatan yang tepat dalam proses dan substansi perencanaan sangat penting, dan dukungan pembiayaan yang memadai serta sektor keuangan yang maju memainkan peran besar dalam keberhasilan pembangunan, dengan memungkinkan investasi di sektor-sektor penting seperti infrastruktur dan pendidikan, serta memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan. Sektor keuangan yang kuat juga mendukung akses keuangan untuk masyarakat dan usaha kecil menengah, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan sosial.



Gambar 5. 9 Kestinambungan Pembangunan Kota Bandar Lampung

Kaidah pelaksanaan meliputi enam aspek utama:

- 1) keselarasan antara perencanaan dan pendanaan,
- 2) struktur pengendalian,

- 3) struktur regulasi dan kelembagaan,
- 4) sistem insentif,
- 5) mekanisme untuk perubahan, dan
- 6) komunikasi serta koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pembangunan.

Aspek-aspek ini berfungsi sebagai alat pengaman untuk memastikan pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045, sehingga dapat mendukung RPJP Nasional 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045. Implementasi kaidah pelaksanaan ini akan diperkuat melalui transformasi digital dengan penerapan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan di setiap tahap siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kelincahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045. Sementara itu, tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dengan memanfaatkan data referensi yang terintegrasi dan andal.

Kemudian, upaya untuk mencapai visi Bandar Lampung Humanis, Maju dan Berkelanjutan pada tahun 2045 serta mendukung Indonesia Emas 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang cukup. Agar konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan terjaga, diperlukan kebijakan pendanaan yang selaras dan sejalan. Untuk memastikan perencanaan yang efektif, kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan rencana serta pemanfaatan pendanaan dari berbagai sumber, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, perlu dilakukan secara inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Peningkatan kapasitas pembiayaan akan dilakukan melalui pengembangan inovasi dalam pembiayaan, seperti perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema pelaksanaan yang baru, dan optimalisasi peran sektor keuangan baik pemerintah maupun swasta.

Selain itu, efisiensi dan peningkatan kualitas belanja daerah juga merupakan langkah penting dalam pendanaan pembangunan, yang meliputi inovasi

dalam sumber pendanaan seperti penguatan KPBU, pemanfaatan hibah yang terarah, kerjasama antar daerah dan bilateral, peningkatan produktivitas aset, penerbitan obligasi daerah, serta pemanfaatan utang pemerintah dengan lebih produktif dan hati-hati. Selanjutnya, optimalisasi peran sektor keuangan secara inklusif diarahkan pada: (i) penguatan peran pemerintah daerah dalam intermediasi sektor keuangan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit/pembiayaan ke berbagai wilayah dan sektor prioritas, termasuk UMKM dan pendampingannya, serta pengelolaan dana masyarakat di luar perbankan; (ii) peningkatan inklusi keuangan dengan cara memperluas edukasi keuangan, pengembangan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi keuangan untuk menjangkau masyarakat yang belum dilayani oleh jasa keuangan formal, termasuk peran pemerintah daerah dalam mendukung inklusi keuangan; (iii) penguatan dan pemanfaatan digitalisasi keuangan; serta (iv) perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Misi pembangunan berkesinambungan di Bandar Lampung bertujuan untuk menciptakan kota yang tidak hanya tumbuh secara pesat tetapi juga tetapi menjaga keseimbangan ekologis dan sosial dalam jangka panjang. Melalui integrasi prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan—mulai dari perencanaan hingga implementasi—misi ini berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan, mendukung konservasi sumber daya alam, dan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi komunitas. Dengan fokus pada inovasi teknologi hijau, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, misi ini berusaha untuk memastikan bahwa kemajuan kota Bandar Lampung dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan dan kualitas hidup masa depan.



Gambar 5. 10 Tahapan Misi 8

Penguatan perencanaan dan pendanaan merupakan fondasi utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan di Bandar Lampung. Proses perencanaan yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif, di mana setiap langkah pembangunan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek dan panjang, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini termasuk pengembangan strategi perencanaan yang responsif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penetapan prioritas pembangunan yang mencerminkan kepentingan semua lapisan masyarakat. Di samping itu, mekanisme pendanaan yang berkelanjutan harus diperkuat untuk memastikan adanya alokasi sumber daya yang memadai dan tepat sasaran. Dengan mengoptimalkan perencanaan dan pendanaan, Bandar Lampung dapat mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan yang tidak hanya memenuhi standar kualitas tinggi tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam prosesnya, sehingga menciptakan hasil yang lebih inklusif dan berkesinambungan.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan di Bandar Lampung, penguatan kerangka pengendalian, regulasi, dan kelembagaan merupakan langkah strategis yang sangat penting. Hal ini meliputi pengembangan dan penerapan regulasi yang mendukung pelaksanaan

kebijakan pembangunan yang efektif serta penciptaan sistem insentif yang mendorong partisipasi aktif berbagai aktor pembangunan, baik dari sektor publik maupun swasta. Penguatan ini juga mencakup penetapan mekanisme perubahan yang fleksibel untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan lingkungan secara adaptif. Komunikasi dan koordinasi antar aktor pembangunan, seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, harus diperkuat untuk memastikan adanya sinergi dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Dengan memperkuat kerangka pengendalian dan regulasi serta membangun struktur kelembagaan yang efektif, Bandar Lampung dapat menciptakan suatu ekosistem pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga responsif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi kota ini di masa depan.

Tabel 5. 14 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-8

Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 8			
Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
• Penguatan perencanaan dan pendanaan • Penguatan kerangka pengendalian, regulasi dan kelembagaan sistem insentif, mekanisme perubahan, dan komunikasi serta koordinasi antar aktor pembangunan	• Percepatan pembangunan dalam perencanaan dan pendanaan yang lebih inklusif dan berkesinambungan	• Pemantapan pembangunan yang berkesinambungan dan pelibatan multisektor dan multiaktor	• Perwujudan pembangunan yang berkesinambungan
• Penyempurnaan instrumen kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif dan berorientasi terhadap dampak	• Terbentuknya ekosistem kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif dan berorientasi terhadap dampak	• Pemantapan sistem pengelolaan sumber pendanaan pembangunan alternative semakin handal untuk mendukung kemandirian fiskal	• Terwujudnya kemandirian fiskal daerah yang tinggi.
○ Percepatan pembangunan sistem Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dengan penganggaran	• Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah menjadi instrumen untuk mitigasi	• Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah menjadi instrumen untuk mitigasi	• Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah menjadi instrumen untuk perencanaan pembangunan

Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi 8			
Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	perencanaan pembangunan	perencanaan pembangunan	
o Keselarasan pembangunan pusat, provinsi, dan kota secara konsisten	• Keselarasan pembangunan pusat, provinsi, dan kota secara konsisten	• Keselarasan pembangunan pusat, provinsi, dan kota secara konsisten	• Keselarasan pembangunan pusat, provinsi, dan kota secara konsisten

BAB VI. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan daerah, regional dan nasional. RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025–2045 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan merupakan dokumen perencanaan sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat didalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

RPJPD ini juga menjadi pedoman bagi calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam manajemen pembangunan daerah, adalah sangat penting untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola resiko yang bisa menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui manajemen resiko yang berfungsi sebagai pengawal dan pegendali implementasi pembangunan daerah. Melalui manajemen resiko yang baik, pembangunan dapat diharapkan berjalan sesuai rencana, jadwal, dan tujuannya sehingga target yang telah ditentukan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Keberhasilan pembangunan di Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan tentunya perlu dukungan dari semua pihak baik pemerintah bersama pemangku kepentingan maupun peran serta masyarakat Kota Bandar Lampung untuk berkomitmen mewujudkan Kota Bandar Lampung yang Humanis, Maju dan Berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung, menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah, termasuk lembaga-lembaga yang merepresentasikan cabang kekuasaan negara, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Visi dan misi RPJPD menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah, (Pasal 165 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);
2. Sasaran pokok dalam RPJPD digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD, (Pasal 167 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);
3. Sasaran pokok RPJPD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan, (Pasal 168 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);
4. Sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD, selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan, (Pasal 168 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);
5. Sasaran dalam RPJMD yang ditetapkan harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai,

relevan, dan berjangka waktu, (Pasal 169 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);

6. Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan, (Pasal 171 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);
7. Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD, termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah, (Pasal 176 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);
8. Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kota, (Pasal 181 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);
9. Visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional, (Pasal 266 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);
10. Kepala BAPPERIDA kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kota, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD kota, dan melaporkannya kepada wali kota, (Pasal 297 dan 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017); dan
11. Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara

penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional, (Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017).

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA